



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, adalah dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi acuan untuk menyusun dokumen RKPD Tahun 2024, 2025 dan 2026.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk periode 3 (Tiga) Tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM;
 - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - e. BAB V TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - i. BAB IX PENUTUP.
- (4) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pedoman penyusunan Renstra PD Kabupaten/Kota tahun 2024-2026.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 April 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,



HENCKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 April 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,



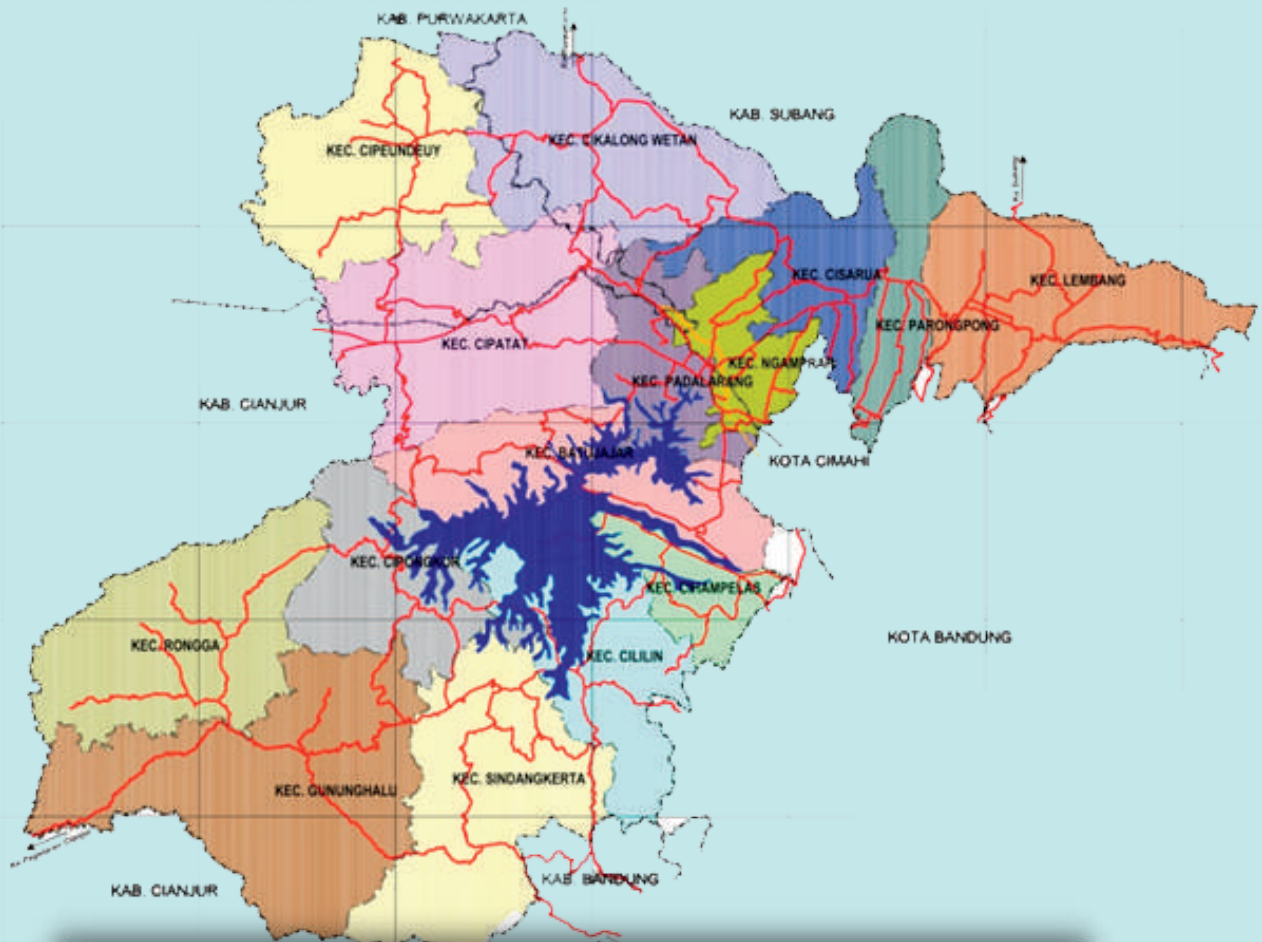
ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 17



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2024 - 2026



Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Penyusunan Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 telah selesai disusun sesuai dengan amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan DOB.

Rencana Pembangunan Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah disusun untuk memberikan arah atau haluan pembangunan masa transisi, sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik dilingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2024-2026. RPD disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, dokumen RPD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 ini, kami ucapkan terima kasih

Bandung Barat, 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKI KURNIAWAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang I-1
1.2	Dasar Hukum I-6
1.3	Hubungan Antara Dokumen I-10
1.4	Maksud dan Tujuan I-13
1.5	Sistematika Dokumen RPD I-13
BAB II	GAMBARAN UMUM
2.1	Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah II-12
2.1.3	Wilayah Rawan Bencana II-14
2.1.4	Aspek Demografi II-17
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-19
2.2.1	Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi. II-19
2.2.1.1	Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB II-19
2.2.1.2	PDRB per Kapita II-28
2.2.1.3	Inflasi II-29
2.2.1.4	Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan II-31
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial II-34
2.2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia II-34
2.2.2.2	Pendidikan II-38
2.2.2.3	Kesehatan II-43
2.2.2.4	Pembangunan dan Pemberdayaan Gender II-44
2.2.2.5	Ketenagakerjaan II-45
2.2.2.6	Indeks Kepuasan Masyarakat II-48
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-49
2.3	Aspek Pelayanan Umum II-52
2.3.1	Layanan Urusan Wajib Dasar II-52
2.3.1.1	Pendidikan II-52
2.3.1.2	Kesehatan II-55
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-61
2.3.1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman II-62
2.3.1.5	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat II-65
2.3.1.6	Sosial II-66
2.3.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar II-68
2.3.2.1	Tenaga Kerja II-68
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-69
2.3.2.3	Pangan II-71
2.3.2.4	Pertanahan II-73
2.3.2.5	Lingkungan Hidup II-74
2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil II-75
2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa II-76
2.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-77
2.3.2.9	Perhubungan II-78
2.3.2.10	Komunikasi dan Informatika II-79

	2.3.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-80
	2.3.2.12	Penanaman Modal	II-81
	2.3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	II-82
	2.3.2.14	Statistik	II-84
	2.3.2.15	Persandian	II-84
	2.3.2.16	Kebudayaan	II-85
	2.3.2.17	Perpustakaan	II-85
	2.3.2.18	Kearsipan	II-86
2.3.3		Layanan Urusan Pilihan	II-87
	2.3.3.1	Kelautan dan Perikanan	II-87
	2.3.3.2	Pariwisata	II-88
	2.3.3.3	Pertanian	II-89
	2.3.3.4	Perdagangan	II-90
	2.3.3.5	Perindustrian	II-92
	2.3.3.6	Transmigrasi	II-93
2.3.4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	II-93
2.3.5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-94
2.3.6		Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-95
2.3.7		Unsur Pemerintahan Umum	II-97
2.4		Aspek Daya Saing	II-98
	2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi daerah	II-98
	2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-101
	2.4.3	Fokus Iklim Investasi	II-104
	2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-107
2.5		Evaluasi Capaian Kinerja Makro, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 serta Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-110
2.6		Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)	II-143
2.7		Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-150
2.8		Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian dan Pemulihan Ekonomi Pasca Dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2022	II-161

BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022	III-1
3.2	Kinerja Keuangan Masa Lalu (2018-2022)	III-10
	3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD (2018 - 2022)	III-11
	3.2.1.1 Pendapatan Daerah	III-11
	3.2.1.2 Belanja Daerah	III-14
	3.2.1.3 Pembiayaan Daerah	III-16
	3.2.2 Neraca Daerah	III-17
3.3	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (2018 - 2022)	III-18
	3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-18
	3.3.2 Analisis Pembiayaan	III-19
3.4	Kerangka Pendanaan (Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2024 – 2026)	III-19

BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
	4.1.1 Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-2
	4.1.2 Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-5
	4.1.3 Permasalahan Urusan Pemerintahan Pilihan	IV-12
	4.1.4 Permasalahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	IV-14
	4.1.5 Permasalahan Fungsi Lainnya	IV-16
	4.1.6 Permasalahan Pokok	IV-16

4.2	Isu Strategis	IV-23
4.2.1	Isu Strategis Global	IV-23
4.2.2	Isu Strategis Nasional	IV-25
4.2.3	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	IV-30
4.2.4	Penetapan Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat	IV-33
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat	V-1
5.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	V-5
5.2.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	V-5
5.2.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	V-6
5.2.3	Penetapan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat	V-8
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	VI-1
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
6.2	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	VI-10
6.2.1	Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang	VI-13
6.2.2	Kebijakan Pengembangan Pola Ruang	VI-16
6.2.3	Pengembangan Kawasan Strategis	VI-20
6.2	Program Prioritas	VI-20
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1	Kerangka Pendanaan	VII-1
7.2	Program Perangkat Daerah	VII-3
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Luas Kecamatan Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat	II-1
2.2	Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Ketinggian	II-4
2.3	Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Jenis Tanah	II-5
2.4	Kondisi Geologi Kandungan Pengendapan Batuan	II-6
2.5	Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Bandung Barat	II-9
2.6	Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bandung Barat	II-10
2.7	Guna Lahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020	II-11
2.8	Kerangka Potensi Pengembangan Wilayah	II-12
2.9	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir	II-15
2.10	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	II-16
2.11	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	II-18
2.12	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 Kabupaten Bandung Barat	II-21
2.13	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (persen)	II-22
2.14	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 Kabupaten Bandung Barat	II-24
2.15	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (persen)	II-26
2.16	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-29
2.17	IHK Desember Tahun 2021, IHK Desember Tahun 2022, Inflasi Tahun 2021, dan Inflasi Tahun 2022 Kota Bandung menurut Kelompok Pengeluaran	II-30
2.18	Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-31
2.19	Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-33
2.20	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-35
2.21	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Menurut Kecamatan (Angka Regional)	II-38
2.22	Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	II-49
2.23	Potensi Keragaman Budaya Kabupaten Bandung Barat 2018 - 2022	II-50
2.24	Indikator Kinerja Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat 2018 - 2022	II-51
2.25	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	II-53
2.26	Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2022	II-54
2.27	Kondisi Ruang Kelas SMP Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2022	II-55
2.28	Data Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	II-56

2.29	Kondisi Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator BB/U Tahun 2018 – 2022	II-56
2.30	Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan berdasarkan Bulan Penimbangan Balita (e-PPGBM) Di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2022	II-57
2.31	Data Pelayanan Imunisasi Di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	II-58
2.32	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	II-58
2.33	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat 2019 - 2022	II-59
2.34	Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-60
2.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019- 2022	II-60
2.36	Capaian Indikator Kinerja Urusan PUTR Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-61
2.37	Jumlah Kawasan Kumuh di Kab. Bandung Barat 2019 - 2022	II-63
2.38	Tabel Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum	II-64
2.39	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-64
2.40	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-66
2.41	Data Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2022	II-67
2.42	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-68
2.43	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 - 2022	II-69
2.44	Data Eksisting Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Peran Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bandung Barat	II-70
2.45	Data Kejadian Kekerasan terhadap Anak, Perempuan dan KDRT Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2022	II-70
2.46	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-71
2.47	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2019-2022	II-72
2.48	Desa Dan Penduduk Sangat Rawan Pangan, Rawan Pangan Dan Tahan Pangan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-72
2.49	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-73
2.50	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-73
2.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-74
2.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-75
2.53	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-76
2.54	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga	II-77

	Berencana Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	
2.55	Kondisi Keluarga di Kabupaten Bandung Barat	II-78
2.56	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-78
2.57	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-79
2.58	Jumlah dan Kondisi Koperasi Tahun 2019 – 2022	II-80
2.59	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-81
2.60	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-82
2.61	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-83
2.62	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-84
2.63	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-85
2.64	Indikator Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-86
2.65	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-86
2.66	Produksi Komoditas Perikanan Unggulan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2022	II-87
2.67	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-87
2.68	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2022	II-88
2.69	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-89
2.70	Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2022	II-90
2.71	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-91
2.72	Data Eksisting Pasar Tradisional, Jumlah Kios, Lapak dan PKL di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2022	II-91
2.73	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Di Kabupaten Bandung Barat 2019-2022	II-92
2.74	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-93
2.75	Capaian Indikator Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-94
2.76	Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-95
2.77	Capaian Indikator Kinerja Unsur Pengawasan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-97
2.78	Capaian Indikator Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022	II-97
2.79	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-99
2.80	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga	II-100

	Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2021	
2.81	Data Kondisi Jalan di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-101
2.82	Data Jumlah Angkutan Barang di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 - 2021	II-102
2.83	Aksebilitas Kendaraan Umum di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	II-102
2.84	Data Infrastruktur Fasilitas Kegiatan Ekonomi di Kab. Bandung Barat Tahun 2019-2022	II-104
2.85	Indeks Rasa Aman Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	II-105
2.86	Persentase Jumlah Izin Yang Terbit Sesuai Sop Tahun di Kab. Bandung Barat Tahun 2022	II-106
2.87	Rasio Ketergantungan Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2022	II-107
2.88	Kondisi ASN Kabupaten Bandung Barat Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2022	II-108
2.89	Capaian Indikator Makro Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	II-110
2.90	Tujuan, Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023	II-113
2.91	Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	II-119
2.92	Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2020	II-120
2.93	Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 - 2022	II-134
2.94	Daftar Indikator Terpilih (Data, target, dan scorecard indikator) untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat	II-145
2.95	Hasil Proyeksi Pencapaian SDGs Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2030 Berdasarkan Scorecard	II-149
2.96	Target, Capaian Kinerja dan Anggaran SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	II-152
2.97	Target, Capaian Kinerja dan Anggaran SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	II-154
2.98	Target, Capaian Kinerja dan Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bandung Barat Tahun 2022	II-157
2.99	Target, Capaian Kinerja dan Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Bandung Barat Tahun 2022	II-158
2.100	Target, Capaian Kinerja dan Anggaran SPM Bidang Trantibum dan Linmas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	II-159
2.101	Target, Capaian Kinerja dan Anggaran SPM Bidang Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	II-160
3.1	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (persen)	III-3
3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018-2022	III-6
3.3	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Barat Tahun 2024-2026	III-8

3.4	Proyeksi Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (persen)	III-9
3.5	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022	III-13
3.6	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022	III-15
3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022	III-17
3.8	Realisasi Proporsi belanja Pegawai Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2020	III-18
3.9	Realisasi Proporsi belanja Pegawai Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2022	III-18
3.10	Defisit/Surplus Anggaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022	III-19
3.11	Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026	III-20
5.1	Perumusan Konsep Dalam Rangka Penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026	V-8
5.2	Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkesetaraan	V-10
5.3	Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan	V-11
5.4	Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan	V-12
5.5	Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	V-13
5.6	Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tertib Dan Tentram Dalam Kerangka Demokrasi	V-14
6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026	VI-2
6.2	Sistem Perkotaan Kabupaten Bandung Barat	VI-16
6.3	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026	VI-22
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026	VII-1
7.2	Program Perangkat Daerah serta Kebutuhan Anggaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026	VII-4
8.1	Proyeksi Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026	VIII-2
8.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026	VIII-2
8.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026	VIII-4
8.4	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026	VIII-6

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Alur Proses Penyusunan Dokumen RPD 2024-2026	I-4
1.2	Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-11
2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung Barat	II-2
2.2	Peta Kabupaten Bandung Barat Sebelum dan Setelah Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat	II-3
2.3	Peta Ketinggian Kabupaten Bandung Barat	II-4
2.4	Peta Geologi Kabupaten Bandung Barat	II-6
2.5	Peta Sumber Daya Air Kabupaten Bandung Barat	II-7
2.6	Peta Curah Hujan Kabupaten Bandung Barat	II-10
2.7	Peta Tingkat Kemampuan Lahan	II-14
2.8	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bandung Barat	II-17
2.9	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	II-18
2.10	Grafik Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-20
2.11	Grafik Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-24
2.12	Grafik Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	II-28
2.13	Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	II-34
2.14	Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	II-37
2.15	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kab. Bandung Barat, Tahun 2018-2022	II-39
2.16	APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-40
2.17	APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-41
2.18	APS Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 - 2022	II-42
2.19	Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2022	II-43
2.20	Capaian Indeks Pemberdayaan dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2022	II-44
2.21	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat 2018-2022	II-45
2.22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Bandung Barat 2017 - 2021	II-46
2.23	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	II-47
2.24	Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021	II-103
2.25	Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	II-107

2.26	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan 2015-2021 (persen)	II-109
2.27	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Barat, 2022	II-109
3.1	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022	III-12
3.2	Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022	III-14
3.3	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022	III-16
4.1	Tujuh Agenda pembangunan Nasional sebagai Isu Strategis yang Menjadi Prioritas pada RPJMN 2020-2024	IV-26
5.1	Agenda Pembangunan Nasional Pada RPJMN Tahun 2020-2024	V-6
6.1	Tema Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2026	VI-7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses dinamis dan progresif untuk mencapai tujuan berupa peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing. Dalam rangka menjalankan pembangunan yang efektif dan mencapai tujuan pembangunan, maka diperlukan perencanaan yang sistematis. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi. Rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bagi perangkat daerah, dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat di daerah.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepada daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut untuk Kepala Daerah yang masa Jabatannya berakhir di tahun 2023, akan diangkat dan ditetapkan seorang Penjabat Kepala Daerah atau Penjabat Bupati sampai dengan terlaksananya pemilihan umum Kepala daerah pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.



Pada masa transisi tersebut agar tidak ada kekosongan hukum dan tidak ada kegamangan atau keraguan bagi penyelenggara negara dan manajemen tata kelola pemerintahan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Publik terlayani dengan baik, politik yang pasti berdinamika dan cenderung ‘panas’ pada tahun 2023 – 2024 termasuk pasca pemilu dan pilkada kondusivitas tetap terjaga. Pemerintah Pusat, melalui Menteri Dalam Negeri telah mengambil langkah strategi dengan dikeluarkannya Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan DOB.

Inmendagri tersebut mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab/Kota tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota tahun 2024-2026. RPD disusun untuk memberikan arah atau haluan pembangunan masa transisi, sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, pada Pemilu serentak Tahun 2024. Dokumen RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Demikian halnya Kabupaten Bandung Barat, juga merupakan salah satu daerah yang masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir pada Bulan September 2023, sehingga masa kepemimpinan Kepala Daerah akan di lanjutkan oleh seorang Penjabat Kepala Daerah atau Penjabat Bupati. Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat beserta perangkat daerah lainnya, telah membentuk tim dalam menyiapkan dan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 -2026, yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Dokumen RPD juga merupakan dokumen perencanaan yang sama muatannya dengan RPJMD, yang membedakan dalam dokumen ini adalah pada dokumen RPJMD berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah sedangkan pada RPD didasarkan pada Visi Misi RPJPD. Namun kedua-duanya terlahir dari berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan menjadi isu permasalahan atau masalah pokok, yang akan berkembang menjadi isu strategi. Selain itu, perbedaannya dokumen RPD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), beda halnya dengan RPJMD yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen RPD Kab/Kota tahun 2024-2026 ini ditetapkan paling lambat Minggu Keempat Bulan Maret Tahun 2023 untuk selanjutnya dokumen RPD yang telah ditetapkan ini disampaikan kepada DPRD Kab/Kota paling lambat seminggu setelah ditetapkan. Bersamaan dengan penyusunan RPD, Perangkat Daerah Kab/Kota menyusun Renstra PD Kab/Kota tahun 2024-2026 untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat Minggu Kedua Bulan April Tahun 2023.

Berdasarkan Inmendagri 52 tahun 2022, dalam rangka sinergitas perencanaan Pusat dan Daerah penyusunan RPD hendaknya, memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional pada RPJMN 2020 – 2024 dan kebijakan nasional
2. RPJMD atau Rancangan RPD Provinsi
3. Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi misi RPJPD dan/atau kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan pada RPJPD Kab/Kota sampai dengan tahun 2025.
4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kab/Kota Tahun 2018-2023
5. Isu strategis yang berkembang
6. Regulasi yang berlaku

Sedangkan dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen RPD harus memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional pada RPJMN 2020 – 2024 serta kebijakan nasional.
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan (IKT), sasaran (IKS) dan hasil (outcome) hasil renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD/Renja PD s.d tahun 2022
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari semua keg/sub kegiatan s.d tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome)
4. Isu strategis terkait bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Dalam rangka penyelarasan dan keterpaduan perencanaan pembangunan untuk pencapaian tujuan, penyusunan dokukmen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan:

- Holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
- Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan yang berpedoman Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial.

Selanjutnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022, alur proses penyusunan dokumen RPD Kab/Kota Tahun 2024-2026, digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Proses Penyusunan Dokumen RPD 2024-2026



Sumber: Inmendagri No. 52 Tahun 2022

Penjelasan alur pada gambar diatas adalah dilakukan melalui tahapan dan tatacara sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPD Kab/Kota Tahun 2024-2026 (penyusunan tim dan pengumpulan data)
2. Penyusunan Rancangan RPD Kab/Kota Tahun 2024-2026 dan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 dilakukan secara simultan
3. Dalam penyusunan rancangan RPD, Bappeda Kab/Kota berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam penentuan program prioritas dan program PD
4. Dalam penyusunan rancangan Renstra PD Tahun 2024-2026, seluruh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda dalam penentuan berbagai target kinerja
5. Bappeda Kabupaten/Kota melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir.
6. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi.
7. Sebelum ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah
8. Fasilitasi Rancangan RPD Kabupaten/Kota melampirkan :
 - Surat Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RPD Kab/Kota Tahun 2023-2026;
 - Rancangan Akhir RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
 - Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022;
 - Berita Acara Forum Konsultasi Publik;
 - Hasil Reviu APIP.
 - Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi Gubernur selaku Wakil Pemerintah;
9. Surat Rekomendasi Gubernur, menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan.

10. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan, diajukan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
11. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.
12. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.
13. Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum, diantaranya

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengganti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan DOB
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang sebagaimana Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembar Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2009);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 No 2 seri E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 14)

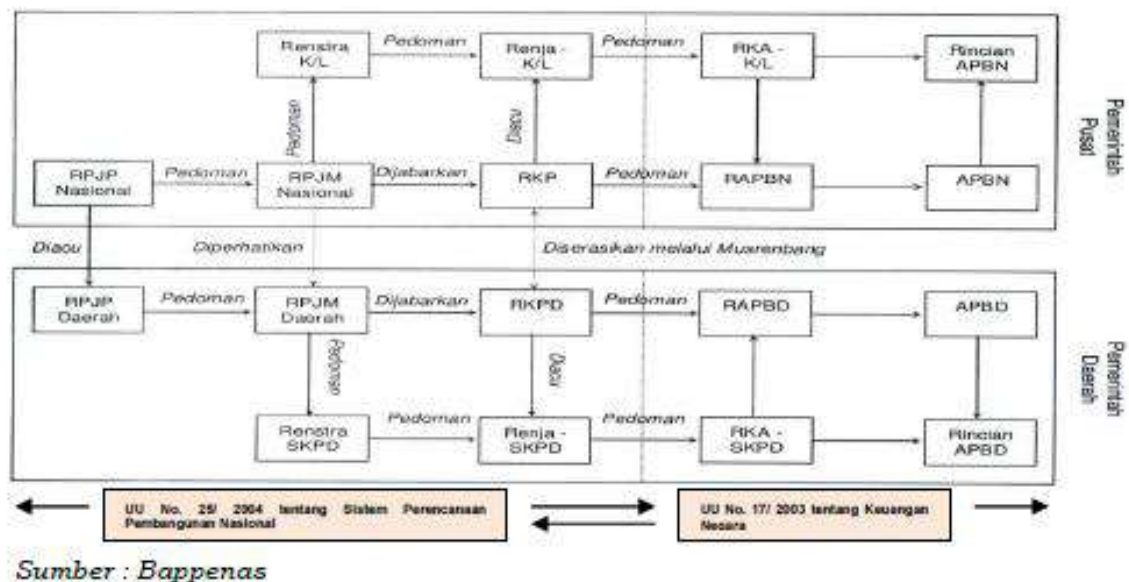
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara pusat dan daerah. Untuk keselarasan pembangunan antar pusat dan daerah, bahwa RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025 dan disesuaikan dengan RPJMN 2020 – 2024 serta RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, akan dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, yang kemudian RPD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Keterkaitan antara RPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, digambarkan secara sistematis pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2 Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Gambar 1.2 diatas terkait hubungan RPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan penyeselarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis nasional lainnya.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Untuk menjaga keselarasan perencanaan pembangunan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Provinsi Jawa Barat, hal-hal yang perlu antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, kawasan strategis, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga dukungan Kabupaten Bandung Barat atas indikator beserta pencapaian target target-target dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran periode RPJPD tahun kelima (2023-2025) pada dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 yang memiliki visi “KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN”. Pada tahap kelima ini pembangunan diarahkan untuk: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan kreatif; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan; Memelihara kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan Mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan.

d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penyelarasan sasaran, strategi, kebijakan, beserta program prioritas perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah

e. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Renstra PD merupakan penjabaran RPD yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang berfungsi untuk menentukan tujuan dan sasaran beserta indikasi program serta kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian RPD berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 disusun sebagaimana amanat Inmendagri 52 Tahun 2022 untuk memberikan arah atau haluan pembangunan masa transisi, sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2024-2026. Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode tahun 2024-2026 maupun Renja Perangkat Daerah sebagai tolok ukur dalam mengukur kinerja tahunan
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan pagu anggaran yang bersifat indikatif sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD
- c. Sebagai instrument pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.5. Sistematika Dokumen RPD

Sistematika penyusunan RPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah, terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan beserta analisisnya yang disajikan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah serta penerapan standar pelayanan minimal

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini terdiri dari uraian kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan terkait proyeksi keuangan daerah tahun 2024-2026.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan analisis capaian kinerja di Bab II. Permasalahan Pembangunan Daerah kemudian menjadi dasar perumusan isu strategis daerah, yang memperhatikan pula isu global dan isu strategis Nasional serta Provinsi Jawa Barat

BAB V : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan pada RPJPD periode berkenaan disertai dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai selama periode 2024-2026

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Menjelaskan strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran, dan arah kebijakan dari masing-masing strategi, serta program prioritas dirumuskan dari masing-masing strategi sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah beserta PD penanggungjawabnya disertai indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif selama periode 2024-2026

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisi tentang uraian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dirumuskan ke dalam Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci.

BAB IX : PENUTUP

Memuat pedoman transisi yang diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta kaidah pelaksanaan RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Untuk melihat gambaran dan kondisi Kabupaten Bandung Barat berdasarkan geografis yang mencakup: karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana serta aspek demografi yang memberikan deskripsi ukuran, struktur dan distribusi penduduk di Kabupaten Bandung Barat.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara Astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06° 3,73' - 07° 1,031' Lintang Selatan dan 107° 1,10' - 107° 4,40' Bujur Timur dengan Luas wilayah berdasarkan hasil analisis review RTRW tahun 2022 adalah 1.284,67 Km² atau 128.467 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 165 Desa, dengan rincian luas wilayah menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

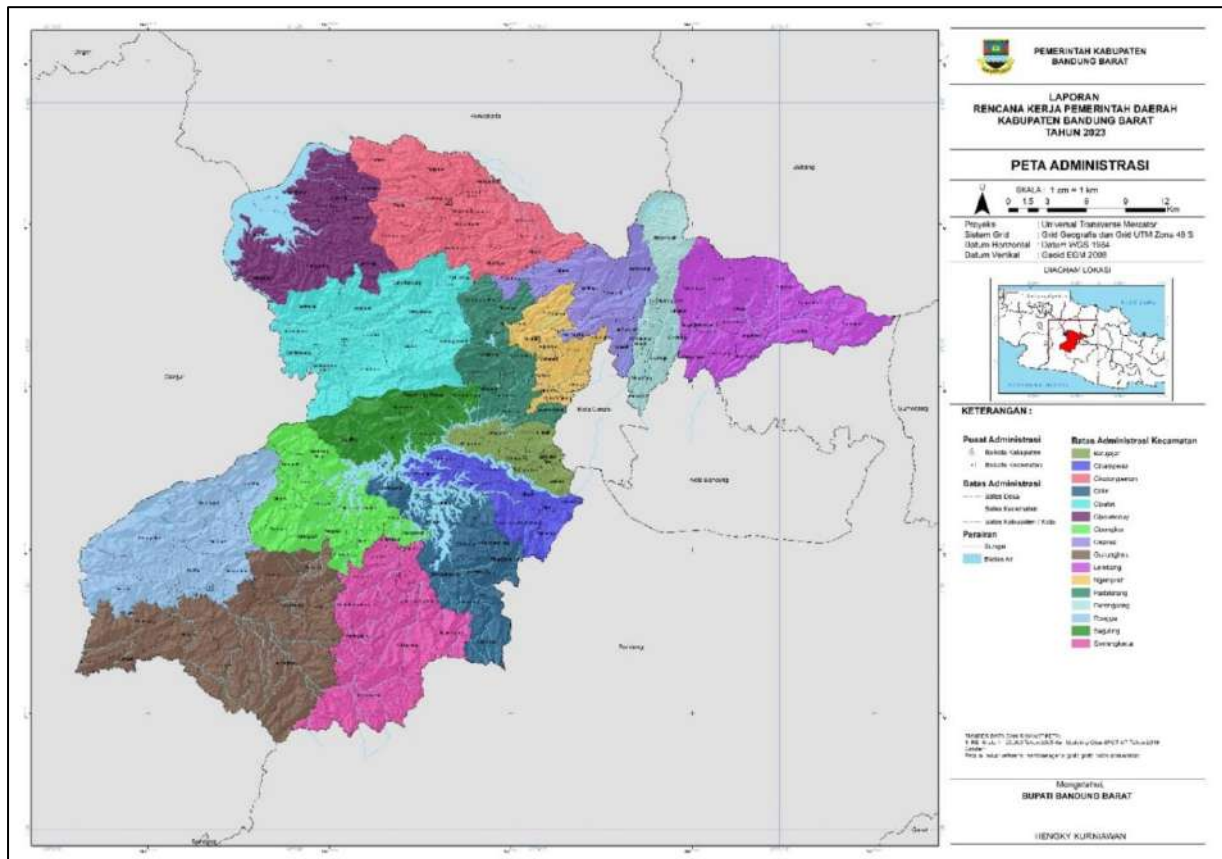
**Tabel 2.1 Luas Kecamatan Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang
Kabupaten Bandung Barat**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)
1. Batujajar	31,06
2. Cihampelas	46,95
3. Cikalongwetan	110,72
4. Cililin	77,68
5. Cipatat	125,68
6. Cipeundeuy	101,96
7. Cipongkor	79,96
8. Cisarua	55,54
9. Gununghalu	155,08
10. Lembang	98,11
11. Ngamprah	35,58
12. Padalarang	51,54
13. Parongpong	44,96
14. Rongga	112,34
15. Sindangkerta	106,07
16. Saguling	51,47
Kab. Bandung Barat	1.284,7

Sumber: Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Dari tabel diatas, Kecamatan Gununghalu merupakan wilayah terluas di Kabupaten Bandung Barat yaitu 155,08 Km² dan berturut-turut kecamatan dengan luas wilayah di atas 100 Km², yaitu Cipatat, Rongga, Cikalongwetan, Sindangkerta dan Cipendeuy. Sisanya memiliki luas wilayah di bawah 100 Km² dan Kecamatan Batujajar merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terendah yaitu 31,06 Km².

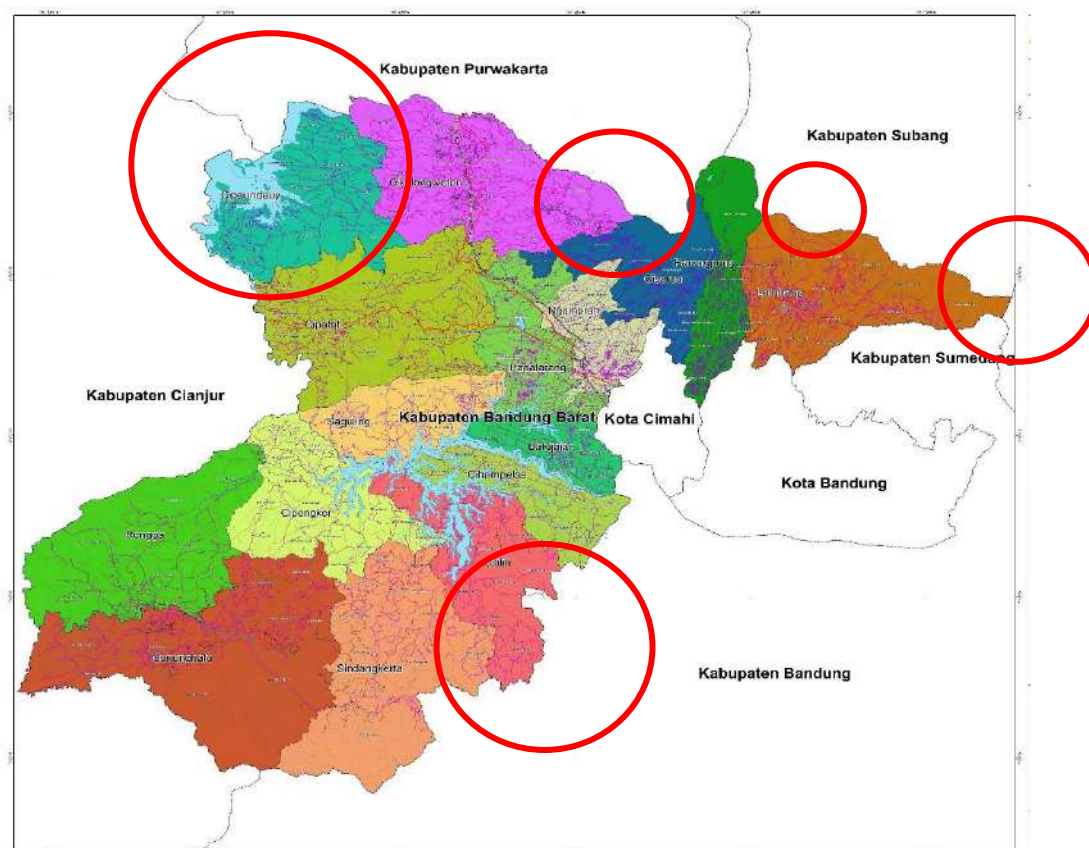
Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung Barat



Sumber Data : Hasil Analisis RTRW, 2020

Batas wilayah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian sebagai berikut:

- Gambar 2.2 Peta Kabupaten Bandung Barat
Sebelum dan Setelah Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat



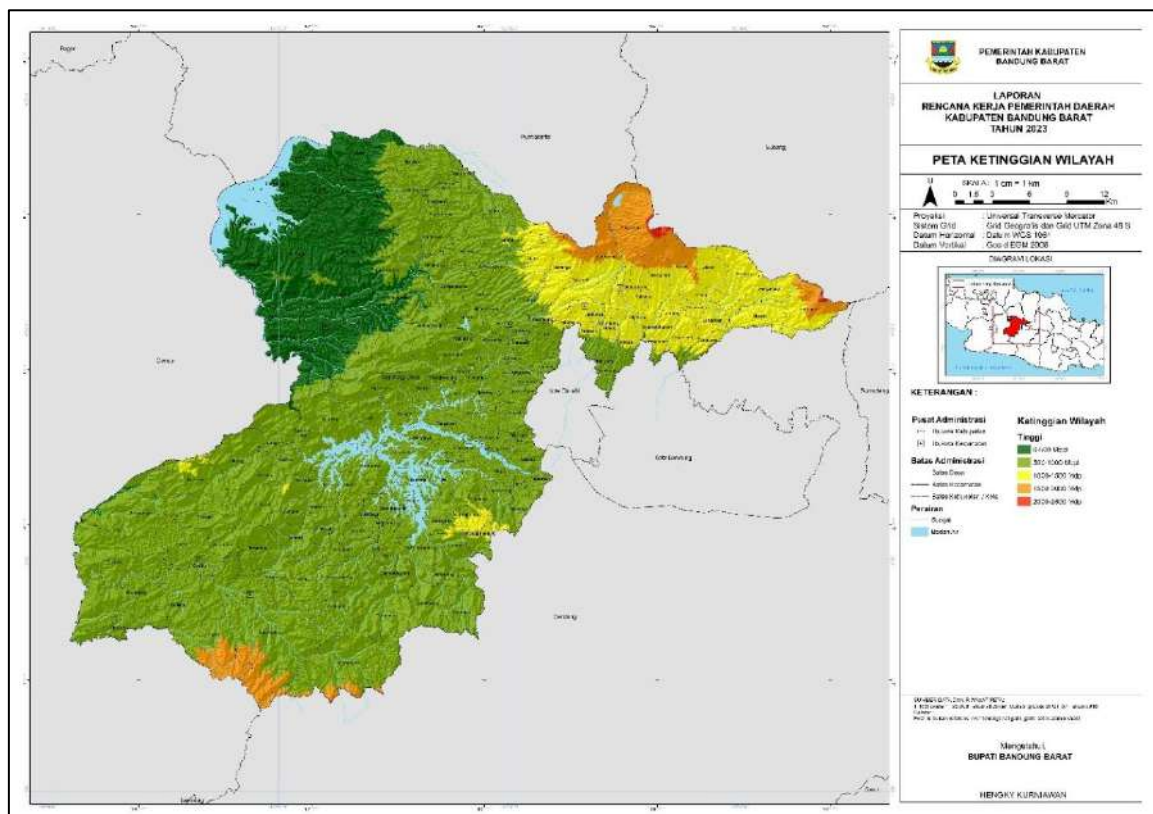
Secara Topografi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal yaitu dapat mencapai lebih dari 40%. Wilayah yang sangat terjal ini terdapat pada wilayah kecamatan Gununghalu seluas 13.480 Ha. Sedangkan kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%.

Berdasarkan kemiringan lereng dan beda tinggi serta kenampakan di lapangan morfologi Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu morfologi pedataran, landai, perbukitan dan morfologi pegunungan. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0-2500 mdpl, seperti pada tabel dan gambar peta ketinggian berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Ketinggian

No.	Ketinggian	Luas (ha)
1	0-500 m	20,461
2	500-1000 m	68.786
3	1000-1500 m	32.487
4	1500-2000 m	6.732
5	2000-2500 m	20.461

Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020

Gambar 2.3 Peta Ketinggian Kabupaten Bandung Barat


Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020

Kawasan lahan terbesar pada elevasi ketinggian 500-1000 mdpl yaitu 68.786 Ha atau 66% dari total luas keseluruhan. Luas kawasan dengan elevasi dibawah 500 mdpl seluas 20.461 Ha atau 14%, kawasan dibawah 500 mdpl ini terdapat Waduk Saguling dan Cirata. Sedangkan kawasan dengan elevasi antara 500-1000 mdpl, merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan pertanian karena pada kawasan elevasi ini menentukan temperatur, kelembaban, penyinaran matahari, yang apabila dikaitkan dengan jenis tanah dan curah hujan, akan menentukan jenis tanaman apa yang paling tepat untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Selain itu di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdapat kawasan sekitar 5% yang berada pada elevasi 1500-2000 mdpl dan 14% yang berada pada elevasi antara 2000-2500 mdpl. Struktur, karakteristik dan potensi kandungan secara Geologi Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

**Tabel 2.3 Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Menurut Jenis Tanah**

No.	Jenis Tanah	Luasan (Ha)
1	Kompleks Regosol Kelabu dan Litosol	2,729
2	Andosol Coklat	8,548
3	Asosiasi Andosol Coklat dan Regosol Coklat	13,442
4	Kompleks Mediteran Coklat Kemerahan dan Litosol	3,162
5	Latosol Coklat	17,572
6	Latosol Coklat Kemerahan	34
7	Latosol Coklat Tua Kemerahan	11,089
8	Aluvial Coklat Kekelabuan	7,757
9	Kompleks Latosol Merah dan Latosol Coklat Kemerahan	17,524
10	Podsolik Kuning	950
11	Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol	37,170
12	Asosiasi Aluvial Kelabu Dan Aluvial Coklat Kekelabuan	1,740
13	Asosiasi Gleit Humus Rendah dan Aluvial Kelabu	6,748

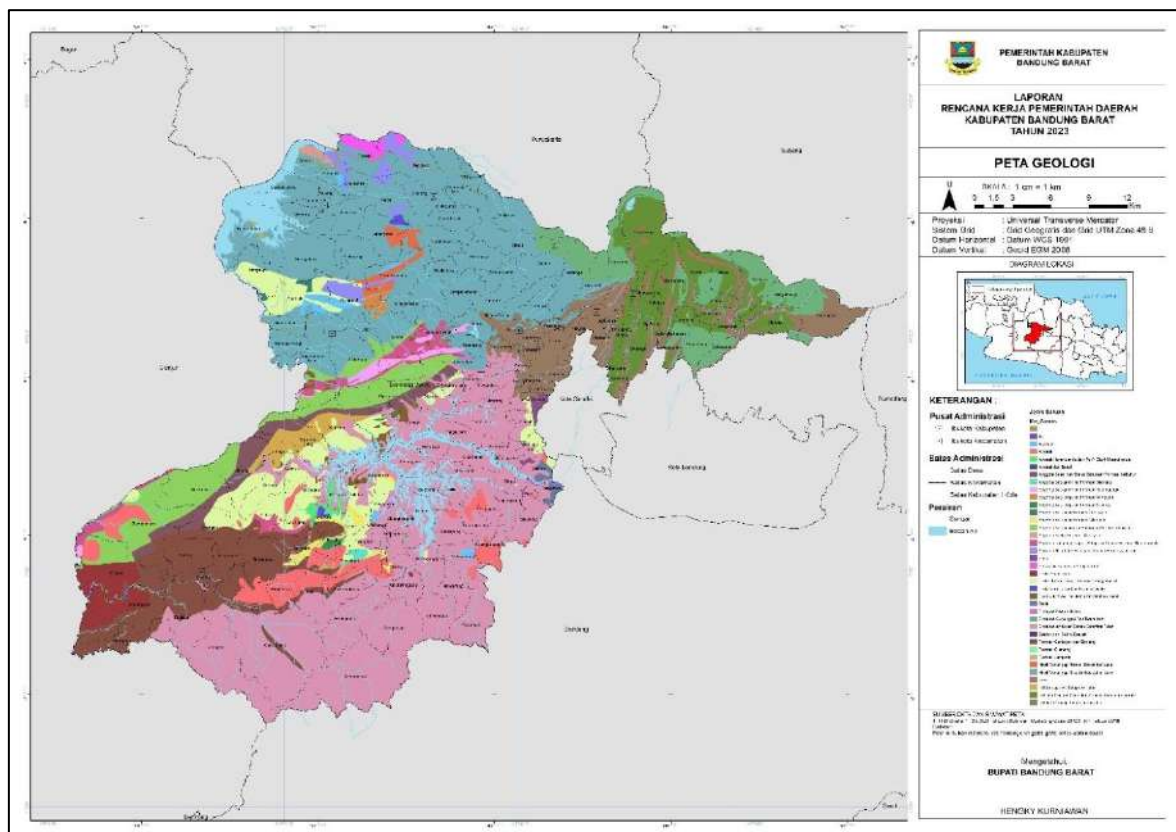
Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari jenis tanah: aluvial coklat kelabu; aluvial kelabu dan merah; andosol coklat; andosol coklat dan regosol coklat; glei humus dan aluvial; glei humus dan aluvial kelabu; latosol coklat; latosol merah dan coklat; latosol merah kekuningan; latosol tua kemerahan; regosol kelabu dan litosol. Jenis tanah yang paling luas di Kabupaten Bandung Barat adalah Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol sebesar 37,170 Ha, sedangkan luasan terkecil adalah jenis tanah latosol coklat kemerahan sebesar 34 Ha.

Selain itu, ditinjau dari potensi kandungan asal pengendapan batuan, Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu Littoral, Littoral Reef, Neritic, Plutonism Sub-Volcanic, Terrestrial Alluvium, Terrestrial Fluvial, Terrestrial Lacustrine, Transition, dan Volcanism Subaerial, dengan gambaran secara geologi dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

NO.	JENIS GEOLOGI	LUASAN (HA)
1	<i>Littoral</i>	4.550
2	<i>Littoral Reef</i>	866
3	<i>Neritic</i>	13.060
4	<i>Plutonism Sub-Volcanic</i>	4.215
5	<i>Terrestrial Alluvium</i>	560
6	<i>Terrestrial Fluvial</i>	39.373
7	<i>Terrestrial Lacustrine</i>	7
8	<i>Transition</i>	414
9	<i>Volcanism Subaerial</i>	59.984
10	<i>Unknown</i>	4.956

Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Bandung Barat



Selanjutnya batuan sedimen pada daerah ini menempati 18,21 % luas wilayah Kab. Bandung Barat. Batuan sedimen yang tersebar pada wilayah ini cukup beraneka ragam mulai dari Breksi, Batulempung, Batupasir. Batugamping sampai Napal. Endapan sedimen kuartir hanya memiliki luas 636 Ha yang didominasi oleh endapan sungai dan danau.

Secara hidrologi, sumber daya air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, kondisi ketersediaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari sumber daya air permukaan dan air tanah, berupa sumber mata air, sungai, danau, rawa, embung.

The figure is a detailed map titled "PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT" and "LAPORAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023". The main title is "PETA SUMBER MATA AIR". The map shows the administrative boundaries of Kabupaten Bandung Barat, which are color-coded according to the legend. It also displays numerous water sources marked with blue diamond symbols. A scale bar indicates a distance of 1 cm = 1 km. An inset map shows the location of Kabupaten Bandung Barat within the larger context of West Java province.

Kabupaten Bandung Barat memiliki kurang lebih 90 sungai, dengan sungai utama adalah Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Citarum Hulu, dan Sungai Cikarial, yang melewati Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar.

Sungai-sungai ini termasuk ke dalam Sub DAS Cikapundung (Lembang, Cisarua, Parongpong) dan Sub DAS Citarum (Cililin, Ngamprah, Batujajar, Padalarang) dengan total panjang adalah 3.941,68 Km. Sumber daya air permukaan lainnya di Kabupaten Bandung Barat berupa 2 (dua) Danau/Situ Alam dan 2 Waduk/Danau Buatan. Danau/Situ Alam terdiri dari Situ Lembang dan Situ Ciburuy serta Waduk Saguling dan Cirata, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Situ Ciburuy terdapat di Kecamatan Padalarang digunakan untuk irigasi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 4 juta m³. Situ Lembang digunakan untuk irigasi dan terletak di bagian hulu DAS Cimahi, kapasitasnya sebesar 3,7 m³ dengan daerah tangkapan situ tersebut diperkirakan 6,3 km³.
- 2) Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, dan Cipongkor. Waduk tersebut digunakan untuk PLTA, irigasi dan penyediaan air minum. Kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m³.
- 3) Waduk Cirata terletak kearah hilir dari Waduk Saguling yang lokasinya berada di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m³, dengan ketinggian mukaair + 220 m/dpl.

Dalam aspek Hidrogeologi, berdasarkan studi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona:

- 1) Zona kritis untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³ perbulan, dengan penyebaran berada di Kecamatan Batujajar.
- 2) Zona rawan untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m³ per bulan. Zona rawan untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Batujajar.
- 3) Daerah aman pengambilan air tanah, pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m³ per hari dengan sumur terbatas. Daerah aman untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Cikalong wetan, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong.
- 4) Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi peruntukan kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³ per bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan Lembang dan Cisarua.

- 5) Zona bukan cekungan air tanah, produktivitas akuifer rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali akuifer dangkal di daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³/bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah penyebarannya di Kecamatan: Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga.

Potensi Mata air di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebanyak 223 lokasi, yang tersebar di 12 Kecamatan, dengan debit air sebesar 1-130 liter/detik seperti terlihat pada table berikut:

**Tabel 2.5 Potensi Sumber Mata Air
di Kabupaten Bandung Barat**

No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Kisaran Debit (lit/det) saat musim hujan
1.	Lembang	119	1 - 40
2.	Parongpong	26	1,5 - 100
3.	Cisarua	62	1- 60
4.	Ngamprah	46	1 - 130
5.	Cikalongwetan	73	1 - 50
6.	Padalarang	13	1 - 15
7.	Cipatat	28	1,5 -11
8.	Cililin	39	1 - 13
9.	Batujajar	29	0,5 - 3
10.	Gununghalu	15	1 - 75
11.	Sindangkerta	32	1 - 8
12.	Cipongkor	24	0,8 - 12
13.	Cipendeuy	44	1 -10
14.	Rongga	116	0,5 - 50
15.	Cihampelas	50	2 - 13

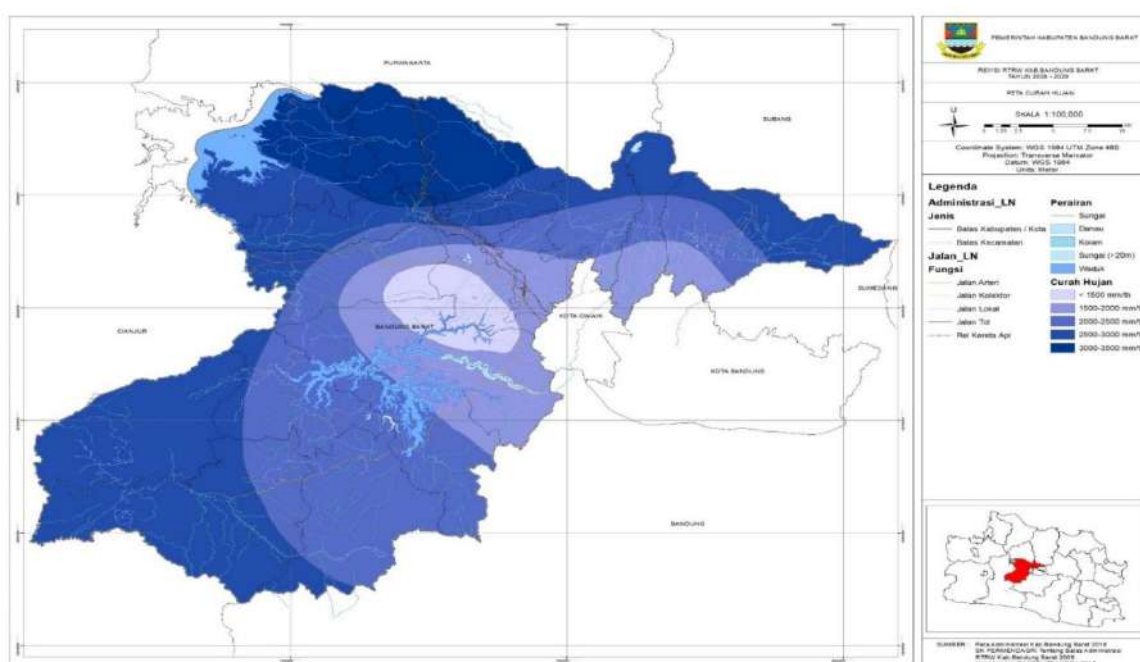
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009 - 2029

Secara Klimatologi, Wilayah Kabupaten Bandung Barat dikaruniai keberuntungan karena selalu disinggahi awan pembawa hujan dan ditempati penampungan air yang sangat besar yaitu waduk Saguling dan Cirata dengan curah hujan rata-rata pertahun adalah kurang lebih pada 1.500 – 3.500 mm/tahun, dengan gambaran dan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6 Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No.	CURAH HUJAN	LUASAN (ha)
1	< 1500 mm/th	5,481
2	1.500 - 2.000 mm/th	19,489
3	2.000 - 2.500 mm/th	39,947
4	2.500 - 3.000 mm/th	48,993
5	3.000 - 3.500 mm/th	14,857

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009-2029

Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kabupaten Bandung Barat


Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Ada dua kecamatan yang memiliki curah hujan kurang dari 1.500 yaitu Kecamatan Batujajar dan Padalarang. Sedangkan untuk curah hujan 1.500 - 2.000 mm/tahun adalah Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah, Padalarang Dan Parongpong. Selanjutnya wilayah yang memiliki curah hujan 2.000 – 2.500 adalah sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, dan Sindangkerta. Untuk curah hujan 2500-3000 mm/th terdapat pada wilayah Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat, Rongga, Gunung Halu, Dan Sindangkerta. Terakhir wilayah yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Cikalong Wetan Dan Cipeundeuy. Berikut tabel curah hujan menurut luasan.

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Jika dilihat dari fungsi guna lahan yang ada Kabupaten Bandung Barat, didominasi oleh fungsi budidaya pertanian sebesar 78.446.15 ha atau 59,96% dari luasan total wilayah Kabupaten Bandung Barat, disusul oleh luasan fungsi budidaya non pertanian sebesar 19,73% dan fungsi kawasan lindung sebesar 14,65% dari total wilayah yaitu 19.171 ha serta fungsi lainnya berupa tanah kosong dan rumput sebesar 5,65%.

Tabel 2.7 Guna Lahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

No	Jenis Tanah	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Lindung		
	Kawasan Lindung	19.171,04	14,65%
	Jumlah	19.171,04	14,65%
2a	Kawasan Budidaya Pertanian		
	Kebun Campur	8.758,76	6,70%
	Perkebunan	9.562,95	7,31%
	Sawah	16.309,44	12,47%
	Sawah Tadah Hujan	19.342,69	14,79%
	Tegal/Ladang	24.472,31	18,71%
	Jumlah	78.446,15	59,96%
2b	Kawasan Budidaya Non-Pertanian		
	Industri	2.270,73	1,74%
	Institusi	251,94	0,19%
	Jalan	2.000,00	1,53%
	Jalan Kereta Api	52,76	0,04%
	Pasar / Pertokoan	776,79	0,59%
	Permukiman	20.260,16	15,48%
	Lapangan	50,02	0,04%
	Taman	35,11	0,03%
	Tambang	114,31	0,09%
	Jumlah	25.811,82	19,73%
	Total Kawasan Budidaya	104.257,97	79,69%
3	Lainnya		
	Tanah Kosong	3.702,29	2,83%
	Rumput	3.689,94	2,82%
	Jumlah	7.392,23	5,65%
Total Kabupaten		130.821,24	100,00%

Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kabupaten Bandung Barat memiliki beragam potensi sumber daya baik kondisi geografi, wilayah dan kondisi lingkungannya untuk dikembangkan, dengan memperhatikan daya dukung/kemampuan satuan lahan untuk selanjutnya dianalisis dengan kerangka pemikiran mengenai potensi pengembangan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan aspek-aspek fisik wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Kerangka Potensi Pengembangan Wilayah

No	Aspek Fisik Wilayah		Kerangka Pengembangan Wilayah
1	Geografi	<ul style="list-style-type: none">Menjadi pintu masuk ke Metropolitan BandungDilalui jaringan transportasi primerBelum diminati investor	<ul style="list-style-type: none">Memanfaatkan lokasi wilayah yang strategisMemperluas kawasan lindung untuk melindungi badan air dan kawasan rawan bencana longsorMelindungi kawasan pertanian lahan basahMengembangkan kegiatan dan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan
2	Topografi	Didominasi lahan dengan kemiringan terhal dan elevasi sama atau lebih dari 750 mdpl (batas elevasi Kawasan Bandung Utara)	
3	Hidrologi	<ul style="list-style-type: none">Memiliki dan dilalui banyak sungai, danau, dan wadukTerdapat potensi banjir dan sekaligus kekeringan	
4	Iklim	Didominasi wilayah dengan curah hujan sedang dan tinggi	
5	Penggunaan Lahan	Didominasi dengan kawasan budidaya non pertanian (terbangun). Kawasan budidaya pertanian lebih kecil, dan hanya 9% merupakan kawasan lindung.	
6	Kawasan Rawan Bencana	Rawan Longsor, dan terdapat potensi kekeringan dan banjir local	

Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020

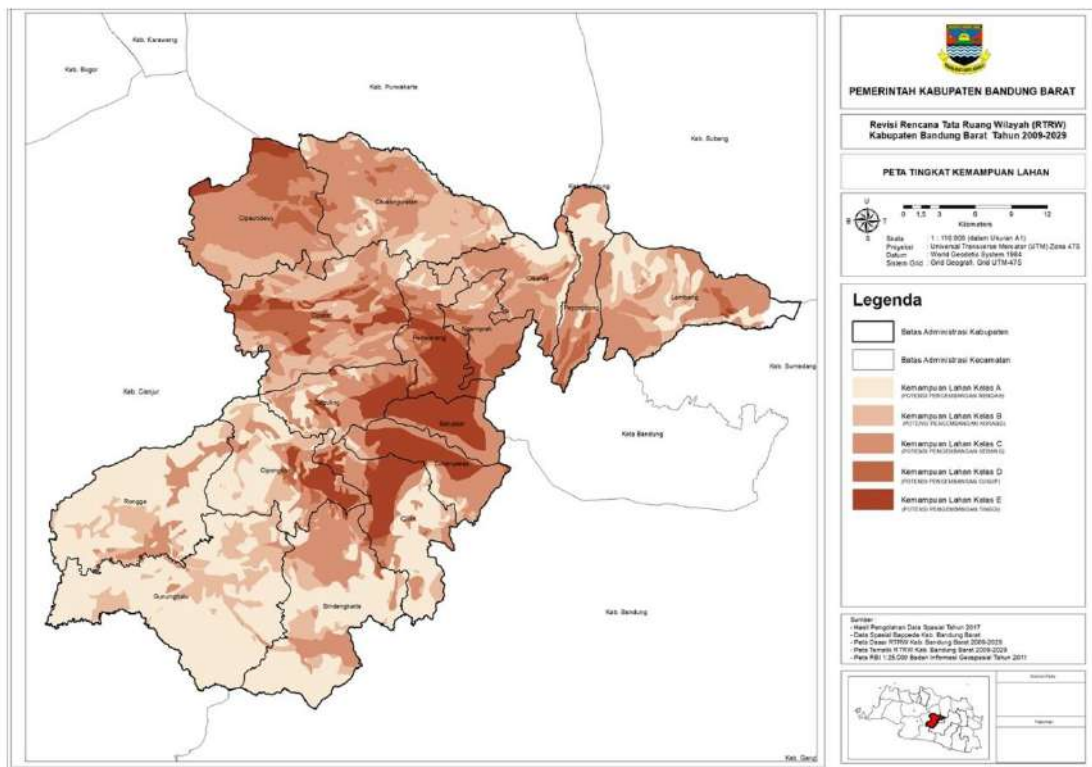
Analisis kemampuan lahan bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan, sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis selanjutnya.

Kemampuan lahan sangat tinggi dan agak tinggi di Kabupaten Bandung Barat terdapat di daerah dataran rendah yang sebagian besar merupakan kemampuan lahan rendah. Kemampuan lahan sedang terdapat di daerah perbukitan dengan elevasi sedang. Kemampuan lahan rendah terdapat di daerah perbukitan dengan elevasi tinggi. Kemampuan lahan sangat rendah terdapat di daerah perbukitan elevasi tinggi dengan lereng yang sangat curam.

Pengembangan kawasan hutan produksi dan pertanian tanaman pangan, hortikultura perkebunan diarahkan pada topografi yang cukup tinggi, pengembangan tersebut diarahkan di Kecamatan Lembang, Parompong, dan Cisarua, beberapa pertanian juga diarahkan pada daerah Cipatat dan Gununghalu. Pengembangan tersebut juga dapat dilihat melalui kelas kemampuan lahan A atau B yang dapat digunakan untuk kawasan pertanian. Pengembangan kawasan industri diarahkan pada kelerengan landai, atau morfologi datar. Pengembangan kawasan industri banyak diarahkan di beberapa daerah di Kecamatan Ngamprah, Padalarang, Batujajar dan sekitarnya. Pengembangan kawasan Industri dapat diarahkan pada kelas kemampuan lahan C atau D pada dasarnya berlokasi pada morfologi landai.

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan pada topografi rendah, atau morfologi datar yang tersebar di Kabupaten Bandung Barat. Kawasan Permukiman dapat diarahkan pada kelas kemampuan lahan D dan E karena memiliki potensi pengembangan tinggi. Kawasan dengan potensi pengembangan tinggi memiliki topografi sangat rendah dan sedang, dan morfologi landai, dengan minimnya kawasan rawan bencana alam, juga memiliki kelas drainase sedang hingga tinggi, yang memungkinkan untuk pengembangan perkotaan.

Kawasan pertahanan dan keamanan diarahkan pada topografi rendah, atau morfologi datar yang tersebar di Kabupaten Bandung Barat, fungsinya agar mempermudah pergerakan kegiatan pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan diarahkan berada di kelas kemampuan lahan D dan E. Peta kemampuan lahan Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.7 Peta Tingkat Kemampuan Lahan

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Cara untuk mengidentifikasi kapasitas wilayah dalam menghadapi kerawanan bencana, salah satunya dapat diketahui melalui tingkat indeks jasa lingkungan/ekosistem dalam pencegahan dan perlindungan terhadap bencana. Jenis jasa ekosistem ini merupakan infrastruktur dari alam yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah kejadian bencana, diantaranya: jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir dan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari bencana.

Jasa lingkungan/ekosistem pengaturan tata air dan banjir di Kabupaten Bandung Barat didominasi Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Kedua kelas ini meliputi 50% luas wilayah Kabupaten Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

- Kategori Sangat Tinggi dengan luas 35.107 Ha atau 27% sebagian besar di Kecamatan Cipatat, selanjutnya Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.
- Kategori Tinggi sebagian besar 29.904 Ha atau 23% Sebagian besar berada di Kecamatan Gununghalu, selanjutnya Kecamatan Cisarua, Cipongkor, dan Kecamatan Cipeundeuy.

- Kategori Sedang merupakan Sebagian besar seluas 40.292 Ha atau 31% yang berada di Kecamatan Rongga, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Saguling, Kecamatan Cihampelas.
- Kategori Rendah dengan luas 2.342 Ha atau 2 % menyebar sebagian kecil di beberapa kecamatan.
- Kategori Sangat Rendah dengan luas 23.551 Ha atau dengan persentase 18% tersebar di sebagian besar Kecamatan Cipatat, Gununghalu dan Kecamatan Lembang. Pada kategori sangat rendah memiliki dampak terhadap gangguan tata aliran dan banjir.

Tabel 2.9 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir

No	Indikator	Luas Ha	%	Kecamatan
1	Sangat Rendah	23.551	18	Sebagian besar Cipatat, Gununghalu, Lembang
2	Rendah	2.342	2	Menyebar sebagian kecil di beberapa Kecamatan
3	Sedang	40.292	31	Bagian besar Rongga, Gununghalu, Saguling, Cihampelas
4	Tinggi	29.904	23	Sebagian besar Gunung Halu, berikut Cisarua, Cipongkor, Cipeundeuy
5	Sangat Tinggi	35.107	27	Sebagian besar Cipatat, Selanjutnya Cihampelas Cikalongwetan, Cipeundeuy
Total		131.195	100	

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK

Indikator jasa lingkungan/ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana dapat memberikan kita perlindungan dan pencegahan dari kejadian bencana baik bencana erosi, longsor, pergerakan tanah dan kebakaran lahan. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- Kategori Sangat Tinggi (ST) seluas 21% atau 27.000 Ha berada disebagian besar Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Cihampelas
- Kategori Tinggi (T) seluas 15% atau 2.3478 Ha berada di sebagian besar di Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipeundeuy, dan Kecamatan Lembang
- Kategori Sedang seluas 45.710 Ha atau 35% berada di sebagian besar Kecamatan Gununghalu, Rongga, selanjutnya Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Saguling
- Kategori Lahan kelas Rendah seluas 14.171 Ha atau 11% yang sebagian kecil menyebar di beberapa kecamatan
- Kategori kelas Sangat Rendah seluas 20.835 Ha sebesar 16% sebagian besar di Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipokongkor, Kecamatan Cipeundey.

Gabungan Kelas Sangat Tinggi dan Kelas Tinggi mencapai 39% jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari kejadian bencana alam. Dengan kondisi demikian menunjukkan bahwa kemampuan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bandung Barat relatif rendah.

**Tabel 2.10 Jasa Ekosistem
Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana**

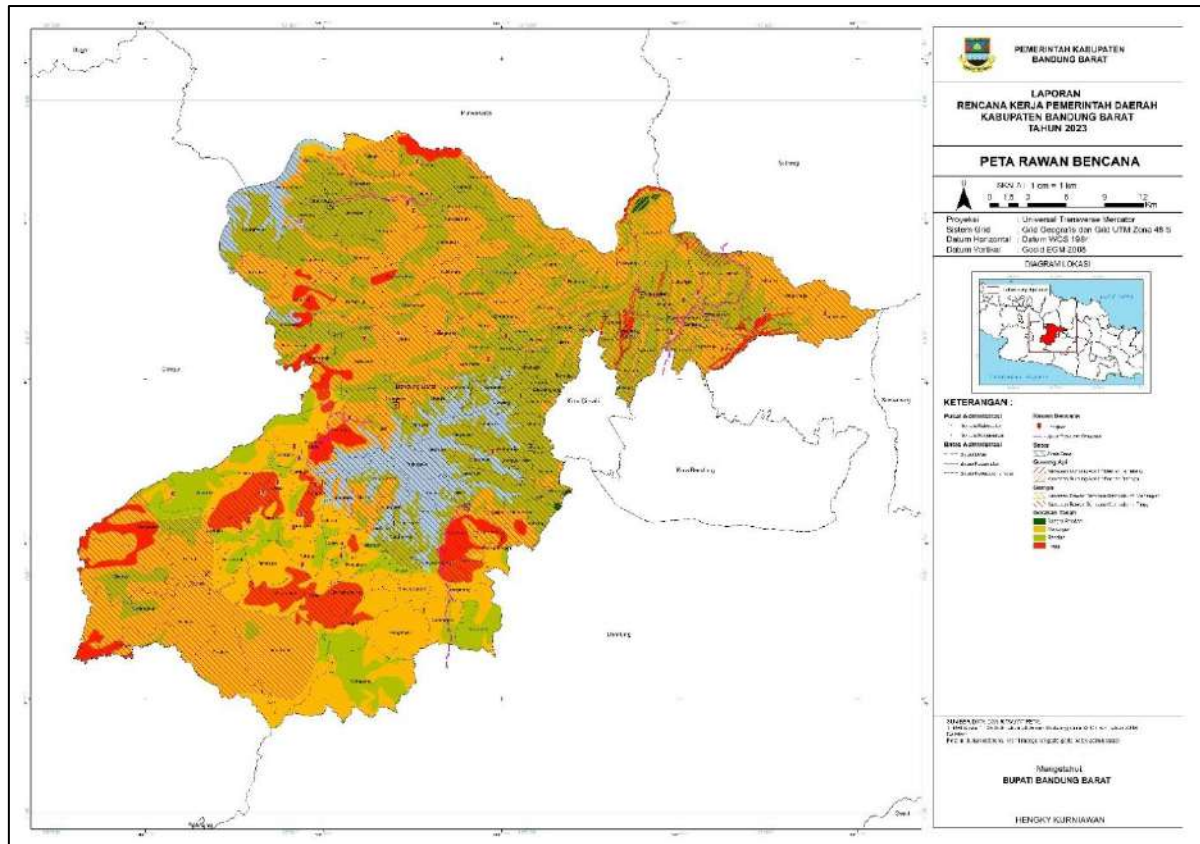
No	Indikator	Luas Ha	%	Kecamatan
1	Sangat Rendah	20.835	16	Sebagian besar Cipatat, Cipokongkor, Cipeundey
2	Rendah	14.171	11	menyebar sebagian kecil
3	Sedang	45.710	35	Bagian besar Gununghalu, Rongga, selanjutnya Cipongkor, Saguling
4	Tinggi	23.478	18	Sebagian besar Cikalongwetan, Cisarua, Cipatat, Cipeundeuy, Lembang
5	Sangat Tinggi	27.000	21	Sebagian besar Cipatat dan Cihampelas
Total		131.195	100	

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ - KLHK

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari bencana banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, pergerakan tanah, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan serta angin puting beliung. Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kejadian gempa bumi, tanah longsor dan pergerakan tanah.

Kawasan rawan bencana longsor dan pergerakan tanah secara umum menyebar di bagian utara dan selatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cikalongwetan, Cipatat, Batujajar, Cililin, Rongga, Gununghalu dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua, dengan sebaran kawasan rawan bencana seperti terlihat pada gambar peta berikut:

Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bandung Barat



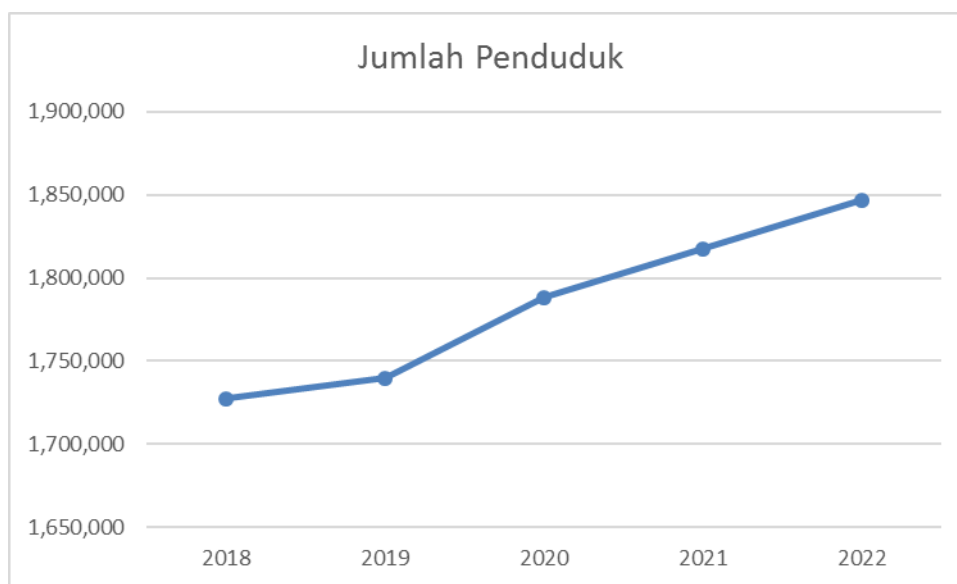
Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020

2.1.4 Aspek Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil (SP2020), jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.727.337 jiwa meningkat sebesar 119.632 jiwa atau 6,93% menjadi 1.846.969 jiwa di tahun 2022.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.846.969 jiwa dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk laki-laki sebesar 942.395 jiwa (51,02 persen) dan penduduk perempuan sebesar 904.574 jiwa (49,98 persen) dengan sex ratio sebesar 104,18 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.041 laki-laki. Jumlah penduduk, komposisi penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 secara rinci menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022



Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Tabel 2.11 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
		Perempuan	Laki-Laki			
1	Rongga	30.309	32.270	62.579	112,34	557
2	Gununghalu	39.546	41.846	81.392	155,08	525
3	Sindangkerta	37.435	38.598	76.033	106,07	717
4	Cililin	48.016	50.664	98.680	77,68	1.270
5	Cihampelas	67.966	71.398	139.364	46,95	2.968
6	Cipongkor	50.755	53.136	103.891	79,96	1.299
7	Batujajar	55.340	57.012	112.352	31,06	3.617
8	Saguling	17.275	17.962	35.237	51,47	685
9	Cipatat	70.848	73.825	144.673	125,68	1.151
10	Padalarang	91.693	95.031	186.724	51,54	3.623
11	Ngamprah	89.730	92.806	182.536	35,58	5.130
12	Parongpong	57.156	59.005	116.161	44,96	2.584
13	Lembang	99.301	103.302	202.603	98,11	2.065
14	Cisarua	40.127	41.617	81.744	55,54	1.472
15	Cikalongwetan	64.715	67.505	132.220	110,72	1.194
16	Cipeundeuy	44.385	46.395	90.780	101,96	890
Kab. Bandung Barat		904.597	942.372	1.846.969	1.284,70	1.438

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, BPS, 2023

Pada tahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.438 jiwa per Km² dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Lembang dengan kepadatan 5.130 jiwa per Km² dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Gununghalu dengan kepadatan 525 jiwa per Km². Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 adalah sebesar 1,80% dengan jumlah penambahan penduduk terbesar berada di Kecamatan Cihampelas sebanyak 4.279 jiwa atau 3,17% sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ngamprah sebanyak 1.405 jiwa atau 0,78%.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi.

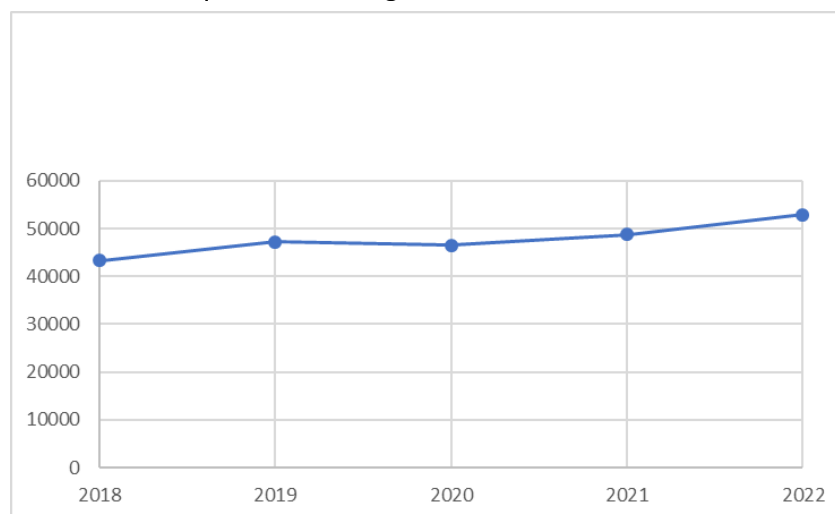
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, diantaranya:

2.2.1.1 Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktifitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada periode perhitungan/tahun berjalan. Pada periode tahun 2018-2022, PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, yakni sebesar 43.807,70 miliar Rupiah (2018); 47.180,08 miliar Rupiah (2019); 46.478,90 miliar Rupiah (2020); 48.764,31 miliar Rupiah (2021) dan 51.625,64 miliar Rupiah (2022).

**Gambar 2.10 Grafik Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**



Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Akibat adanya dampak pandemi covid-19 di awal tahun 2020, PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 sempat turun menjadi 46.478,90 Milyar dibanding tahun 2019 sebesar 47.180,08 atau mengalami penurunan sebesar 701,18 Milyar. Pada tahun 2021 secara nominal PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan sebesar 2.285,41 Milyar menjadi 48.764,31 Milyar dibanding tahun 2020 dan Nilai PDRB Bandung Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 51.625,64 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.861,33 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 48.764,31 miliar rupiah. Peningkatan nilai PDRB tahun 2021 dan 2022 pasca covid-19, dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir diseluruh lapangan usaha seiring dengan melandainya kasus covid-19 serta dengan berbagai kebijakan di bidang perekonomian dalam rangka pemulihan dan peningkatan sektor ekonomi, perkembangan nilai PDRB Kab. Bandung Barat 2018-2022, terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 Kabupaten Bandung Barat**

No	Sektor	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.895,30	6.325,51	6.173,59	6.140,22	6.812,50
2	Pertambangan dan Penggalian	473,24	476,90	476,31	506,84	517,68
3	Industri Pengolahan	17.505,32	18.853,41	18.753,08	20.092,11	22.012,92
4	Listrik dan Gas	354,04	390,49	375,83	418,08	441,35
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	16,78	17,77	19,68	21,60	23,85
6	Konstruksi	3.305,39	3.613,70	3.421,28	3.683,20	3.878,19
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	6.010,72	6.404,98	6.990,22	6.194,40	6.535,27
8	Transportasi dan pergudangan	2.325,18	2.503,97	2.436,30	2.511,43	2.905,25
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2.217,51	2.436,39	2.401,86	2.512,23	2.783,85
10	Informasi dan komunikasi	746,82	786,48	999,36	1.069,96	1.120,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	381,60	414,19	418,93	451,44	490,38
12	Real Estate	773,51	853,13	855,11	939,98	1.016,14
13	Jasa Perusahaan	194,90	212,59	192,79	218,83	253,49
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.279,81	1.365,49	1.312,15	1.242,43	1.201,45
15	Jasa Pendidikan	1.616,54	1.742,81	1.891,90	1.983,84	2.078,60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	234,66	259,84	258,02	274,36	290,83
17	Jasa lainnya	476,30	522,36	501,60	503,35	558,78
PDRB ADHB		43.807,70	47.180,08	46.478,90	48.764,31	52.921,28

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha bertujuan untuk melihat struktur ekonomi, besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha atau yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah tersebut.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini dapat dilihat dari distribusi peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.13 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (persen)**

No	Sektor	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,46	13,41	13,28	12,59	12,87
2	Pertambangan dan Penggalian	1,08	1,01	1,02	1,04	0,98
3	Industri Pengolahan	39,96	39,96	40,32	41,20	41,60
4	Listrik dan Gas	0,81	0,83	0,81	0,86	0,83
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
6	Konstruksi	7,55	7,66	7,36	7,55	7,33
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	13,72	13,58	12,90	12,70	12,35
8	Transportasi dan pergudangan	5,31	5,31	5,24	5,15	5,49
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,06	5,16	5,17	5,15	5,26
10	Informasi dan komunikasi	1,70	1,67	2,15	2,19	2,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	0,88	0,90	0,93	0,93
12	Real Estate	1,77	1,81	1,84	1,93	1,92
13	Jasa Perusahaan	0,44	0,45	0,41	0,45	0,48
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,92	2,89	2,73	2,55	2,27
15	Jasa Pendidikan	3,69	3,69	4,18	4,07	3,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,54	0,55	0,56	0,56	0,55
17	Jasa lainnya	1,09	1,11	1,08	1,03	1,06
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

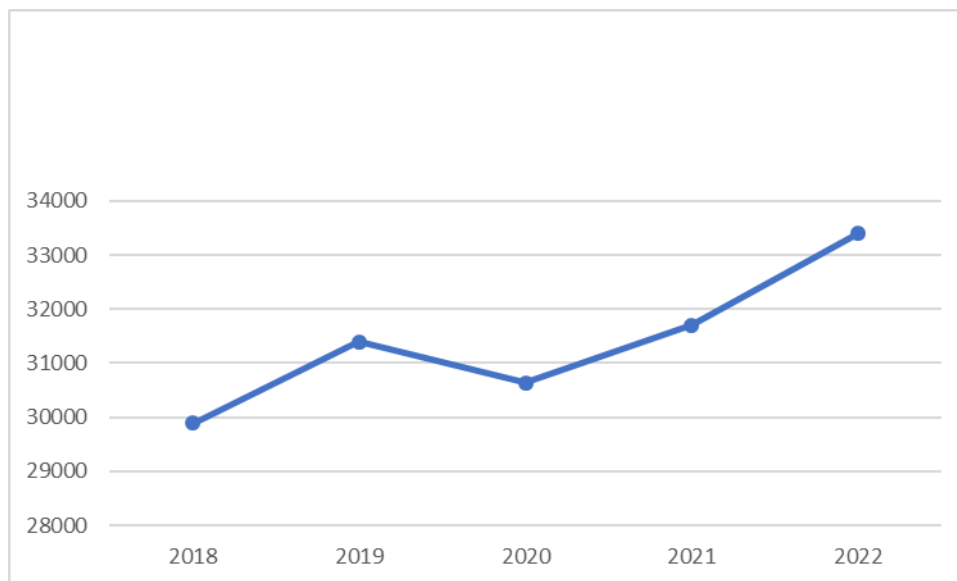
Peranan distribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat pada tahun 2018 - 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 39,96 - 41,60 persen dari total PDRB. Selanjutnya disusul berturut-turut oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 12,35 - 13,72 persen; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 12,59 - 13,46 persen; lapangan usaha Kontruksi dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 7,33 - 7,66 persen; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 5,15 - 5,49 persen dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 5,06 - 5,26 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing- masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Pada rentang tahun 2020-2022 saat terjadi Pandemi Covid-19 sampai dengan saat pemulihan ekonomi, di tahun 2020 dan 2022 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada pergeseran dimana distribusi peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi urutan kedua yaitu sebesar 13,28 persen tahun 2020 dan 12,87 persen tahun 2022 melampaui pencapaian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 12,90 persen di tahun 2020 dan 12,35 persen di tahun 2022. Ini terjadi karena saat Pandemi Covid-19 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan walaupun sama mengalami hantaman karena dampak negative covid-19 namun tidak sebesar lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Di antara keenam lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Industri Pengolahan dan Konstruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan perannya berangsur-angsur menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan ke empat kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Bandung Barat adalah melemahnya permintaan masyarakat akibat penurunan pendapatan sebagai dampak negative pandemic covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Selain itu pembukaan aktifitas perdagangan karena menurunnya kasus covid-19 masih dilakukan secara bertahap belum sepenuhnya pulih.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktifitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bandung Barat terus meningkat dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2018 nilai PDRB ADHK sebesar 29.888,88 milyar kemudian tumbuh menjadi 31.398,35 milyar pada tahun 2019. Tetapi akibat adanya pandemi covid-19 di awal tahun 2020, angka PDRB ADHK mengalami penurunan menjadi 30.640,41 miliar rupiah pada tahun 2020. Tetapi pada tahun 2021 dan 2022 secara nominal PDRB ADHK Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan menjadi 31.701,79 milyar pada tahun 2021 dan 33.393,29 milyar pada tahun 2022, perkembangannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel gambar dan tabel berikut:

**Gambar 2.11 Grafik Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**



Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

**Tabel 2.14 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 Kabupaten Bandung Barat**

No	Sektor	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.688,41	3.790,59	3.711,11	3.672,83	3.823,82
2	Pertambangan dan Penggalian	333,99	329,60	322,49	342,68	342,29
3	Industri Pengolahan	12.071,60	12.770,35	12.517,13	13.128,21	13.970,00
4	Listrik dan Gas	229,84	237,12	229,82	254,96	266,93
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	11,17	11,50	12,68	13,89	14,95
6	Konstruksi	2.187,51	2.349,04	2.214,82	2.378,25	2.419,98
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	4.220,20	4.382,10	4.024,97	4.142,79	4.305,72
8	Transportasi dan pergudangan	1.537,22	1.605,32	1.544,01	1.561,04	1.716,34
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.547,79	1.645,76	1.568,89	1.553,41	1.709,15
10	Informasi dan komunikasi	737,76	799,67	1.015,82	1.094,91	1.155,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	250,86	259,48	263,15	277,91	274,48
12	Real Estate	566,48	615,10	616,03	676,51	731,75
13	Jasa Perusahaan	143,30	154,15	135,50	146,31	161,89
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	765,21	740,30	706,20	688,15	666,91
15	Jasa Pendidikan	1.112,36	1.189,95	1.241,42	1.241,87	1.272,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	160,82	172,96	172,47	181,52	192,58
17	Jasa lainnya	324,29	345,20	341,91	346,54	368,39
PDRB ADHK		29.888,88	31.398,35	30.640,41	31.701,79	33.393,29

Sumber: KBBDA, BPS 2023.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, hal ini berguna untuk mengetahui apakah suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus atau sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, nilai PDRB Bandung Barat pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh aktifitas produksi lapangan usaha yang telah bebas dari pengaruh inflasi kecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian, jasa keuangan dan asuransi serta administrasi pemerintahan pertahanan dan kegiatan sosial.

Nilai PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 31.701,79 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1.061,41 miliar dari 30.640,41 miliar pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,46 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 pada saat terjadi pandemic covid-19 yang mengalami kontraksi/pertumbuhan negatif sebesar 2,41 persen. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 atas dasar harga konstan, mencapai 33.393,29 milyar rupiah angka tersebut naik sebesar 1.691,50 milyar dari 31.701,79 miliar pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (persen)

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,66	1,24	-0,62	-1,03	4,11
B	Pertambangan dan Penggalian	2,40	-1,29	-2,18	6,26	-0,11
C	Industri Pengolahan	6,62	6,26	-2,41	4,88	6,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,55	3,17	-3,08	10,94	4,70
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,90	2,94	10,21	9,58	7,61
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,35	7,38	-5,71	7,38	1,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,67	3,84	-8,15	2,93	3,93
H	Transportasi dan Pergudangan	4,97	4,43	-3,82	1,10	9,95
I	Penyediaan Akomodasi & Mamin	7,70	6,33	-4,67	-0,99	10,03
J	Informasi dan Komunikasi/	9,08	8,39	27,03	7,79	5,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,88	3,44	1,41	5,61	-1,24
L	Real Estat	9,80	8,58	0,15	9,82	8,06
M,N	Jasa Perusahaan	8,29	7,58	-12,11	7,98	10,65
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,35	-0,03	-7,68	-2,56	-3,09
P	Jasa Pendidikan	5,42	4,76	6,53	0,04	2,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,94	7,55	-0,28	5,25	5,25
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,60	6,45	-0,38	0,76	6,30
	Produk Domestik Regional Bruto	5,50	5,05	-2,41	3,46	5,34

Sumber: KBDDA, BPS 2023.

Kontraksi/pertumbuhan negatif ekonomi Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 disebabkan oleh melambatnya seluruh lapangan usaha kecuali 5 (lima) lapangan usaha antara lain: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Pendidikan. Perlambatan ekonomi terbesar terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan yaitu sebesar -12,11 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar - 8,15 persen. Hal ini terjadi karena pembatasan pergerakan manusia sangat berdampak pada berkurangnya aktifitas perusahaan-perusahaan pada lapangan usaha tersebut, bahkan di saat

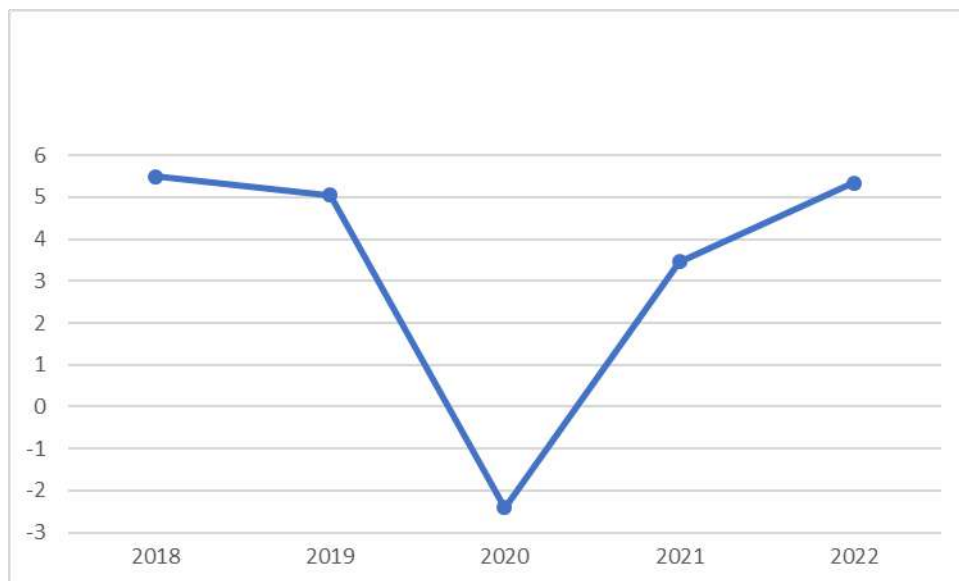
awal pandemi dan kasus penyebaran virus meningkat perusahaan-perusahaan tersebut berhenti beroperasi.

Diantara lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan yang melonjak dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 8,39 persen dan pada tahun 2020 melesat menjadi 27,03 persen. Kita maklum bersama melesatnya pertumbuhan ini terjadi karena saat pandemi permintaan akan data (quota) internet melojak drastis. Pemberlakuan work from home (bekerja dirumah) untuk para pegawai dan pembelajaran daring (online) untuk para siswa dan mahasiswa menuntut penggunaan data internet menjadi berlipat ganda.

Pada tahun 2021, percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,46 persen sebagai dampak dari menurunnya kasus covid-19 dengan dilonggarkannya semua aktifitas perekonomian masyarakat. Hal ini menyebabkan peningkatan aktifitas produksi hampir di semua lapangan usaha (13 lapangan usaha) kecuali pada 4 (empat) lapangan usaha mengalami perlambatan, yaitu: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,58 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,79 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,04 persen serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Keempat lapangan usaha tersebut mengalami perlambatan bahkan untuk lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,03 persen. Selain itu ada 2 (dua) lagi lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi sebesar -0,99 persen serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi sebesar 2,56 persen.

Sedangkan pada tahun 2022, dengan semakin melandainya kasus covid-19 pada tahap ini merupakan pemulihan ekonomi pasca covid-19 Kabupaten Bandung Barat mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen. Hal ini terlihat dari peningkatan aktifitas produksi di semua lapangan usaha (14 lapangan usaha) kecuali pada 3 (tiga) lapangan usaha mengalami perlambatan, yaitu: lapangan usaha pertambangan dan penggalan, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi serta lapangan usaha adm. pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib. Gambar 2.12 memperlihatkan capaian kinerja pembangunan sector ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2018 – 2022:

**Gambar 2.12 Grafik Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022**



Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

2.2.1.2 PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Bandung Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 25,36 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami fluktuasi hingga tahun 2022 mencapai 28,65 juta rupiah. Pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 1,57 juta rupiah dari 27,12 juta rupiah menjadi 25,99 juta rupiah, tetapi naik Kembali

di tahun 2021 menjadi 26,88 juta rupiah dan tahun 2022 menjadi 28,65 juta rupiah, perkembangannya seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.16 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**

PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
- ADHB	25,36	27,12	25,99	26,88	28,65
- ADHK	17,75	18,77	17,20	17,47	17,96
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	2,16	1,02	-1,57	0,27	0,49

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya, di satu sisi, dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sementara di sisi lain diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah output dari setiap sektor ekonomi.

2.2.1.3 Inflasi

Secara teoritis, laju inflasi berperan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tergolong rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif (meskipun pertumbuhan tersebut dapat saja bersifat menurun). Apabila sisi permintaan di dalam perekonomian lebih kuat dibandingkan dengan sisi penawarannya, maka secara teoritis penurunan laju inflasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, demikian sebaliknya. Kabupaten Bandung Barat bukan termasuk Kabupaten/Kota yang dihitung nilai inflasinya. Bagi kabupaten yang tidak dihitung maka ada kota rujukan inflasi, dimana kota inflasi tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang tidak jauh berbeda dan atau memiliki kedekatan secara geografis.

Berikut ditampilkan inflasi Kota Bandung, dengan pertimbangan secara geografis merupakan kota perhitungan inflasi terdekat, serta sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat berbelanja dan memiliki pola konsumsi yang mengarah ke Kota Bandung.

Tabel 2.17 IHK Desember Tahun 2021, IHK Desember Tahun 2022, Inflasi Tahun 2021, dan Inflasi Tahun 2022 Kota Bandung menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok	IHK Desember 2021	IHK Desember 2022	Inflasi Tahun 2021	Inflasi Tahun 2022
Umum	107,43	115,43	1,65	7,45
Makanan, Minuman Dan Tembakau	112,21	119,18	3,47	6,21
Pakaian Dan Alas Kaki	107,55	108,93	0,40	1,25
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,59	116,50	0,70	11,39
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	112,55	120,41	4,24	6,98
Kesehatan	112,26	113,86	0,64	1,43
Transportasi	100,77	116,55	0,52	15,66
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	99,46	99,28	-0,13	-0,18
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	104,23	108,24	0,21	3,85
Pendidikan	106,10	106,81	0,81	0,07
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	106,30	111,10	1,01	4,52
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	115,91	125,64	2,21	8,39

Sumber: BPS, Tahun 2022

Pada tabel diatas terlihat pergerakan IHK selama dua belas bulan terakhir terjadi inflasi sebesar 7,45 persen. Dari sebelas kelompok pengeluaran, yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Kelompok Transportasi sebesar 15,66 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 11,39 dan Kelompok Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya sebesar 8,39 persen. Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) mematok target inflasi untuk tahun 2022 berada di kisaran angka 4 persen plus minus 1 persen. Pencapaian inflasi sebesar 7,45 jauh diatas target, penyebab utamanya bukan hanya harga yang tidak terkendali dan nilai mata uang yang belum stabil tetapi akibat juga permintaan domestik yang kuat akibat pandemi covid-19 yang terjadi serta dampak adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di kuartal ke empat tahun 2022.

2.2.1.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari distribusi pendapatan yang merata antar daerah. Hal tersebut penting untuk dipantau fluktuasinya karena hal tersebut menjadi salah satu acuan stakeholder penentu kebijakan dalam merencanakan serta melaksanakan kebijakan. Perbedaan pemerataan kesejahteraan antar daerah yang terlalu kontras akan menimbulkan permasalahan sosial yang mampu menghambat laju kemajuan sosial daerah.

Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (2100 kilo kalori per kapita per hari). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedang Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Perkembangan tingkat kemiskinan, penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 - 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 2.18 Persentase Penduduk Miskin,
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**

PendudukTahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Miskin
2018	329.415	169,00	10,06
2019	341.307	159,03	9,38
2020	362.212	179,46	10,49
2021	374.470	190,77	11,30
2022	393.956	183,70	10,82

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu Tahun 2018 - 2022 di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren meningkat. Pada keadaan Tahun 2018, persentase penduduk miskin di Bandung Barat mencapai 10,06 persen (169,00 ribu jiwa) dan pada keadaan tahun 2022 sedikit meningkat sebesar 0,76 persen menjadi 10,82 persen (183,70 ribu jiwa). Secara absolut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selama periode Tahun 2018 – 2022, penduduk miskin Kabupaten Bandung Barat terjadi peningkatan sekitar 14,70 ribu jiwa yaitu dari 169,00 ribu jiwa menjadi 183,70 ribu jiwa.

Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat sempat menurun dibanding tahun 2018 yaitu terjadi penurunan sebesar 0,68 persen (9,97 ribu jiwa). Tetapi akibat adanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2022, sehingga berdampak pada seluruh sendi kehidupan manusia bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga ekonomi, tidak terkecuali kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang dari tahun ketahun terus menurun, mengalami trend meningkat, kenaikan pada tahun 2020 menjadi 10,49 persen, kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 11,30 persen dan baru turun Kembali di tahun 2022 menjadi 10,82 persen. Penduduk miskin meningkat 20,43 ribu dari 159,03 ribu pada tahun 2019 menjadi 179,46 ribu pada tahun 2020, meningkat kembali menjadi 190,77 ribu pada tahun 2021 dan baru turun menjadi 183,70 ribu pada tahun 2022.

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2018 –2022, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp.64.541,- dari Rp.329.415,- per kapita per bulan pada Tahun 2018 menjadi Rp.393.956,- per kapita per bulan pada Tahun 2022.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata- rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Tabel 2.19 Indeks Kedalaman Kemiskinan
Dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**

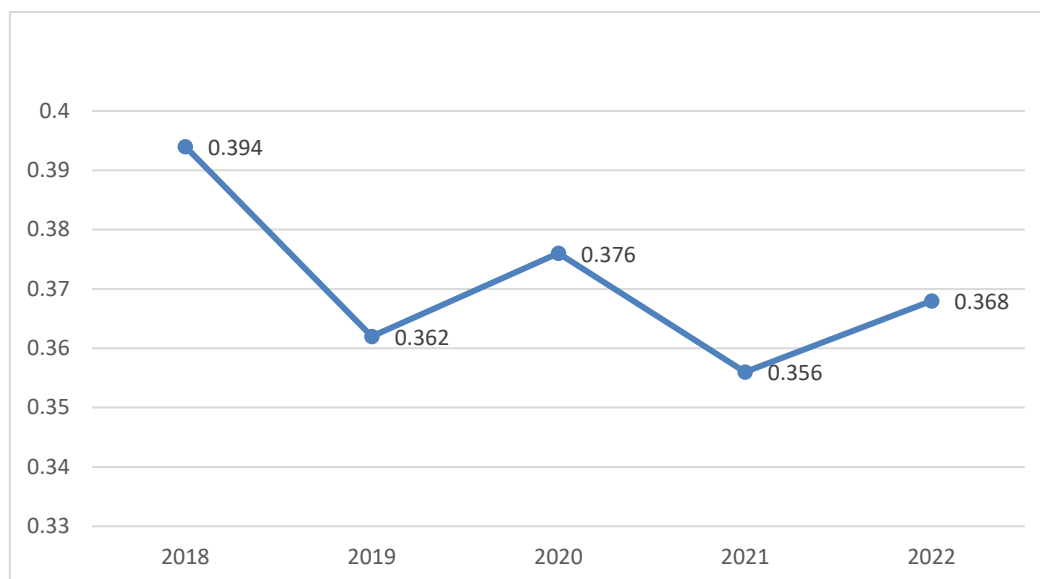
Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2018	1,45	0,35
2019	1,54	0,33
2020	1,40	0,25
2021	1,62	0,32
2022	1,56	0,31

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Pada periode Tahun 2018 –2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 1,45 pada keadaan Tahun 2018 menjadi 1,56 pada keadaan Tahun 2022. Kenaikan nilai indeks ini dari tahun 2018 - 2021 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi Garis Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bandung Barat mencapai 0,31 di tahun 2022. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibandingkan pada Tahun 2018 (0,35). Ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin menyempit.

Indikator pertama yang digunakan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pendapatan suatu wilayah yaitu gini rasio. Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022 berfluktuatif namun cenderung selalu berada pada level ketimpangan rendah ($<0,4$). Hal yang menggembirakan di Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir gini rasio menurun, setelah pada tahun 2018 mencapai gini rasio tertinggi yaitu sebesar 0,394 pada tahun 2019 turun menjadi 0,362 atau turun sebesar 0,032 poin. Tetapi Pada tahun 2020 gini rasio meningkat sebesar 0,014 menjadi 0,376 poin, peningkatan di tahun 2020 salah satunya adalah karena adanya dampak pandemi covid 19 di awal tahun 2020 tetapi melalui program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi yang cukup efektif di tahun 2021 indeks gini kembali turun menjadi 0,356 dan turun Kembali di tahun 2022 menjadi 0,368 poin.

Gambar 2.13 Grafik Perkembangan Gini Rasio
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022



Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Nilai indeks pada tabel tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk kategori dengan ketimpangan rendah karena nilainya masih dibawah 0,4. tetapi Pemerintah Daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator capaian pembangunan manusia, pembangunan dan pemberdayaan gender, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memastikan bahwa manusia dapat memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki. Hal ini tentunya dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Capaian pembangunan manusia di Kab. Bandung Barat tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**

KOMPONEN	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,03	72,18	72,34	72,52	72,79
2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,83	11,86	11,87	11,88	11,89
3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,97	8,18	8,19	8,20	8,22
4. Pengeluaran Perkapita (ribu Rupiah)	8.329	8.684	8.455	8.546	9.044
IPM	67,46	68,27	68,08	68,29	69,04

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Berdasarkan tabel diatas, IPM Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 sebesar 69,04. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berdasarkan data pada tahun 2022, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 72,79 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 72,79 tahun. Dari sisi pendidikan, penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,22 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 11,89 tahun atau setara dengan Kelas XI atau sampai SMA kelas 2. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita sudah mencapai 9,044 juta rupiah per kapita per tahun.

Perkembangan pencapaian IPM selama tahun 2018 - 2022. Dalam kurun waktu tersebut, nilai IPM Kabupaten Bandung Barat bergerak naik dari 67,46 pada tahun 2018 menjadi 69,04 pada tahun 2022 atau mengalami kenaikan sebesar 1,58 poin. Pergerakan yang sama juga terjadi pada ketiga indeks IPM, dimana usia harapan hidup meningkat dari 72,03 pada tahun 2018 menjadi 72,79 pada tahun 2022. Dimensi pendidikan untuk harapan lama sekolah bergerak dari 11,83 di tahun 2018 menjadi 11,89 pada tahun 2022, sementara rata lama sekolah dari 7,97 di tahun 2018 menjadi 8,22 pada 2022. Setandar hidup layak juga meningkat dari Rp.8.329.000 pada tahun 2018 menjadi Rp.9.044.000 pada tahun 2022.

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan perkembangan yang positif. Setiap tahun, IPM Kabupaten Bandung Barat meningkat rata-rata 0,32 persen per tahun. Dalam kurun waktu lima tahun, telah terjadi kenaikan IPM sebesar 1,58 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Bandung Barat.

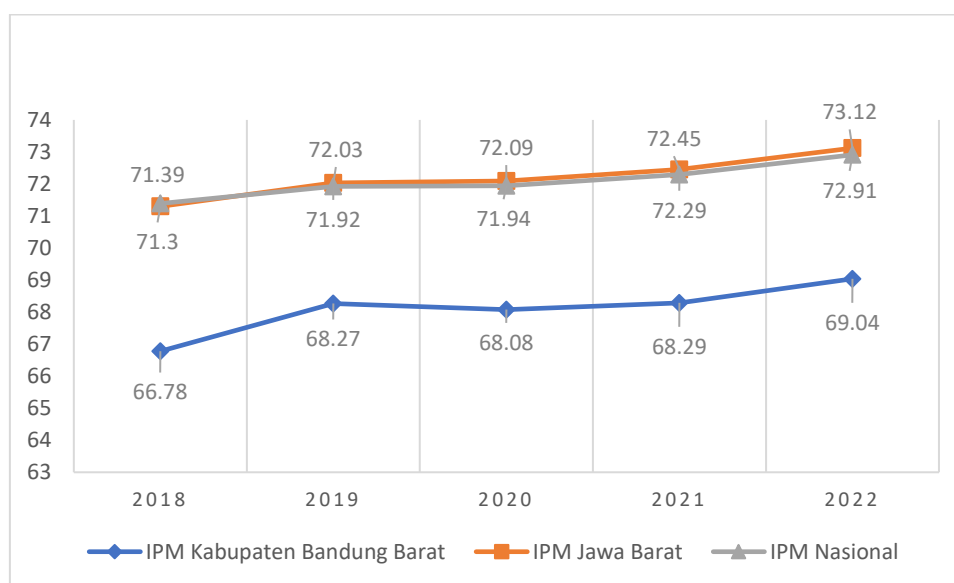
Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Berubahnya status pembangunan manusia dapat dijadikan indikator dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok dengan kriteria sebagai berikut.

- Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

Bila mengacu pada klasifikasi pembagian status IPM di atas, maka IPM Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir termasuk dalam kategori “Kelompok sedang”, yakni kelompok daerah dengan nilai IPM berkisar antara 60 hingga 70. Adapun capaian masing-masing komponen IPM cukup bervariasi. Masih dalam periode waktu yang sama, status indeks kesehatan termasuk dalam kategori “Kelompok Tinggi” (dengan capaian antara 70-80), status indeks pendidikan masih dalam kategori “rendah” dengan capaian di atas 60, sedangkan status indeks daya beli masih tergolong dalam kategori “Kelompok Sedang” (dengan capaian antara 60-70). Ketiga komponen IPM secara simultan meningkatkan pencapaian IPM setiap tahun. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas pembangunan manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan hidup layak penduduk beberapa tahun terakhir.

Namun hal tersebut belum berarti bahwa kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat sudah cukup menggembirakan. Hal yang paling harus diperhatikan adalah tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah. Posisi IPM Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun secara tren sama-sama menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. IPM Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2022 sudah masuk dalam kategori IPM tinggi sedangkan Kabupaten Bandung Barat masih masuk dalam kategori sedang.

Gambar 2.14 Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbanda, 2022

Bila dilihat dari pencapaian IPM di Kabupaten Bandung Barat menurut kecamatan, Kecamatan dengan IPM tertinggi di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 ditempati oleh Kecamatan Lembang dengan 70,61 atau sudah masuk dalam kategori tinggi, diikuti oleh Kecamatan Parongpong dengan 70,10 (tinggi) dan Kecamatan Padalarang dengan 70,05 (tinggi). Sedangkan tiga kecamatan dengan IPM terendah ditempati Kecamatan Rongga dengan 64,48 (sedang), Kecamatan Saguling 64,49 (sedang) dan Kecamatan Cipongkor 64,57 (sedang) sedangkan untuk pencapaian IPM tahun 2021 dan 2022 tidak menghitung sampai tingkat Kecamatan.

**Tabel 2.21 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2020 Menurut Kecamatan (Angka Regional)**

Kecamatan	Kesehatan		Pendidikan				Daya beli		I P M		Laju
	UHH	Indeks	EYS	Indeks	MYS	Indeks	Pengeluaran Perkapita Tahunan	Indeks	Indeks	Peringkat	
1 Cililin	74.04	83.14	11.99	66.61	8.91	59.43	8,359.36	64.66	69.71	7	-0.299
2 Cihampelas	73.82	82.80	12.03	66.81	9.02	60.12	8,398.33	64.80	69.83	6	-0.286
3 Sindangkerta	72.66	81.01	11.93	66.28	8.03	53.55	8,311.23	64.48	67.90	9	-0.290
4 Gunung Halu	71.22	78.80	11.79	65.49	7.86	52.37	8,277.00	64.36	66.86	13	-0.290
5 Rongga	69.28	75.82	11.48	63.77	6.87	45.81	8,327.71	64.54	64.48	16	-0.241
6 Cipongkor	67.44	72.98	11.99	66.59	7.03	46.86	8,461.69	65.03	64.57	14	-0.224
7 Batujajar	73.46	82.25	11.93	66.25	9.15	61.01	8,482.42	65.11	69.85	5	-0.334
8 Saguling	68.55	74.68	11.76	65.34	6.80	45.35	8,421.60	64.89	64.49	15	-0.232
9 Lembang	75.04	84.67	12.03	66.83	8.97	59.79	8,639.79	65.67	70.61	1	-0.337
10 Parongpong	75.70	85.69	11.92	66.21	8.63	57.50	8,450.08	64.99	70.10	2	-0.340
11 Cisarua	73.47	82.26	11.67	64.86	8.58	57.17	8,428.59	64.91	68.81	8	-0.281
12 Ngamprah	71.79	79.68	11.99	66.59	9.75	64.98	8,588.02	65.48	70.02	4	-0.332
13 Padalarang	73.40	82.15	12.05	66.94	9.08	60.55	8,628.10	65.63	70.05	3	-0.296
14 Cipatat	72.61	80.94	11.75	65.30	7.75	51.64	8,561.60	65.39	67.64	11	-0.278
15 Cipeundeuy	72.49	80.76	11.83	65.74	8.04	53.60	8,344.48	64.61	67.77	10	-0.283
16 Cikalong Wetan	73.17	81.80	11.80	65.54	7.36	49.05	8,407.33	64.83	67.23	12	-0.319
Bandung Barat	72.34	80.52	11.87	65.94	8.19	54.60	8,455	65.01	68.08		-0.280

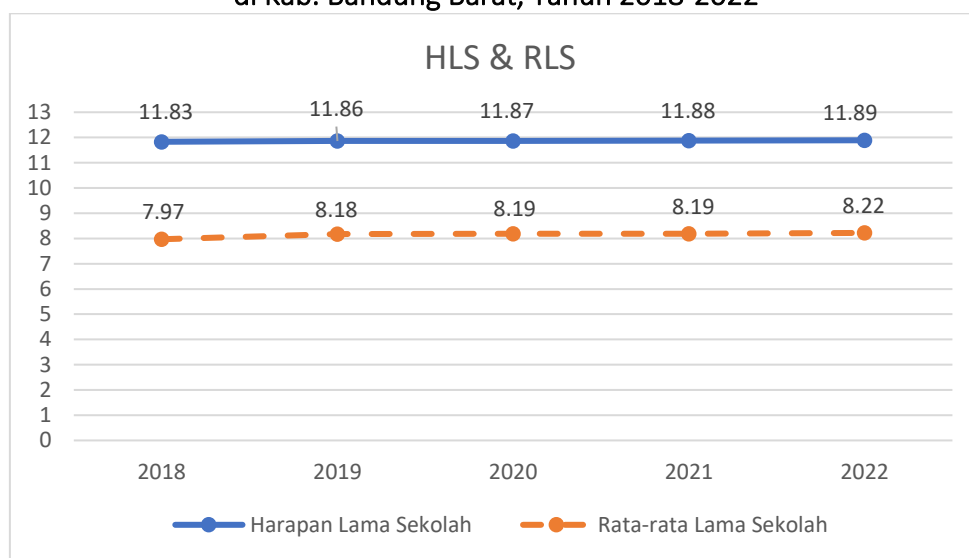
Sumber: Indikator Pembangunan KBB, Bappelitbangda Tahun 2020

2.2.2.2 Pendidikan

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Selama Periode 2018 hingga 2022, pengetahuan masyarakat Kabupaten Bandung Barat menunjukkan trend meningkat. Hal ini sejalan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan peningkatan. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah cenderung tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan harapan lama sekolah. Hal ini wajar karena rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas.

Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

**Gambar 2.15 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
di Kab. Bandung Barat, Tahun 2018-2022**



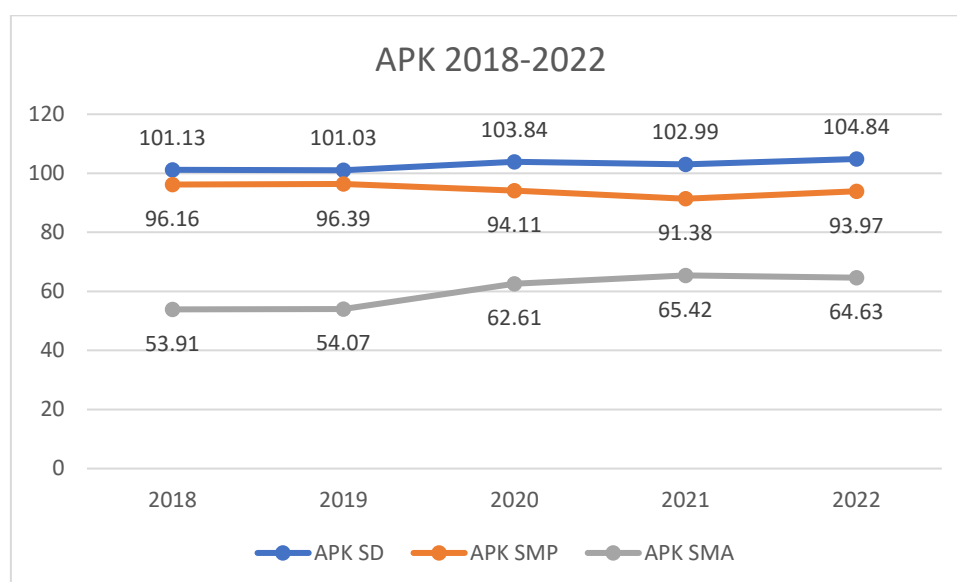
Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2018 hingga 2022. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun selama tahun 2018-2022. Sementara itu, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 0,05 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama. Walau HLS dan RLS menunjukkan peningkatan tetapi peningkatannya lambat, sehingga sector pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Gambar 2.16 APK Menurut Jenjang Pendidikan
di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**



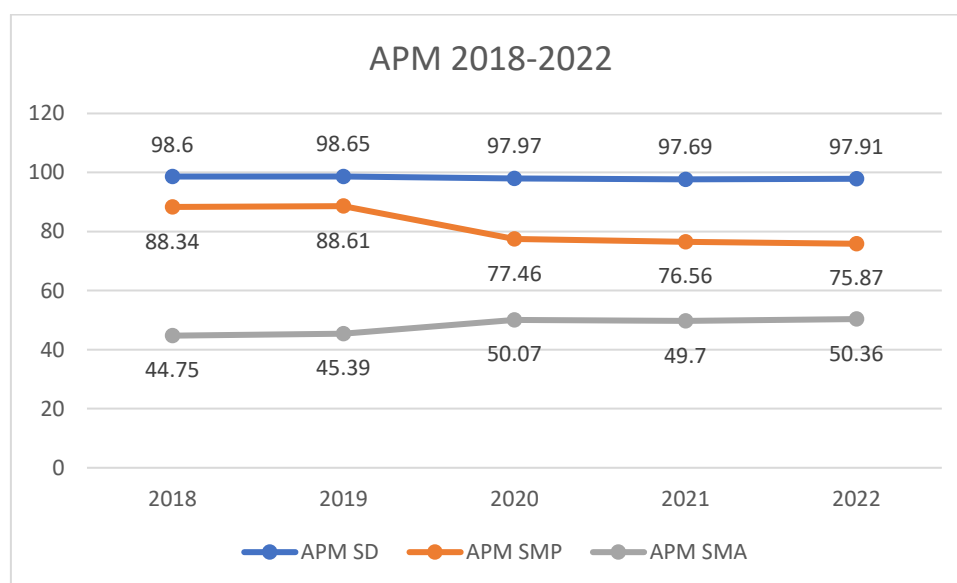
Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022, diolah

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Pada Gambar 2.16 terlihat bahwa APK SD di Kabupaten Bandung Barat lebih dari 100 persen. Artinya terdapat siswa, baik lebih muda maupun lebih tua, yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Hal ini dimungkinkan banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar pada usia 5-6 tahun, disisi lain di daerah pedesaan masih banyak anak yang usianya di atas 12 tahun, tetapi masih duduk dibangku SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

APM yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa hampir semua penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. APM SD di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 97,91 persen, artinya 97,91 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

**Gambar 2.17 APM Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**

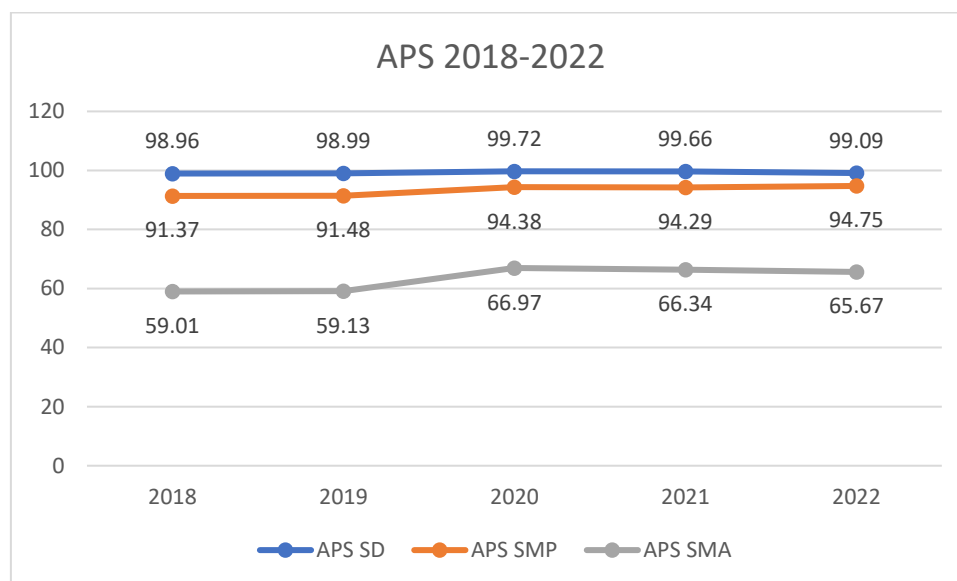


Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022, diolah

Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. APM SD penduduk laki-laki tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan APM SD penduduk perempuan.

Angka Partisipasi Sekolah atau APS merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

**Gambar 2.18 APS Menurut Jenjang Pendidikan
di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022, diolah

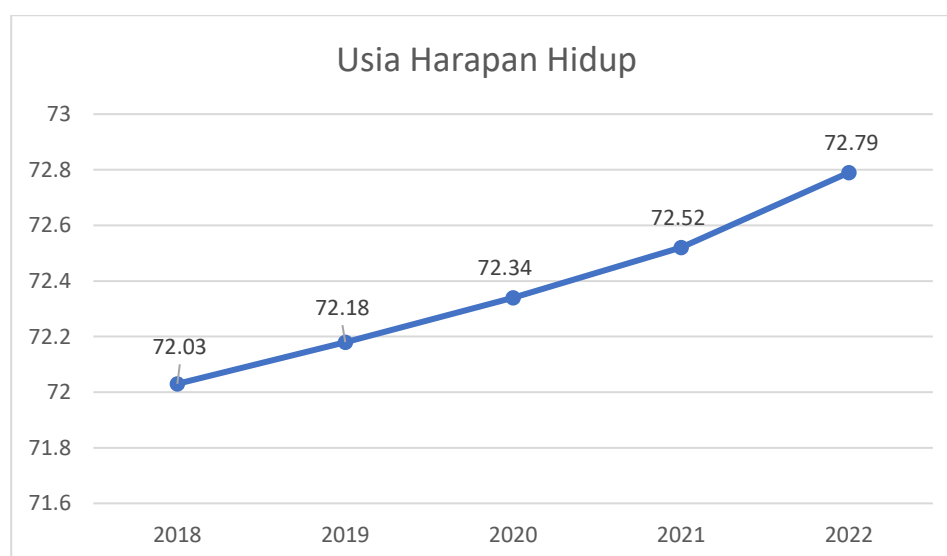
Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti Paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTS dan Paket C setara SM/MA. Gambar 2.18 memperlihatkan APS penduduk Kabupaten Bandung Barat, dimana pada semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan perbedaan yang besar antara angka partisipasi sekolah antara penduduk laki-laki dan perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa, tidak ada perlakuan yang berbeda dalam menyekolahkan anak baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek, dalam konstelasi regional Jawa Barat, HLS Kabupaten Bandung Barat termasuk rendah dibanding Kab/Kota lainnya di Jawa Barat rerata Jawa Barat pada kisaran rentang 12,10 - 14,10 sedangkan Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir berada pada rentang 11,83 – 11,89. Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 (tujuh) tahun untuk menempuh pendidikan Kab/Kota lain lebih lama dibandingkan di Kab. Bandung Barat. Sedangkan RLS menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang, capaian RLS Kab. Bandung Barat 2018-2022 pada kisaran 7,97 - 8,22 tahun, bila dilihat pada skala regional Jawa Barat termasuk pada capaian RLS yang tinggi dibanding Kab/Kota lain di Jawa Barat.

2.2.2.3 Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Umur harapan hidup saat lahir yang diwakili dimensi umur panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

**Gambar 2.19 Umur Harapan Hidup Saat Lahir
di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2022**



Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Indikator umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

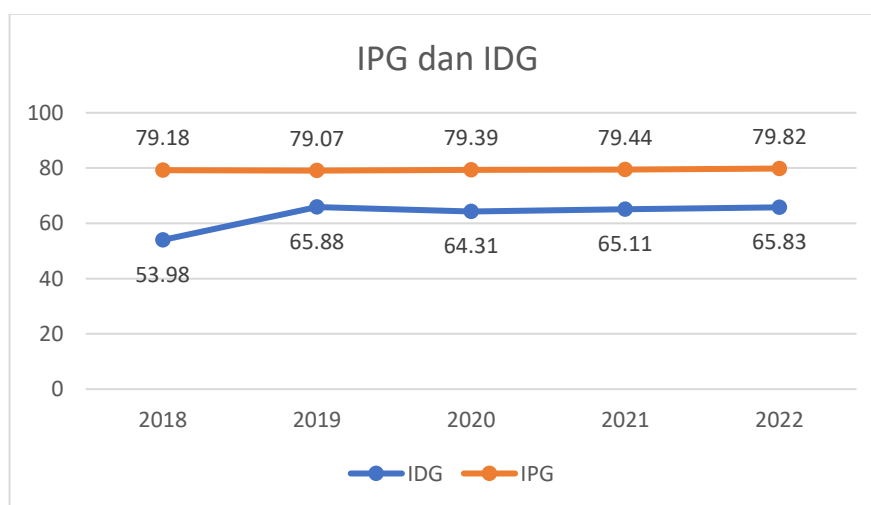
Umur harapan hidup saat lahir Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022, usia harapan hidup meningkat dari 72,03 pada tahun 2018 menjadi 72,79 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar. Secara tidak langsung, hal ini merupakan cerminan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat.

Banyak hal dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat turut berperan dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat. Dalam skala regional Jawa Barat, perkembangan UHH di kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Selain semua kabupaten/kota mengalami peningkatan UHH, disparitas antara daerah dengan capaian UHH tertinggi dengan yang terendah semakin mengecil.

2.2.2.4 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Pada tahun 2022 nilai IDG Kabupaten Bandung Barat sebesar 65,83 poin angka ini meningkat dari kondisi tahun 2018 yang masih berada pada angka 53,98 poin artinya terjadi peningkatan aktivitas perempuan dalam ekonomi dan politik dalam lima tahun terakhir sebesar 11,85 poin. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2022 nilai IPG Kabupaten Bandung Barat sebesar 79,82 poin, angka ini meningkat sebesar 0,64 poin dari tahun 2018 dengan capaian 79,18 poin. Berikut capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2022.

Gambar 2.20 Capaian Indeks Pemberdayaan dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2022



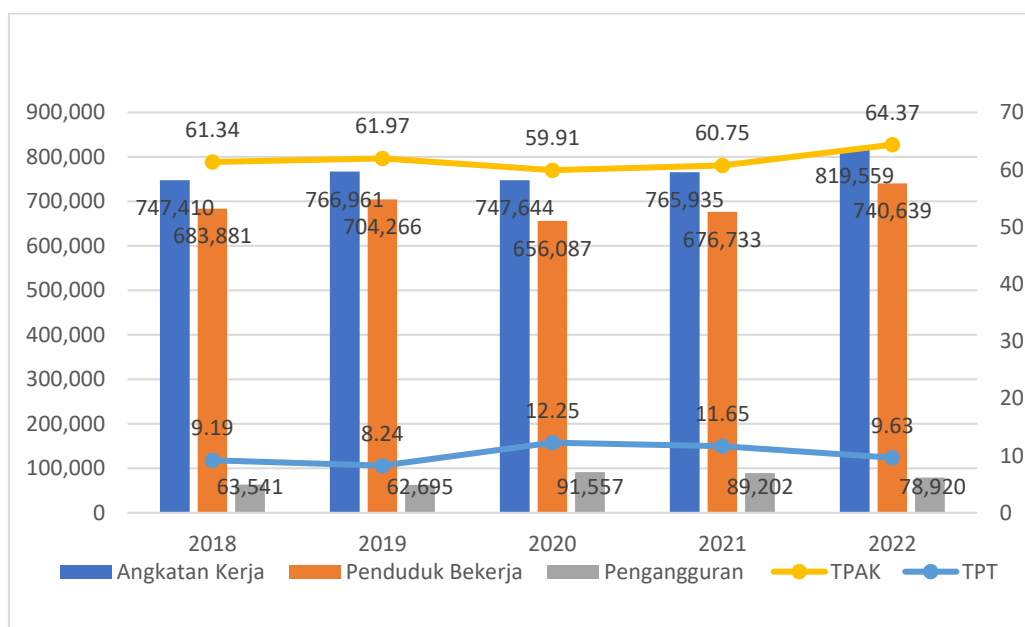
Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

2.2.2.5 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan tidak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya ekonomi diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah.

Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT), dengan kondisi selama tahun 2018- 2022 dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 2.21 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat 2018-2022



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2018-2022, diolah.

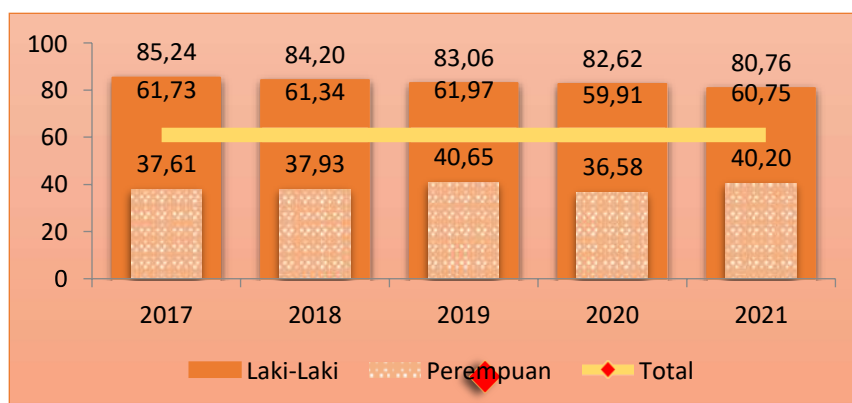
Dari gambar tersebut, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja, dari 747 ribu pada tahun 2018 menjadi 767 ribu pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 748 ribu. Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19, pada tahun 2021 angkatan kerja kembali meningkat menjadi 766 ribu dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 819 ribu.

Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Untuk melihat kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan, di antaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat berfluktuasi dari tahun 2018 – 2022, terjadi penurunan TPAK sebesar 2,06 persen di tahun 2020 menjadi 59,91 dibanding tahun 2019 dengan capaian 62,09. Hal ini terjadi akibat adanya dampak pandemic covid-19 di tahun 2020, sehingga banyak usia kerja yang terhenti bekerja atau enggan mencari pekerjaan. Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 pada tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja kembali meningkat menjadi 60,75 persen dan meningkat Kembali di tahun 2022 menjadi 64,37 persen.

Secara empiris, selalu terdapat perbedaan jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bandung Barat, TPAK laki-laki pada tahun 2021 sebesar 80,76 persen jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya 40,20 persen. Tetapi ada hal menarik dalam capaian TPAK pada tahun 2021 dibanding kondisi tahun 2020 dimana TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,86 persen, sementara TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 3,62 persen seperti pada Gambar berikut:

**Gambar 2.22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Bandung Barat 2017 - 2021**



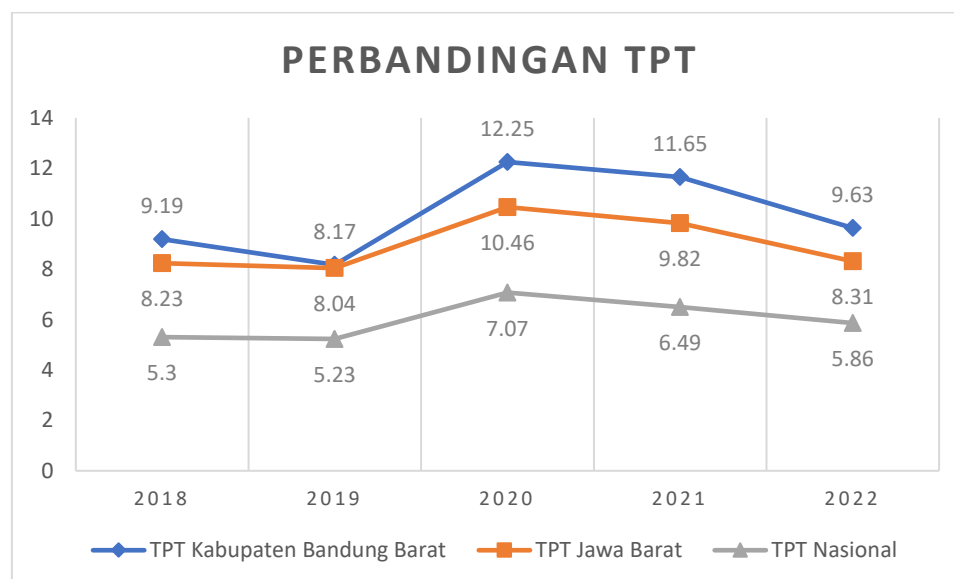
Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa peningkatan TPAK perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat terjadi karena proporsi perempuan bekerja di sector formal lebih banyak. Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, tren indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat dari 2018 sampai 2019 mengalami penurunan (Gambar 2.21) dari 9,33% menjadi 8,17%. Namun pada 2020 mengalami kenaikan yang cukup melonjak menjadi 12,25%. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terhentinya kegiatan usaha akibat pandemi cukup tinggi, namun sebagian dari mereka mencoba memasuki dunia kerja dengan mencari kerja melalui melamar pekerjaan atau coba memulai mempersiapkan usaha. Pada Tahun 2021 dan 2022 di Kabupaten Bandung Barat tingkat penganggur terbuka (TPT) kembali menurun seiring beransur- angsurnya pergerakan manusia karena pandemi mulai mereda, TPT pada tahun 2021 sebesar 11,65 persen dan tahun 2022 menjadi 9,63 persen.

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Pada tahun 2020 dan 2021 dampak pandemi COVID-19 masih memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat, hal ini terlihat dari capaian target tingkat pengangguran terbuka selalu lebih rendah dibanding target yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023. Begitupun pula kondisi tingkat pengangguran di Kab. Bandung Barat masih tinggi bila dibandingkan dengan capaian TPT Jawa Barat dan nasional. Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja, untuk lebih jelasnya digambarkan berikut:

**Gambar 2.23 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022**



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbanda, 2022

Pada skala regional Jawa Barat, pandemi COVID-19 menyebabkan angka pengangguran di Jawa Barat semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari keadaan ketenagakerjaan di 27 Kabupaten/Kota, di Jawa Barat terdapat 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang memiliki angka pengangguran lebih dari 2 (dua) digit (>10 persen) termasuk Kabupaten Bandung Barat salah satunya dan di tahun 2021 masih terdapat 13 (tiga belas) kabupaten/kota dengan angka pengangguran (>10 persen), tetapi di tahun 2022 tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung Barat turun menjadi 1 (satu) digit menjadi 9,63 persen.

2.2.2.6 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indikator pemerintahan yang baik (good governance) adalah keikutsertaan (participation) masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator/agen pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menilai penerapan (implementation) kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil.

Kelemahan pelayanan publik ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan, adapun capaian IKM tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22 Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Target	Realisasi
2018	76,86	76,23
2019	77,23	76,29
2020	78,23	80,29
2021	79,23	80,75
2022	80,23	82,39

Sumber : Survey kepuasan Masyarakat, Setda KBB, 2022.

Pada tahun 2019 capaian IKM Kabupaten Bandung Barat sebesar 76,29 dengan nilai mutu pelayanan “C” (Kurang Baik), pada tahun 2020 capaian IKM sebesar 80,29 dengan nilai mutu pelayanan “B” (Baik), guna terus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Bandung Barat peningkatan capaian target nilai interval konversi IKM tahun 2021 meningkat menjadi 80,75 dengan nilai mutu pelayanan “B” (Baik) dan tahun 2022 meningkat Kembali menjadi 82,39 dengan nilai mutu pelayanan “B” (Baik).

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Tolok ukur kinerja pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah keberhasilan pelestarian seni budaya dan peningkatan prestasi olahraga. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan dalam rangka pemajuan dan pelestarian nilai dan objek budaya lokal. Upaya dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan terhadap objek pemajuan kebudayaan, yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Data potensi keragaman seni dan budaya di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.23 Potensi Keragaman Budaya
Kabupaten Bandung Barat 2018 - 2022**

No	Seni Budaya	Jumlah Tahun					Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Seni Karawitan	95	50	50	50	48	Degung, Karawitan, Aneka Seni Sunda, Domyak, Karinding
2	Seni Teater	4	1	3	3	3	Lawak, Drama
3	Seni Pedalangan	15	6	6	6	8	Wayang Golek, Wayang Piling
4	Seni Lukis	6	-	-	6	1	-
5	Seni Pertunjukan	63	40	56	58	121	Calung, Qosidah, Singa Depok, Tagonian, Terbangsan, Calung, Kacapi, Kuda Lumping, Orkes Melayu, Reog, Kaulinan Barudak
6	Seni Tari	122	83	88	88	120	Jaipong, Pencak Silat
7	Kontemporer	28	8	8	8	1	Elektone, Organ Tunggal, Campur Sari
8	Seni Rupa	2		-	-	1	Wayang
9	Seni Sastra	4		1	1	0	-
10	Adat Budaya	-	36	40	55	55	Ritual, Upacara tradisional/adat, Cerita Rakyat, Permainan Rakyat
Jumlah		339	224	252	275	358	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2022.

Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat tiap tahunnya melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan pada tahun 2018 terdapat 339 keragaman budaya yang dilestarikan meningkat s.d tahun 2022 menjadi 358 keragaman budaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 65 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Ruang lingkup olahraga tidak hanya menyangkut olahraga prestasi tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Artinya, indikator keberhasilan tidak hanya mendasarkan pada medali sebagai ukuran keberhasilan tetapi keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, SDM atau tenaga keolahragaan yang terlibat, partisipasi masyarakat untuk berolahraga secara teratur, dan capaian prestasi olahraga.

Capaian indikator penyelenggaraan urusan olahraga di Kabupaten Bandung Barat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.24 Indikator Kinerja Keolahragaan
di Kabupaten Bandung Barat 2018 - 2022**

Uraian	Tahun					Keterangan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Klub/ Perkumpulan olahraga	399	404	411	428	431	Olahraga Prestasi, Olahraga Pelajar, Olahraga Rekreasi, Olahraga Disabilitas
Jumlah Atlet	1.389	1.678	1.984	2.475	2.542	
Jumlah Pelatih	473	487	545	572	616	
Jumlah Atlet Berprestasi	94	41	0	38	471	PORDA 2018, PON 2021, SEAGAMES 2019, POPWILDA 2019, KEJURNAS 2019, Porprov 2022, Peparda 2022
Jumlah Sarana dan Prasaran olahraga	745	1.527	2.562	2.667	2.712	Tersebar di 16 Kecamatan dengan status Milik Pribadi, Milik Desa, Milik Swasta, Milik Pemda, Milik Yayasan, Milik Sekolah Swasta, Milik Sekolah Negeri & Milik BUMN

Sumber Data : Dispora Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.

Prestasi olahraga di Kabupaten Bandung Barat didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana olahraga, pelaku olahraga yang terlibat dan klub/perkumpulan olahraga sebagai wadah untuk berlatihnya atlet dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga. Potensi pelaku olahraga Atlet dan Pelatih dari olahraga prestasi, olahraga pelajar, olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan dari sisi kuantitas selama kurun waktu 5 tahun dari 2018 - 2022 dengan jumlah atlet di tahun 2018 sebanyak 1.389 orang atlet meningkat sebesar 83 persen menjadi 2.542 atlet di tahun 2022. Hal tersebut merupakan keberhasilan pembinaan atlet di Kabupaten Bandung Barat dengan melibatkan 616 pelatih sampai dengan tahun 2022.

Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat baik berupa gedung dan lapang olahraga sebagai pusat aktifitas atlet dan masyarakat untuk melaksanakan aktifitas olahraga pada tahun 2022 terdapat 2.712 lokasi sarana dan prasarana olahraga, artinya proporsi ketersediaan sarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat per 1.000 penduduk dari total penduduk tahun 2022 sebanyak 1.846.969 jiwa adalah sebesar 0,25 persen atau setiap 1 lokasi prasarana olahraga digunakan oleh 681 orang.

Bila dilihat dari prestasi olahraga, keikutsertaan atlet-atlet Kab. Bandung Barat pada event POPDA XIII Bogor tahun 2018 dengan raihan 40 emas, 52 perak dan 111 perunggu berada pada peringkat 6 se Jawa Barat dan event PEPARDA V Bogor tahun 2018 dengan raihan prestasi 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Pada tahun 2019, 7 atlet Kab. Bandung Barat memperoleh raihan medali 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu.

Sedangkan atlet pelajar Kab. Bandung Barat pada tahun 2019 mengikuti event POPWILDA Jabar dengan raihan medali 7 emas, 7 perak dan 13 perunggu. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi covid-19, berdampak pada tidak adanya aktifitas/kejuaraan olahraga, sehingga tidak ada prestasi yang diraih oleh atlet Kab. Bandung Barat di tahun tersebut. Pada tahun 2021 melalui event PON XX Papua Kab. Bandung Barat mengirimkan 48 atlet untuk mewakili Kontingen Jawa Barat dengan raihan prestasi medali 18 emas, 12 perak dan 7 perunggu, berkontribusi untuk mengantarkan kontingen Jawa Barat menjadi juara umum PON XX Papua. Terakhir pada tahun 2022, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tuan rumah Porprov XIV Jabar tahun 2022 dengan raihan prestasi memperoleh 49 emas, 72 perak dan 104 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat dan event PEPARDA VI Bekasi tahun 2022 dengan raihan prestasi 18 emas, 25 perak dan 32 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat, baik pada urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar), urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang.

2.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Aspek pelayanan umum focus urusan wajib pelayanan dasar yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, dan sosial:

2.3.1.1 Pendidikan

Aspek penyelenggaraan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota, diantaranya: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Analisis kinerja atas layanan urusan pendidikan dilakukan terhadap indikator: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah.

Perkembangan capaian indikator aspek pelayanan umum bidang pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.25 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022**

NO	INDIKATOR PENDIDIKAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Jumlah SD/MI Thd penduduk usia SD/MI	1 : 345	1 : 208,12	1 : 204,94	1 : 204,14	1 : 217,52
2	Rasio Jml SMP/MTs Thd Penduduk Usia SMP/MTs	1 : 345	1 : 272,35	1 : 274,75	1 : 269	1 : 291,43
3	Rasio Guru SD/MI Thd Murid	1:21,48	1 : 23,01	1 : 19,61	1 : 18,86	1 : 22,13
4	Rasio Guru SMP/MTs Thd Penduduk Usia SMP/MTs				1 : 13,60	1 : 17,24
5	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7.82	8.14	8.19	8.20	8.22
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	96,16	100,20	102,77	102,99	104,84
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	101,13	102,98	100,07	91,38	93,97
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	88,34	97,74	92,93	97,69	97,91
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	98,6	79,65	80,44	76,56	75,87
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	98,96	96,46	93,39	99,66	99,09
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS	91,37	81,44	91,1	94,29	94,75
12	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,04	0,09	0,14	0,0004	0,0012
13	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTS	0,31	0,09	0,16	0,0035	0,057
14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,90	99,97	99,64	99,00	99,50
15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS	99,43	99,73	99,50	98,95	99,43
16	Angka Melanjutkan (AM) ke SMP/Mts	95,37	96,72	96,16	95,20	89,26
17	Angka Melanjutkan (AM) ke SMA/MA	95,37	77,52	78,71	83,77	116,966

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat 2022

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Murni atau APM merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, APM digunakan mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM SD di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 97,91 persen, artinya 97,91 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat.

Angka Partisipasi Sekolah atau APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100% dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100%, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah, APS SD di Kabupaten Bandung Barat lebih besar dibanding dengan APS SMP.

Angka Kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah, angka kelulusan murid SD di Kabupaten Bandung Barat sebesar 99,50 persen ini lebih besar bila dibanding dengan angka kelulusan murid SMP sebesar 99,43.

Indikator lain yang juga relevan menggambarkan kondisi pelayanan bidang pendidikan adalah rasio guru dan murid. Perbandingan jumlah murid dan guru sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bandung Barat berada pada kisaran 19-23 murid/guru. Ruang Kelas sekolah sebagai infrastruktur penunjang pelayanan pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan peningkatan baik dilihat dari jumlah ruang kelas maupun kondisi ruang kelas dengan kondisi baik. Ruang Kelas SD dengan kondisi baik di tahun 2022 sebanyak 3.341 ruang kelas dari total 4.891 ruang kelas, dan ruang kelas SMP dengan kondisi baik di tahun 2022 sebanyak 1.278 ruang kelas dari total 1.342 ruang kelas SMP, untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.26 Kondisi Ruang Kelas SD
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Kondisi Ruang Kelas				Jumlah Ruang Kelas SDN
	Baik	Ringan	Sedang	Berat	
2018	743	3.316	-	426	4.485
2019	550	3.121	-	809	4.480
2020	177	3.937	-	555	4.669
2021	4.350	532	-	-	4.882
2022	3.341	1550	-	0	4.891

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Bandung Barat, 2022

**Tabel 2.27 Kondisi Ruang Kelas SMP
Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Kondisi Ruang Kelas				Jumlah Ruang Kelas SMPN
	Baik	Ringan	Sedang	Berat	
2018	1.036	143	-	26	1.205
2019	674	521	-	32	1.227
2020	580	524	-	70	1.174
2021	1.268	62	-	-	1.330
2022	1.278	64	-	-	1.342

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Bandung Barat 2022

2.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan yang dimiliki seseorang menggambarkan kualitas manusianya. Pemerintah kabupaten Bandung Barat terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program- program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indikator Umur Harapan Hidup, Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Ibu per 100.000 ibu melahirkan serta rasio ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Indikator umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat tergantung terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB, hal ini relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita.

**Tabel 2.28 Data Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)
di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 – 2022**

No	INDIKATOR	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Angka Kematian Bayi	5/1.000 Kelahiran Hidup	138/29828 = 9,1/1000 KH Kelahiran Hidup	129/30841 = 4,18/1000 KH Kelahiran Hidup	106/26454 4,0/1000 KH Kelahiran Hidup	51/31160 1,6/1000 KH Kelahiran Hidup
2	Angka Kematian Ibu	47 Ibu / 29.828 Bayi Lahir Hidup	43/32718= 145/1000 KH Bayi Lahir Hidup	38/32383 = 117/1000 KH Bayi Lahir Hidup	47/29895= 157/1000 KH Bayi Lahir Hidup	21/32718= 64/10000 KH Bayi Lahir Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan, Kab. Bandung Barat, 2022

AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Bandung Barat semakin menurun dari tahun 2019 sebesar 9,1 / 1.000 KH, menjadi 4,18/1.000 KH dan tahun 2022 sebesar 1,6 / 1.000 KH, hal ini menunjukkan semakin baiknya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui pelaksanaan fasilitasi layanan dan advokasi kesehatan ibu hamil, pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan dan layanan dan penanganan komplikasi neonatal dini dan layanan neonatal Esensial. Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energy dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan underweight adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U), dengan kondisi status gizi balita di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.29 Kondisi Status Gizi Balita
Berdasarkan Indikator BB/U Tahun 2018 – 2022**

No	STATUS GIZI	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Gizi Sangat Kurang	0,57%	442 (0,36%)	1.546 (1,34%)	1.048 (0,99%)	0.49%
2.	Gizi Kurang	4,24%	6.130 (4,99%)	7.230 (6,27%)	5.843 (5,54%)	4.12%
3.	Gizi Baik	93,25%	111.964 (91,23%)	100.465 (87,1%)	93.351 (88,44%)	85.72%
4.	Gizi Lebih	1,56%	4.191 (3,41%)	6.090 (5,28%)	5.307 (5,03%)	9.68%

Sumber Data : Hasil BPB Dinas Kesehatan, 2022

Kondisi status gizi balita sangat kurang (Gizi Buruk) di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebesar 0,36 persen, pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,34 persen dan turun kembali di angka 0,99 persen atau <1%. Perlu menjadi perhatian bahwa angka gizi buruk s.d tahun 2021 hampir mencapai angka 1 persen, perlu adanya peningkatan layanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan minimal.

Kondisi gizi balita erat kaitannya dengan stunting yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting, sebagaimana diamankan pada Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kondisi capaian percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung Barat walaupun terus mengalami penurunan tetapi masih relative tinggi s.d dengan tahun 2022 Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah sebesar 27,30% sedangkan Prevalensi Stunting berdasarkan Bulan Penimbangan Balita (e-PPGBM) adalah sebesar 8,15%, dengan rincian capaian prevelansi stunting dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.30 Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)
dan berdasarkan Bulan Penimbangan Balita (e-PPGBM)
Di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2022**

No	JENIS IMUNISASI	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1	Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)	30,80	-	29,60	27,30
2	Prevalensi Stunting berdasarkan Bulan Penimbangan Balita (e-PPGBM)	7,60	13,76	9,54	8,15

Sumber : Dinas Kesehatan, Kab. Bandung Barat, 2022

Hal lain yang penting dalam kesehatan masyarakat adalah imunisasi. Imunisasi adalah proses untuk membuat imun seseorang menjadi kebal terhadap suatu penyakit. Pencapaian Imunisasi di Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 sudah cukup baik, rata-rata sudah mencapai angka di atas 85 - 90 persen. Kondisi ini sudah memenuhi *herd immunity*, namun kondisi akan menjadi lebih baik apabila seluruh bayi terimunisasi.

**Tabel 2.31 Data Pelayanan Imunisasi
Di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 – 2022**

No	JENIS IMUNISASI	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Imunisasi BCG	99	98	90	89	
2	Imunisasi DPT – HB 3	97	98	83	86	95
3	Campak	97	96	88	67	95
4	Polio IV	97	97	88	89	93
5	TT2 Ibu Hamil	80	79	83	83	83

Sumber : Dinas Kesehatan, Kab. Bandung Barat, 2022

Salah satu faktor rendahnya pencapaian angka harapan hidup adalah tingkat kematian bayi, dan salah satu tingginya angka kematian bayi adalah penolong saat persalinan. Pada golongan pengeluaran atas, semua ibu telah melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan. Golongan pengeluaran menengah, ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 97,20%. Hal yang masih mengkhawatirkan adalah golongan pengeluaran bawah ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan adalah sebanyak 80,59% dan yang ditolong tenaga kesehatan sebanyak 86,82%.

**Tabel 2.32 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang pernah
Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan,
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022**

Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan	Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	80.59	86.82
40 Persen Tengah	97.20	97.20
20 Persen Teratas	100.00	100.00
Pendidikan Tertinggi		
SD ke bawah	63.19	73.42
SMP ke atas	92.64	95.03
Kabupaten Bandung Barat	87.60	91.33

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, diolah

Sejak diluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional mulai Januari 2014, keikutsertaan masyarakat cukup banyak dan tentu memiliki kegunaan yang sangat berarti, terutama untuk golongan menengah bawah. Pada kelompok pengeluaran terbawah 21,71% telah menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, sementara untuk golongan menengah sebanyak 27,95%. Pada golongan pengeluaran atas penggunaannya 30,80% dan selebihnya menggunakan dana mandiri. Dalam memenuhi jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan bantuan keuangan berupa pemberian bantuan iuran kepada peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum tercakup oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional serta menganggarkan jaminan Kesehatan masyarakat melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda dan Jampersal melalui APBD Kabupaten Bandung Barat.

**Tabel 2.33 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pasien Masyarakat Miskindi Kabupaten Bandung Barat 2019 - 2022**

Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda KBB	66.174	48.847	54.018	56.502
Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN	627.429	675.249	558.139	713.690
Penerima Bantuan Jampersal	3.076	1.749	860	0
Jumlah	696.679	725.845	613.017	770.192

Sumber: Dinas Kesehatan KBB, 2022.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan hal yang sangat penting, terutama ketersediaan sarana kesehatan di setiap desa seperti adanya Puskesmas, Posyandu dan Klinik dan fasilitas layanan kesehatan lainnya, yang dapat membantu akses pelayanan masyarakat dengan jarak tempuh yang relatif lebih dekat. Gambaran kondisi layanan bidang kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersedia. Fasilitas kesehatan tersebut mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Posyandu. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar pada tahun 2019 sebesar 75 persen, pada tahun 2020 meningkat menjadi 79 persen, pada tahun 2021 menjadi 78,89 persen dan tahun 2022 sebesar 88,86 persen. Jumlah fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.34 Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**

Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan	Jumlah / tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Sakit	8	8	8	9	9
Puskesmas	32	32	32	32	32
Pustu	57	57	38	38	45
Poliklinik	134	110	67	75	71
Posyandu	1.485	1.485	1.780	1.780	2.330
Dokter	105	149	146	286	266
Tenaga Medis	817	1.295	1.325	2.194	2.228

Sumber: Dinas Kesehatan KBB, 2022

Secara keseluruhan capaian indikator urusan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 - 2021, dengan tingkat capaian berfluktuasi adanya peningkatan dan penurunan baik berdasarkan cakupan layanan kesehatan maupun berdasarkan jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

**Tabel 2.35 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019- 2022**

Indikator	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Bayi	9,1/1.000 KH	4,18/1.000 KH	4,0/1.000 KH	1,6/1.000 KH
Angka Kematian Ibu	145/1.000 KH	117/1.000 KH	157/1.000 KH	64/1.000 KH
Status Gizi Sangat Kurang	0,36%	1,34%	0,99%	0,49%
Cakupan imunisasi	93,6%	86,4%	82,8%	84%
Cakupan pelayanan kesehatan Ibu	-	95%	99%	99%
Cakupan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan	-	56%	65%	67%
Cakupan melahirkan di fasilitas kesehatan	-	87,60	88,48	89,59
Cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan	-	91,33	90,08	99,55
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	-	725.845	613.017	713.690
Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar	75%	97%	99,56%	88,86%
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,005	0,004	0,005	0,005
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu	0,11	0,8	0,8	0,8
Rasio posyandu per satuan balita	10,21	12,07	11,70	11,77
Cakupan Puskesmas	2%	2%	2%	2%
Cakupan Puskesmas Pembantu	34,55	23,03	23,03	23,21
Rasio dokter per satuan penduduk	0,09	0,08	0,16	0,14

Rasio tenaga medis	0,74	0,74	1,21	1,20
Presentase Desa Siaga Aktif	-	44%	51%	56%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan KBB, 2022 diolah

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep.160-DBMSDAP/2012 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten bahwa panjang jalan Kabupaten Bandung Barat adalah sepanjang 518,070 Km yang tersebar di 113 ruas jalan. Pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.219-DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten bahwa panjang jalan Kabupaten Bandung Barat berubah menjadi 525,57 Km yang tersebar di 108 ruas jalan hal ini berarti terdapat peningkatan sepanjang 7,500 Km. Berdasarkan kondisinya, jaringan jalan terbagi menjadi 4 (empat) yakni kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat. Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Urusan PUTR
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Indikator	Capaian Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Total Panjang jalan kabupaten (Km)	525,57	525,57	525,57	525,57
Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)	342,615	318,617	332,375	372,682
Presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	65,19	60,62	63,24	70,91
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,00030	0,00029	0,00029	0,00028
Jumlah jaringan Irigasi	435	435	435	435
Potensi area sawah yang terairi (ha)	34.245	36.232	36.232	
Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	68,81	69,82	69,26	69,48
Rasio jaringan irigasi	1,27	1,20	1,20	
Persentase tersedianya akses air minum yang memadai	62,75	65,50	66,90	65,50
Persentase cakupan pelayanan air limbah domestik	30	30	61,50	61,18
Presentase bangunan publik yang memadai	44	50	99,48	50
Implementasi dokumen perencanaan pembangunan di kawasan pusat pertumbuhan	6	3	13	19
Persentase pembangunan di wilayah desa	0	30	96	100

Sumber: Dinas PUTR, diolah Bappelitbangda, 2022.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat tidak serta merta menambah kondisi panjang jalan, sehingga rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk semakin menurun. Sedangkan kondisi kemantapan jalan dengan kondisi baik terus diupayakan oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 sebesar 65,19 persen jalan dengan kondisi baik, pada tahun 2020 pada saat terjadi dampak pandemi covid-19 jalan dengan kondisi baik menurun menjadi 60,62 persen.

Hal ini terjadi karena adanya refofusing anggaran infrastruktur untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi, tetapi pada tahun 2021 kondisi jalan baik meningkat kembali menjadi 63,24 persen. Sama halnya dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 68,81 persen di tahun 2019 menjadi 68,42 persen di tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 69,48 persen.

Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat sebanyak 435 Daerah Irigasi, dengan kondisi infrastruktur jaringan irigasi dengan kondisi baik semakin meningkat di tahun 2021 sebesar 69,26 persen dengan cakupan potensi area sawah yang terairi adalah 36.232 ha. Infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum merupakan salah satu infrastruktur pelayanan dasar yang terus dibangun. Cakupan pelayanan air minum terus meningkat, dimana terjadi kenaikan pada tahun 2019 sebesar 62,75 persen, meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 65,50 persen, tahun 2021 menjadi 66,90 persen dan tahun 2022 menurun menjadi 65,50%.

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bandung Barat dapat diukur berdasarkan indikator: penataan wilayah kawasan kumuh, penyediaan air bersih dan air minum layak, penyediaan hunian layak bagi masyarakat dan penangan rumah tidak layak huni. Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi wilayah perkotaan, tidak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat, jumlah kawasan kumuh tersebar di beberapa kecamatan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.37 Jumlah Kawasan Kumuh
di Kab. Bandung Barat 2019 - 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kawasan Kumuh			
		2019	2020	2021	2022
1	Rongga	4	4	-	
2	Gununghalu	6	6	-	
3	Sindangkerta	6	6	-	
4	Cililin	8	8	1	5
5	Cihampelas	6	6	-	1
6	Cipongkor	8	8	-	
7	Batujajar	6	6	-	
8	Saguling	3	3	-	
9	Cipatat	3	3	-	
10	Padalarang	4	66	3	9
11	Ngamprah	6	14	3	6
12	Parongpong	5	5	-	8
13	Lembang	5	22	2	9
14	Cisarua	8	8	-	
15	Cikalongwetan	8	8	-	
16	Cipeundeuy	3	3	-	
Jumlah		89	176	8	38

Sumber: Satu Data Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2022.

Jumlah lokasi lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bandung Barat, semakin berkurang, yang semula di tahun 2019 berjumlah 176 lokasi pada tahun 2021 berkurang menjadi 38 lokasi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan penataan wilayah kumuh yang menjadi kewenangan Kab/Kota di bawah luasan 10 ha, dimana capaian tahun 2019 terealisasi di 20 lokasi dan pada tahun 2020 terealisasi di 8 lokasi sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini tidak dilaksanakan.

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, ketersediaan sumber air bersih di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren positif dengan cakupan 89 persen rumah tangga di kabupaten Bandung Barat telah menggunakan sumber air bersih untuk mencukupi kebutuhannya. Pengguna Air Bersih dan Air minum Layak di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 tersebar di seluruh kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38 Tabel Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum

No	Kecamatan	Air dalam kemasan & Ledeng	Pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Tidak bersih	Jumlah
1	Rongga	342	1.254	4.218	3.876	8.550	18.240
2	Gununghalu	1.040	780	8.320	2.470	10.790	23.400
3	Sindangkerta	535	1.712	3.852	1.819	11.235	19.153
4	Cililin	4.796	5.559	7.412	3.270	2.943	23.980
5	Cihampelas	8.700	8.265	13.920	435	580	31.900
6	Cipongkor	1.036	5.476	16.724	1.480	4.884	29.600
7	Batujajar	16.080	4.920	3.600	135	465	25.200
8	Saguling	6.656	960	1.728	192	64	9.600
9	Cipatat	19.872	2.940	9.555	5.733	120	38.220
10	Padalarang	25.604	8.477	10.726	6.055	1.038	51.900
11	Ngamprah	27.664	9.646	4.186	8.008	3.276	52.780
12	Parongpong	6.840	8.664	3.496	12.160	2.128	33.288
13	Lembang	19.729	724	12.308	26.245	543	59.549
14	Cisarua	2.415	231	115	18.170	919	21.850
15	Cikalongwetan	4.455	945	12.015	15.120	2.565	35.100
16	Cipeundeuy	125	2.000	16.875	3.000	3000	25.000
Kab. Bandung Barat		145.889	62.553	129.050	108.168	53.100	498.760

Sumber Data : Dokumen Analisis Data Makro Sosial, Bappelitbangda 2022, diolah.

Penyediaan air bersih di Kab. Bandung Barat baru terpenuhi sebesar 63,26 persen rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih untuk mencukupi kebutuhannya sedangkan rasio rumah layak huni, tercatat sampai dengan Tahun 2022 baru sebesar 71,62 persen rumah yang sudah layak huni

**Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Jumlah areal penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha	%	20	8	0	33,25
Jumlah lokasi air bersih dan sanitasi terbangun	Lokasi	15	12	-	16
Jumlah Peningkatan PSU perumahan formal	Jumlah perumahan	5	1	0	12
Persentase Penyediaan hunian layak bagi masyarakat	%	39,55	71,62	0	0

Sumber: Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.1.5 Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pembangunan kawasan tak terlepas dari kebijakan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Pembangunan kawasan tidak dapat dilepaskan dari K3 (ketertiban, kebersihan, dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat, dan lainnya.

Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain. Selama kurun waktu tahun 2019 -2021 di Kabupaten Bandung Barat telah terjadi beberapa jenis gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan Perda K3 dalam rangka perlindungan masyarakat berupa: penegakan tipiring terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan, penertiban PKL, penertiban warung remang-remang/PSK, penertiban IMB, penertiban gepeng/anak jalanan dan penertiban reklame tidak berijin.

Persentase Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Bandung Barat, semakin meningkat dengan capaian di tahun 2019 sebesar 78 persen, menurun di tahun 2020 karena adanya pembatasan akibat pandemi covid-19, tetapi meningkat kembali di tahun 2021 dengan capaian 97,91 persen dan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen.

Dalam melaksanakan perlindungan kepada masyarakat terkait penanganan bencana, di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2021 tercatat sebanyak 236 kasus kejadian bencana, kejadian tanah longsor dengan intensitas terbanyak yaitu 171 kasus, diikuti kebakaran dengan 139 kasus, angin putting beliung sebanyak 27 kasus, kebakaran sebanyak 55 kasus dan banjir bandang sebanyak 15 kasus. Bencana tersebut mengakibatkan 3 orang korban jiwa, 4 orang korban luka dan mengakibatkan sekitar 278 kerusakan bangunan. Dalam hal perlindungan terhadap bencana kebakaran, berdasarkan Permen PU RI Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di WMK. dari target < 30 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydran, dan peran serta masyarakat/satwankar.

Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat dari tahun 2019 sebesar 44 persen, menjadi 73 persen di tahun 2020 dan pada tahun 2021 dengan capaian 77 persen, waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran semakin baik untuk meminimalisir korban jiwa maupun korban materi. Berikut capaian indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
%e Penegakan Perda % Perkada	%	78	58,47	97,91	100
Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	%	44	73	77	77
Persentase respon penanganan bencana	%	95	100	N/A	N/A
Meningkatnya Nilai Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	N/A	N/A	Sedang	Sedang

Sumber: Dinas BPBD dan Satpol PP, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.1.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Kabupaten Bandung Barat yaitu penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilaksanakan melalui bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Untuk melihat jumlah dan peran aktif pemerintah dalam upaya penanganan PPKS disajikan pada di Kabupaten Bandung Barat tahun 2021, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.41 Data Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2022**

No. Kec.	Kecamatan	PEMERLU PPelayanan KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)								
		Anak Terlantar	Lansia Terlantar	Penyandang Disabilitas	Tuna Susila	Penge mis	Gelandangan /pemulung	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	Remaja Putus Sekolah	Keluarga Rentan Ekonomi
1	Rongga	10	80	293						1
2	Gunung Halu	24	110	358			1			
3	Sindangkerta	24	89	283					1	2
4	Cililin	12	169	448			4		7	4
5	Cihampelas	18	114	489			2			1
6	Cipongkor	60	114	303			1			4
7	Batujajar	4	154	315			3			2
8	Saguling	9	52	89						
9	Cipatat	34	176	573			1			4
10	Padalarang	45	144	555		1	1			1
11	Ngamprah	24	141	416			7		4	1
12	Parongpong	23	59	184						
13	Lembang	47	93	537						2
14	Cisarua	12	102	256			3			2
15	CikalongWetan	11	98	422		1	11	1	1	5
16	Cipeundeuy	10	69	267	2		5		5	1
JUMLAH		367	1,764	5,788	2	2	39	1	18	30

Sumber: Satu Data Dinas Sosial, diolah Bappelitbangda, 2022

Pada tahun 2020 persentase angka PPKS yang tertangani sebesar 51,93 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 47,31 persen. Untuk mengatasi masalah PPKS tersebut, di Kabupaten Bandung Barat dengan memberdayakan organisasi/lembaga sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 110 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 60 Lembaga, Anggota Karang Taruna sebanyak 11.437 orang dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Penyuluh Sosial, juga terdapat 54 sarana rehabilitasi sosial yaitu Panti Sosial Asuhan Anak sebesar 42 unit, Panti Jompo sebanyak 9 unit dan Panti Sosial Penyandang cacat sebanyak 3 unit.

Adapun rekapitulasi capaian indikator penyelenggaraan urusan sosial Kabupaten Bandung Barat, tersaji pada tabel berikut dimana capaian 2019 dan 2020 yang tidak ada realisasinya (N/A) mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD.

**Tabel 2.42 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	47,31	51,93	71	72
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial	%	N/A	N/A	38	16,2
Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	N/A	N/A	36	5,34
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	100	100	0	100
Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	%	N/A	N/A	100	100
Persentase tertanganinya warganegara migran korban tindak kekerasan	%	N/A	N/A	0	0

Sumber: Dinas Sosial, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan seperti Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Angka Pengangguran merupakan data dan informasi mengenai ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pembangunan dan pemecahan masalah urusan tenaga kerja.

Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan pada tahun 2019 masih tercatat dengan adanya pelaksanaan Job Fair, pada tahun 2020 dan 2021, indikator besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami penurunan hal ini karena adanya dampak pandemi covid-19 pada tahun 2021 dan masih terasadampaknya di tahun 2021 serta walaupun banyak warga yang mengajukan kartu kuning tetapi tidak banyak perusahaan yang membuka lowongan kerja atau bahkan walupun telah ditempatkan tetapi tidak melapor ke Disnakertras. Berikut capaian indikator penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 - 2021.

**Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 - 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Jumlah Angkatan Kerja	orang	741 ribu	748 ribu	766 ribu	819 ribu
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	%	62,09	59,91	60,75	64,37
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,17	12,25	11,65	9,63
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	20	42,86	60
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	N/A	N/A	100	116,67
Besaran pencari kerja yang ditempatkan	%	100	N/A	60	68
Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja	%	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program- program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat menjadi indikator untuk mengetahui peran aktif perempuan, sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik maupun kegiatan lain terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah perempuan yang bekerja sebagai PNS di wilayah Kabupaten Bandung Barat menurun jumlahnya dari 5.127 orang tahun 2019 menjadi 3.684 orang pada tahun 2022.

Jumlah organisasi perempuan meningkat menjadi 34 organisasi, jumlah anggota PEKKA pun menunjukkan kenaikan dari 1.702 orang tahun 2019 menjadi 3.174 orang pada tahun 2021, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Data Eksisting Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Peran Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bandung Barat

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perempuan Yang Bekerja Sebagai PNS di wilayah Kabupaten Bandung Barat	5.082	4.801	4.316	4.066	3.684
Jumlah Perempuan Yang Bekerja Sebagai Karyawan Swasta	25.867	23.337	26.897	25.794	24.744
Jumlah Organisasi Perempuan	27	27	27	34	34
Jumlah anggota PEKKA	3.159	3.174	3.438	3.468	3.483
Forum Anak Daerah	-	-	35	36	36

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Bandung Barat 2022

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Pada tahun 2022 nilai IDG Kabupaten Bandung Barat sebesar 65,83 poin angka ini meningkat dari kondisi tahun 2018 yang masih berada pada angka 53,97 poin artinya terjadi peningkatan aktivitas perempuan dalam ekonomi dan politik dalam satu tahun terakhir. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2022 nilai IPG Kabupaten Bandung Barat sebesar 79,82 poin angka ini meningkat sebesar 0,64 poin dari tahun 2018 yang masih berada pada angka 79,18 poin.

**Tabel 2.45 Data Kejadian Kekerasan terhadap Anak, Perempuan dan KDRT
Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2022**

Uraian	2019	2020	2021	2022	Penyelesaian
Kekerasan Terhadap Anak	8	21	16	22	100%
Kekerasan terhadap Perempuan	6	1	5	4	100%
Kekerasan dalam rumah tangga	1	0	3	3	100%

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2022

Dalam rangka kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga kasusnya meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2022, dengan penanganan dapat diselesaikan semua atau 100%. Kedepannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan kabupaten perlu lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat dengan cepat ditangani dan pelaku tindak kekerasan dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera.

Untuk lebih jelasnya capaian indikator penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disajikan pada tabel berikut, dengan catatan capaian 2019 dan 2020 yang tidak tersisi merupakan indikator lama sebelum dilakukan Perubahan pada RPJMD.

Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Indeks Pembangunan Gender	%	65,88	64,31	65,11	79,82
Indeks Pemberdayaan Gender	%	79,07	79,39	79,44	65,83
Kabupaten/Kota Layak Anak	Predikat	Non Katagori	Pratama	Madya	Non Kategori
Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan ekonomi	%	82	82	82,5	84
Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	N/A	N/A	39	39
Persentase Data dan profil gender dan anak Hasil analisis	%	N/A	N/A	85	87
Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	100	100
Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	%	N/A	N/A	67	100
% penanganan korban kekerasan terhadap anak	%	100	100	100	100

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2022

2.3.2.3 Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bandung Barat. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Secara umum, ada 9 (sembilan) kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Skor PPH Kab. Bandung Barat pada tahun 2021 adalah 79,1 poin dan turun di tahun 2022 menjadi 76,8 Kelompok padi-padian terutama beras (25,0) dan pangan hewani (20,3) masih mendominasi konsumsi masyarakat Kab. Bandung Barat jika dibandingkan dengan kelompok ubi, sayur dan buah-buahan. Capaian pola pangan harapan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.47 Pola Pangan Harapan (PPH)
Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2019-2022**

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2019	Skor PPH Tahun 2020	Skor PPH Tahun 2021	Skor PPH Tahun 2022
1.	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	1,2	1,4	1,8	1,7
3.	Pangan Hewani	21,2	19,7	21,8	20,3
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5	5,0	5,0
5.	Buah/biji berminyak	0,0	0,1	0,1	0,1
6.	Kacang-kacangan	7,5	6,8	5,3	4,8
7.	Gula	1,7	1,1	1,2	1,1
8.	Sayuran dan buah	23,0	20,2	18,7	18,8
9.	Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah		84,6	79,3	79,1	76,8

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Belum ditetapkan Perda tentang cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat masih dalam bentuk Raperda, menyebabkan capaian indikator cadangan pangan daerah belum terealisasi dari tahun 2019 – 2021. Dalam rangka penanganan daerah rawan pangan, berdasarkan Analisis FSVA di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 terdapat 2 desa yang teridentifikasi daerah sangat rawan pangan, pada tahun 2020 tidak ada desa yang masuk katagori daerah sangat rawan pangan dan pada tahun 2021 ada 1 desa yang termasuk katagori tersebut

**Tabel 2.48 Desa Dan Penduduk Sangat Rawan Pangan, Rawan Pangan Dan Tahan Pangan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Desa dan Penduduk Sangat Rawan Pangan						
1	Jumlah Desa	1 Desa	2 Desa	0	1 Desa	1 Desa
2	Persentase Penduduk Sangat Rawan Pangan	0,6%	1,21%	0%	0,6%	0,6%
Desa dan Penduduk Rawan Pangan						
1	Jumlah Desa	35 Desa	49 Desa	37 Desa	84 Desa	45 Desa
2	Persentase Penduduk Rawan Pangan	21,2%	30,9%	22,40%	50,30%	27,28%
Desa dan Penduduk Tahan Pangan						
1	Jumlah Desa	129 Desa	114 Desa	128 Desa	81 Desa	120 Desa
2	Persentase Penduduk Tahan Pangan	78,2%	60,1%	77,6%	49,09%	72,72%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022.

Capaian indikator penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Jumlah sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	sertifikat	38	48	5	4
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	0	0	0	10
Ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan	Laporan	N/A	N/A	12	12
Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Point	88,73	83,03	66,78	83,14
Penurunan Jumlah desa rawan pangan	Desa	9	2	0	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diolah Bappelitbangda, 2022

2.3.2.4 Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, dalam perubahan RPJMD mengalami penyesuaian indikator dan target, dengan capaian indikator s.d tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Jumlah dokumen penetapan daftar masyarakat penerima	dokumen	N/A	N/A	0	0
Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong	dokumen	N/A	N/A	100	0
Terkoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan penatagunaan tanah dan konsolidasi tanah	Kegiatan	N/A	N/A	100	0
Jumlah rekomendasi pengelolaan izin lokasi	rekomen	N/A	N/A	0	0
Tersedia data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, tersinkronisasikan untuk aset akses reforma agraria	dokumen	N/A	N/A	0	0
Penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	60	20	66,60	33,33

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, diolah Bappelitbangda, 2022.

Persentase penyelesaian sengketa/konflik tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 sebanyak 6 lokasi di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah dan Kp. Cikamuning Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang dan pada tahun 2022 dengan capaian 33,33%.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain. RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%. Persentase RTH di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan. Tahun 2019-2021 persentase RTH mencapai angka 6,86%. Kondisi tersebut belum memenuhi besaran target RTH sesuai dengan amanah undang-undang yaitu sebesar 30%. Seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2021, terdapat perubahan indikator kinerja terkait ruang terbuka hijau yang semula menjadi kewenangan Dinas PUPR mulai tahun 2022 pengelolaan RTH menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup

**Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Indeks Kualitas lingkungan Hidup	Indeks	47	47,05	50,27	63,03
Tonase sampah terangkut ke TPA	Ton	53.537	58.891	62.386	55.667
Persentase titik sampling air yang status mutunya baik	%	29,4	40	0	6
Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen pendukung perencanaan LH	%	N/A	N/A	60	80
Bertambahnya usaha dan atau kegiatan yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan pada tahun ke - n	Industri	N/A	N/A	30	26
Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH dibagi jumlah usaha yang dilakukan pemeriksaan pada tahun ke-n	%	N/A	N/A	100	88,24
Meningkatnya gerakan peduli sungai / situ / air tanah	jumlah lokasi	N/A	N/A	2	1
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH pada tahun ke-n	sekolah	N/A	N/A	20	15
RTH taman yang terawat	Lokasi	22	23	0	26
Cakupan luasan taman dan RTH	%			6,86	72,22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2022.

Indikator urusan lingkungan hidup yang mengalami peningkatan diantaranya, indeks kualitas lingkungan hidup sampai dengan tahun 2022 capaian sebesar 63,03 poin. Sedangkan dalam rangka penanganan sampah di Kabupaten Bandung Barat kapasitas sampah yang terangkut ke TPA capaiannya menurun pada tahun 2021 sebanyak 62.386 ton menjadi 55.667 ton di tahun 2022.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib yang sangat terkait langsung dengan pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintahan. Kepemilikan dokumen kependudukan dan dokumen catatan sipil sangat penting terutama pada kalangan tertentu yang mewajibkan dokumen-dokumen tersebut sebagai syarat program.

Pada tahun 2019 persentase penduduk memiliki KTP elektronik sebesar 90 persen meningkat menjadi 98 persen di tahun 2022. begitu juga dengan indikator lain presentase penduduk ber-akta kelahiran, persentase anak yang memiliki KIA. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, anak yang telah mempunyai KIA. Peningkatan indikator kependudukan yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte kematian menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan.

**Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Persentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga	%	79	57	40	84
Persentase Penduduk Memiliki KTP-EI	%	90	99	98	98
Persentase Anak Ber KIA	%	14	18,1	30	24
persentase penduduk ber Akta kelahiran	%	32	32,5	32	39
persentase penerbitan Akta kematian	%	28	46	30	100
Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun	%	N/A	N/A	96	89
Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	%	15	26,66	36	57
Profil Kependudukan yang terselesaikan	Dok.	N/A	N/A	0	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat pedesaan, dibutuhkan perangkat pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat, mulai dari tingkat RT sampai desa. Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 165 desa, 2.416 RW dan 9.009 RT yang tersebar di 16 kecamatan. Untuk indikator Lembaga Kemasyarakatan Aktif, terjadi peningkatan di tahun 2022 menjadi 91,82 persen dibanding tahun 2019 sebesar 49,7 persen.

**Tabel 2.53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Persentase Desa Mandiri	%	-	-	24	37,58
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	49,7	60,4	82,34	91,82
Persentase Desa Cepat Berkembang	%	-	-	0	0
Jumlah Desa Persiapan	Desa	-	-	0	0
Jumlah Kerjasama Desa yg Terasilitasi	Desa	-	-	0	21

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, diolah Bappelitbangda, 2022.

Hal yang tak boleh dilupakan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah pergerakan ekonomi desa. Kabupaten Bandung Barat memiliki lembaga ekonomi pedesaan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Jumlah BUMDes Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebanyak 40 unit meningkat di tahun 2021 menjadi 164 unit, hampir diseluruh desa telah memiliki BUMDes kecuali di Desa Cangkoran Kec. Batujajar.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik, pada tahun 2021 di Kabupaten Bandung Barat terdapat 40 Desa Mandiri atau 24 persen dan meningkat di tahun 2022 menjadi 37,58 persen

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan KB Aktif Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebesar 73,4 persen menurun menjadi 72,71 persen pada tahun 2022, hal ini diperlukan dalam pengendalian penduduk di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 34.378 orang KB baru 466.534 orang KB Aktif dan 166.124 orang KB Mandiri.

Berikut indikator penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB, dengan indikator pada tahun 2021 dan 2022 merupakan hasil penyesuaian pada perubahan RPJMD.

Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	-	-	0	0
Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	%	-	-	5,11	6,78
Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/ Kelurahan	%	-	-	70	75
Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di evaluasi	%	-	-	100	100
Persentase KB Aktif	%	73,4	79,86	73,85	72,71
Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	-	-	22,08	21,48
Persentase UNMETNEED	%	-	-	14,33	15,23
Cakupan kelompok kegiatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Sejahtera	%	-	-	40	50

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2022.

Dalam rangka Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Sejahtera, Kondisi Keluarga di Kabupaten Bandung Barat dari total jumlah Kepala keluarga sebanyak 524.433 KK terjadi penurunan kondisi keluarga dengan status Pra sejahtera pada tahun 2020 sebanyak 45.047 KK berkeurang menjadi 30.314 KK pada tahun 2021 sedangkan di tahun 2022 tidak dilaksanakan pendataan keluarga.

**Tabel 2.55 Kondisi Keluarga
di Kabupaten Bandung Barat**

Tahun	Data Kondisi Keluarga		Jumlah KK
	Pra KS	KS I	
2019	46.104	121.492	504.456
2020	45.074	122.623	510.965
2021	30.314	126.543	524.433
2022	30.168	129.421	523.873

Sumber: DP2KBP3A, 2022.

2.3.2.9 Perhubungan

Kabupaten Bandung Barat berada pada posisi yang sangat strategis, sehingga memerlukan pengelolaan pada urusan perhubungan yang baik. Untuk mendukung aksesibilitas barang dan orang di dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang menjadi urusan perhubungan diantaranya sarana angkutan darat, ASDP, terminal, dermaga. Secara umum indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi darat	Penumpang	1.280.542	598.435	746.618	577.299
Jumlah Angkutan yang berkeselamatan	unit	18.623	16.067	16.391	16.600
Jumlah ruas jalan yang berkeselamatan	ruas	-	-	11	7
Jumlah Pelayanan angkutan darat yang beroperasi wilayah Kabupaten Bandung Barat	trayek	17	9	12	19
Jumlah angkutan sungai danau dan penyeberangan yang terkelola	unit	244	196	165	154
Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi ASDP	Penumpang	7.890	6.858	90.819	13.460

Sumber: Dinas Perhubungan, diolah Bappelitbangda, 2022.

Indikator jumlah penumpang yang menggunakan transportasi darat dan transportasi ASDP terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2020 akibat adanya pembatasan pergerakan orang pada saat pandemic covid-19, tetapi mengalami kenaikan kembali untuk transportasi darat menjadi 746.618 orang di tahun 2021 yang menggunakan transportasi darat dan 90.819 orang yang menggunakan transportasi ASDP. Terkait indikator sarana transportasi darat berupa jumlah trayek dan kendaraan angkutan umum serta jumlah ASDP menunjukkan indikator yang semakin menurun. Layanan angkutan darat yang beroperasi pada tahun 2019 sebanyak 17 trayek, turun di tahun 2020 menjadi 9 trayek dan tahun 2022 bertambah lagi menjadi 19 trayek. Begitupun dengan jumlah ASDP yang terkelola tahun 2019 sebanyak 244 unit dan terus turun menjadi hanya 154 unit di tahun 2022.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari presentase aplikasi TIK pemerintahan yang dimanfaatkan dan persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

**Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Indeks SPBE	%	2,41	2,71	2,85	2,65
Persentase Aplikasi Teknologi Informasi Pemerintahan Yang Termanfaatkan	%	40	40	99,22	94.56
Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	41,76	39,27	100	97.62

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik, diolah Bappelitbangda, 2022.

Media informasi dan komunikasi publik berupa: website milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat maupun melalui pemanfaatan media sosial diantaranya facebook, twitter, instagram dan youtube berperan dalam meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Bandung Barat.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien menunjukkan penurunan, dimana tahun 2020 dengan capaian ideks SPBE sebesar 2,71 poin dan turun kembali di tahun 2022 dengan capaian 2,65 point.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi menjadi ujung tombak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pada tahun 2019 jumlah koperasi di Kabupaten Bandung sebanyak 667 unit dimana 60,1 persennya merupakan koperasi aktif dan meningkat di tahun 2022 menjadi 758 unit dengan jumlah koperasi aktif sebesar 66 persen. Berdasarkan kondisi tingkat kesehatan koperasi terjadi peningkatan koperasi sehat sebesar 24 persen di tahun 2021 bila dibanding tahun 2020 yang hanya sebesar 13 persen.

Tabel 2.58 Jumlah dan Kondisi Koperasi Tahun 2019 – 2022

URAIAN	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi	667	692	722	758
Koperasi Aktif	60,1%	61,6%	64,3%	66%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2022.

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut kinerja pembangunan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode Tahun 2019-2021.

Tabel 2.59 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Pertumbuhan Koperasi sehat	%	N/A	13	24	20
Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	26	11	24	22
Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	21	21	21	21
Persentase Peserta Diklat Perkoperasian	%	10	-	10	7
Jumlah kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Kegiatan	5	3	5	5
Jumlah Pertumbuhan Pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Mikro	Pelaku Usaha	577	0	213	716
Pertumbuhan pengembangan pelaku usaha mikro	Pelaku Usaha	200	50	171	221

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Beberapa capaian indikator mengalami penurunan, diantaranya jumlah investasi PMDN pada tahun 2019 sebesar Rp.572 Milyar turun menjadi Rp.192,6 Milyar pada tahun 2021 dan indikator jumlah dokumen perijinan yang ditindaklanjuti menurun dari tahun 2019 sebanyak 87 dokumen menjadi 33 dokumen di tahun 2021.

Capaian indikator yang mengalami penurunan kinerja, diantaranya presentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi dari semula tahun 2019 sebesar 19,73 persen menjadi 16,67 persen, sedangkan presentase waktu proses pelayanan perijinan sesuai SOP semakin membaik awalnya 2020 sebesar 68 persen menjadi 72,5 persen di tahun 2021 dan naik kembali di tahun 2022 menjadi 82,79 persen, hal ini dengan adanya dukungan aplikasi perijinan online. Berikut indikator urusan Penanaman Modal:

Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal

Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Nilai investasi PMDN	Milyar	572	335	192,6	704
Persentase dokumen yang ditindaklanjuti	Dokumen	87	68	33	33,33
Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	%	19,73	14,19	33	16,67
Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	-	-	268	622
Jumlah penerbitan perijinan	jumlah	2.308	1.878	2.344	3.248
Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	%	88	68	72,5	82,79

Sumber: DPMPSTP, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Ruang lingkup olahraga tidak hanya menyangkut olahraga prestasi tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Artinya, indikator keberhasilan tidak hanya mendasarkan pada medali sebagai ukuran keberhasilan tetapi keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, SDM atau tenaga keolahragaan yang terlibat, partisipasi masyarakat untuk berolahraga secara teratur, dan capaian prestasi olahraga. Prestasi olahraga di Kabupaten Bandung Barat didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana olahraga, pelaku olahraga yang terlibat dan klub/perkumpulan olahraga sebagai wadah untuk berlatihnya atlet dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga.

Indikator ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat baik berupa gedung dan lapang olahraga sebagai pusat aktifitas atlet dan masyarakat untuk melaksanakan aktifitas olahraga menunjukkan tren meningkat dari tahun 2019 sebanyak 1.527 lokasi meningkat pada tahun 2022 menjadi 2.712 lokasi terkait ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. Bila dilihat dari prestasi olahraga, keikutsertaan atlet-atlet Kab. Bandung Barat pada tahun 2019, dengan mengirim 7 atlet pada Sea Games 2019 memperoleh prestasi dengan raihan medali 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu, sedangkan atlet pelajar Kab. Bandung Barat pada tahun 2019 mengikuti event POPWILDA Jabar dengan raihan medali 7 emas, 7 perak dan 13 perunggu.

Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi covid-19, berdampak pada tidak adanya aktifitas/kejuaraan olahraga, sehingga tidak ada prestasi yang diraih oleh atlet Kab. Bandung Barat di tahun tersebut. Pada tahun 2021 melalui event PON XX Papua kontingen Kab. Bandung Barat mengirimkan 48 atlet untuk mewakili Kontingen Jawa Barat dengan raihan prestasi medali 18 emas, 12 perak dan 7 perunggu, berkontribusi untuk mengantarkan kontingen Jawa Barat menjadi juara umum PON XX Papua. Sedangkan indikator kepemudaan merupakan indikator baru sesuai dengan perubahan RPJMD dengan capaian presentase layanan kepemudaan pada tahun 2021 sebesar 8,87. Terakhir pada tahun 2022, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tuan rumah Porprov XIV Jabar tahun 2022 dengan raihan prestasi memperoleh 49 emas, 72 perak dan 104 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat dan event PEPARDA VI Bekasi tahun 2022 dengan raihan prestasi 18 emas, 25 perak dan 32 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat.

Untuk indikator kepemudaan merupakan indikator baru sesuai dengan perubahan RPJMD, dengan capaian kapasitas layanan kepemudaan di tahun 2021 sebesar 8,87 persen dan presentase pemuda yang aktif di organisasi kepramukaan capaian 2021 sebesar 1,5 persen. Berikut indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga, tersaji pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	%	N/A	N/A	8,87	7,83
Presentase peningkatan pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan	%	N/A	N/A	1,5	2,86
Jumlah ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga	Lokasi	1.527	2.562	2.667	2.712
Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	Atlet	41	0	38	569
Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Persen	14,56	19,98	33	34

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.2.14 Statistik

Dalam rangka pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Bandung Barat dengan indikator, presentase penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Bandung Barat yang telah dikelola dan dipublikasikan capaian tahun 2019 sebesar 70 persen meningkat di tahun 2022 menjadi 99,05 persen. Peningkatan capaian penyelenggaraan statistik sektoral tidak terlepas dari efektifitasnya Forum satu data Bandung Barat melalui peran Pembina data, wali data dan produsen data dalam mengumpulkan, menyediakan dan mempublikasikan data statistik sektoral dalam rangka berbagi pakai data untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan serta dengan ditetapkannya Perbup Nomor 19 tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Bandung Barat

Kebutuhan data statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan diantaranya melalui penyusunan buku Kabupaten Bandung Barat Dalam angka dan buku PDRB Kabupaten melalui analisis data makro ekonomi.

**Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kabupaten	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Tidak ada	Ada
Presentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	70	74,5	99,22	99,05

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.2.15 Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Bandung Barat dititikberatkan pada pengamanan informasi Pemerintah Daerah dengan indikator persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 97,22 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 99,17 persen. Peningkatan capaian di tahun 2022 ini didukung dengan adanya kerjasama antara Pemkab Bandung Barat dan BSSN yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Diskominfo Bandung Barat dan BSSN tentang penyelenggaraan kemandirian informasi dan penyelenggaraan sertifikat elektronik, serta Pelatihan/Pendidikan bagi aparatur dalam pengelolaan sertifikat elektronik dan keamanan informasi serta diberlakukannya tanda tangan elektronik dilingkungan Pemkab Bandung Barat.

2.3.2.16 Kebudayaan

Pemetaan potensi budaya di Kabupaten Bandung Barat tertuang pada Data Potensi Adat Budaya berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat No. 188.45/Kep.196-Disparbud/2019 Perihal Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pada dokumen tersebut tercatat ada 40 jenis adat budaya baik berupa budaya tradisi/ritual, cerita rakyat, upacara tradisional, permainan rakyat dan jenis lainnya. Capaian pelestarian nilai budaya local Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan upacara tradisional/ritual dan pagelaran pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 5 objek budaya pada tahun 2020 akibat adanya pembatasan kegiatan keramaian hanya terealisasi 1 objek budaya dan di tahun 2021 terlaksana 2 objek budaya.

Dalam rangka pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya dari total potensi di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 173 objek, capaiannya semakin meningkat tahun 2019 sebanyak 10 objek telah dilestarikan dan tahun 2022 meningkat menjadi 20 objek benda, situs dan kawasan cagar budaya telah dilestarikan.

**Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	10	4	8	20
Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan	Budaya	5	1	2	1
Jumlah Persiapan dan perencanaan Kebudayaan dan kesenian yang berjalan dengan baik	Kegiatan	2	1	1	10

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.2.17 Perpustakaan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, dilaksanakan melalui pelayanan perpustakaan, penyediaan buku perpustakaan daerah, perpustakaan desa, perpustakaan keliling maupun dalam bentuk taman bacaan masyarakat. Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan selama periode Tahun 2019-2022 rata-rata realisasi menunjukkan capaian yang positif, Koleksi buku perpustakaan daerah semakin banyak pada tahun 2019 tersedia 61.959 buku dengan 14.738 judul meningkat di tahun 2021 menjadi 65.826 buku dengan 15.188 judul buku.

Sedangkan nilai kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan dengan capaian berpredikat “B”. Indikator capaian penyelenggaraan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.64 Indikator Penyelenggaraan Perpustakaan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Indikator	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah	61.959 Explr 14.738 Judul	62.206 Explr 14.826 Judul	65.826 Explr 15.188 Judul	70.980 Explr 17.877 Judul
Jumlah koleksi E-Book	-	-	1.869 Explr 1.014 Judul	5.139 Explr 2.107 Judul
Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Daerah	7.152 orang	7.809 orang	5.331 orang	10.936 Orang
Jumlah Perpustakaan Desa	70	70	71	71
Jumlah Taman Bacaan Masyarakat	12	12	12	12
Jumlah Kendaraan Perpustakaan Keliling	5	5	5	5
Layanan Kunjungan Perpustakaan Keliling	24 titik	15 titik	-	18 titik
Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	N/A	N/A	Predikat B	Predikat B

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.2.18 Kearsipan

Capaian kinerja pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 20 persen menjadi 39 persen di tahun 2022, tetapi masih perlu dilakukan pembinaan terhadap pengelola arsip di Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelamatan arsip, capaian mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 20 persen menjadi sebesar 46 persen ditahun 2022.

**Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
1	Jumlah arsip yang sudah dilakukan penyelamatan	%	20	30	31	46
2	Persentase Arsip PD yang sudah di Kelola secara baku	%	20	25	19	39
3	Jumlah rumusan kebijakan perizinan kearsipan	Dok	N/A	N/A	0	1

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Peningkatan indikator urusan kelautan dan perikanan, hal ini didukung oleh meningkatnya produksi komoditas perikanan unggulan di Kabupaten Bandung Barat yang meningkat dari tahun 2019 sebesar 42.362,72 ton menjadi 44.161,43 ton di tahun 2021 tetapi terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi 41.364,32 ton.

Hal ini sejalan dengan keberadaan Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang meningkat menjadi 5.030 RTP di tahun 2022 yang semula di tahun 2019 hanya 2.254 RTP dan peningkatan pada Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 78 menjadi 86 kelompok di tahun 2022, dengan capaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.66 Produksi Komoditas Perikanan Unggulan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2022**

No	Komoditas Ikan	Total Produksi Ikan Tahun 2019	Total Produksi Ikan Tahun 2020	Total Produksi Ikan Tahun 2021	Total Produksi Ikan Tahun 2022
1	Ikan Mas	8.224,78	15.763,99	14.097,74	14,063.87
2	Ikan Nila	12.825,22	18.450,00	21.627,23	21,054.44
3	Ikan Patin	4.580,44	5.849,56	6.077,52	6,204.65
4	Ikan Lele	16.506,45	1.917,19	1.981,37	-
5	Ikan Gurame	2.748,26	345,98	377,57	41.36
Jumlah		44.905,15	42.326,72	44.161,43	41.364,32

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda, 2022

**Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Persentase Penyebaran Benih Unggul	Persen	-	-	11	15,1
Jumlah RTP	RTP	2.254	2.689	4.872	5.030
Pengawasan Sumber Daya Perikanan	SDP	-	-	2	2
Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Kelompok	78	80	83	86
Budidaya ikan pembenihan	Ha	10,49	10,49	11,52	11,55
Budidaya ikan KAT	Ha	275,14	275,39	275,82	276,26
Budidaya ikan KJA	petak	66.650	63.320	62.820	62.820

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.3.2 Pariwisata

Berdasarkan data potensi pariwisata, sampai dengan tahun 2021 terdapat 155 objek wisata di Kab. Bandung Barat dimana 3 diantaranya dikelola oleh Pemda yaitu: Situ Ciburuy, Gua Pawon dan Curug Malela dan sisinya 152 objek wisata dikelola oleh swasta. Jumlah kunjungan wisatawan sebelum terjadinya covid-19 pada tahun 2019 mencapai 6.333.889 orang tetapi karena adanya pembatasan pergerakan orang dimasa pandemi covid jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis menjadi 4.088.811 orang dan seiring meredanya kasus covid-19 pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan kembali meningkat menjadi 4.497.692 orang dan 2022 sebanyak 5.045.679 orang. Dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor pariwisata upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat melalui promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif pendukung pariwisata serta peningkatan fasilitas pendukung pariwisata dilihat berdasarkan tabel berikut memperlihatkan tren positif.

**Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	6.333.889	4.088.811	4.497.692	5.045.679
Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemda	Objek	3	3	3	2
Jumlah Obyek Wisata yang dikelola pihak swasta	Objek	122	143	155	155
Hotel/Penginapan/Vila	Unit	89	89	90	95
Jumlah Tamu yang Menginap	Orang	901.690	134.350	147.785	607.390
Restoran, Rumah Makan, Café	Unit	134	135	141	142
Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (Ekraf)	Jumlah	200	350	1.494	615
Jumlah pelaku usaha industri kreatif, penggerak pariwisata dan budaya yang meningkat kompetensinya	Pelaku Usaha	30	70	75	105
Jumlah Perluasan sub sektor ekonomi kreatif	Sub Sektor	9	10	1	0
Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi standar	%	20	23,31	35,29	55.56
Presentase kegiatan promosi pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif yang efektif	%	100	100	100	77

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.3.3 Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Selama tiga tahun terakhir (2019-2021) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha salah satunya adalah sektor pertanian yang berkontribusi terhadap PDRB sebesar 13,28 persen pada tahun 2020 kecuali di tahun 2021 peranan sektor pertanian menurun menjadi 12,59 persen atau mengalami pelambatan sebesar - 1,30 persen. Capaian indikator urusan pertanian, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Pertumbuhan sektor pertanian	%	1,24	-0,62	-1,30	4,11
Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	%	N/A	N/A	4,1	-32
Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan)		405.560	387.939	444.368	457.816
Nilai Tukar Petani	point	109,10	101,42	108,34	109
Jumlah Ahli Pertanian Berkualitas	orang	83	83	83	89
Jumlah penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis	orang	19	45	25	17
Produksi Daging	Ton	25.003	24.769	24.548	7.418
Produksi Telur	Ton	1.665	1.405	1.966	659
Produksi Susu	Ton	79.950	84.210	97.088	57.992
Persentase Penyebaran Bibit Unggul	Persen	5	7	10	9,7
Persentase kelahiran Ternak	Persen	72,3	74	75	94
Jumlah Kelompok Yang menerapkan teknologi peternakan	Kelompok	7	12	14	23
Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	Persen	-	-	-	20
Cakupan pelayanan kesehatan hewan	Persen	-	-	63	77,3
Prevalensi Brucellosis (%)	Persen	-	-	2	2,2
Persentase Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi	Persen	-	-	78	100
Tefasilitasinya Penerbitan izin usaha peternakan	Persen	-	-	100	100
Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Ternak / Tahun	Klpok	10	12	10	10

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diolah Bappelitbangda, 2022.

**Tabel 2.70 Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2022**

Tahun	Padi Sawah			Padi Ladang		
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
2018	48.910	50.267	294.630	105	2.243	8.430
2019	49.826	49.528	319.138	3.535	1.641	5.981
2020	46.291	46.247	299.319	858	1.186	4.654
2021	42.217	43.199	279.990	1.035	1.055	3.355
2022	44,735	45,807	297,093	415	416	1,635

Sumber Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Tanaman padi bila dilihat dari produksinya mengalami penurunan untuk padi sawah di tahun 2022 menjadi 297.093 ton dibanding tahun 2020 dengan capaian 299.319 ton begitupula dengan produktifitas padi ladang pada tahun 2022 menurun sebesar 1.720 ton dibanding tahun 2020. Nilai tukar petani yang merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) menunjukkan tren menurun dimana NTP tahun 2019 sebesar 109,10 turun menjadi 108,34 di tahun 2021.

Sedangkan untuk produktifitas hasil peternakan seperti daging, susu dan telur akiobat adanya Penyakit Mulut dan Kuku di tahun 2022 hampir semua produksi hasil peternakan berupa daging, susu dan telur mengalami penurunan.

2.3.3.4 Perdagangan

Peranan distribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat pada tahun 2019-2021 salah satunya adalah sektor perdagangan, dengan kontribusi sebesar 13,58 pada tahun 2019 terus menurun pada tahun 2020 menjadi 12,90 dan 2021 menjadi 12,70 hal ini disebabkan karena sektor perdagangan merupakan sektor yang terdampak akibat adanya pembatasan disaat terjadi pandemi covid-19. Capaian indikator urusan perdagangan pada tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Persentase Pasar yang Dikelola	%	85	83,97	100	100
Persentase Penataan organisasi PKL dan asongan	%	90	99,61	100	99,91
Persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	%	83,10	89,66	89,06	90,02

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diolah Bappelitbangda, 2022

**Tabel 2.72 Data Eksisting Pasar Tradisional, Jumlah Kios, Lapak dan PKL di
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2022**

No	Nama Pasar	Lokasi	Jumlah tahun 2019			Jumlah tahun 2020			Jumlah tahun 2021			Jumlah Tahun 2022		
			Kios	Lapak	PKL	Kios	Lapak	PKL	Kios	Lapak	PKL	Kios	Lapak	PKL
1	Pasar Panorama Lembang	Lembang	1421	1012	-	1.455	1.036	-	1.455	1.036	-	1.455	1.036	-
2	Pasar Buah-Buahan Lembang	Lembang	59	10	-	55	10	-	55	10	-	55	10	-
3	Pasar Cisarua	Cisarua	84	27	-	84	68	-	84	68	-	84	68	-
4	Pasar Tagog Padalarang	Padalarang	459	945	-	361	345	695	361	345	695	361	345	695
5	Pasar Curug Agung	Padalarang	380	245	-	380	244	-	380	244	-	380	224	-
6	Pasar Rajaman dala	Cipatat	120	73	-	120	73	-	-	-	-	-	-	-
7	Pasar Cililin	Cililin	392	110	-	393	110	31	393	110	31	393	110	31
8	Pasar Batujajar	Batujajar	650	577	-	650	-	-	650	577	-	650	577	-
9	Pasar Sindang kerta	Sindang kerta	47	165	-	47	-	160	47	165	-	47	165	-
Total			3.612	3.164	-	3.545	2.628	889	3.425	2.555	726	3.425	2.555	726

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diolah Bappelitbangda, 2022

Seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2020 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan perdagangan dengan indikator pada tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.73 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Di Kabupaten Bandung Barat 2019-2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Pertumbuhan sektor perdagangan	%	4,15	1,85	2,93	3,93
Persentase peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen	%	38	19	29	40
Persentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	%	45	0	0	50
Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	Jumlah	4.122	1.960	3.880	4.268
Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	%	35	20	30	33
Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten Kota	Jumlah	6	0	2	7
Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah	150	70	120	150

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.3.2.19 Perindustrian

Perindustrian merupakan sektor yang berperan penting bagi pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, terlebih pada jenis agroindustri. Diketahui bahwa pertumbuhan industri (baik industri kecil, sedang dan besar), terus mengalami peningkatan. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Peranan distribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2019 dengan kontribusi sebesar 39,96 persen, tahun 2020 meningkat menjadi 40,32 persen dan meningkat kembali di tahun 2021 mencapai 41,20 persen. Indikator pertumbuhan Industri Kecil Menengah memperlihatkan tren meningkat dari capaian tahun 2019 sebanyak 7.067 menjadi 8.123 pada tahun 2021. Berikut indikator urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.74 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	6,26	-2,41	4,88	6,43
Jumlah Pertumbuhan IKM	Jumlah	7.067	7.205	8.123	
Pertumbuhan industri yang berizin	Jumlah			2.132	2.240
Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS	Jumlah	255	255	260	300

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diolah Bappelitbangda, 2022

2.3.3.6 Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi melalui program transmigrasi regional. Program tersebut ditunjang oleh kegiatan monitoring dan penempatan transmigrasi. Monitoring tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai daerah penempatan transmigrasi. Hal tersebut dikarenakan sudah semakin berkurangnya tanah yang akan dibuka untuk penempatan transmigrasi. Tetapi pada tahun 2021 indikator urusan transmigrasi berubah menjadi presentase transmigran mandiri dengan capaian sebesar nol persen hal ini karena baru pada tahap sosialisasi kepada 54 orang calon transmigran dan pada tahun 2022 telah terdaftar 25 orang calon transmigrasi.

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

Unsur pendukung urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, pada perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 terdapat penyesuaian indikator, dengan capaian indikator terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.75 Capaian Indikator Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks		80,29	80,75	82,39
Persentase data dan informasi bid. Perekonomian yang di gunakan sebagai <i>policy brief</i>	%	-	-	85	80
Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Potensi Perekonomian sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian	jumlah	0	3	-	-
Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan <i>policy brief</i>	%	-	-	90	75
<i>Center of excelent</i> pengadaan barang jasa	%	100	100	100	100
Tingkat Kematangan UKPBJ	level	Level 3	Level 3	Level 3	
Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	100	90
Persentase Perda yang ditetapkan	%	60	60	90	85
Persentase Data dan Informasi Bidang Sosial yang digunakan sebagai Policy Brief	%	-	-	85	80
Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	%	-	-	83,25	83,25

Sumber: Setda dan Sekretariat DPRD, diolah Bappelitbangda, 2022

Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Bandung Barat dengan capaian indikator selalu patuh tepat waktu dengan capaian tiap tahun sebesar 100 persen. Salah satu indikator peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah bidang perekonomian pembangunan adalah melalui pengukuran level kematangan/maturitas PBJ. Indikator ini menggambarkan tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Capaian indikator tingkat kematangan UKPBJ Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2021 berada pada Level 2 (*Repeatable*) UKPBJ.

Sedangkan bila dilihat dari capain kinerja Sekretariat DPRD bahwa Persentase Perda yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 60 persen meningkat di tahun 2022 menjadi 85 persen dengan capaian persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi adalah sebesar 83,25 persen.

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Unsur penunjang urusan Pemerintah Daerah mencakup urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja unsur penunjang urusan Pemerintah daerah, dengan capaian indikator terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.76 Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Indeks Merit	katagori indek	Katagori 3 (baik)	Katagori 3 (baik)	Katagori 3 (baik)	Kategori 3 (baik)
Opini BPK	skore	WTP	WDP	WTP	-
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	%	100	97	100	97,28
Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD	%	100	100	100	99,20
Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai standar dan peraturan yang berlaku	%	100	100	100	100
Persentase peningkatan pengelolaan aset daerah	%	-	80,78	77	111,16
Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	-	7,36	13,41	32,12
Persentase Aparatur yang mendapatkan Pembinaan Kepegawaian	%	119,05	65	73,94	61,7
Persentase Aparatur yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	%	102,28	42,77	70	75
Persentase diseminasi hasil kelitbangan	%	-	-	71,42	0

Sumber: Bappelitbangda, BKAD, Bappenda, BKPSDM, 2022

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Capaian penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD yang menjadi kewenangan urusan perencanaan dengan capaian sebesar 100 persen. Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD mencapai 100 persen. Adapun untuk tahun 2020 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD sebesar 98,43 persen. Hal ini disebabkan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang diikuti dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 100 persen.

Capaian indikator urusan keuangan terkait pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah lebih baik dengan capaian opini BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2019 dan 2021 dengan opini WTP. Sedangkan bila dilihat dari indikator persentase peningkatan pendapatan daerah Kab. Bandung Barat meningkat menjadi 13,41 persen di tahun 2021 dibanding tahun 2020 sebesar 7,36 persen dan melonjak naik di tahun 2022 menjadi 32,12 persen. Indeks Sistem Merit ASN merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yaitu ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Capaian indeks sistem merit ASN di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2019 – 2022 telah baik dengan capaian katagori 3. Untuk capaian presentase aparatur yang mendapatkan pembinaan kepegawaian dan persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi terdapat penurunan di tahun 2020 karena adanya pembatasan aktifitas dan reconfusing anggaran, sampai dengan tahun 2022 capaiannya sebesar 75 persen sedangkan untuk presentase aparatur yang mendapatkan pembinaan kepegawaian capaiannya sebesar 61,7 persen di tahun 2022.

2.3.6 Pengawasan Urusan Pemerintahan

Salah satu fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Adapun capaian indikator SAKIP Kabupaten Bandung Barat pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun masih pada katagori “B” tetapi secara nilai mutu pada Tahun 2019 sebesar 66, naik pada tahun 2020 menjadi 67,04 dan sampai dengan 2021 nilai SAKIP Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 67,55.

Sedangkan capaian indikator presentase rekomendasi temuan BPK RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah meningkat dari tahun 2019 sebesar 75 persen menjadi 100 persen di tahun 2021 atau semua di tindaklanjuti.

**Tabel 2.77 Capaian Indikator Kinerja Unsur Pengawasan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Rata-rata Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Mutu	B 66	B 67,04	B 67,55	B (67,32)
Persentase Rekomendasi Temuan BPK RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	75	85	100	100

Sumber: Inspektorat Daerah, diolah Bappelitbangda, 2022

2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan indikator yang telah disesuaikan dan mengalami perubahan dengan capaian secara umum kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan umum menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari capaian presentase penyelesaian jumlah potensi konflik sosial tahun 2022 sebesar 84,86 persen, Tingkat pemahaman politik di masyarakat terus meningkat sampai dengan tahun 2022 dengan capaian 52,18 persen, rincian capaian terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.78 Capaian Indikator Kinerja Unsur Pemerintahan Umum
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Persentase penyelesaian jumlah potensi konflik sosial	%	98	100	96,42	84,86
Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	98,41	100	51,88	83,18
Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	-	-	42,86	98,17
Persentase Ormas/LSM yang tercatat di Badan Kesbangpol	%	-	-	70	100
Tingkat pemahaman politik di masyarakat	%	30	50	60	52,18

Sumber: Badan Kesbangpol, diolah Bappelitbangda, 2022

2.4 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Kemenristek BRIN tahun 2021, bahwa Kabupaten Bandung Barat masuk pada kategori Daya Saing “Tinggi” dengan nilai indeks sebesar 2,832.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Kondisi daya saing daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan kemampuan ekonomi daerah diantaranya berdasarkan indikator komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Rangka (PK-RT), pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita pangan dan non pangan.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Bandung Barat, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2017-2021 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 2.79 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020*	2021**	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Total of Household Consumption</i>					
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Miliar Rp)	28.655,22	31.000,87	31.225,97	32.226,92	33.446,74
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant Prices</i> (Miliar Rp)	18.973,06	19.946,78	19.770,88	20.033,77	20.066,84
Proporsi terhadap PDRB/ <i>Proportion to GRDP</i> (% ADHB / <i>Current Prices</i>)	65,41	65,71	67,18	66,09	66,78
Rata-rata konsumsi per Kapita/ <i>Average of per-capita consumption</i> (Ribu Rp/Thousand Rp)					
a. ADHB/ <i>Current Prices</i> (Ribu Rp/Thousand Rp)	17.019,08	18.535,29	17.527,05	17.763,45	18.106,12
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant Prices</i> (Ribu Rp/ Thousand Rp Rp)	11.268,60	11.926,10	11.097,34	11.042,60	11.512,61
Pertumbuhan/ <i>Growth</i> ⁷					
a. Total konsumsi RT/ <i>Total of Household Consumption</i>	5,46	5,13	-0,88	1,33	2,47
b. Perkapita/ <i>Per capita</i>	4,39	5,83	-6,95	-0,49	1,63

Sumber : Publikasi PDRB KBB Menurut Pengeluaran 2017-2021, BPS 2021.

Selama periode 2017-2021 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB fluktuatif, terjadi penurunan selama periode tahun 2017-2018, kemudian mengalami peningkatan selama periode 2018-2020, dan kembali mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2021, proporsi tersebut yaitu 65,44 persen (2017); 65,41 persen (2018); 65,71 persen (2019); 67,65 persen (2020) dan 67,18 (2021). Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga. Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017, setiap penduduk di Kabupaten Bandung Barat menghabiskan dana sekitar 15.788 ribu Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 17.019 ribu Rupiah (2018); 18.535 ribu Rupiah (2019); 17.527 ribu Rupiah (2020) dan 17.763 ribu Rupiah (2021). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per kapita mengalami fluktuatif pada kisaran - 6 s.d 5 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,83 persen. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk mengalami penurunan selama pandemi Covid-19 menyerang dan perlahan membaik kembali setelah kasus Covid-19 menurun. Peningkatan dan penurunan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.80 Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2021**

Uraian	2018	2019	2020*	2021**
a. Makanan, Minuman, Rokok	52,05	52,74	54,18	54,68
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,72	3,74	3,56	3,50
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	15,39	14,83	14,66	14,27
d. Kesehatan, Pendidikan, rekreasi dan Budaya	3,34	3,41	3,51	3,55
e. Transportasi, Komuniasi, Rekreasi dan Budaya	17,35	17,20	16,16	16,16
f. Hotel dan Restoran	4,02	3,99	3,81	3,76
g. Lainnya	4,13	4,09	4,12	4,07
Total Konsumsi	100	100	100	100

Sumber :Publikasi PDRB KBB Menurut Pengeluaran 2017-2021, BPS 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama periode 2017-2021, pengeluaran rumah tangga didominasi oleh konsumsi pada kelompok makanan, minuman dan rokok yang berkisar antara 51,13 sampai dengan 54,68 persen. Pengeluaran konsumsi non pangan untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 16,16 sampai dengan 17,61 persen, disusul kemudian oleh pengeluaran pada kelompok perumahan perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga yang berkisar antara 14,27 sampai dengan 15,96 persen.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah, dibutuhkan kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien melalui pemaduan jaringan pelayanan dan juga prasarana, diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi. Sarana infrastruktur aksesibilitas/transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi berperan penting sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Data kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir, dengan total panjang jalan Kabupaten sepanjang 525,57 Km, dengan proporsi panjang jalan dengan kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 65,19 persen, tahun 2020 sebesar 60,62 persen dan tahun 2021 meningkat lagi kondisi jalan baik menjadi 63,24 persen.

**Tabel 2.81 Data Kondisi Jalan
di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 - 2022**

Kondisi Jalan	PANJANG JALAN (Km)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	343.689	342.615	318.617	332.375	372.682
Sedang	45.900	37.765	88.695	57.340	61.738
Rusak Ringan	54.804	86.44	2.175	49.645	53.453
Rusak Berat	80.997	58.75	116.083	86.210	37.697
Total Panjang Jalan	525.57	525.57	525.57	525.57	525.57

Sumber : Dinas PUTR, Kab. Bandung Barat, 2022

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan jalan yang dapat memberikan akses tiap kendaraan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan data, panjang jalan di Kabupaten Bandung Barat sepanjang 525,57 km dengan jumlah rata-rata harian angkutan darat yang melintas berdasarkan data dari Dinas Perhubungan yaitu sebanyak 62.683 kendaraan/hari sehingga rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 119,27 artinya per 1 km jalan melayani/dilalui oleh 119 kendaraan.

Jumlah sarana angkutan umum dan angkutan barang serta layanan kendaraan umum berpenumpang di Kabupaten Bandung Barat sebagai sarana aksesibilitas penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82 Data Jumlah Angkutan Barang
di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 - 2021

No	Kecamatan	Jumlah Unit Angkutan Barang			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Cililin	1.395	416	418	416
2	Cihampelas	1.094	444	444	444
3	Sindangkerta	316	146	146	146
4	Gununghalu	202	120	119	120
5	Rongga	228	70	70	70
6	Cipongkor	335	209	209	209
7	Batujajar	1.374	849	849	849
8	Lembang	2.108	3184	3186	3384
9	Parongpong	1.524	1213	849	1213
10	Cisarua	1.337	757	760	757
11	Ngamprah	1.404	1425	1423	1475
12	Padalarang	1.725	3557	3556	3707
13	Cipatat	721	771	209	771
14	Cipeundeuy	1.106	577	579	577
15	Saguling	200	94	93	94
16	Cikalongwetan	990	605	604	605
JUMLAH		16.059	14.437	13.514	14.837

Sumber : Dishub, Kab. Bandung Barat, 2022

Tabel 2.83 Akseibilitas Kendaraan Umum
di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Angkutan Umum	956	965	614	419	600
Jumlah Penumpang yang melalui Terminal	697.445	777.966	746.618	598.435	577.299

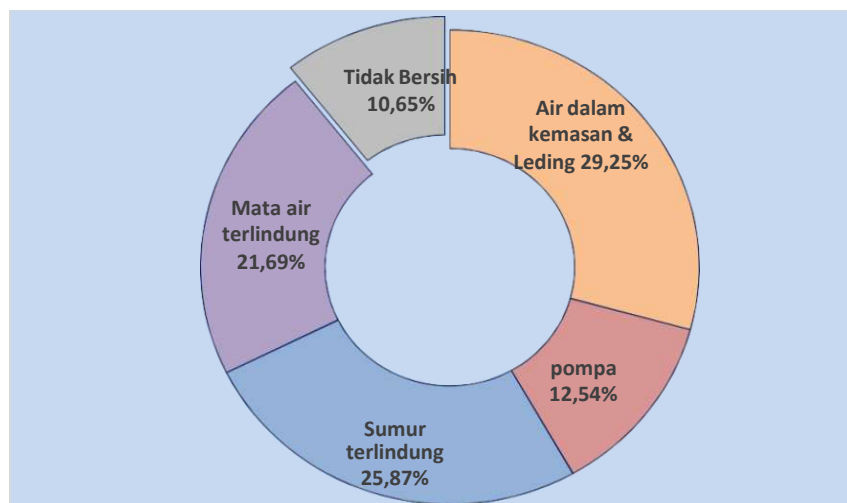
Sumber : Dishub, Kab. Bandung Barat, 2022

Akseibilitas pergerakan manusia dan barang sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah didukung oleh ketersediaan angkutan umum dan angkutan barang, dengan kondisi layanan angkutan barang tahun 2019 sebanyak 14.437 unit, karena adanya pembatasan aktifitas di saat pandemic covid-19 layanan angkutan barang tahun 2020 turun menjadi 13.514 unit dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 14.837 unit seiring dengan melandainya pandemic covid-19.

Begitupun dengan pergerakan manusia yang dilayani oleh angkutan umum pada tahun 2020 saat terjadi pandemic covid-19 terjadi penurunan layanan jumlah penumpang umum sebesar 4,20 di banding tahun 2019 tetapi kondisi layanan angkutan umum di tahun 2021 masih terdampak pasca pandemic covid-19 dengan terjadinya penurunan jumlah armada layanan angkutan umum berkurang sebanyak 195 unit kendaraan linear dengan penurunan jumlah penumpang yang terlayani turun sebesar 19,85 persen dibanding tahun 2020, hal ini pun terdampak adanya angkutan umum berbasis online .

Sedangkan untuk fasilitas infrastruktur air bersih, persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum bersih di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 telah mencapai lebih dari 89,35 persen. Proporsi pemakaian air minum menurut sumbernya dalam penggunaan air bersih di Kabupaten Bandung Barat, bahwa penggunaan sumber air minum dari air ledeng/air kemasan sebesar 29,25 persen diikuti oleh sumur terlindung sebesar 25,87 persen masih mendominasi terkait pemenuhan kebutuhan sumber air minum masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah bahwa masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan sumber air minum tidak bersih sebesar 10,65 persen.

Gambar 2.24 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2021

Indikator lain dari aspek daya saing daerah adalah ketersediaan energi terutama penggunaan listrik sebagai sumber penerangan. Sebanyak 43 desa (26,06%) sebagian besar jalannya telah diterangi listrik. Ada 95 desa (57,58%) yang sebagian kecil jalannya telah diberi penerangan dan sebanyak 27 desa (16,36%) belum memiliki penerangan jalan.

Diantara 138 desa yang memiliki penerangan jalan sebanyak 96 Desa (69,57%) menggunakan listrik yang diusahakan pemerintah dan sisanya sebanyak 42 desa (30,43%) listrinya non pemerintah.

Aspek daya saing daerah fokus terhadap kondisi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi diantaranya ketersediaan pasar, restoran, rumah/warung makan, hotel/penginapan, Bank/BPR di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Basis Data Pembangunan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.84 Data Infrastruktur Fasilitas Kegiatan Ekonomi
di Kab. Bandung Barat Tahun 2019-2022**

Jenis Infrastruktur	2019	2020	2021	2022
Pasar Tradisional/Modern	388	388	388	388
Restoran, Rumah/WarungMakan	1.738	1.436	1.606	1.748
Hotel/Penginapan	159	117	162	167
Bank/BPR	98	90	95	95
Penerangan Jalan	4.627	4.972	5.044	5.164

Sumber : Basis Data Pembangunan, BPS/Diskominfotik, 2022

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti indeks rasa aman, angka kriminalitas, jumlah demonstrasi dan pelayanan perijinan.

Stabilitas keamanan menjadi salah satu aspek penting dalam berinvestasi. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing iklim investasi yang lebih tinggi. Hal ini karena faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang aspek daya saing dengan mengabaikan aspek keamanan. Investor tidak akan mungkin menanamkan invstasinya apabila diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman dari lingkungan maupun ancaman terjadinya bencana. Indeks Rasa Aman di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.85 Indeks Rasa Aman Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Ketersediaan Makanan	Rasa Aman dari bencana	Keamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	Rangking
1	Rongga	94,17	46,67	71,67	70,83	13
2	Gununghalu	87,29	68,33	90,14	81,92	4
3	Sindangkerta	94,38	52,50	50,49	65,79	16
4	Cililin	87,50	73,33	69,86	76,90	6
5	Cihampelas	94,38	62,50	52,50	69,79	15
6	Cipongkor	88,98	70,34	58,83	72,72	10
7	Batujajar	98,13	65,00	49,51	70,88	12
8	Saguling	98,44	61,25	68,44	76,04	7
9	Cipatat	99,29	79,29	33,93	70,83	14
10	Padalarang	83,75	62,14	74,82	73,57	9
11	Ngamprah	98,16	80,90	84,68	87,91	2
12	Parongpong	97,92	91,67	78,68	89,42	1
13	Lembang	99,82	70,71	67,20	79,25	5
14	Cisarua	93,13	80,00	84,51	85,88	3
15	Cikalongwetan	86,04	72,53	59,51	72,70	11
16	Cipeundeuy	97,71	72,50	51,04	73,75	8
Bandung Barat		93,74	70,36	65,88	76,66	

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2022.

Berdasarkan Basis Data Pembangunan 2 (dua) tahun terakhir (2020-2021), jumlah kejahatan yang dilaporkan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung barat menunjukkan angka yang cenderung turun. Pada tahun 2020 jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 446 kasus, sementara itu pada tahun 2021 berkurang menjadi 320 kasus dengan jenis kejahatan yang paling banyak adalah pencurian, perampokan dan penganiayaan.

Sedangkan jumlah kejadian demonstrasi/unjuk rasa di Kabupaten Bandung Barat, disebabkan karena adanya beberapa isu-isu seperti isu-isu pengupahan, pelaksanaan outsourcing, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM, dan sebagainya dengan angka kejadian pada tahun 2020 sebanyak 6 kejadian dan menurun di tahun 2021 menjadi 5 kejadian demonstrasi/unjuk rasa. Perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian sistem dan prosedur perijinan yang meliputi persyaratan, waktu dan biaya serta transparansi dan akuntabilitas proses perijinan merupakan komponen penting dalam pelayanan perijinan.

Pelayanan perijinan yang berbasis digital terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon, meningkatkan efisiensi dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan.

**Tabel 2.86 Persentase Jumlah Izin Yang Terbit Sesuai Sop Tahun
di Kab. Bandung Barat Tahun 2022**

No	Izin	SOP (Hari)	Jumlah Izin Terbit Tidak Sesuai SOP	Jumlah Izin Terbit Sesuai SOP	Jumlah Izin Terbit	% SOP
1	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NON-BERUSAHA	30	58	78	136	57,35
2	IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR (SD & SMP)	12	16	0	16	0,00
3	IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR FORMAL	44	32	25	57	43,86
4	IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL (KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK, PUSAT BELAJAR MASYARAKAT, LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN)	24	48	38	86	44,19
5	IZIN PRAKTIK DOKTER (MANDIRI & FASKES)	11	21	384	405	94,81
6	IZIN PRAKTIK PERAWAT	11	19	394	413	95,40
7	IZIN PRAKTIK BIDAN (MANDIRI & FASKES)	11	25	367	392	93,62
8	IZIN PRAKTIK APOTEKER	11	10	157	167	94,01
9	IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	11	3	128	131	97,71
10	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	11	1	7	8	87,50
11	IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA	11	0	2	2	100,00
12	IZIN KERJA RADIOGRAFER	11	2	13	15	86,67
13	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	11	1	3	4	75,00
14	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL	11	0	0	0	0,00
15	IZIN PRAKTIK REKAM MEDIS	11	3	53	56	94,64
16	IZIN PRAKTIK ANALIS/AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	11	7	90	97	92,78
17	IZIN PRAKTIK GIZI	11	1	23	24	95,83
18	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (MANDIRI & FASKES)	11	2	7	9	77,78
19	IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN	11	2	26	28	92,86
20	SURAT KETERANGAN TIDAK BERPRAKTIK DI KBB	11	10	833	843	98,81
21	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (PERMANEN & INSIDENTIL)	14	127	27	154	17,53
22	TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL	7	19	2	21	9,52
23	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL	8	0	0	0	0,00
24	IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	10	151	30	181	16,57
25	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	11	1	2	3	66,67
26	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN	11	0	0	0	0,00
27	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PELAYANAN INSEMINATOR	11	0	0	0	0,00
28	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN	11	0	0	0	0,00
29	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN TEKNIK REPRODUKSI	11	0	0	0	0,00
TOTAL			559	2689	3248	82,79

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat, 2022

Indikator Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pada tahun 2020 sampai dengan saat ini, dengan adanya aplikasi perijinan online, lamanya pengurusan perizinan bisa diperpendek, dengan ketentuan semua persyaratan perizinan terpenuhi.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan, kondisi PNS menurut pendidikan yang ditamatkan dan kualitas tenaga kerja berdasarkan penduduk usia produktif.

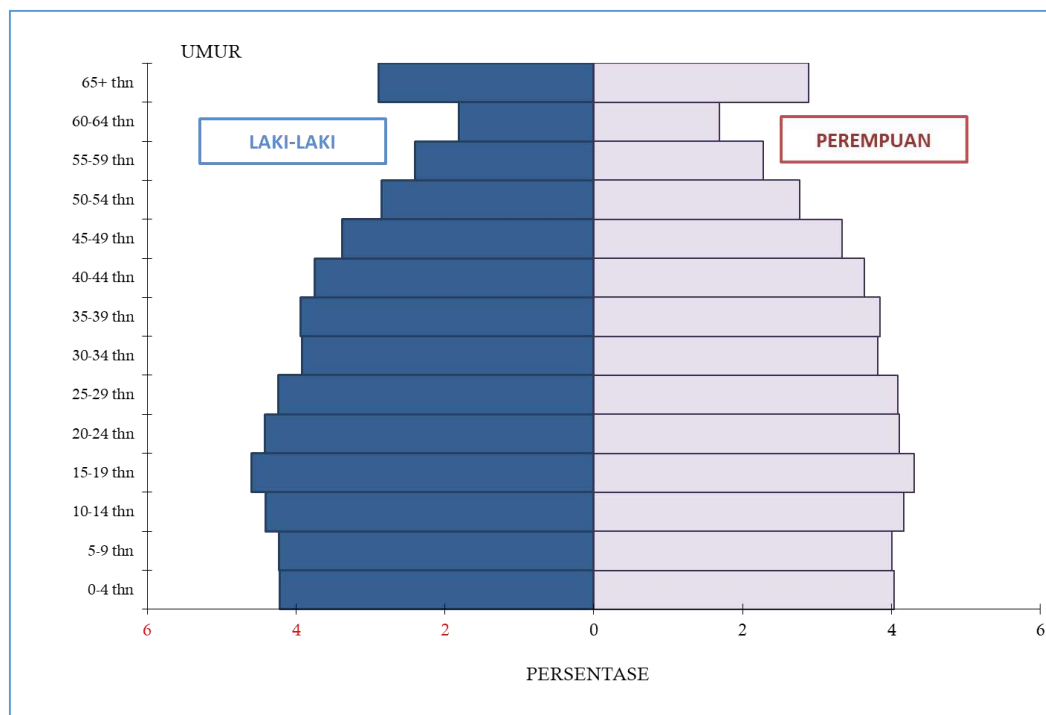
Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat menurut kelompok umur digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan usia, angkatan kerja, Angka Partisipasi Sekolah dan lain-lain yang dapat dilihat pada tabel serta digambarkan oleh Piramida penduduk Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

**Tabel 2.87 Rasio Ketergantungan
Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2022**

Penduduk Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022
Penduduk Usia < 15 Tahun	470.912	452.602	461.949	450.086
Penduduk Usia > 64 Tahun	87.151	103.373	104.824	118.923
Penduduk (< 15 Tahun dan > 64 Tahun)	558.063	555.975	566.733	569.009
Penduduk Usia Produktif (15-64)	1.181.848	1.232.361	1.250.977	1.277.960
Jumlah	1.739.911	1.788.336	1.817.770	1.846.969
Rasio Ketergantungan	47,22	45,11	45,31	44,59

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2021

**Gambar 2.25 Piramida Penduduk
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022**



Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Tahun 2022, diolah

Terlihat dari bentuk piramida penduduk Kabupaten Bandung Barat, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat pada kelompok umur di bawah 15 tahun dihitung di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa penduduk Kabupaten Bandung Barat tergolong struktur penduduk tua, yang artinya perbandingan penduduk usia produktif lebih besar dari yang tidak produktif.

Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk, yang merupakan perbandingan antara penduduk yang belum/tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). *Dependency Ratio* Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 menunjukkan capaian sebesar 44.59. Angka ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung Barat harus menanggung 45 orang penduduk usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan penduduk laki-laki sebesar 44.60 relatif lebih besar dibandingkan penduduk perempuan sebesar 44.59.

Kondisi ASN di Kabupaten Bandung Barat menurut pendidikan yang ditamatkan mayoritas berpendidikan terakhir S-1. Hal ini bermakna pegawai di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara umum telah memiliki: kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media, kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah. Namun demikian dalam perspektif kedepan perlu terus ditingkatkan kualitas pendidikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada jenjang S-2 dan S-3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang terus berkembang dan bersifat multidimensi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

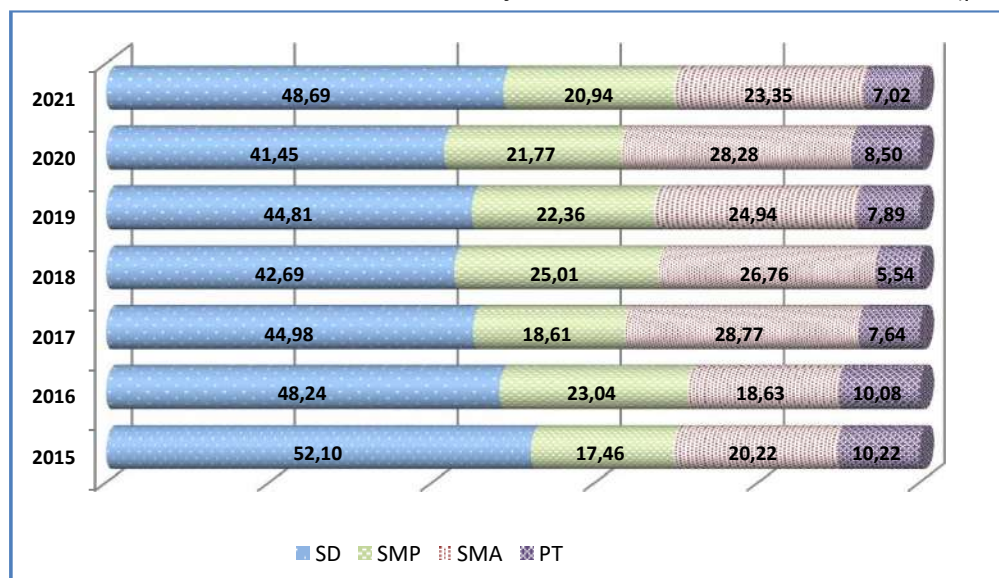
**Tabel 2.88 Kondisi ASN Kabupaten Bandung Barat
Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2022**

Tingkat Pendidikan	2019			2020			2021			2022		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	total	L	P	total
Sampai dengan SD	52	-	52	39	2	41	38	0	38	21	0	21
SMP/Sederajat	85	7	92	56	3	59	50	2	52	37	3	40
SMA/Sederajat	379	236	615	472	159	631	402	114	516	286	55	341
Diploma I, II/Akta I, II	32	14	46			0	119	124	243			0
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	196	487	683	84	456	540	128	505	633	100	486	586
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	2397	4057	6454	2967	3119	6086	2451	3304	5755	2412	3139	5551
Jumlah/Total	3141	4801	7942	3618	3739	7357	3188	4049	7237	2856	3683	6539

Sumber : BKPSDM, 2022.

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat, pada Tahun 2022 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 48,69 persen, SMP sebanyak 20,94 persen, dan SMA sebanyak 23,35 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 7,02 persen.

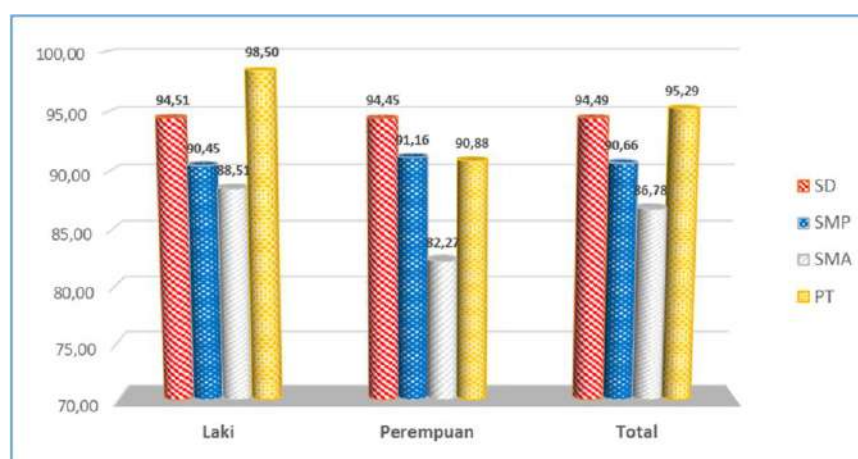
Gambar 2.26 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan 2015-2021 (persen)



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2021

Pada tahun 2022 penyerapan tenaga kerja untuk tingkat SD kebawah dan perguruan tinggi (PT) relatif lebih besar. Penyerapan tenaga kerja pada jenjang Perguruan tinggi sebesar 95,29 persen sementara untuk penduduk yang pendidikan tertingginya sekolah dasar sebesar 94,49 persen. Penyerapan penduduk dalam dunia kerja untuk pendidikan SMP dan SMU relatif lebih kecil yaitu sebesar 90,66 dan 86,78 persen.

Gambar 2.27 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Barat, 2022



Sumber: Analisis Data Ketenagakerjaan, BPS/Diskomifotik, 2021

2.5 Evaluasi Capaian Kinerja Makro, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 serta Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2022, telah dilakukan evaluasi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan Indikator Kinerja Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bahkan beberapa program terdapat penyesuaian dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, dengan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat periode sebelumnya (tahun 2018-2022) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.89 Capaian Indikator Makro Pembangunan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022**

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan (Perubahan RPJMD 2018 - 2023)							
				2019		2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	IPM	Poin	67.46	68.07	68.27	68.80	68.08	68,51*	68.29	68,57*	69.04
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1.69	1.68	1.67	1.67	0.89	1.64	1.24	1.62	1.80
3	Presentase Penduduk Miskin	Persen	10.06	10.81	9.38	10.46	10.49	11,11*	11.30	11,02*	10.82
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9.19	9.06	8.24	8.95	12.25	11,61*	11.65	11,31*	9.63
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5.85	5.96	5.05	6.04	-2.41	4,17*	3.46	4,64*	5,34
6	Indeks Gini	Point	0.394	0.370	0.362	0.360	0.376	0,355*	0.356	0,350*	0.368
7	Pendapatan Perkapita***	Juta Rupiah	25.36	24.27	27.12	26.39	25.99	26,68*	26.88	27,89*	28,65
*** Indikator baru pada perubahan RPJMD 2018-2023											
* Target Baru Hasil Perhitungan Proyeksi BPS Pada Perubahan RPJMD 2018-2023											

Capaian indikator makro pembangunan tahun 2019 sebelum terjadinya covid-19 dan tahun 2022 pasca melandainya covid-19 menuju pemulihan ekonomi menunjukkan tren positif dengan beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian target, diantaranya:

- Semakin melandainya pandemi covid-19, mendorong semakin normalnya aktifitas menuju pemulihan perekonomian
- Berbagai program bantuan penanganan dampak Covid-19 menjadi faktor penentu daya tahan dan membangkitkan optimisme perekonomian di Kabupaten Bandung Barat, dengan program tang tepat sasaran dan distribusi yang merata secara adil menjadi harapan utama

- Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari faktor produksi merupakan potensi kekuatan ekonomi Kabupaten Bandung Barat yang cukup penting selain Sumber Daya Alam. SDM ini dapat berperan sebagai faktor produksi tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian
- Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak hanya merupakan tumpuan mata pencaharian penduduk Kabupaten Bandung Barat, tetapi juga sumber aktivitas penduduk yang memperkuat sendi perekonomian baik pada tingkat nasional maupun regional
- Keunggulan sektor UMK ini mampu menampung tenaga kerja Kabupaten Bandung Barat yang jumlahnya melimpah. Meskipun tidak menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, aktivitas UMK mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam inovasi dan operasional usahanya sehingga memungkinkan memenuhi kebutuhan konsumen dengan cepat.
- Pemberian bantuan Modal menjadi yang paling diharapkan dunia usaha hingga mencapai 61,09 persen. Urgensi Bantuan Modal ini menjadi pilihan pertama dari kelompok usaha UMB maupun UMK. Berikutnya Bantuan Lainnya, seperti Peralatan, Ijin, Stabilitas Harga dan Pengembalian ke Kondisi Normal diharapkan sebesar 21,58 persen. Selanjutnya Bantuan Pemasaran juga sebesar 10,33 persen sangat diharapkan oleh pelaku usaha

Sedangkan capaian indikator makro pembangunan tahun 2020 dan 2021 akibat adanya pandemi Covid-19 mempunyai dampak sosial, ekonomi dan kesehatan terutama sektor perekonomian, baik secara Nasional maupun di Kabupaten Bandung Barat hampir seluruh indikator makro pembangunan mengalami tren negatif atau mengalami perlambatan hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat, diantaranya:

- Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar mengakibatkan terhambatnya distribusi barang dan pergerakan manusia sebagai pelaku perekonomian
- melambatnya seluruh lapangan usaha yang berkontribusi terhadap PDRB, kecuali 5 (lima) lapangan usaha antara lain: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Pendidikan
- Penurunan nilai PDRB atas dasar harga berlaku karena pandemi covid-19, sementara jumlah penduduk terus bertambah
- Penurunan angkatan kerja akibat pandemi covid-19, sehingga banyak usia kerja yang terhenti bekerja (PHK) atau enggan mencari pekerjaan
- Meningkatnya angka kemiskinan akibat dampak covid-19 terhadap perekonomian



Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari misi RPJMD. Setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator dan target per tahun untuk mengukur kinerja pembangunan. RPJMD Kabupaten Bandung Barat telah dilakukan reviu pada tahun 2020 dengan beberapa indikator dan target mengalami perubahan, sehingga terdapat beberapa indikator baru (*) dan indikator yang tidak lagi digunakan (**). Untuk menjadi pertimbangan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai berdasarkan target dan realisasi serta tingkat capaian dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018 - 2023, sementara tingkat capaian indikator sasaran RPJMD yang juga menjadi IKU Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.90 Tujuan, Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target dan Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target dan Capaian Kinerja Setelah Perubahan				Target Tahun 2023
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Misi 1 : Meningkatkan Cakupan Dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan Dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Luas Lainnya Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas												
Tujuan 1.1 Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat												
IKT 1.1a Indeks Pendidikan (HLS)	point	11.83	11.95	11.86	12.11	11.87	12.27	11.88	12.44	11.89	12.62	
IKT 1.1b Indeks Pendidikan (RLS)	point	7.78	7.89	8.18	8.02	8.19	8.14	8.20	8.26	8.22	8.38	
Sasaran 1.1.1 Meningkatkan kualitas layanan pendidikan												
IKS 1.1.1.a Indeks Pendidikan (HLS)	Point	11.83	11.95	11.86	12.11	11.87	12.27	11.88	12.44	11.89	12.62	
IKS 1.1.1.b Indeks Pendidikan (RLS)	Point	7.78	7.89	8.18	8.02	8.19	8.14	8.20	8.26	8.22	8.38	
Sasaran 1.1.2 Meningkatkan minat budaya baca												
IKS 1.1.2.a Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Jumlah	17,000	18,000	15,600	21,600	12,428	25,200	5,331	28,800	10,936	32,400	
Tujuan 1.2 Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat												
IKT 1.2 Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup - UHH)	point	71.94	71.98	72.18	72.01	72.52	72.04	72.52	72.08	72.79	72.13	
Sasaran 1.2.1 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan												
IKS 1.2.1.a Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup - UHH)	point	71.94	71.98	72.18	72.01	72.52	72.04	72.52	72.08	72.79	72.13	
Sasaran 1.2.1 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan												
IKS 1.2.1.b Rata-rata jumlah anak dalam keluarga **	angka	2.36	2.36	2.39	2.35	2.39						
IKS 1.2.1.b Total Fertility Rate*	%						2.44	2.43	2.43	2.24	2.42	
Tujuan 1.3 Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Non Dasar Lainnya												
IKT 1.3 Indeks Kebahagiaan	Indeks	N/A	70 -71		70 -71		71 -73,5		71 -73,5		73,6 - 76	
Sasaran 1.3.1 Mewujudkan ketahanan pangan												
IKS 1.3.1.a Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81.4	83.7	83	86	76.8	81	79.1	82	76.8	82.5	
Sasaran 1.3.2 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan												
IKS 1.3.2.a Persentase partisipasi masyarakat terhadap aktivitas kebudayaan daerah**	%	27	27	10	27	25.8						
IKS 1.3.2.a Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan*	%						30	25	32	6	32	
Sasaran 1.3.3 Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat												
IKS 1.3.3.a Indeks Rasa Aman**	%	N/A	0.30	0.76	0.40	N/A						
IKS 1.3.3.a Persentase Penegakan Perda dan Perkada*	%						100	97.91	100	100	100	
IKS 1.3.3.b Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan*	Indeks						75	54	77	77	80	



Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target dan Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target dan Capaian Kinerja Setelah Perubahan				Target Tahun 2023
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Sasaran 1.3.3 Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat												
IKS 1.3.3.a Indeks Rasa Aman**	%	N/A	0.30	0.76	0.40	N/A						
IKS 1.3.3.a Persentase Penegakan Perda dan Perkada*	%						100	97.91	100	100	100	
IKS 1.3.3.b Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan*	Indeks						75	54	77	77	80	
Sasaran 1.3.4 Meningkatkan sinergi dan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana												
IKS 1.3.4.a Indeks Resiko Bencana Indonesia**	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang						
IKS 1.3.4.a Indeks Ketahanan Daerah (IKD)*	Indeks						Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
Sasaran 1.3.5 Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat												
IKS 1.3.5.a Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	47.31	49.73	51.93	50.94	52.10	52.15	52.15	53.36	47.56	54.57	
IKS 1.3.5.b Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skala	N/A	68,6 - 69	75	69,1 – 69,5	58	69,6 - 70	81.20	70,1 – 70,5	83.59	70,6 - 71	
IKS 1.3.5.c Indeks Demokrasi**	Indeks	N/A	68,79 – 70,78	79	70,79 – 71,78	69.09						
IKS 1.3.5.c Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat*	Skala						71,79 – 72,78	34	72,79-73,78	52.18	73,79-74,78	
Tujuan 1.4 Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak												
IKT 1.4 Indeks Pembangunan Gender	Indeks	79.11	79.34	79.29	79.64	79.06	79.34	79.07	79.39	79.69	79.44	
Sasaran 1.4.1 Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat												
IKS 1.4.1.a Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	40	50	64.66	60	73.51	82.34	83.24	91.17	91.82	100	
IKS 1.4.1.b Kontribusi BumDes terhadap PADes**	%	40	48	52	56	45						
IKS 1.4.1.b Persentase Desa Mandiri*	%						21	24	24	37.58	27	
Sasaran 1.4.2 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat												
IKS 1.4.2.a Persentase Pemuda yang memiliki kecakapan hidup**	%	N/A	29	22.03	46.75	10						
IKS 1.4.2.a Presentase Layanan Kepemudaan*	%						7.41	9.20	7.83	7.83	10.3	
IKS 1.4.2.b IKS Indeks Pembangunan Olahraga*	point						0,299 - 0,799	0.41	0,299 - 0,799	0.42	0,299 - 0,799	
Sasaran 1.4.3 Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak												
IKS 1.4.3.a Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53.98	54.03	62.71	54.13	64.53	63.5	65.11	64.31	65.83	65.11	
IKS 1.4.3.b Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	79.11	79.34	79.29	79.64	79.06	79.34	79.44	79.39	79.69	79.44	
IKS 1.4.3.c Kabupaten/Kota Layak Anak*	Predikat						Pratama	Non Katagori	Pratama	Non Katagori	Madya	



Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target dan Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target dan Capaian Kinerja Setelah Perubahan				Target Tahun 2023
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Misi 2: Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing												
Tujuan 2.1 Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan												
IKT 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.85	5.96	5.05	6.04	-2.41	4.17*	3.46	4.64*	5.34	4.88*	
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan												
IKS 2.1.1.a Pertumbuhan Sektor Pertanian	%	7.05	7.2	8.28	7.34	-2.10	7.50	-1.30	7.65	4.11	7.81	
IKS.2.1.1.b Persentase Kenaikan Produksi Peternakan*	%						4	4.1	4	-32	4	
IKS.2.1.1.c Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan*	%						5	4.33	5	5.8	5	
IKS 2.1.1.d Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	7.63	7.79	39.44	7.95	-1.98	8.11	4.88	8.28	6.43	8.45	
IKS 2.1.1.e Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	9.83	10.03	27.6	10.24	-8.15	10.45	2.93	10.67	3.93	10.89	
IKS.2.1.1.f Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	7,000,000	7,000,000	6.531.026	7,500,000	4.088.811	2.000.000*	4,497,692	2.125.000*	5,045,679	2.125.000*	
IKS.2.1.1.g Pertumbuhan PAD sektor pariwisata**	%	10	10	17.26	10	-42.70						
IKS.2.1.1.g Persetasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata*	%						10	3	10	3	10	
Sasaran 2.1.2 Meningkatnya investasi PMDN												
IKS 2.1.2.a Nilai Investasi PMDN	Milyar	325	325	547.69	330	335.67	500*	192,6	550*	704	600*	
IKS 2.1.2.b Jumlah Investor PMDN*	jumlah						190	268	195	68	200	
Sasaran 2.1.3 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada												
IKS 2.1.3.a Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	%	9.19	9.06	8.17	8.95	12.25	11,61*	11.65	11,31*	9.63	10,95*	
IKS 2.1.3.a Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*	%	62.75	64.95	62.09	67.16	59.91	69.36	60.75	71.57	64.37	73.77	
IKS 2.1.3.b Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar*	%						100	100	100	100	100	
Sasaran 2.1.4 Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif												
IKS 2.1.4.a Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	45	52.1	47	53.8	40.9	22*	22	25*	20	28*	
IKS 2.1.4.b Peningkatan Skala Usaha Mikro**	%	N/A	20	20	45	45						
IKS 2.1.4.b Penumbuhan Wirausaha Baru*	P. Usaha						100	100	125	149	150	



Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target dan Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target dan Capaian Kinerja Setelah Perubahan				Target Tahun 2023
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi												
Tujuan 3.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi dan sosial												
IKT 3.1 Indeks Kesulitan Geografis	Indeks	40.06	38.53	31.57	36.98	27.65	35.41	27.59	33.82	26.78	32.22	
Sasaran 3.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaan, melalui berbagai alternatif skema pembiayaan												
IKS 3.1.1.a Indeks Kesulitan Geografis	Skala	40.06	38.53	31.57	36.98	27.65	35.41	27.59	33.82	26.78	32.22	
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial												
IKS 3.1.2.a Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	%	52.58	58.42	37.35	60.17	39.75	61,92	54.00	63,67	59.00	65,42	
Tujuan 3.2 Meningkatkan kualitas lingkungan												
IKT 3.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	N/A	50.46	47.14	50.66	47.07	47,10	50.27	47,15	63.03	47,20	
Sasaran 3.2.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup												
IKS 3.2.1.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	N/A	50.46	47.14	50.66	47.07	47,10*	50.27	47,15*	63.03	47,20*	
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi												
Tujuan 4.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik												
IKT. 4.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	CC	B	CC	BB	CC	BB	B	A	
Sasaran 4.1.1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien												
IKS 4.1.1.a Indeks Merit	Katagori	Katagori II	Katagori II	Katagori II	Katagori II	Katagori III	Kategori III	Kategori III	Kategori III	Kategori III	Kategori IV	
IKS 4.1.1.b Nilai SAKIP	Katagori	B	B	B	BB	B	BB	B	BB	B	A	
IKS 4.1.1.c Opini BPK	opini	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
IKS 4.1.1.d Indeks SPBE	Skala	2.61	2.71	2.41	2.81	3.17	2.71*	2.85	2,81*	2.65	3.00	
Tujuan 4.2 Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas												
IKT 4.2 Indeks Kepasan Masyarakat	Indeks						79,23	80.75	80,23	82.39	81,23	
Sasaran 4.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik												
IKS 4.2.1.a Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76.23	77.23	76.29	78.23	80.29	79,23	80.75	80,23	82.39	81,23	

Sumber : Perubahan RPJMD KBB 2018-2023, Bappelitbangda 2023, diolah

* Indikator baru pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

**Indikator sebelum perubahan RPJMD 2018-2023

Berdasarkan tabel tersebut diatas, sampai dengan tahun 2022 dari 40 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah telah memenuhi target sebanyak 24 indikator dan 16 indikator masih belum memenuhi target, dalam hal ini masih terdapat beberapa indikator kinerja sampai dengan akhir tahun perencanaan (2023) yang mungkin atau bahkan tidak akan tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah sebagai indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2022 belum mencapai target dan sesuai target tahun 2023 HLS sebesar 12,62 dan RLS 8,38 pelaksanaan urusan pendidikan harus menjadi prioritas untuk pencapaian target diakhir tahun perencanaan.
2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan sebagai IKU Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan target kunjungan tahun 2022 sebanyak 28.800 dan target tahun 2023 sebanyak 32.400 dengan realisasi s.d tahun 2022 sebanyak 10.936 masih harus menjadi perhatian dinas bersangkutan untuk dapat memenuhi target kunjungan perpustakaan
3. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum memenuhi target dengan capaian tahun 2022 sebesar 76,8 poin dan target tahun 2023 sebesar 82,5 poin
4. Capaian indikator Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2022 sebesar 47,56 persen belum memenuhi target dan melihat target tahun 2023 sebesar 54,57 persen, indikator pada Dinas Sosial ini harus menjadi perhatian untuk pencapaian target diakhir tahun perencanaan 2023
5. Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat yang menjadi IKU Bakesbangpol sampai dengan tahun 2022 belum mencapai target apalagi dengan melihat target di tahun 2023 sebesar 73,79-74,78 dalam rangka meningkatkan pemahaman politik masyarakat menghadapi Pemilu serentak di tahun 2024 hendaknya indikator ini perlu perhatian dalam pencapaian target di tahun 2023
6. Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai IKU DP2KBP3A sampai tahun 2022 masih berada pada predikat non katagori melihat target tahun 2023 untuk mencapai katagori Madya perlu adanya dukungan program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja diakhir tahun perencanaan 2023
7. Pertumbuhan Sektor Pertanian, sebagai IKU DKPP sampai dengan tahun 2022 dengan capaian sebesar 4,11 persen belum mencapai target baik di tahun 2022 maupun target di tahun 2023 dengan target sebesar 7,81 persen
8. Persentase Kenaikan Produksi Peternakan, pada tahun 2022 akibat adanya kasus penyakit kuku dan mulut pada ternak capaian kinerja IKU Dispernakan ini tidak tercapai

9. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, walaupun sektor industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kab. Bandung Barat tetapi secara pertumbuhan belum memenuhi target dengan capaian sampai dengan tahun 2022 sebesar 6,43 persen masih di bawah target tahun 2023 sebesar 8,45 persen
10. Target indikator Pertumbuhan Sektor Perdagangan sebesar 10 persen sampai dengan tahun 2022 belum tercapai, walaupun sektor perdagangan memberikan andil kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung Barat hal ini disebabkan masih belum normalnya sektor ini akibat dampak pandemi covid-19
11. Persetasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata, subsektor pariwisata kontribusinya tidak lagi dihitung langsung terhadap PDRB tetapi subsektor pariwisata sudah terbagi ke beberapa subsektor yang berkontribusi terhadap PDRB diantaranya pada sektor perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan, transportasi dan jasa sehingga perhitungan indikatornya sampai dengan tahun 2022 belum bisa dihitung oleh Disbudpar selaku dinas pengampunya.
12. Untuk melihat kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). IKU Disnaker ini tahun 2022 tidak mencapai target hal ini disebabkan karena akibat adanya dampak pandemic covid-19, banyak usia kerja yang terhenti bekerja atau enggan mencari pekerjaan sehingga TPAK masih rendah dengan target tahun 2023 sebesar 73,77 persen.
13. Pertumbuhan Koperasi Sehat, dengan target sampai tahun 2023 adalah 28% IKU Diskop UKM ini belum tercapai dengan capaian s.d tahun 2022 adalah sebesar 20%
14. Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial, sampai dengan tahun 2022 baru tercapai sebesar 59 persen dengan target di tahun 2023 sebesar 65,42 persen
15. Nilai SAKIP, rata-rata nilai SAKIP perangkat daerah Kab. Bandung Barat tahun 2022 masih berada pada katagori B hal ini belum sesuai target bahkan target tahun 2023 adalah katagori A
16. Indeks SPBE, target indikator penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sampai dengan tahun 2022 belum tercapai malah cenderung turun dengan capaian tahun 2022 sebesar 2,65 poin dimana target tahun 2023 adalah sebesar 3,00 poin

Sedangkan capaian indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/impact dan hasil/outcome tersaji pada tabel berikut:



**Tabel 2.91 Capaian Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022**

No	Aspek / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja (Tahun)			
			2019	2020	2021	2022
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Pertumbuhan PDRB (LPE)	%	5,05	-2,41	3,46	5,34
2	Laju Inflasi	%	2,52	1,75	1,65	7,45
3	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	27,12	25,99	26,83	28,65
4	Indeks Gini	poin	0,36	0,38	0,36	0,35
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	9,38	10,49	11,3	10,82
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,27	68,08	68,29	69,04
7	Angka rata-rata lama sekolah	Angka	8,18	8,19	8,20	8,22
8	Angka Harapan lama sekolah	Angka	11,86	11,87	11,88	11,89
9	Angka usia harapan hidup	Angka	72,18	72,34	72,52	72,79
10	Persentase balita gizi buruk	%	0,36	1,34	0,99	0,49
11	Prevalensi balita gizi kurang	%	4,99	6,27	5,54	4,12
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	N/A	44	51	56
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,09	59,91	60,75	64,37
14	Tingkat pengangguran terbuka	%	8,17	12,25	11,65	9,63
15	Rasio penduduk yang bekerja	%	91,5	87,75	88,35	90,37
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,29	80,29	80,75	82,39
17	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	15,58	14,87	19,72	
18	Opini BPK	Skor	WTP	WDP	WTP	WTP
19	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	83	76,8	79,1	76,8
20	Cadangan pangan Pemerintah Daerah	Ton	0	0	0	10
21	Penanganan daerah rawan pangan	Desa	9	2	0	0
22	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	13,41	13,28	12,59	12,87
23	Produksi sektor pertanian	Ton	405560	387939	444368	457816
24	Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	%	N/A	N/A	4,1	-32
25	Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan	%	N/A	N/A	4,33	5,8
26	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	39,96	40,32	41,2	41,6
27	Pertumbuhan Industri yang berizin	Jumlah	N/A	N/A	2132	2240
28	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,58	12,9	12,7	12,35
29	Kontribusi sektor Informasi dan Komunikasi thd PDRB	%	1,67	2,15	2,19	2,12
No	Aspek / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja (Tahun)			



			2019	2020	2021	2022
3. ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Juta Rupiah	8684	8455	8546	9044
2	Nilai Tukar Petani	poin	109,10	101,42	108,34	112,5
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	47,26	45,82	45,32	45,43
4	Persentase Desa Mandiri	Desa	N/A	N/A	24	37,58
5	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	78	58,47	97,91	100
6	Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	%	N/A	N/A	54	77
7	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori indeks	N/A	N/A	Sedang	Sedang
8	Rasio ketergantungan	%	47,22	45,11	45,31	44,59

**Tabel 2.92 Capaian Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2020**

No	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Awal Tahun (2018)	Target dan Capaian Kinerja			
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
2. ASPEK PELAYANAN UMUM							
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1	URUSAN PENDIDIKAN						
1	APK PAUD	%	99,49%	99,52%	68,29%	99,61%	50,48%
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	101,13%	101,05%	100,20%	99,68%	102,77%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	98,60%	88,56%	97,74%	89,75%	92,93%
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95,37%	87,64%	96,72%	88,82%	96,16%
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	96,16%	88,56%	102,98%	89,75%	100,07%
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	88,34%	89,93%	79,65%	91,46%	80,44%
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	%	77,52%	77,43%	N/A	78,72%	78,71%
8	Persentase Lembaga Terakreditasi	%	10,05%	10,05%	10,05%	10,24%	38,30%
9	Presentase guru yang telah tersertifikasi	%	40,50%	40,87%	54,70%	41,56%	33,90%
10	Persentase Guru SD/MI layak	%	91,41%	93,55%	93,02%	94,01%	83,81%
11	Persentase Guru SMP/MTs layak	%	86,00%	79,03%	90,08%	80,09%	85,59%
12	Ketersediaan dan kompetensi pendidik sesuai ketentuan Sumber Daya Manusia (SDM)	%	N/A	89,01%	91,55%	89,72%	84,70%
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	84,12	85,89	86,97	87,35	88,35
2	URUSAN KESEHATAN						



14	% balita wasting (BB/TB)	%	0,7%	0,7%	1,37%	0,66%	4,18
15	% balita stunting /pendek (TB/U)	%	N/A	7,77%	7,60%	7,76%	13,76%
16	% balita underweight (BB/U)	%	4,3%	4,2%	4,99%	4,18%	7,61%
17	% ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	%	40,0%	40,1%	72,09%	40,15%	66,30%
18	Penurunan % ibu hamil anemia	%	5,1%	5,1%	9,71%	5,12%	7,47%
19	Peningkatan % rumah tangga mengkon-sumsi garam beriodium	%	98,8%	98,8%	97,0%	98,83%	97,59%
20	Cakupan persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	95,0%	95,0%	93,0%	95%	85%
21	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	%	91. 40 %	≥ 90 %	59,0%	≥ 90 %	78,2
22	Presentase orang berisiko di tes HIV Standar	%	99. 50 %	≥ 90 %	39,47%	≥ 90 %	0
23	Angka Kematian DBD (Case Fatality Rate DBD)	%	0,5%	≤ 5 %	0,29%	≤ 5 %	0,357
24	Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan	%	92,0%	≥ 90 %	99,78%	≥ 90 %	98,55
25	Target Penemuan Pneumonia Balita	%	4,2%	≥ 4.62 %	34,09%	≥ 4,62 %	18,46
26	Target Penemuan Diare Semua Umur	%	≥ 10 %	14,0%	47,92%	≥ 10 %	10
27	Proporsi Cacat Tingkat 2 Penderita Baru Kusta	%	2,0%	≤ 15 %	0,0%	≤ 15 %	0
28	Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita baru Filariasis	%	100,0%	≥ 85 %	100,0%	≥ 85 %	0
29	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	75,0%	100,0%	99,56%	100%	97%
30	Persentase cakupan pendataan pengembangan SDM Kesehatan sesuai standar kompetensi	%	75,0%	80,0%	79,0%	85%	0%
31	Cakupan sarana obat dan makanan yang sesuai standar	%	35,0%	36,0%	8,7%	47%	0%
32	Persentase apotek yang memenuhi standar	%	100,0%	28,0%	2,8%	43%	0%
33	Persentase Toko obat yang memenuhi standar	%	100,0%	50,0%	1,6%	60%	0%
34	Persentase instalasi farmasi klinik & instalasi farmasi rumah sakit yang memenuhi standar	%	100,0%	10,0%	0,8%	20%	0%
35	Persentase instalasi farmasi puskesmas yang memenuhi standar	%	0,0%	100,0%	2,6%	100%	0%
36	Persentase sarana yang menyediakan produk legal yang memiliki izin edar	%	90,0%	10,0%	0,8%	20%	0%
37	Cakupan produk pangan yang aman dan bersertifikat	%	100,0%	20,0%	11,34%	40%	0%
38	Persentase konsumen/ masyarakat yang paham mengenai bidang obat dan makanan	%	100,0%	100,0%	14,90%	100%	0%
39	Tingkat Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin yang terlayani asuransi kesehatan (premi BPJS, Jamkesda)	%	12,0%	12,0%	1,71%	22%	10%
40	Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS rumah tangga	%	53,0%	54,0%	50,0%	56%	47%
41	Persentase kelompok masyarakat yang menerapkan PHBS/Germas	%	28,5%	42,8%	42,0%	57,10%	0,00%
42	Persentase desa yang ber- PHBS	%	34,0%	40,0%	40,0%	45%	25%
43	Cakupan kecamatan yang melaksana-kan program pengembangan kab/kota sehat	%	66,6%	66,6%	66,60%	66,60%	100,00%
44	Persentase Ketersediaan obat dasar untuk 18 bulan kedepan di Puskesmas dan RSUD	%	100,0%	90,0%	90,0%	100%	99%
45	Persentase Puskesmas dan RSUD yang terdistribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai Kebutuhan	%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%
46	Persentase sediaan obat dasar dan perbekalan kesehatan dengan mutu yang terjaga baik	%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%
47	Persentase Tingkat Pelayanan di Puskesmas/ Pustu	%	75,0%	80,0%	55,0%	85%	20,91%
48	Persentase Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan)	%	38,0%	38,0%	38,0%	56%	21,88%
49	Cakupan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan sesuai SPM	%	77,3%	100,0%	86,5%	100%	66%



50	Cakupan puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan anak balita sesuai standar	%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%
51	Tingkat pelayanan kesehatan bayi sesuai standar SPM	%	50,53%	100,0%	93,9%	100%	89%
52	Tingkat cakupan pelayanan kesehatan Ibu sesuai SPM dan Indikator PISPK	%	85,73%	100,0%	90,5%	100%	85%
53	Cakupan Angka Kematian Ibu (AKI)	1000 KH	4,8	4,69	4,1	4,53	3,8
54	Cakupan Kematian Bayi (AKB)	10.000 KH	127	124	125	121	122
55	Tingkat status Kesehatan anak sekolah sesuai standar SPM	%	100,0%	100,0%	88,0%	100%	93%
56	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja sesuai standar	%	50,0%	63,0%	97,0%	69%	78%
57	Persentase Puskesmas yang memiliki Pos UKK yang memadai & sesuai standar	%	37,5%	50,0%	50,0%	60%	46%
58	Tingkat Penyelenggaraan pemeriksaan jemaah haji setiap tahun yang sesuai standar	%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	56%
59	Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan Kesorga di Masyarakat secara rutin/ berkesinambungan	%	50,0%	60,0%	100,0%	70%	63%
60	Tingkat Cakupan Pelayanan penyakit tidak menular sesuai standar SPM	%	43,8%	100%	66,8%	100%	73%
61	Tingkat Pengembangan Puskesmas Dengan Nursing Center	%	9,0%	12,0%	0,0%	16%	4%
62	Persentase Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji sesuai standar	%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	78%
63	Terpetakan Informasi Keluarga Sehat pada program PIS PK secara lengkap	%	16,0%	100,0%	50,0%	100%	30%
64	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas dengan hasil Kategori 1	%	12,5%	19,0%	19,0%	25%	30%
65	Persentase Keberhasilan Tindak lanjut Intervensi dari hasil Pendataan Keluarga Sehat pada program PIS PK di 32 Puskesmas	%	0%	19%	50%	37,50%	0,00%
66	Peningkatan Jumlah Pasien Yang Memanfaatkan Pelayanan RSUD Cikalongwetan	%	137,5%	5,0%	209,7%	5%	0%
67	Tingkat Penyediaan Sarana & Prasarana RSUD Cikalongwetan Yang Memadai Sesuai Standar RS Tipe D	%	50,0%	60,0%	92,78%	70%	87%
68	Peningkatan Jumlah Pasien Yang Memanfaatkan Pelayanan RSUD Cililin	%	N/A	4,0%	4,1%	4%	68%
69	Tingkat Penyediaan Sarana & Prasarana RSUD Cililin Yang Memadai Sesuai Standar RS Tipe D	%	65%	100%	87,2%	100%	61%
70	Peningkatan Jumlah Pasien Yang Memanfaatkan Pelayanan RSUD Lembang	%	29%	25%	13,3%	25%	18%
71	Tingkat pelayanan kesehatan lansia sesuai SPM	%	13,93%	100%	69,54%	100%	34%
72	Tingkat kemandirian Lansia	%	0,01%	2%	85,16%	5%	34%
73	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	%	45%	50%	50%	55%	57%
74	Persentase TPM (rumah makan dan jasaboga) yang memenuhi syarat kesehatan	%	25,0%	35,0%	35,0%	45%	46%
75	Persentase SAB yang memenuhi syarat kesehatan	%	25,0%	28,33%	28,0%	31,67%	29,50%
76	Persentase desa dengan status STBM	%	45,0%	55,0%	50,0%	65%	95%
77	Tingkat Ketepatan Waktu puskesmas dalam pelaporan dan pelaksanaan program kesling secara lengkap & sesuai standar	%	81,25%	100,0%	83,0%	100%	93%
78	Persentase Penduduk dengan jaminan kesehatan yang terlayani (total)	%	N/A	100,0%	86,24%	100%	6400%
79	Cakupam kualitas pelayanan kesehatan rujukan	%	N/A	100%	0,14%	100%	0,20%
80	Cakupan kualitas pelayanan kesehatan dasar	%	N/A	100,0%	0,48%	100%	0,50%
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
81	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	63,11	78,40%	72,37%	88,22%	77,50%



82	Kondisi jembatan baik/seluruh jembatan	Jembatan	N/A	2	3	4	1
83	Persentase jembatan yang dibangun dalam kondisi baik	%	63,11%	78,40%	72,37%	83,80%	77,50%
84	Jembatan yang direhabilitasi pada Tahun-N	jembatan	N/A	10	9	20	10 (1)
85	persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	55%	65%	65%	75%	0,00
86	Persentase Pengaduan Masyarakat Tentang Pelanggaran Tata Ruang yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%
87	Realisasi RTRW/Rencana Peruntukan	Dokumen	5	4 Dokumen	4	2 Dokumen	8 Dokumen
88	implementasi dokumen perencanaan pembangunan di kawasan pusat pertumbuhan	Dok RDTR	6	3	3	3	3
89	jumlah Dokumen Kondisi Jalan dan Jembatan	Dokumen	3	3 Dokumen	2	3 Dokumen	2 Dokumen
90	Tersedianya Dokumen Informasi data dasar Jalan dan Jembatan dan Jembatan	Dokumen	100	1	2		-
91	Persentase Tersedianya Dokumen Informasi data dasar Jalan dan Jembatan	%	100	100	100	100	0
92	Jumlah Pendampingan pembangunan di wilayah desa	Desa	10	0	0	3	3
93	Jumlah SDM Teknik yang tersertifikasi	Orang	N/A	80	80	85	85
94	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana untuk Rumah sederhana sehat	Lokasi	64	15	193	129	158,00
95	Presentase Rumah tangga pengguna air bersih	%	52,58	55	43,99	-	-
96	Meningkatnya Infrastruktur Persampahan	Lokasi	20	6	2	-	-
97	Persentase Tersedianya Akses Air Minum Yang Memadai	%	61,75	62,75%	62,75%	63,75	65,50%
98	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi/jumlah rumah tinggal	%	76,33	78,33	78,33%	80,33	61,18%
99	Cakupan pelayanan air limbah	unit	N/A	30	30	33	30,00
100	Bangunan Publik Yang Memadai	unit	N/A	8	9	10	4
101	Persentase proporsi turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	%	30%	40%	35%	50%	-
102	Persentase panjang saluran drainase/ gorong-gorong yang direhabilitasi dalam kondisi baik	%	10%	20%	20%	30%	30%
103	persentase areal daerah Irigasi dalam kondisi baik	%	65%	68,81%	68,81%	72,62%	0,69
104	Jumlah titik pantau	Lokasi	N/A	2	2	4	0
105	Presentase Drainase dalam kondisi baik	%	10%	20%	20%	30%	26%
106	Jumlah Reservoir yang terbangun	lokasi	5	0	0	8	-
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
107	Jumlah taman yang terbangun	lokasi	18	23	22	29	23 (1)
108	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	24.000	21.653	1.140	17.252	19.485 (741)
109	Luas kawasan kumuh yang tertangani (Ha)	Ha	53,84	0,037	5,06	0,03	112,4
110	Jumlah Perumahan formal yang melakukan proses serah terima PSU kepada Pemda	%	5.125	6,30%	5%	10.24%	2.04%
111	Jumlah lokasi air bersih dan sanitasi terbangun	lokasi	7	10	12	15	12
112	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan kawasan KTP2D	Kawasan	3	5	5	5	0
113	Jumlah lokasi Pembangunan Sarana & Prasarana di kawasan CAP-RPP dan Citarum Harum	Desa	9	12	8	15	0
114	Jumlah rehabilitasi unit rumah akibat bencana Sosial	Paket	1	2	1	5	0
115	Persentase Luas lahan dalam perkantoran Pemda yang dikuasai	Ha	50	62,4	0,9	70	0,9
116	Persentase Luas lahan Luar perkantoran Pemda yang dikuasai	Ha	0	0	0	50	0



117	Jumlah Lokasi Penataan Kawasan Permukiman Agropolitan	Desa	7	7	7	20	0
118	Jumlah penyelesaian kasus konflik pertanahan	Kasus	2	4	2	6	2
119	Jumlah lokasi areal prasarana pemakaman yang akan dibangun	Lokasi	6	13	20	20	1
120	Jumlah lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan di permukiman	Desa	13	12	10	12	0
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
121	Persentase berkurangnya penyakit masyarakat	%	75%	75%	68%	78%	75%
122	Persentase laporan gangguan masyarakat yang tertangani	%	76%	76%	77,77%	78%	58%
123	Persentase kejadian kebakaran tertangani sesuai SOP	%	40%	50%	44,14%	60%	73%
124	Persentase penyelesaian kasus konflik sosial	%	100%	100%	98,26%	100%	100%
125	Jumlah forum dialog kebangsaan dan antar umat beragama	Kegiatan	10	10	5	9	8
126	Tingkat pemahaman politik di masyarakat	Kegiatan	2	4	3	5	5
127	Persentase Kebencanaan yang disebarluas-kan	%	95%	95%	95%	95%	0,6%
128	Persentase respon penanganan bencana	%	95%	95%	95%	95%	100%
129	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	95%	95%	95%	95%	1,2%
130	Persentase Penanganan Darurat Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%
6	URUSAN SOSIAL						
131	Persentase Korban bencana , eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya serta terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%
132	Persentase Keluarga Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	%	100%	100%	100%	100%	100%
133	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	%	100%	100%	100%		
134	Persentase penyandang cacat dan trauma yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	%	100%	100%	100%	100%	100%
135	Persentase panti asuhan/panti jompo yang sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%
136	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks narkoba, dan penyakit sosial lainnya) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100%	100%	100%	100%	100%
137	Persentase Kader Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	%	100%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1	URUSAN TENAGA KERJA						
138	Persentase calon pencari kerja yang dilatih	%	100%	20%	20%	40%	20%
139	Persentase Terserapnya Pencari Kerja Terlatih pada pasar Kerja	%	100%	100%	93%	100%	100%
140	Persentase Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
141	Presentase Lembaga Advokasi gender dan Anak yang Aktif	%	80%	81%	81%	82%	82%
142	Persentase Perempuan yang aktif di Organisasi Sosial dan Pemerintahan	%	7%	8%	8%	8,50%	8,00%
143	Cakupan Kasus tindak Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%
144	Cakupan kasus Kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%
145	Cakupan kasus perdagangan manusia yang ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%
146	Jumlah Desa Layak Anak	Jumlah	88	116	116	128	116
3	URUSAN PANGAN						



147	Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	84,6	87,2	88,73	89,8	83,03
148	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	16,5	51	0	68	0
149	Penurunan jumlah desa rawan pangan	Desa	10	9	9	8	2
150	Jumlah sertifikasi/ label produk pangan dan pangan aman	Jumlah	40	47	38	54	48
4	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
151	Persentase Penanganan Sampah	%	12%	14%	12%	16%	14%
152	Indeks kualitas Air	%	N/A	29,02%	40,26%	29,40%	40,00%
153	Indeks kualitas Udara	%	N/A	78%	61,22%	78,25%	61,25%
154	Area non hutan yang dihindarkan	Ha	N/A	1	1	1	0
155	Lokasi area sempadan sungai yang dikonservasi	lokasi	N/A	1	1	1	0
156	Persentase Informasi dan lingkungan hidup yang dapat di akses masyarakat	%	N/A	100%	100%	100%	100%
157	Persentase Emisi sumber tidak bergerak yang memenuhi baku mutu kualitas udara	%	N/A	10%	17,14%	15%	0%
158	Persentase Effluent IPAL Yang Memenuhi Kualitas Limbah Cair	%	N/A	10%	5%	15%	17%
5	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
159	Persentase Penduduk Memiliki KTP-EL	%	86%	88%	95%	90%	99,90%
160	Persentase Penduduk Ber- Akta Kelahiran	%	24%	28%	95%	32%	32,50%
161	Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	%	74%	76%	75%	79%	56,81%
162	Persentase Anak yang Memiliki KIA	%	2%	10%	11%	14%	18,10%
163	Persentase penerbitan Akta Kematian	%	39%	25%	12,74%	28%	46,70%
164	Persentase Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan	%	0%	10%	8,89%	15%	26,66%
6	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
165	Persentase Posyandu Mandiri	%	29%	30%	40%	35%	41%
166	Persentase PKK Berprestasi	%	9,7%	9,7%	64,66%	19,40%	19,40%
167	Persentase LPM Berprestasi	%	9,7%	9,7%	9,70%	19,40%	19,40%
168	Meningkatnya Unit Usaha BUMDes	Unit BUMDES	41	66	52	90	74
169	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) Yang Terbentuk	Unit Posyantek	12	13	14	14	14
170	Jumlah Kemitraan Yang Terbentuk	UPK	12	12	12	13	12
171	Persentase Administrasi Desa Yang Tertib	%	22%	37%	33%	35%	35%
172	Persentase Pemenuhan SPM Desa	%	N/A	30%		50%	0%
173	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	10%	23,75%	100%	35,9%	100,00%
174	Persentase usulan DSP yang masuk ke RKPd	%	100%	100%	100%	100%	100%
175	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
176	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
177	Tersusunnya dokumen laporan monitoring hibah Bansos dan Bantuan Keuangan	Dok.	1	1	1	1	1
178	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
179	Persentase usulan DSP yang masuk Ke RKPd	%	100%	100%	100%	100%	100%
180	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
181	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
182	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
183	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	
184	Persentase Usulan DSP yang masuk Ke RKPd	%	100%	100%	100%	100%	100%



185	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
186	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	
187	Tersusunnya dokumen laporan monitoring hibah Bansos dan Bantuan Keuangan	Dok.	1	1	1	1	1
188	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
189	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintah	%	100%	100%	100%	100%	100%
190	Persentase Usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	80%	100%	100%
191	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
192	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
193	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
194	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
195	Persentase Usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
196	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
197	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
198	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
199	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	99%	100%	100%
200	Persentase usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
201	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
202	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
203	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
204	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
205	Persentase Usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
206	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
207	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	99,61%	100%	100%
208	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
209	Persentase Usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
210	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
211	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
212	Presentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
213	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
214	Persentase Usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
215	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
216	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
217	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsasan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
218	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
219	Persentase Usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
220	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
221	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
222	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
223	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
224	Persentase usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
225	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
226	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
227	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
228	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%



229	Persentase Usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
230	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
231	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
232	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
233	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
234	Persentase usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
235	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
236	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	99,9%	100%	100%
237	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
238	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
239	Tersusunnya dokumen laporan monitoring hibah Bansos dan Bantuan Keuangan	Dok.	1	1	1	0	0
240	Persentase Usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
241	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
242	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
243	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
244	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
245	Persentase usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
246	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
247	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
248	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
249	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
250	Persentase usulan DSP yang masuk Ke RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%
251	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	%	100%	100%	100%	100%	100%
252	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
253	Persentase fasilitasi kegiatan kebangsaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
254	Persentase kegiatan KDH yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA						
255	Cakupan KB Aktif	%	73,15%	73%	73,38%	73,65%	79,86%
256	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	23,39%	23,45%	21,81%	23,50%	21,09%
257	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 th	%	2,52%	0,00%	2,44%	2,47%	2,46%
258	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	47,87%	47,37%	31,54%	48,87%	33,83%
259	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,93%	13,5%	13,25%	13%	10%
260	Cakupan Kampung KB di setiap Desa	Jumlah	108	165	130	200	160
261	Jumlah Kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, non Formal dan Informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	0	14	17	20	17
262	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
263	Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
264	Anggota Kelompok UPPKS PUS ber KB	%	91,58%	91,75%	92,99%	92%	92%
265	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	100%	100%	100%	100%	100%
266	Masyarakat memahami cara pencegahan dan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	angka	2,65	3,37	3,29	3,37	3,31



267	Cakupan kerersediaan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	100%	100%	100%	100%	100%
268	Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang terlatih	angka	55	55	55	75	55
269	Jumlah Kelompok BKB Holistic Integratif	angka	84	80 Kelompok	80 Kelompok	80 Kelompok	80
8	URUSAN PERHUBUNGAN						
270	Penurunan presentase kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten	kejadian	245	233%	372 (51.83%)	221 (10%)	146
271	Peningkatnya Kecepatan Kendaraan Pada Ruas Jalan yang menjadi kemacetan	Km/jam	29,49	32,44	29,49	35,39	31,55
272	Pemasangan rambu di ruas jalan Kabupaten	unit	5115	5555	5268 (51.49%)	6169 (60.3 %)	5319
273	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	12,78	11,61	12,79%	12%	0,80
274	Persentase Jangkauan Pelayanan Terminal Di setiap Kecamatan	%	37,5	43,75	43,75%	56,25%	43,75%
275	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02%
276	Persentase jangkauan pelayanan transportasi umum disetiap desa	%	43,03	43,03	43%	44,85%	43,03%
277	Persentase Panjang Jalan yang terlayani PJU	(%)	3610 (22.59 %)	4170 (26.10%)	4186 (31,86%)	6170 (49,96%)	4258
278	Jumlah Orang yang melalui terminal/ dermaga per tahun	Orang	3023400	2007600	1280542	2.208.360	74663
279	Jumlah Terminal Bus	Unit	6	7	7	9	7,00
280	Jumlah Kendaraan Laik Jalan	Unit	18.744	37.488	38.600	39.362	16.509
9	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
281	Presentase informasi pembangunan yang telah tersebarluaskan	%	20,88%	27,84%	30%	41,76%	39,27%
282	Persentase aplikasi teknologi informasi pemerintahan yang termanfaatkan	%	14%	20%	20%	40%	40%
10	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
283	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	N/A	100	50	200	200
284	Presentase Peningkatan Koperasi Sehat Aktif	%	78,69%	79,62%	81%	80,20%	85,00%
285	Jumlah Koperasi Baru	Koperasi	10	30	27	35	40
286	Jumlah kegiatan dalam iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Kegiatan	4	6	3	7	2
287	Jumlah kegiatan pendukung usaha mikro kecil menengah	Kegiatan	2	4	2	4	3
11	URUSAN PENANAMAN MODAL						
288	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	16%	18%	19%	20%	14,19%
289	Persentase Dokumen yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%
290	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%
291	Persentase waktu proses Pelayanan perizinan sesuai SOP	%	81%	84%	87%	100%	68%
12	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
292	Persentase Pemuda yang memiliki kecakapan hidup	%	100%	29%	22,03%	46,75%	21,79%
293	Persentase Kenaikan Pemuda yg berwirausaha	%	100%	20%	55,41%	40%	10%
294	persentase Pemuda yang terdata	%	100%	100%	0%	100%	100%
295	Persentase Sarana dan Prasarana kepemudaan	%	100%	0%	0%	25%	0%
296	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi yang mengikuti Kejuaraan	%	100%	7,04%	69,40%	7,80%	0,00%
297	Persentase Angka Partisipasi Olahraga di Masyarakat dan Menghasilkan Masyarakat Sehat dan Berprestasi	%	100%	14,56%	14,56%	16%	19,98%
298	Persentase Penyelenggara-raan PORDA	%	100%	0%	0%	-	-
299	Persentase Prasarana dan sarana kegiatan olahraga dalam kondisi baik	%	100%	30%	10%	50%	20,66%



300	persentase Pelatih/Instruktur kegiatan olahraga yang bersertifikat	%	100%	5%	0%	25%	25%
301	Persentase Partisipasi masyarakat dalam olahraga	%	100%	100%	100%	100%	100%
13	URUSAN STATISTIK						
302	Persentase data statistik sektoral yang telah dikelola dan dipublikasikan	%	50%	50%	70%	100%	74,5%
14	URUSAN PERSANDIAN						
303	Persentase data dan informasi yang sudah memperoleh pengamanan	%	0%	2%	2%	13,33%	6,20%
15	URUSAN KEBUDAYAAN						
304	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	0
305	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	3	18	10	48	4
306	Penyelenggaraan festival seni dan budaya berskala nasional	Festival	3	3	2	4	1
307	Jumlah nilai-nilai budaya lokal daerah yang dilestarikan	Ritual	8	17	5	17	1
16	URUSAN PERPUSTAKAAN						
308	Persentase perpustakaan desa yang aktif	%	40%	60%	60%	75%	45%
309	Persentase Pengelola Perpustades dan Taman Baca masyarakat yang terbina	%	40%	60%	60%	75%	45%
310	Persentase Jenis Bahan Pustaka	%	23,78%	25,00%	23,78%	26,00%	24%
17	URUSAN KEARSIPAN						
311	Persentase data dan informasi yang sudah memperoleh pengamanan	%	4,44%	15%	15%	25%	25%
312	Persentase Penyelamatan Arsip Statis	%	8,88%	20%	20%	25%	25%
313	Persentase Cakupan Arsip Statis dan Dinamis yang sudah dikelola	%	8,88%	20%	20%	40%	30%
314	Persentase Bangunan Publik Yang Memadai	%	20%	40%	20%	80%	40%
	URUSAN PILIHAN						
1	URUSAN PARIWISATA						
315	Persentase kegiatan promosi pariwisata dan budaya yang efektif	%	100%	100%	100%	100%	100%
316	Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi standar	%	20%	40%	20%	40%	23,31%
317	Jumlah kemitraan antar pelaku usaha pariwisata dan stakeholder yang terjalin	Kemitraan	5	5	5	5	-
318	Jumlah sumber daya manusia pelaku penggerak pariwisata yang meningkat kompetensinya	Orang	100	75	30	100	70
319	Jumlah pelaku usaha industri kreatif	Orang	100	100	200 Orang	150 orang	350
320	Perluasan sub sektor ekonomi kreatif	sub sektor	9	10	9	1	10
2	URUSAN PERTANIAN						
321	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Ton	0	0	0	480,591	387.939
322	Jumlah Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan	kelompok	3	5	5	7	5
323	jumlah produksi Tanaman Hortikultura	Ton	3.882	4.270	5270	4697	8731
324	jumlah penangkar benih/ bibit tanaman hortikultura	Jumlah	8	10	10	12	10
325	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	6006,33	6119,54	7.008.08	6.239	8.890
326	Jumlah Penangkar Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah	6	8	8	10	8
327	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Ton	341,545	351,659	3.881,30	0	0
328	Persentase randemen Tanaman Pangan	%	68	69	72	70	73
329	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan	%	20%	20%	20%	0	0



	daerah						
330	Jumlah petani mahir pengolahan tembakau	Orang	26	50	75	100	0
331	Jumlah produksi tembakau	Ton	105	110,25	120,88	115,76	0
332	NTP (nilai Tukar Petani)	Poin	109	109,05	109,10	109,1	-
333	Jumlah ahli pertanian yang berkualitas (mandatory RPJPD KBB)	Orang	73	78	83	83	83
334	Jumlah penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis	Orang	60	120	19	180	145
3	URUSAN PERRDAGANGAN						
335	Persentase Pasar yang Dikelola	%	100%	100%	83,97%	100%	100%
336	Persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	%	83,10%	91,66%	89,66%	92%	89%
337	Persentase peningkatan dan pengembangan ekspor	%	85,99%	87%	72%	90%	78%
338	Persentase pembinaan organisasi PKL dan asongan	%	100%	100%	99,61%	100%	100%
4	URUSAN PERINDUSTRIAN						
339	pengembangan IKM	jumlah	9992	10092	7067	10192	7205
340	Persentase peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	%	98,80%	100%	96,15%	100%	100%
341	Persentase peningkatan kemampuan teknologi industri	%	98,38%	100%	97,01%	100%	100%
342	Persentase pengembangan sentra-sentra industri potensial	%	96,35%	100%	90,55%	100%	100%
5	URUSAN PETERNAKAN						
343	Produksi Daging	Ton	23,526	24,114	25,003	24,717	24,769
344	Produksi Telur	Ton	1,325	1,358	1,665	1,392	1,405
345	Produksi Susu	Ton	74,822	78,563	79,950	82,491	84,21
346	Prevalensi Brucellosis (%)	Persen	6	5,5	3,20%	5%	3,50%
347	Cakupan pelayanan kesehatan hewan (%)	Persen	37,5	46	103%	53,50%	59,28%
348	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Peternakan	Kelompok	54	60	59	65	62
349	Persentase Pencemaran Bahan Pangan Asal Hewan	Persen	17%	15%	14,50%	10%	10%
350	Persentase kelahiran Ternak (%)	Persen	70%	72%	72,30%	74%	74%
351	Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi peternakan	Kelompok	5	7	7	10	12
352	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Ternak/Tahun	Kelompok	10	10	10	10	12
6	URUSAN PERIKANAN						
353	Presentase kenaikan Produksi Benih Ikan	Juta Ekor	88,5	177,5	188,7	187,4	190,7
354	Persentase Peningkatan Produktivitas Budidaya perikanan	Ton	3,059	3,518	3,543	4,045	4,072
355	Presentase kenaikan Jumlah RTP	RTP	2090	2195	2,254	2,31	2,689
356	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Kelompok	76	78	78	80	80
7	URUSAN TRANSMIGRASI						
357	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	%	100%	100%	0%	100%	0%
	PENUNJANG URUSAN						
1	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						
358	Persentase Perangkat Daerah yang Kelembagaannya Tertata	%	100%	100%	100%	100%	100%
359	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki ANJAB, ABK & EVJAB yang baik	PD	10	10	10	10	10
360	Persentase Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%
361	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki ANJAB, ABK & EVJAB yang baik	PD	0	1 PD	1 PD	3 PD	3 PD
362	Persentase Kerjasama dan Kemitraan KORPRI yang terbentuk	%	100%	100%	100%	100%	100%
363	Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%



364	Persentase Pemenuhan Standar LKPP	%	100%	100%	100%	100%	100%
365	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3
366	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen standar pelayanan publik	%	20%	20%	20%	30%	30%
367	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas SKM yang baik	%	20%	20%	20%	30%	30%
368	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPM	%	50%	50%	50%	50%	50%
369	Persentase Penyusunan dan Penyampaian LPPD Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%
370	Persentase Implementasi Kerjasama Daerah	%	50%	50%	60%	55%	68,29%
371	Persentase Batas Wilayah	%	25%	30%	30%	30%	30%
372	Persentase Kecamatan berkinerja baik	%	80%	80%	95%	90%	100%
373	Persentase Penyelesaian Produk Hukum Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%
374	Persentase Produk Hukum yang tersosialisasikan	%	100%	100%	10000%	100%	100%
375	Persentase Pendampingan Hukum	%	50%	55%	60%	65%	60%
376	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen standar pelayanan publik	%	20%	30%	30%	50%	50
377	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Keagamaan	Jumlah	10	20	10	30	14
378	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan Masyarakat	Jumlah	10	25	15	40	30
379	Persentase Perangkat Daerah yang terkendali dalam perencanaan APBDnya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO	%	40%	50%	50%	60%	60%
380	Persentase Perangkat Daerah yang terkendali dalam pelaksanaan DPA-nya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO	%	40%		5000%	60%	60%
381	Persentase Perangkat Daerah dan kab/kota yang terkendali penyerapannya anggarannya melalui Sistem Monitoring TEPPA secara optimal	%	40%	50%	50%	60%	
382	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Produksi dan Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian	Jumlah	6	10	5	18	3
383	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Pengembangan BUMD sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian	Jumlah	6	6	5	12	4
384	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Potensi Perekonomian sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian	Jumlah	12	12	2	12	2
385	Indeks Layanan Keprotokolan	Nilai		B	B	B	B
386	Persentase Press Realease yang diangkat menjadi berita	%	50%	75%	90%	85%	93%
387	Persentase Kegiatan Daerah yang terdokumentasikan	%	50%	50%	50%	50%	47%
388	Prestasi Porpemda	Peringkat	Peringkat VIII	Peringkat V	Peringkat V	Peringkat IV	-
389	Persentase Perangkat Daerah dan kab/kota yang terkendali penyerapannya anggarannya melalui Sistem Monitoring TEPPA secara optimal	%	40%	50%	50%	50%	50%
390	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Produksi dan Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian	Jumlah	6	6	6	6	6
391	Persentase Produk Hukum & Raperda Inisiatif DPRD	%	100%	100%	100%	100%	50%
392	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%
393	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
394	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
395	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
396	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%



397	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
398	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
399	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
400	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
401	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
402	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
403	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
404	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
405	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
406	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	99,7%	100%	100%
407	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
408	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%
409	Persentase Kebutuhan Perkantoran yang terpenuhi (31 PD)	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
410	Persentase kebutuhan Sapras kantor yang terpenuhi (31 PD)	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
411	Persentase Kedisiplinan aparatur sesuai dng ketentuan (31 PD)	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
412	Persentase Sumber daya aparatur yang terlatih (31 PD)	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
413	Persentase dok. perencanaan dan penganggaran tepat waktu (31 PD)	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
414	Persentase capaian dokumen kinerja keuangan tepat waktu (31 PD)	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
415	Persentase Kebutuhan Perkantoran yang terpenuhi (16 Kec)	%	100%	100%	100%	100%	100%
416	Persentase kebutuhan Sapras kantor yang terpenuhi (16 Kec)	%	100%	100%	100%	100%	100%
417	Persentase Kedisiplinan aparatur sesuai dng ketentuan (16 Kec)	%	100%	100%		100%	100%
418	Persentase Sumber daya aparatur yang terlatih (16 Kec)	%	100%	100%	100%	100%	100%
419	Persentase dok. perencanaan dan penganggaran tepat waktu (16 Kec)	%	100%	100%	100%	100%	100%
420	Persentase capaian dokumen kinerja keuangan tepat waktu (16 Kec)	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
421	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Dokumen Perencanaan dengan kualitas baik	%	75%	80%	80%	88%	88%
422	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan dengan kualitas baik	%	75%	80%	80%	85%	85%
423	Persentase Dokumen Data /Informasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
424	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	%	100%	100%	100%	100%	100%
425	Presentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	%	100%	100%	100%	100%	100%
426	Presentase Dokumen Perencanaan Fisik dan Pengembangan Wilayah	%	100%	100%	100%	100%	100%
427	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang dijadikan bahan perumusan kebijakan	%	100%	100%	100%	100%	100%
428	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial yang dijadikan bahan perumusan kebijakan	%	100%	100%	100%	100%	100%
429	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang dijadikan bahan perumusan kebijakan	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	KEUANGAN						



423	Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang sesuai standar	%	93,17%	93,5%	100%	94%	100%
424	Persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah	%	N/A	5%	7,40%	7,36%	13%
425	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah yang terinventarisir	%	N/A	50%	70%	65%	75%
426	Persentase Dokumen Pengembangan Pengelolaan Anggaran Daerah	Dokumen	12	14	14	14	14
427	Jumlah Dokumen Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	6	6	6	6	6
428	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah I Non PBB dan BPHTB	%	8,98%	6,85%	-11,48 %	7,5%	5%
429	Persentase Peningkatan Data Aset daerah yang terinventaris	%	95%	60%	86,16%	70%	88%
430	Jumlah dokumen pengembangan pengelolaan akuntansi dan pelaporan	Dokumen	10	10	10	10	10
431	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah II PBB dan BPHTB	%	8,98%	6,85%	-11,48 %	7,5%	5%
4	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
432	Presentase Aparatur yang mendapatkan pengembangan	%	60%	60%	51,70%	65%	43%
433	Persentase Aparatur yang mendapatkan pembinaan	%	60%	60%	71,43%	65%	65%
434	Presentase Penyelesaian Dokumen Kepegawaian	%	80%	80%	101,14%	82,50%	110,74%
435	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	%	60%	60%	59,70%	65%	12%
436	Persentase ASN terfasilitasi pindah/purna tugas	%	100%	100%	100%	100%	100%
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
437	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100%	100%	100%	100%	71%
6	PENGAWASAN						
437	Persentase Rekomendasi Temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	75%	75%	75%	85%	85%
439	Persentase penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat	%	75%	75%	75%	80%	80%
440	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 2
441	Persentase penerapan sistem dan prosedur pengawasan	%	75%	75%	75%	80%	80%



**Tabel 2.93 Capaian Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 - 2022**

NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target akhir Tahun 2023
2. ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Urusan Pendidikan						
1	APK PAUD	%	63%	49,33	63%	51,20	63
2	APK SD	%	101%	100,93	101%	104,84	101
3	APK SMP	%	99%	94,59	99%	93,97	98
4	APM SD	%	90%	91,11	91%	97,91	93
5	APM SMP	%	98%	75,06	98%	75,87	98
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	94%	99,86	95%	94,75	96
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	%	83%	0	83%	65,67	85
8	Jumlah Lembaga PKBM, Kursus, dan Pelatihan yang berizin	%	10%	48	10%	48	11
9	Persentase pemenuhan kurikulum	%	100%	90,02	100%	100%	100
10	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kualitan dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	95%	98,81	96%	95,40%	96
11	Persentase pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal	%	100%	0	100%	0	100
12	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	100%	95,53	100%	100%	100
2	Urusan Kesehatan						
13	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100%	63	100%	76,17	100
14	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	60%	60	70%	70	80
15	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	80%	78,89	85%	88,33	90
16	Persentase Desa Siaga Aktif	%	0%	51	44%	56	55
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
17	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	76,32	63,24	76,32%	70,91%	76.32
18	Persentase tersedianya akses air minum yang memadai	%	66,50%	66,9	67,50%	65,50%	68.50
19	Bangunan publik yang memadai	%	100%	100	50%	50%	50
20	Persentase areal daerah irigasi dalam kondisi baik	%	66,43%	68,42	66,43%	69,48%	66.43
21	Panjang drainase permukiman yang terbangun	km	66,80	1,92	68,75	4,65	69
22	Jumlah prasarana persampahan yang dibangun	unit	2 unit	2	2 unit	1 unit	2
23	persentase pengembangan jasa konstruksi di KBB	%	100%	96,75	100%	98,06%	100
24	Persentase cakupan pelayanan air limbah domestik	%	61,28%	61,50	61,38%	61,18%	61.48
25	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%	100%	100	100%	100%	100
26	Implementasi dokumen perencanaan pembangunan di kawasan pusat pertumbuhan	dokumen	4	13	4	19	4
27	persentase pembangunan di wilayah desa	%	100%	100	100%	100%	100



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target akhir Tahun 2023
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
28	Jumlah areal penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha	%	100%	0	100%	33,25%	100%
29	Jumlah areal pencegahan kumuh diluar kawasan kumuh yang ditangani	%	100%	0	100%	0%	100%
30	Jumlah Peningkatan PSU perumahan formal	%	100%	0	100%	120%	100%
31	Persentase Penyediaan hunian layak bagi masyarakat	%	100%	0	100%	0%	100
32	Jumlah badan hukum perencana PSU perumahan dan pengembang perumahan yang tersertifikasi, terakreditasi, terklasifikasi dan teregistrasi	Jumlah	100	0	100	0%	100
5	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
33	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	97,91	100	100	100
34	Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran & Penyelamatan	%	75	54	77	77	80
35	Meningkatnya Nilai Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
6	Urusan Sosial						
36	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	71%	71	72%	72	72
37	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial	%	38%	38	40%	16,2	42
38	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	36%	36	37%	5,34	38
39	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	100%	0	100%	100	100
40	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	%	100%	100	100%	100	100
41	Persentase tertanganinya warganegara migran korban tindak kekerasan	%	100%	0	100%	0	100
7	Urusan Tenaga Kerja						
42	Persentase tersusunya dokumen rencana tenaga kerja daerah	Dokumen	1	1	1	1	2
43	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	60%	42,86	80%	60%	100
44	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	60%	100	80%	116,67%	100
45	Besaran pencari kerja yang ditempatkan	%	60%	60	80%	68%	100
46	Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja	%	60%	100	80%	0%	100



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target akhir Tahun 2023
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
47	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan ekonomi	%	82,50%	82,5	84%	84%	85
48	Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	39%	39	40,5 %	39%	42
49	Persentase Data dan profil gender dan anak Hasil analisis	%	85%	85	87%	87%	90
50	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	%	100%	100	100%	100%	100
51	Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	%	67%	67	78%	100%	100
52	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak	%	100%	100	100%	100%	100
9	Urusan Pangan						
53	Jumlah sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	sertifikat	4	0	8	4	12
54	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	TON	27	0	30	10	40
55	Ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan	Laporan	12	12	12	12	12
56	Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Point	84	66,87	85	83,14	86
57	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	27	0	30	10	40
58	Penurunan Jumlah desa rawan pangan	Desa	30	0	25	0	20
10	Urusan Pertanahan						
59	Jumlah dokumen penetapan daftar masyarakat penerima	dokumen	1	0	1	0%	1
60	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong	dokumen	100%	100	100%	0%	100
61	Terkoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan penatagunaan tanah dan konsolidasi tanah	%	100%	100	100%	0%	100
62	Jumlah rekomendasi pengelolaan izin lokasi	rekomen dasi	100%	0	100%	0%	100
63	Tersedia data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, tersinkronisasikan untuk aset akses reforma agraria	dokumen	100%	0	100%	0%	100
64	penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	100%	66,60	100%	33,33%	100



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target akhir Tahun 2023
11	Urusan Lingkungan Hidup						
65	Tonase sampah terangkut ke TPA	Ton	53.500	62.386	53.500	55.667	53.700
66	Persentase titik sampling air yang status mutunya baik	%	5,0%	0	5,0%	6	6
67	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen pendukung perencanaan LH	%	60,0%	60	80,0%	80	100
68	Bertambahnya usaha dan atau kegiatan yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan pada tahun ke-n	Industri	5	30	5	26	5
69	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH dibagi jumlah usaha yang dilakukan pemeriksaan pada tahun ke-n	%	100%	100	100%	88,24	100
70	Meningkatnya gerakan peduli sungai / situ / air tanah	desa	1	2	1	1	1
71	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH pd tahun ke-n	sekolah	1	20	1	15	1
72	RTH taman yang terawat	Lokasi	36	0	36	26	36
73	Cakupan luasan taman dan RTH	%	6,9%	6,86	6,9%	72,22	7
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
74	Persentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga	%	81%	40	83%	84%	86
75	Persentase Penduduk Memiliki KTP-EI	%	92%	98	93%	98%	94
76	Persentase Anak Ber KIA	%	20%	30	25%	24%	30
77	persentase penduduk ber Akta kelahiran	%	34%	32	36%	39%	38
78	persentase penerbitan Akta kematian	%	30%	30	32%	100%	35
79	Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun	%	94%	96	96%	89%	98
80	Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	%	20%	36	25%	57%	35
81	Profil Kependudukan yang terselesaikan	%	100%	0	100%	100%	100%
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
82	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	82,34	83,24	91,17	91,82	100
83	Persentase Desa Cepat Berkembang	%	32%	0	30%	0	20
84	Jumlah Desa Persiapan	Desa	0	0	5 desa	0	5
85	Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	Desa	5 desa	18 desa	20 desa	21 desa	40



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target akhir Tahun 2023
14	Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana						
86	Persentase PD yang menyusun & memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	42%	0	48%	0%	55%
87	Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	%	5.11%	5.11	6.78%	6,78%	8.46%
88	Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/ Kelurahan	%	70%	70	75%	75%	80%
89	Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di evaluasi	%	100%	100	100%	100%	100
90	Persentase KB Aktif	%	73,75%	73.85	73,85%	72,71%	73.95
91	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,73%	22.08	20,74%	21,48%	20.75
92	Persentase UNMETNEED	%	10,24%	14.33	10,23%	15,23%	10.22
93	Cakupan kelompok keg Pemberdayaan dan Ketahanan KS dan Cakupan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	%	40%	40	50%	50%	60
15	Urusan Perhubungan						
94	Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi darat	Penumpang	1.540.000	598.435	1.586.200	577.299	1.633.786
95	Jumlah Angkutan yang berkeselamatan	unit	635 unit	419	786 unit	600	937
96	Jumlah ruas jalan yang berkeselamatan	ruas	7 ruas	11	9 ruas	7	11
97	Jumlah Pelayanan angkutan darat yang beroperasi wilayah Kab. Bandung Barat	trayek	17 trayek	12	18 trayek	19	19
98	Jumlah angkutan sungai danau dan penyeberangan yang terkelola	unit	189 unit	165	192 unit	154	195
99	Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi ASDP	pnp	6.995	90.819	7.045	13,460	7.100
16	Urusan Komunikasi dan Informatika						
100	Persentase Aplikasi Teknologi Informasi Pemerintahan Yang Termanfaatkan	%	100%	99,22	100%	94,56%	100
101	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100%	100	100%	97,62%	100
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
102	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	33%	24	39%	22	44
103	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	21%	21	26%	21	31
104	Persentase Peserta Diklat Perkoperasian	%	14%	10	19%	7	23
105	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Kegiatan	8	5	9	5	10
106	Jumlah Pertumbuhan Pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Mikro	Pelaku Usaha	100	213	515	716	580
107	Pertumbuhan pengembangan pelaku usaha mikro	Pelaku Usaha	120	171	150	221	175



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target akhir Tahun 2023
18	Urusan Penanaman Modal						
108	Persentase dokumen yang ditindaklanjuti	%	-	0	33,33%	33,33%	100
109	Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	Dokumen	-	0	2	0	2
110	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Dokumen	2	1	2	1	2
		Pameran	6	1	6	1	6
111	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	190	268	195	622	200
112	Persentase pelayanan berbasis aplikasi	%	100%	67	100%	100	100
113	Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	%	92%	72,5	96%	82,79	100
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						
114	Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	%	7,41%	9,20	7,83%	7,83	10.30
115	Presentase peningkatan pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan	%	10%	5,15	10%	2,86	10
116	Jumlah ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga	Indeks	2.500 lokasi	2.712 lokasi	2.550 lokasi	2.667 lokasi	2.650 lokasi
117	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi		50 Atlet	33 Atlet	100 Atlet	569 Atlet	200 Atlet
118	Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga		10%	30	20%	34	30%
20	Urusan Statistik						
119	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	100%	99,22	100%	99,05%	100
21	Urusan Persandian						
120	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	%	100%	97,22	100%	99,17%	100
22	Urusan Kebudayaan						
121	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	20	7	30	20	30
			20	1	30	0	30
			20	0	30%	0	30
122	Benda, Situs dan Kawasan Cagar yang dilestarikan	Orang	125	30	150	0	175
		Dokumen	1	1	1	1	1
123	Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan	Dokumen	2%	0	2%	1	2
		Orang	125	0	150	0	175
		Orang	125	127	150	0	175
		Pagelaran	5	2	6	5	7
		Orang	25	0	25	0	75
		Ritual dan Pagelaran	17 Ritual 5 Pagelaran	1 Ritual dan 2 Pagelaran	17 Ritual 5 Pagelaran	5 Pagelaran	17 Ritual 7 Pergelaran
		Orang	25 Orang	0	50 Orang	0	50
124	Jumlah Persiapan dan perencanaan Kebudayaan dan kesenian yang berjalan dengan baik	Kegiatan	3	1	4	10	5



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target akhir Tahun 2023
23	Urusan Perpustakaan						
125	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	Predikat	CC	B	B	B	B
24	Urusan Kearsipan						
126	Jumlah arsip yang sudah dilakukan penyelamatan	%	31%	31	46%	46%	57
127	Persentase Arsip PD yang sudah di Kelola secara baku	PD	19	19	25	39	31
128	Jumlah rumusan kebijakan perizinan kearsipan	Dok	1	0	1	1	1
25	Urusan Kelautan dan Perikanan						
129	Persentase Penyebaran Benih Unggul	Persen	10	11	15	15,1	20
130	Jumlah RTP	RTP	4.250	4.872	2.540	5.030	2650
131	Pengawasan Sumber Daya Perikanan	SDP	2	2	2	2	2
132	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Kelompok	83	83	86	86	90
26	Urusan Pariwisata						
133	Persentase kegiatan promosi pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif yang efektif	Media	5 media	5	6 media	1	6
		Event	6 event	3	6 event	12	7
		Dokumen	1	2	2	1	3
		Kemitraan	5	5	5	2	5
134	Jumlah pelaku usaha industri kreatif, penggerak pariwisata dan budaya yang meningkat kompetensinya	Orang	100	48	125	0	150
		Lembaga	4	1	4	5	5
		Orang	75	75	75	40	125
		Orang	75	0	100	45	125
		Orang	75	0	100	30	125
		Orang	75	100	100	0	125
135	Jumlah Perluasan sub sektor ekonomi kreatif	Zona Kreatif	1	1	1	0	1
		Produk	5	0	5	22	7
136	Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi standar	Destinasi	3	0	3	5	3
		Destinasi	6	0	6	9	6
		Dokumen	1 Dokumen & 4 perjanjian	4	1 Dokumen & 4 perjanjian	1	1 Dokumen & 4 perjanjian
		Orang	30	30	35	0	40.000
		Pokdarwis	4	0	5	8	5
		Industri	85,00	0	85,00	40	85
		Orang	30.000	0	35.000	0	40.000



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target akhir Tahun 2023
27	Urusan Pertanian						
137	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan)	Ton	444.368	444.368	454.395	457.816	464.660
		Tangkai	80.375.000	10.287.300	84.393.785	35.605.770	88.613.470
138	Nilai Tukar Petani	point	110,5	108,34	112	109	112.5
139	Jumlah Ahli Pertanian Berkualitas	orang	83	83	90	89	100
140	Jumlah penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis	orang	25	25	25	17	25
141	Persentase Penyebaran Bibit Unggul	Persen	10	10	15	9,7	20
142	Persentase kelahiran Ternak	Persen	75	109	78	94	80
143	Jumlah Kelompok Yang menerapkan teknologi peternakan	Kelompok	15	14	20	23	25
144	Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	Persen	20%	0	20%	20	20
145	Cakupan pelayanan kesehatan hewan	Persen	63	63	71	77,3	80
146	Prevalensi Brucellosis (%)	Persen	4	2	3	2,2	2
147	Persentase Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi	Persen	100	78	100	100	100
148	Tefasilitasinya Penerbitan izin usaha peternakan	Persen	100	100	100	100	100
149	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Ternak / Tahun	Kelompok	10	10	10	10	10
28	Urusan Perdagangan						
150	Persentase peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen	%	30%	29	40%	40%	30
151	Persentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	%	-	0	50%	50%	50
152	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	Jumlah	3.880	3.880	4.268	4.268	4.696
153	Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	%	33%	30	33%	33%	34
154	Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten Kota	Jumlah	7	2	7	7	7
155	Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	kali	120 kali	120 kali	150 kali	150 kali	180 kali



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target akhir Tahun 2023
29	Urusan Industri						
156	Prosentase Pengembangan IKM	%	30%	28	40%	40%	30
157	Pertumbuhan industri yang berizin	Jumlah	2.132	2.132	2.240	2240	2350
158	Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS	Jumlah	260	260	300	300	350
30	Urusan Transmigrasi						
159	Persentase transmigran mandiri	%	60%	100	80%	0%	100
31	Urusan Pendukung Unsur Pendukung Urusan Pemerintah						
160	Persentase data dan informasi bid. Perekonomian yang di gunakan sebagai <i>policy brief</i>	%	60%	85	80%	80%	100
161	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan <i>policy brief</i>	%	65%	90	75%	75%	100
162	<i>Center of excelent</i> pengadaan barang jasa	%	80%	100	100%	100%	100
163	Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	%	100%	100	100%	90%	100
164	Persentase Perda yang ditetapkan	%	70%	90	85%	85%	100
165	Persentase Data dan Informasi Bidang Sosial yang digunakan sebagai Policy Brief	%	70%	85	80%	80%	90
166	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	%	70	83,25	72	83,25	100
32	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah						
167	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	%	100%	100	100%	97,28%	100
168	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD	%	100%	100	100%	99,20%	100
169	Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai standar dan peraturan yang berlaku	%	100%	100	100%	100%	100
170	Persentase peningkatan pengelolaan aset daerah	%	75%	77	85%	111,16%	100
171	Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	7,94%	13,41	8,20%	32,12	8.62
172	Presentase Aparatur yang mendapatkan Pembinaan	%	70%	73,94	75%	61,7%	80
173	Persentase Aparatur yang mendapatkan Pengembangan	%	70%	70	75%	75%	80
174	Persentase diseminasi hasil kelitbangan	%	100%	0	100%	100%	100
33	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
175	Rata-rata Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	B	A
176	Persentase Rekomendasi Temuan BPK RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti oleh PD	%	100%	100	100%	100%	100
34	Unsur Pemerintahan Umum						
177	Persentase penyelesaian jumlah potensi konflik sosial	%	80%	96,42	100%	84,86	100
178	Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	80%	51,88	100%	83,18	100
179	Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	80%	42,86	100%	98,17	100
180	Persentase Ormas/LSM yang tercatat di Badan Kesbangpol kab. Bandung Barat	%	90%	70	100%	100	100
181	Tingkat pemahaman politik di masyarakat	%	80%	60	100%	52,18	100

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah agenda kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan atas hak asasi manusia dan kesetaraan, bersifat universal, holistik, terintegrasi, inklusif dan membutuhkan kemitraan dan partisipasi antar pihak. Amanat pelaksanaan TPB di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

TPB/SDGs memiliki 17 tujuan yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2030, adapun 17 tujuan tersebut diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) pilar, yaitu:

- 1) Pilar Sosial, bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia berkualitas, terdiri dari 5 (lima) tujuan:
 - Tujuan 1 Tanpa kemiskinan
 - Tujuan 2 Tanpa kelaparan
 - Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 - Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
 - Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- 2) Pilar Ekonomi meliputi penyediaan energi untuk semua, faktor penting dalam mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan dan penurunan kemiskinan, terdiri dari 5 (lima) tujuan:
 - Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
 - Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
 - Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
 - Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
- 3) Pilar Lingkungan merupakan landasan semangat transformatif pembangunan berkelanjutan, terdiri dari 6 (enam) tujuan:
 - Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi yang Layak
 - Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
 - Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
 - Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

- Tujuan 14 Ekosistem Laut
 - Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- 4) Pilar Hukum dan Tata Kelola terdiri dari 1 (satu) tujuan yaitu tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Untuk mengetahui kesiapan pencapaian SDGs Kabupaten Bandung Barat, pada Tahun 2022 Bappelitbangda bekerjasama dengan SDGs Center Unpad mengevaluasi capaian SDGs Kabupaten Bandung Barat dengan menganalisis baseline atas 63 indikator (apabila memperhitungkan sub-indikator menjadi 92 indikator) dari 13 tujuan SDGs, 4 tujuan yaitu tujuan 12-Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, tujuan 13-Penanganan Perubahan Iklim, tujuan 14-Ekosistem Lautan, dan tujuan 15-Ekosistem Daratan tidak dianalisis karena keterbatasan data.

Sumber data yang digunakan diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Pusat Data dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan (Pusdatin Kemnaker) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes), dimana tahun perolehan data bervariasi berkisar dari tahun 2001 s.d 2020. Hasil evaluasi diperoleh dengan melakukan proyeksi pencapaian indikator TPB/SDGs di tahun 2030 dengan asumsi skema *Business As Usual* (BAU) kemudian membandingkannya dengan target SDGs yang telah ditentukan. Apabila hasil proyeksi mencapai atau hampir mencapai (97.5%) target TPB/SDGs maka akan diberikan nilai A (skor 4). Suatu indikator akan diberikan nilai B (skor 3) jika hasil proyeksi pada tahun 2030 mendekati target TPB/SDGs setidaknya 90%. Bernilai C (skor 2) apabila hasil proyeksi lebih dari 75% menuju target TPB/SDGs. Nilai D (skor 1) diberikan jika hasil proyeksi pencapaian indikator di tahun 2030 setidaknya mencapai 50% dari target TPB/SDGs. Dan bernilai E (skor 0) jika indikator masih cukup jauh untuk mencapai target TPB/SDGs (dibawah 50%).

Daftar Indikator Terpilih (Data, Target, Dan Scorecard Indikator) untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai berikut:



Tabel 2.94 Daftar Indikator Terpilih (Data, target, dan scorecard indikator) untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat

TUJU AN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR	2015	2019	2020	2025 ^a	2030 ^a	TARGET	NILAI	SUMBER DATA	TAHUN	KETERANGAN
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	12.67	9.38	10.49	7.82	6.33	6.335	A	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : Data tahun tersebut belum tersedia.
1	1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40)(%)	69,91	76.05	b	100	100	100	A	BPS Susenas	2015-2019	
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)	47,62	61.80	61.13	66.12	74.02	100	D	BPS Susenas	2002-2019	
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	36,13	34.80	48.05	52.30	54.77	100	D	BPS Susenas	2002-2019	
1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (B40)	17.9	13.68	11.87	7.27	4.99	0	B	BPS Susenas	2006-2019	
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (B40) (%)	96.82	97.33	97.45	99.80	100	100	A	BPS Susenas	2001-2019	
1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (B40) (%)	73.51	77.46	72.42	81.13	85.04	100	C	BPS Susenas	2001-2019	
1	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (B40) (%)	40.03	39.87	51.74	66.56	83.01	100	C	BPS Susenas	2001-2019	
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (B40)	64.25	71.19	77.03	94.14	100	100	A	BPS Susenas	2004-2020	
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (B40)	100	100	b	100	100	100	A	BPS Susenas	2001-2019	
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Kontrak/Sewa)	2.60	7.51	3.71	4.99	5.39	38.34	E	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : Data tahun tersebut belum tersedia. c : data 2007. d : data 2013. e : data tahun 2016. f : data tahun 2017. g : data tahun 2018.
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Milik Sendiri)	91.44	83.25	83.89	84.19	83.60	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	5,34 ^f	4,2	5,06	3,35	1,93	3,6	A	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2017-2020	
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	22,4 ^d	b	13,48 ^g	17,94	17,94	0	C	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Prov. Jabar	2007-2018	
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	16,9	9,4 ^e	16,7 ^f	13,43	12,93	0	C	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2017	
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. (0-59 Bulan)	52,5 ^d	b	36,69 ^g	44,59	44,59	31,5	C	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Prov. Jabar	2007-2018	
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	29,6	32,6 ^e	34,3 ^f	32,16	32,16	17,76	C	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2017	
2	2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita. (0-59 Bulan)	13,2 ^d	b	9,67 ^g	11,43	11,43	5	B	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)Prov. Jabar	2007-2018	
2	2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita.	7,3	5,6 ^e	8,19 ^f	7,03	7,03	5	A	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2017	



TUJU AN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR	2015	2019	2020	2025 ^a	2030 ^a	TARGET	NILAI	SUMBER DATA	TAHUN	KETERANGAN
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	83,06	100	97,01	100	100	100	A	BPS Susenas	2001-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : data tahun 2018.
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan	78,40	100	95,96	100	100	100	A	Susenas KOR	2015-2020	
3	3.7.1*	Proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	56,29	48,74	45,84	44,26	40,10	64,55	D	Susenas KOR	2010-2020	
3	3.8.1.(a)	Proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan	2,61	15,23	7,91	7,73	8,43	0	B	Susenas KOR	2010-2020	
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 10% Total Pengeluaran Rumah Tangga)	1,80 ^b	3,41	1,15	2,11	2,11	0	A	Susenas KOR	2018-2020	
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 25% Total Pengeluaran Rumah Tangga)	0,23 ^b	0,97	0,11	0,44	0,44	0	A	Susenas KOR	2018-2020	
3	3.a.1*	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	12,67	36,18	35,05	34,79	34,52	0	D	Susenas KOR	2015-2020	a : Hasil Analisis Proyeksi. b : Data tidak tersedia pada tahun tersebut
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	108.58	104.22	104.54	105.74	106.27	100	A	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	93.18	90.65	90.99	97.21	100.80	100	A	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	58.30	65.88	66.99	103.96	142.61	100	A	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >=15 tahun.	7.81	8.71	.b	9.23	9.87	12	C	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat	88.91	98.33	96.10	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/Sederajat	33.33	61.29	61.83	68.52	81.36	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/Sederajat	66.94	81.18	84.26	94.28	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	89.48	91.56	98.55	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	32.38	30.64	.b	57.03	86.58	100	C	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	9.72	13.95	16.17	19.24	22.79	42.08	D	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	35.03	84.43	91.73	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	16.93	61.54	69.75	82.48	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	84.80	157.16	141.70	94.29	94.29	100	B	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	.b	11.83	75.00	16.18	16.18	100	E	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	98.65	103.67	98.05	100.23	100.23	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	108.62	108.55	101.84	104.90	104.90	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/Sederajat untuk perempuan/laki-laki	121.84	106.01	119.19	114.05	114.05	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	66.53	58.82	105.72	55.56	55.56	100	D	Susenas KOR	2010-2020	



TUJUAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR	2015	2019	2020	2025 ^a	2030 ^a	TARGET	NILAI	SUMBER DATA	TAHUN	KETERANGAN
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, untuk perempuan/ laki-laki	94.11	101.94	112.62	105.15	105.15	100	B	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil Analisis Proyeksi. b : Data tidak tersedia pada tahun tersebut
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	75.25	90.21	78.06	77.77	77.77	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	134.02	224.09	208.34	107.27	107.27	100	B	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/ teratas	.b	.b	43.48	15.40	15.40	100	E	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	107.04	102.45	98.08	101.16	101.16	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	100.70	99.12	98.44	100.27	100.27	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/ SMK/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	94.41	105.15	119.23	113.44	113.44	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/ SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	65.07	67.45	72.24	52.88	52.88	100	D	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	97.50	101.44	104.67	106.40	106.40	100	B	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	77.95	96.61	74.19	80.12	80.12	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.6.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/ lainnya	98.90	99.51	99.66	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : tidak ada data pada tahun tersebut. c : data tahun 2017
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun (%)	99.91	99.95	99.91	100	100	100	A		2001-2020	
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun (%)	100	100	100	100	100	100	A		2001-2020	
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun	2.18	0.80	2.35	b	2.94	0.00	B	Susenas KOR	2010-2020	
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	22.37	18.35	19.12	20.49	19.57	0.00	C	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : data tahun 2017
5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	12.67	23.18	21.84	18.52	18.52	50	E		2010-2020	
5	5.b.1*	Proporsi penduduk yang menguasai/ memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	55.10	61.76	56.63	76.33	86.05	100	C	Susenas KOR	2015-2020	
6	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	32.28	35.41	37.57	30.69	28.21	88.20	E	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : data tahun 2017
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	12.67	72.43	68.39	82.84	99.30	100	A	BPS	2002-2020	
6	6.2.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	48.55 ^b	56.63	73.99	100	100	100	A	Susenas KOR	2017-2020	
6	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	43.04	59.47	71.47	74.95	82.49	100	C	Susenas KOR	2010-2020	



TUJU AN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR	2015	2019	2020	2025 ^a	2030 ^a	TARGET	NILAI	SUMBER DATA	TAHUN	KETERANGAN
7	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	78.92	85.98	90.64	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.75	4.05	-3.27	4.26	4.26	7	D	BPS	2011-2020	a : Hasil analisis proyeksi.
8	8.1.1.(a)	PDB per kapita (ribu rupiah)	20861.14	27754.69	27101.68	39599.07	57859.38	119635.88	E	BPS	2010-2020	b : tidak ada data pada tahun tersebut.
8	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	9.18	2.32	4.40	3.73	3.73	3.78	A	BPS	2011-2020	c : data tahun 2017
8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal	75.88	55.22	59.48	55.90	55.62	25	D	BPS Sakernas	2010-2020	
8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	24.12	44.78	40.52	44.10	44.38	75	D	BPS Sakernas	2007-2020	
8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	81.36	88.67	.b	81.00	80.47	-	B	BPS Sakernas	2007-2019	
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	7348.22	14872.91	.b	18343.98	22157.91	-		BPS Sakernas	2007-2019	
8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	10.01	8.24	12.25	10.86	10.86	3.80	B	BPS Sakernas	2007-2020	
8	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	12.01	5.95	12.48	9.26	9.26	-		BPS Sakernas	2010-2020	
8	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	35.80	28.15	37.09	27.10	25.19	3.80	C	BPS Sakernas	2017-2020	
8	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta)	24.02	36.34 ^c	.b	26.93	28.94	36.03	C	BPS Susenas	2002-2017	
9	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	0.17	0.21	0.18	0.18	0.18	0.33	D	BPS Sakernas	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi
10	10.1.1*	Koefisien Gini	0.34	0.36	0.38	0.41	0.44	0.31	D	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2001-2020	a : Hasil analisis proyeksi
10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan	4.29	8.86	5.18	7.98	8.44	0	B	Susenas KOR	2001-2020	
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	13.25	24.41	31.46	58.48	100	100	A	BPS Susenas	2012-2020	a : Hasil analisis proyeksi
16	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	0.16	0.82	1.28	0	0	0	A	BPS Susenas	2001-2020	a : Hasil analisis proyeksi
16	16.3.1.(a)	Proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi	24.81	18.92	34.98	33.53	43.16	100	E	Susenas KOR	2010-2020	
16	16.9.1*	Proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran	74.04	61.59	68.65	81.32	87.33	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
17	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet	13.94	48.11	55.12	100.00	100.00	100.00	A	BPS Susenas	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi

Sumber : Kajian Studi Baseline Indikator TPB/ SDGs KBB, Litbnag Bappelitbangda, 2022

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai 2,61 atau C. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai TPB/SDGs masih cukup berat. Apabila pembangunan ke depannya masih menggunakan skema BAU, target TPB/SDGs tahun 2030 sangat mungkin untuk tidak tercapai sepenuhnya. Hasil proyeksi pencapaian SDGs hingga tahun 2030 berdasarkan scorecard dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.95 Hasil Proyeksi Pencapaian SDGs
Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2030 Berdasarkan Scorecard**

No.	Scorecard	Jumlah Indikator
1	A	37
2	B	11
3	C	21
4	D	12
5	E	7
6	Belum dapat ditentukan nilainya	4
Total		92

Sumber : Kajian Studi Baseline Indikator TPB/ SDGs KBB, Litbang Bappelitbangda, 2022

Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat dalam capaian indikator-indikator SDGs-nya. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari banyaknya indikator yang masih memiliki nilai scorecard C, D dan bahkan E (tabel 2.191).

Indikator dengan nilai C, D, E diklasifikasikan berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang pendidikan ditunjukkan dengan APM SD, SMP dan SMA yang masih jauh dari target terutama disagregasi berdasarkan kuintil untuk SD dan SMA; APK SMP, SMA, PT, PAUD berdasarkan kuintil untuk SMA dan PT; rata-rata lama sekolah dan tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat.
2. Bidang kesehatan ditunjukkan dengan angka stunting dan underweight yang masih tinggi; penduduk di bawah 15 tahun yang merokok; rendahnya penggunaan alat kontrasepsi, dan rendahnya sumber air dan sanitasi layak di Kabupaten Bandung Barat.
3. Bidang ekonomi ditunjukkan dengan tingginya angka usia muda yang tidak bersekolah dan tidak bekerja; rendahnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara; rendahnya laju PDB per kapita; tingginya lapangan kerja informal; rendahnya tenaga kerja formal (termasuk tenaga kerja industri manufaktur); serta semakin meningkatnya koefisien gini.

4. Bidang sosial ditunjukkan dengan rendahnya proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran; rendahnya proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir; tingginya proporsi perempuan 20-24 yang kawin sebelum 18 tahun; rendahnya proporsi rumah yang memiliki hak atas tanah milik sendiri terutama kontrak/sewa; rendahnya proporsi perempuan yang menempati managerial; serta rendahnya proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi.

Berdasarkan hasil dari analisis SDGs interlinkages yang disusun oleh SDGs Center Unpad untuk Kab. Cirebon (Komarulzaman dkk, 2020), dengan menggabungkan hasil analisis baseline Kabupaten Bandung Barat dan juga analisis interlinkages tersebut (Komarulzaman dkk, 2020), Kabupaten Bandung Barat disarankan untuk memprioritaskan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (*B40) (%)
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (*B40) (%)
Keterangan : B40 adalah penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).
4. Persentase tenaga kerja formal
5. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman

2.7 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) melekat dalam pembagian urusan pemerintahan sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014, yakni ada 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar yakni urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan social. Berikut Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, yang terdiri dari:

1. Urusan Pendidikan, dengan jenis pelayanan dasar :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Pendidikan Dasar; dan
 - c. Pendidikan Kesetaraan.
2. Urusan Kesehatan, dengan jenis pelayanan dasar yaitu :
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa;
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan jenis pelayanan dasar yaitu :
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan jenis pelayanan dasar yaitu:
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan jenis pelayanan dasar yaitu :
 - a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran

6. Urusan Sosial, dengan jenis pelayanan dasar yaitu :
- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bandung Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, ada sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal, namun Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun pencapaian SPM di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Target, realisasi kinerja, anggaran dan dukungan personil pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.96 Target, Capaian Kinerja dan Anggaran
SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
1)	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.000	32.000	100	100.000.000	100.000.000	100
2)	Pendidikan dasar (SD/SMP)	200.049	200.049	100	400.000.000	400.000.000	100
3)	Pendidikan kesetaraan	3.097	3.097	100	100.000.000	100.000.000	100

Sumber: Bagian Organisasi Setda, Kab. Bandung Barat 2022

1) Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD)

- a. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dengan target yang ingin dicapai sebanyak 32.000 siswa
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
- c. Dukungan personil Pendidikan Usia dini melibatkan Guru PAUD sebanyak 2.180 siswa dan di dukung oleh lembaga satuan pendidikan sebanyak 10 lembaga yang tersebar di 16 kecamatan

2) Pendidikan Dasar

- a. Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dengan target yang ingin dicapai sebanyak 200.049 siswa
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.400.000.000,-
- c. Dukungan personil Pendidikan Dasar melibatkan tenaga pendidik SD sebanyak 8118 orang dan SMP 4425 orang, serta 698 Tenaga Teknis Administrasi yang berkualifikasi SMA sederajat;

3) Pendidikan Kesetaraan

- a. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dengan target yang ingin dicapai sebanyak 3.097 siswa
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
- c. Dukungan personil Pendidikan Kesetaraan melibatkan 6 Kepala Sekolah, 27 Tutor dan 7 Tenaga Penunjang lainnya, dan memiliki PKBM sebanyak 447 lembaga yang sudah terakreditasi

2. SPM Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Target, realisasi kinerja, anggaran dan dukungan personil pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.97 Target, Capaian Kinerja dan Anggaran
SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	31.319	31.179	99,55	2.194.672.650	991.874.850	45,19
2)	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	29.896	28.877	96,59	2.767.915.100	852.667.400	30,81
3)	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	28.472	28.158	98,90	312.577.000	95.209.000	30,46
4)	Pelayanan kesehatan balita	112.626	101.363	90,00	573.887.000	223.421.650	38,93
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	70.961	58.693	82,71	473.440.700	176.792.700	37,34
6)	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1.075.240	753.139	70,04	1.113.811.550	542.023.260	48,66
7)	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	155.426	99.633	64,10	262.614.600	145.697.200	55,48
8)	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	513.318	87.149	16,98	66.751.500	45.501.500	68,17
9)	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	17.021	6.799	39,94	21.700.000	21.100.000	97,24
10)	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	2.461	1.846	75,01	123.890.050	47.712.550	38,51
11)	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	19.139	18.570	97,03	686.179.750	398.254.200	58,04
12)	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	21.264	17.680	83,15	882.736.900	404.433.200	45,82

Sumber: Bagian Organisasi Setda, Kab. Bandung Barat 2022

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil

- Target jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 31.319 Orang
- Alokasi anggaran sebesar Rp.2.194.672.650
- Dukungan personil: 12 orang Dokter, 278 orang Bidan dan 45 orang Perawat

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

- Target jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 29.896 Orang
- Alokasi anggaran sebesar Rp.2.767.915.100
- Dukungan personil: 12 orang Dokter, 278 orang Bidan dan 45 orang Perawat

3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

- Target jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 28.472 bayi
- Alokasi anggaran sebesar Rp.312.577.000

- c. Dukungan personil: 12 orang Dokter Anak, 16 orang Dokter Umum, 278 orang Bidan dan 45 orang Perawat
- d. Permasalahan
- e. Solusi

4) Pelayanan kesehatan balita

- a. Target jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 112.626 balita
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.573.887.000
- c. Dukungan personil: 12 orang Dokter Anak, 16 orang Dokter Umum, 278 orang Bidan, 45 orang Perawat, 38 orang ahli Gizi dan 11.565 orang Kader Kesehatan

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

- a. Target jumlah Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 79.961 orang
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.473.440.700
- c. Dukungan personil: 32 orang Bidan, 32 orang Perawat, 32 orang ahli Gizi, 32 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat dan 1.410 orang Kader Kesehatan

6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

- a. Target Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 1.075.240 orang
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.113.811.550
- c. Dukungan personil: 32 orang Dokter, 32 orang Bidan, 32 orang Perawat, 32 orang ahli Gizi, 32 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat dan 32 orang Tenaga Kesehatan Terlatih

7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

- a. Target Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 155.426 orang
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.262.614.600
- c. Dukungan personil: 32 orang Dokter, 32 orang Bidan, 96 orang Perawat, 32 orang ahli Gizi, 32 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat dan 2.510 orang Tenaga Non Kesehatan Terlatih

8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

- a. Target Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 513.318 orang

- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.66.751.500
- c. Dukungan personil: 32 orang Dokter, 32 orang Bidan, 32 orang Perawat dan 32 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat

9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

- a. Target jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 17.021 orang
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.21.700.000
- c. Dukungan personil: 32 orang Dokter, 32 orang Bidan, 326 orang Perawat, 32 orang ahli Gizi dan 32 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat

10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

- a. Target jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 2.461 orang
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.123.890.050
- c. Dukungan personil: 12 orang Dokter Specialist Jiwa

11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

- a. Target jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 19.139 orang
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.686.179.750
- c. Dukungan personil: 8 orang Dokter Specialist Penyakit Dalam, 40 orang Perawat, 40 orang Analis Teknis Laboratorium Medik, 8 orang Penata Rontgen, 40 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat dan 40 orang Tenaga Non Kesehatan Terlatih

12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus).

- a. Target jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 21.264 orang
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.882.736.900
- c. Dukungan personil: 3 orang Dokter Specialist Penyakit Dalam/Kulit/Kelamin, 40 orang Perawat, 40 orang Bidan, 40 orang Analis Teknis Laboratorium Medik dan 40 orang Tenaga Non Kesehatan Terlatih

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah. Target, realisasi kinerja dan anggaran pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.98 Target, Capaian Kinerja dan Anggaran
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bandung Barat Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	14.400	14.160	98,33	8.761.940.694	8.476.527.034	96,74
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	943	943	100%	4.021.963.788	3.793.174.183	94,31

Sumber: Bagian Organisasi Setda, Kab. Bandung Barat 2022

1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

- Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dengan target yang ingin dicapai sebanyak 14.400 orang
- Alokasi anggaran sebesar Rp.8.761.940.694,-

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

- Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestic, dengan target yang ingin dicapai sebanyak 943 orang
- Alokasi anggaran sebesar Rp.4.021.963.788,-

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah. Target, realisasi kinerja dan anggaran pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.99 Target, Capaian Kinerja dan Anggaran
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
1)	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	0	0	173.414.300	91.074.300	52,52
2)	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	0	0	97.743.350	94.989.950	97,18

Sumber: Bagian Organisasi Setda, Kab. Bandung Barat 2022

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

- Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, dengan target yang ingin dicapai sebesar 100%
- Alokasi anggaran sebesar Rp.173.414.300,- (BPBD)
- Karena Keterbatasan anggaran/adanya Refocusing dan belum ada tempat relokasi korban bencana pada Dinas Permukiman dan Perumahan tidak melaksanakan SPM tersebut
- Berdasarkan Regulasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat berkontribusi atas dasar rekomendasi BPBD

2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

- Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, dengan target yang ingin dicapai sebesar 100%
- Alokasi anggaran sebesar Rp.97.743.350,-

5. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah. Target, realisasi kinerja, anggaran dan dukungan personil pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.100 Target, Capaian Kinerja dan Anggaran
SPM Bidang Trantibum dan Linmas Kab. Bandung Barat Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
1)	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	1.616.203	1.616.203	100	1.443.634.656	1.415.293.350	98,04
2)	Pelayanan informasi rawan bencana	254.660	254.660	100	2.101.270.137	2.062.738.449	98,17
3)	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	254.660	550	0,22	519.378.237	517.819.509	99,70
4)	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	545	545	100	886.757.700	849.784.740	95,83
5)	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	1.814.226	58.454.362	32,22	6.625.000.600	6.625.000.600	100

Sumber: Bagian Organisasi Setda, Kab. Bandung Barat 2022

1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, dengan target yang ingin dicapai sebanyak 1.616.203 orang
- Alokasi anggaran sebesar Rp.1.443.634.656,-
- Dukungan Personil sebanyak 280 orang Satpol PP dan Linmas

2) Pelayanan informasi rawan bencana;

- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dengan target yang ingin dicapai sebanyak 254.660 orang
- Alokasi anggaran sebesar Rp.2.101.270.137,-
- Dukungan Personil sebanyak 9 orang BPBD

3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target yang ingin dicapai sebanyak 254.660 orang
- Alokasi anggaran sebesar Rp.519.378.237,-
- Dukungan Personil sebanyak 9 orang BPBD

4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan target yang ingin dicapai sebanyak 545 orang
- Alokasi anggaran sebesar Rp.886.757.700,-
- Dukungan Personil sebanyak 14 orang Petugas Damkar

5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

- a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan target yang ingin dicapai sebanyak 1.814.226 orang
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.6.625.000.600,-
- c. Dukungan Personil sebanyak 1116 orang Petugas Damkar

6. SPM Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah. Target, realisasi kinerja, anggaran dan dukungan personil pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.101 Target, Capaian Kinerja dan Anggaran
SPM Bidang Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
1)	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	130	130	100	524.448.000	265.565.500	50,64
2)	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	45	35	77,78	51.520.000	51.520.000	100
3)	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	60	35	58,33	32.280.000	32.280.000	100
4)	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	60	60	100	84.045.000	83.295.000	99,11
5)	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100%	0	0	0	0	0

Sumber: Bagian Organisasi Setda, Kab. Bandung Barat 2022

1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;

- a. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, dengan target yang ingin dicapai sebanyak 130 orang;
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.524.448.000,-
- c. Dukungan Personil sebanyak 4 orang Petugas Damkar

2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

- a. Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, dengan target yang ingin dicapai sebanyak 45 orang;
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.51.520.000,-
- c. Dukungan Personil sebanyak 4 orang

3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

- a. Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, dengan target yang ingin dicapai sebanyak 60 orang;
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.32.280.000,-
- c. Dukungan Personil sebanyak 4 orang

4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;

- a. Jumlah Warga Negara /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti, dengan target yang ingin dicapai sebanyak 60 orang;
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.84.045.000,-
- c. Dukungan Personil sebanyak 4 orang

5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota.

- a. Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan social, dengan target yang ingin dicapai sebesar 100%
- b. Alokasi anggaran sebesar Rp.0,-
- c. Tidak ada dukungan personil

2.7 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian dan Pemulihan Ekonomi Pasca Dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2022

Adanya Covid-19 mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian Nasional maupun di Kabupaten Bandung Barat. Dalam menangani peningkatan kasus terinfeksi virus corona atau Covid-19 pemerintah memberlakukan berbagai macam kebijakan salah satunya adalah melakukan social distancing, hal ini berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi sejalan dengan pergerakan manusia, ketika pergerakan manusia dibatasi maka ekonomipun terhambat bahkan menurun.

Hal ini terlihat dari nilai PDRB Kab. Bandung Barat ini mengalami penurunan sebesar 701,2 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 47.180,1 miliar rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 31.398,35 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 30.640,41 miliar rupiah pada tahun 2020 atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,41 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai PDRB menurun menjadi 27,05 juta rupiah, penurunan ini seiring dengan menurunnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku sementara jumlah penduduk terus bertambah. Bila dilihat dari struktur ekonomi, dampak pandemi covid-19 menyebabkan melambatnya seluruh lapangan usaha yang berkontribusi terhadap PDRB, kecuali 5 (lima) lapangan usaha antara lain: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Pendidikan.

Sedangkan bila dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (global value chain). Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran Covid-19 secara otomatis akan berubah.

Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang. Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama perekonomian juga akan terdampak akibat Covid-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur).

Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor. Begitu pula pada aktifitas perusahaan/usaha, dampak adanya Covid-19, berpengaruh terhadap 16,98 persen kegiatan perusahaan/usaha berhenti beroperasi atau tutup yang berdampak terhadap meningkatnya pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di masa pandemi Covid-19 walaupun para pelaku usaha ini dapat bertahan namun mengalami perubahan pendapatan.

Hal ini ditunjukkan dari usaha UMK yang menyatakan bahwa sebesar 85,31 persen pendapatan mereka mengalami penurunan dan penurunan sebesar 14,69 persen untuk usaha UMB. Kebijakan pencegahan penularan kasus covid-19 salah satunya dilakukan dengan meningkatkan daya tahan tubuh melalui program pelaksanaan vaksin covid-19, sampai dengan tahun 2022 masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang telah melakukan vaksinasi Covid-19 dengan capaian yang cukup baik khususnya pada dosis pertama dan dosis kedua. Capaian vaksinasi dosis pertama untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat bahkan telah mencapai 94,13% dari total sasaran. Sedangkan untuk dosis kedua telah mencapai 76,90% dari total sasaran. Untuk dosis ketiga atau dosis penguat (booster) baru mencapai 3,64% dari total sasaran karena memang untuk dosis ini baru dimulai awal tahun 2022 bagi masyarakat umum.

Seiring dengan waktu pandemi covid sudah mulai melandai menuju kondisi normal dan tercapainya *herd immunity* dengan meningkatkan daya tahan tubuh melalui program pelaksanaan vaksin covid-19 pada masyarakat sehingga aktifitas masyarakat sudah berangsur pulih dan ini terbukti dengan mulai membaiknya indikator-indikator makro baik ekonomi maupun social. Perekonomian Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021-2022 masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Hal ini terlihat dari nilai PDRB Bandung Barat pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 walau masih mencapai target sebagaimana halnya pertumbuhan sebelum adanya covid-19 di tahun 2018 dan 2019. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang bebas dari pengaruh inflasi.

Berbagai kebijakan pemulihan pada sector ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta upaya pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, pariwisata serta informasi dan komunikasi.

Program bantuan penanganan dampak Covid-19 menjadi faktor penentu daya tahan dan membangkitkan optimisme perekonomian di Kabupaten Bandung Barat. Ketepatan sasaran dan distribusi yang merata secara adil menjadi harapan utama. Bantuan Modal menjadi yang paling diharapkan dunia usaha, Urgensi Bantuan Modal ini menjadi pilihan pertama dari kelompok usaha UMB maupun UMK. Selanjutnya pemberian bantuan, seperti Peralatan, Ijin, Stabilitas Harga dan Pengembalian ke Kondisi Normal sangat diharapkan oleh pelaku usaha.

Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak hanya merupakan tumpuan mata pencaharian penduduk Kabupaten Bandung Barat, tetapi juga sumber aktivitas penduduk yang memperkuat sendi perekonomian baik pada tingkat nasional maupun regional. Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi aktivitas ekonomi di Kabupaten Bandung Barat dengan proporsi sekitar 98 persen. Keunggulan sektor UMK ini mampu menampung tenaga kerja Kabupaten Bandung Barat yang jumlahnya melimpah. Meskipun tidak menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, aktivitas UMK mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam inovasi dan operasional usahanya sehingga memungkinkan memenuhi kebutuhan konsumen dengan cepat.

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya adalah lapangan usaha yang belakangan ini menjadi penguat keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat selain 5 sektor unggulan. Lapangan usaha informasi dan komunikasi mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan merupakan pendorong utama berkembang pesatnya kegiatan ekonomi informasi dan komunikasi, terutama transformasi digital dan penerapan inovasi pada tahap produksi dan pemasaran hasil produksi usaha kecil dan menengah.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap jenis objek dan aspek kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang dengan memperhitungkan perkembangan ekonomi makro yang nantinya akan mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan dan belanja daerah. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor- sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan sebagai dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022

Pembangunan ekonomi yaitu serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, serta mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun sektor tersier.

Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir 2018 – 2022, setiap tahun akan berbeda dengan kondisi perekonomian pada saat rencana pembangunan jangka menengah tersebut ditetapkan. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan ekonomi yang lebih fleksibel setiap tahunnya, meskipun arah kebijakan pembangunan ekonominya tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pandemic Covid-19 di awal tahun 2020, mempengaruhi terhadap kondisi perekonomian nasional terlebih regional di Kabupaten Bandung Barat. Dampak covid-19 bila dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (global value chain).

Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran Covid-19 secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang. Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama perekonomian juga akan terdampak akibat penyebaran Covid-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor.

Seiring dengan waktu pandemi covid sudah mulai melandai dan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat sehingga aktifitas masyarakat sudah berangsur pulih dan ini terbukti dengan mulai membaiknya indikator-indikator makro baik ekonomi maupun social. Perekonomian Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021-2022 masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Bandung Barat diharapkan telah memasuki fase penormalan, dimana perekonomian Kabupaten Bandung Barat tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi. Capaian perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 dan tahun 2022 pasca terjadinya covid-19 menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2020, namun belum sepenuhnya pulih seperti periode sebelum pandemi (2018-2019), hal ini ditandai dengan:

- a. Perkembangan *output* produksi LPE tahun 2021-2022 terus tumbuh positif;
- b. Kinerja sektor-sektor ekonomi sisi pengeluaran seperti investasi, ekspor, dan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menunjukkan kecenderungan fase pemulihan menuju tahap penormalan;

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap Kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan SepedaMotor; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara peranan lapangan usaha- lapangan usaha lainnya masing- masing masih berada di bawah 5 (lima) persen, distribusi peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (persen)**

No	Sektor	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,46	13,41	13,28	12,59	12,87
2	Pertambangan dan Penggalian	1,08	1,01	1,02	1,04	0,98
3	Industri Pengolahan	39,96	39,96	40,32	41,20	41,60
4	Listrik dan Gas	0,81	0,83	0,81	0,86	0,83
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
6	Konstruksi	7,55	7,66	7,36	7,55	7,33
7	Perdagangan besar, eceran & reparasi Mobil	13,72	13,58	12,90	12,70	12,35
8	Transportasi dan pergudangan	5,31	5,31	5,24	5,15	5,49
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,06	5,16	5,17	5,15	5,26
10	Informasi dan komunikasi	1,70	1,67	2,15	2,19	2,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	0,88	0,90	0,93	0,93
12	Real Estate	1,77	1,81	1,84	1,93	1,92
13	Jasa Perusahaan	0,44	0,45	0,41	0,45	0,48
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,92	2,89	2,73	2,55	2,27
15	Jasa Pendidikan	3,69	3,69	4,18	4,07	3,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,54	0,55	0,56	0,56	0,55
17	Jasa lainnya	1,09	1,11	1,08	1,03	1,06
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha 2017-2022, BPS 2022.

1. Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat dibanding sektor lainnya, dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 39,96 - 41,60 persen dari total PDRB.

2. Perdagangan Besar dan Eceran

Sektor Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar ke dua setelah Industri Pengolahan dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 12,35 - 13,72 persen dari total PDRB. Pada saat pandemi covid-19 sektor ini sangat terpengaruh dengan adanya pembatasan aktifitas manusia atau barang sehingga kontribusinya melambat dibanding saat kondisi normal sebelum adanya covid-19 tetapi berangsur-angsur pulih kembali di tahun 2022 ini.

3. Pertanian

Lingkup lapangan usaha ini meliputi Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Perikanan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 12,59 - 13,46 persen dari total PDRB. Khusus di tahun 2020 pada saat awal terjadi pandemi covid-19, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ada pergeseran dimana lapangan usaha pertanian menjadi urutan kedua melampaui pencapaian lapangan usaha perdagangan. Ini terjadi karena dampak Pandemi Covid-19, lapangan usaha pertanian walaupun sama mengalami hantaman karena covid namun tidak sebesar lapangan usaha perdagangan.

4. Konstruksi

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha konstruksi memberikan andil terhadap PDRB dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 7,33 - 7,66 persen dari total PDRB. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup konstruksi pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prefabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Proyek pembangunan infrastruktur strategis di Bandung Barat jangka menengah seperti Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung serta Proyek perbaikan dan pembukaan ruas jalan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat memberikan kontribusi pada perekonomian di sektor ini.

5. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman pada tahun 2018 - 2022 memberikan andil 5,06 - 5,26 persen terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi

6. Transportasi dan Pergudangan

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2018 - 2022 memberikan andil 5,15 - 5,49 persen terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan didorong oleh perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, dan konstruksi serta juga dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor dan impor..

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Bandung Barat berfluktuatif sebelum dan pasca terjadinya dampak pandemi covid-19 di awal tahun 2020, nilai PDRB Bandung Barat pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Bandung Barat tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 30.640,41 miliar rupiah. Angka tersebut turun sebesar 757,94 miliar dari 31.398,35 miliar rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Bandung Barat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,41 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Pelambatan pertumbuhan ekonomi Bandung Barat pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh melambatnya seluruh lapangan usaha kecuali 5 (lima) lapangan usaha antara lain: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Pendidikan.

Seiring dengan meredanya covid-19 menuju kondisi normal, nilai PDRB Bandung Barat pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 walau masih mencapai target sebagaimana halnya pertumbuhan sebelum adanya covid-19 di tahun 2018 dan 2019. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Bandung Barat tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 33.393,29 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1.691,5 miliar dari 31.701,79 miliar rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan sebesar 5,34 persen dibandingkan tahun 2021, berikut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat selama kurun waktu 2018-2022.

**Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018-2022**

Tahun	LPE (%)
2018	5.50
2019	5.05
2020	-2.41
2021	3.46
2022	5.34

Sumber: PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha 2018-2022.

Dalam rangka perencanaan tahun 2024-2026 perlu memproyeksikan indikator ekonomi makro yang menjadi kerangka untuk perencanaan pembangunan. Kondisi ekonomi tahun 2024 - 2026 masih dalam fase pemantapan pertumbuhan menuju penormalan ekonomi, seluruh sektor lapangan usaha akan didorong untuk tumbuh ekspansif sejalan dengan mantapnya transformasi struktural ekonomi yang telah mengalami percepatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat ke depan tidak terlepas dari kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta upaya pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM dan pariwisata. Tantangan perekonomian Bandung Barat pada tahun 2024 - 2026, meliputi:

1. Tantangan pada sektor investasi yang paling utama adalah pengimplementasian sistem Online Single Submission (OSS) pada seluruh sektor perizinan yang saat ini masih belum optimal. Disamping itu perlu adanya Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi dan Formalisasi Usaha Mikro Kecil pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

2. Tantangan pada sektor industri antara lain mengembangkan wilayah industri pada Kawasan Peruntukan Industri, Substitusi bahan baku impor untuk meningkatkan produksi dalam negeri, membangun kemitraan antara industri besar dan Industri Kecil dan Menengah serta Penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0.
3. Tantangan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah memperkuat ekosistem digital dari hulu ke hilir dan Meningkatkan kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian Bandung Barat melalui wirausaha baru dan meningkatkan kelas UMKM;
4. Tantangan pada sektor pariwisata adalah Pengembangan wisata ramah lingkungan dan desa wisata lalu Promosi destinasi pariwisata baru dan Pengembangan destinasi pariwisata berstandar internasional;
5. Tantangan pada sektor perdagangan antara lain perdagangan yang harus berorientasi ekspor dan meningkatkan cakupan bisnisnya, Standarisasi pasar rakyat ber-SNI, Memastikan Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok terjangkau melalui distribusi yang merata;
6. Tantangan pada sektor pangan dan hortikultura adalah Ketersediaan pangan yang terjangkau dan terlindunginya harga ditingkat produsen, meningkatkan produksi komoditas bahan pangan dan hortikultura impor sehingga dapat meningkatkan produk Pangan lokal yang berkualitas.
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan adalah kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja khususnya bagi generasi milenial yang mencapai 464.462 jiwa atau sekitar 25,54 persen dari total penduduk KBB yang akan memasuki dunia tenaga kerja. Penempatan calon tenaga kerja generasi milenial pada bidang peternakan dan pertanian dengan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing dan menguntungkan sekaligus pula memanfaatkan teknologi digital yang efektif dan efisien sejalan dengan pembangunan pertanian dan peternakan 4.0.
8. Tantangan krisis global akibat perang Rusia dan Ukraina, yang mengakibatkan krisis energi yang berdampak pada permintaan ekspor dan impor serta tingginya inflasi serta kebijakan ekonomi negara besar yang tidak bisa diprediksi secara tepat

Prospek perekonomian pada tahun 2024 - 2026 diperkirakan akan mengalami penormalan bahkan cenderung meningkat seiring dengan normalnya kembali seluruh aktifitas perekonomian masyarakat pasca pandemi covid-19, walaupun harus tetap diantisipasi dengan adanya isu global perang Rusia dan Ukraina serta meningkatnya inflasi. Hal ini ditandai dengan UMKM akan lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (*e-commerce*), Industri sudah mulai berjalan normal seiring banyaknya permintaan pasar ekspor, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali.

Perekonomian Kabupaten Bandung Barat diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat pada fase pemulihan pasca dampak pandemi covid-19 tahun 2020 yang mengalami peningkatan. Kecendrungan meningkat ini diharapkan akan terus berlangsung sehingga laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dapat berada diatas 6%. Secara umum, pada tahun 2024 - 2026 diharapkan perekonomian sudah mulai pulih dan semakin meningkat, dengan proyeksi kinerja capaian perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 - 2026 ditargetkan berdasarkan perhitungan proyeksi berikut:

**Tabel 3.3 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Capaian Tahun 2022*	Target (hasil proyeksi)		
			2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,34	4,95	5,66	6,13
2	Laju Inflasi	7,45	0,72	1,14	1,08
3	PDRB harga berlaku (milyar)	52.921,28	57.489,33	61.436,42	65.904,08
4	PDRB harga Konstan (milyar)	33.393,29	36.524,24	38.591,39	40.956,13
5	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	28.650,00	30.106,36	31.728,63	33.508,36

Sumber: Target Indikator Pembangunan KBB 2024-2026, Proyeksi Bappelitbangda, 2022

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 - 2026 masih dalam fase pemulihan ekonomi menuju pemantapan pertumbuhan ekonomi. Seluruh sektor lapangan usaha akan didorong untuk tumbuh ekspansif sejalan dengan mantapnya transformasi struktural ekonomi yang telah mengalami percepatan.

Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, serta Kehutanan dan Perikanan akan didorong untuk tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional dan provinsi. Sektor-sektor lainnya seperti sektor Konstruksi, Real Estate dan Jasa Perusahaan juga diperkirakan menjadi sektor yang tumbuh positif pada tahun 2024 - 2026. Proyeksi distribusi presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha tahun 2024 - 2026 ditargetkan berdasarkan perhitungan proyeksi berikut:

Tabel 3.4 Proyeksi Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (persen)

	Lapangan Usaha	Capaian Tahun 2022*	Target (hasil proyeksi)		
			2024	2025	2026
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,87	12,88	12,89	13,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,98	1,03	1,01	1,01
C	Industri Pengolahan	41,60	41,61	41,63	41,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,83	0,83	0,85	0,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,04	0,05	0,05
F	Konstruksi	7,33	7,49	7,51	7,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,35	12,98	13,01	13,03
H	Transportasi dan Pergudangan	5,49	5,22	5,24	5,25
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,26	5,16	5,19	5,21
J	Informasi dan Komunikasi	2,12	2,06	2,09	2,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,93	0,91	0,93	0,93
L	<i>Real Estate</i>	1,92	1,87	1,88	1,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,48	0,43	0,44	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,27	2,70	2,71	2,71
P	Jasa Pendidikan	3,93	4,03	4,05	4,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,55	0,56	0,58	0,59
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1,06	1,07	1,08	1,08

Sumber: Target Indikator Pembangunan KBB 2024-2026, Proyeksi Bappelitbangda, 2022

Krisis Global akibat perang Rusia dan Ukraina, perang dagang yang berkecamuk ditingkat global, menguatnya nilai tukar dolar, kebijakan ekonomi negara besar yang tidak bisa diprediksi secara tepat, maka peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kedepan akan mengalami kendala yang cukup berarti.

Kendala ini tidak mengubah optimisme pemerintah Kabupaten Bandung Barat agar terus LPE meningkat. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi strategi yang akan terus dilakukan. Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional serta nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2024 - 2026.

3.2 Kinerja Keuangan Masa Lalu (2018-2022)

Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber- sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function).

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD (2018 - 2022)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah; (2) Belanja Daerah; dan (3) Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 28 ayat (1), Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah berdasarkan peraturan yang sama Pasal 28 ayat (2) meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Pembiayaan Daerah berdasarkan peraturan yang sama Pasal 28 ayat (3) meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

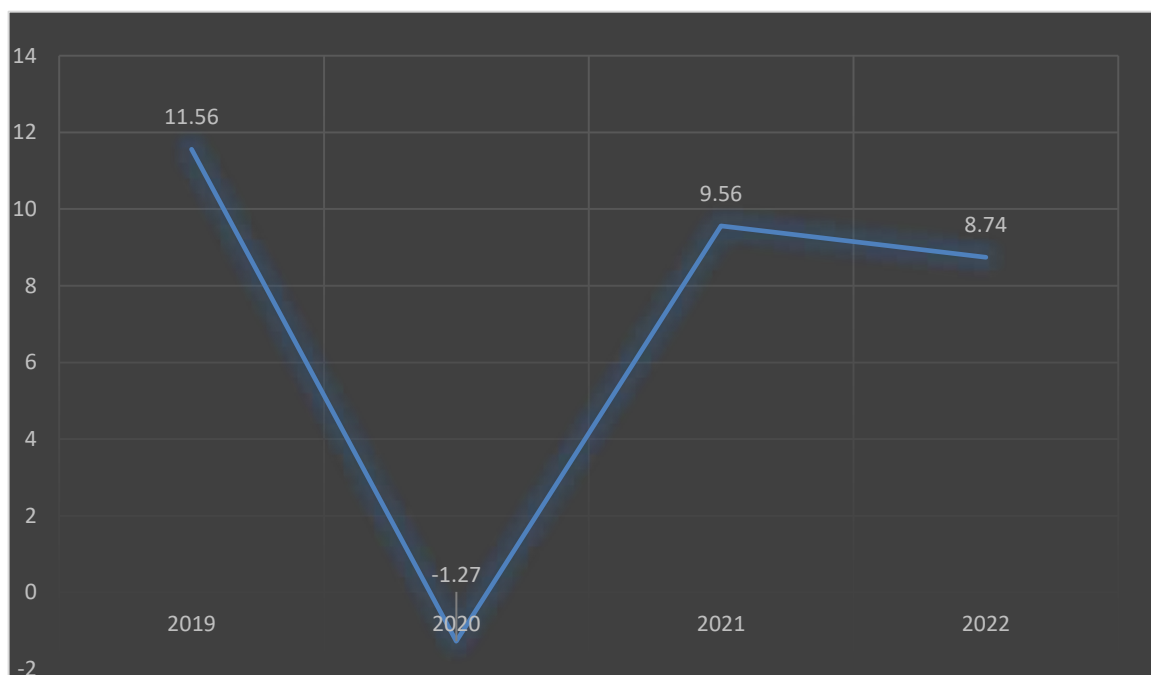
3.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Lain-lain pendapatan yang sah yang meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak

Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen APBD yang memiliki peranan penting karena sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak Pendapatan Daerah. Berikut ini adalah persentase pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2022.

**Gambar 3.1. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022**



Sumber: Bappenda, BKAD, Bappelitbangda, diolah 2022

Tahun 2018 hingga 2022, pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat mengalami perkembangan fluktuatif dari tahun 2018 dengan kenaikan 11,56 persen dan mengalami penurunan sebesar 12.83 Persen dari dampak Covid-19 di tahun 2020. Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:



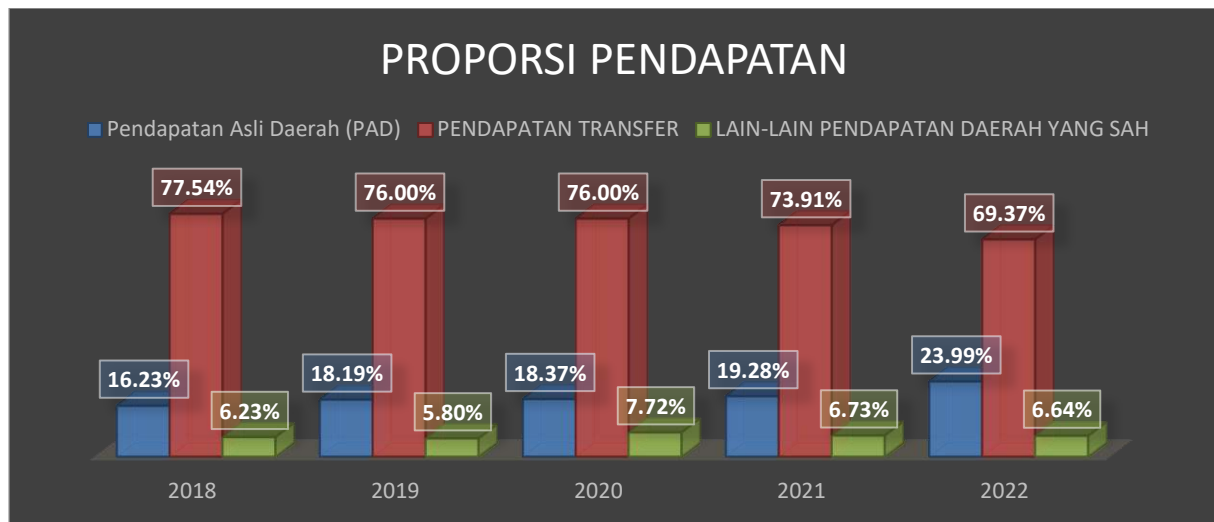
**Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022**

Kode	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Pendapatan Daerah	2.601.956.561.020	2.902.841.293.218	2.530.168.878.201	2.804.253.404.555	2.781.252.577.719
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	422.341.026.545	528.087.033.271	464.817.974.827	540.783.936.035	667.243.725.925
4.1.01	Pajak Daerah	306.237.634.441	379.096.936.256	330.898.929.358	375.265.784.971	495.814.400.587
4.1.02	Retribusi Daerah	20.367.747.909	38.560.684.794	27.510.250.500	17.073.496.576	15.099.253.355
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	470.526.236	494.842.021	653.894.651	1.253.070.525
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	95.735.644.195	109.958.885.985	105.913.952.948	147.790.759.837	155.077.001.458
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.017.526.076.310	2.206.258.579.947	1.870.003.233.375	2.074.746.679.520	1.929.331.252.543
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.525.369.448.662	1.639.819.402.415	1.447.321.912.126	1.804.538.931.386	1.637.296.424.922
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	198.291.361.000	241.510.582.000			
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	240.298.088.056	243.264.633.170			
4.2.04	Bantuan Keuangan	53.567.178.592	81.663.962.362			
4.2.05	Pendapatan Transfer Antar Daerah			422.681.321.249	270.207.748.134	292.034.827.621
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	162.089.458.165	168.495.680.000	195.347.670.000	188.722.789.000	184.677.599.251
4.3.01	Pendapatan Hibah	162.089.458.165	168.495.680.000	195.347.670.000		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				188.722.789.000	184.677.599.251

Sumber : Bappelitbangda, diolah

Jika dilihat dari tren persentase masing-masing komponen Pendapatan Daerah, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari PAD mengalami fluktuasi ditahun 2020 tetapi dapat meningkat di realisasi tahun 2022 . Bila dilihat berdasarkan komponennya, Proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2 Proporsi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022)



Sumber : Bappelitbangda, diolah

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah Proporsi Pendapatan Transfer selalu menjadi komponen dengan kontribusi terbesar. Pendapatan Asli Daerah mengalami tren positif meningkat di tiap tahunnya Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat baik. Adapun Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

3.2.1.2 Belanja Daerah

Penyajian belanja daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Tabel 3.6 Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022**

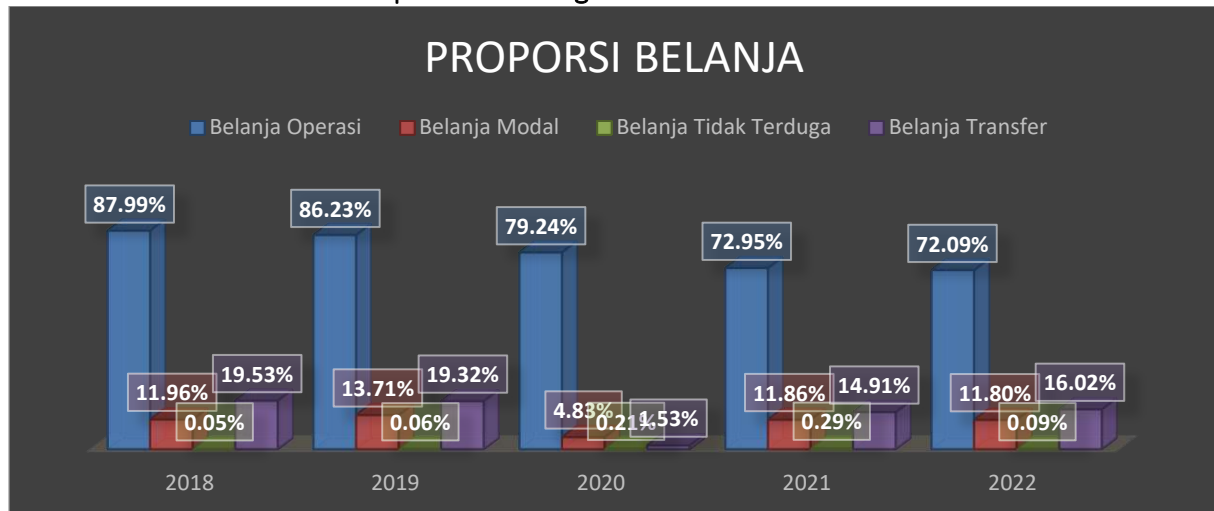
Kode	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
		Realiasi	Realiasi	Realiasi	Realiasi	Realiasi
5	BELANJA	2.211.908.511.646	2.901.968.390.707	2.639.640.727.271	2.917.749.150.862	2.893.541.475.823
5.1	BELANJA OPERASI	1.946.359.838.578	2.562.489.902.313	1.934.668.372.009	2.128.381.840.567	2.086.070.172.818
5.1.01	Belanja Pegawai	1.137.466.466.446	1.337.528.136.824	1.153.720.854.748	1.140.660.223.059	1.126.247.524.223
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.835.278.920	490.001.178.090	665.332.491.207	918.292.891.347	880.687.593.731
5.1.03	Belanja Bunga			2.855.004.000	723.711.188	10.303.550.991
5.1.04	Belanja Subsidi					
5.1.05	Belanja Hibah	204.132.164.612	284.461.538.360	110.656.193.554	65.485.210.973	62.369.036.473
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.925.928.600	13.285.454.435	2.103.828.500	3.219.804.000	6.462.467.400
5.2	BELANJA MODAL	264.540.319.500	338.001.326.884	465.456.844.575	346.128.576.027	341.545.861.605
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.019.454.950	20.388.039.964	7.133.690.500	11.193.228.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.167.389.878	105.614.260.226	190.396.585.609	144.959.328.329	97.105.705.629
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.332.590.648,00	51.922.752.066	113.378.948.383	71.983.011.084	52.174.354.880
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.600.838.472,00	77.081.366.659	82.998.056.756	101.033.415.866	177.473.377.906
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.420.045.552,00	81.892.322.469	66.000.836.058,00	16.782.032.748	14.098.540.479
5.2.06	Belanja Modal Aset Tetap		1.102.585.500,00	5.548.727.269,00	177.560.000,00	693.882.711
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.008.353.569	1.477.161.510	74.183.964.539	8.328.012.910	2.511.104.082
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.008.353.569	1.477.161.510	74.183.964.539	8.328.012.910	2.511.104.082
5.4	BELANJA TRANSFER	431.987.695.410	39.024.427.844	165.331.546.148	434.910.721.359	463.414.337.318
5.3.01	Belanja Bagi Hasil	36.852.601.759	37.774.335.344	38.518.706.534	40.579.431.776	45.321.914.164
5.3.01	Belanja Bantuan Keuangan	395.135.093.651	1.250.092.500	126.812.839.614	394.331.289.583	418.092.423.154

Sumber : Bappelitbangda, diolah

Realisasi Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 5 tahun terakhir (2018-2022). Pada tahun 2018 sebesar Rp.2.211.908.511.646,- meningkat menjadi Rp.2.893.541.475.823,- ditahun 2022

Bila dilihat berdasarkan komponennya, Proporsi masing- masing komponen belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.3 Proporsi Belanja Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Bappelitbangda, diolah

3.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 ayat (1), Pembiayaan Daerah terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan. Pasal 70 ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan bahwa terdapat enam sumber Penerimaan Pembiayaan, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan (6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah tersebut dapat digunakan untuk lima hal, yaitu: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan (5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto, dimana Pembiayaan Netto ini digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Sama halnya dengan analisis Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Adapun hasil analisis pembiayaan daerah Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022**

Kode	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
7	PEMBIAYAAN	314.002.914.877	272.063.268.840	233.911.743.507	198.288.982.078	177.494.441.286
7.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	324.002.913.177	272.063.268.840	233.911.743.507	198.288.982.078	232.657.933.693
7.1.1.	Penggunaan SiLPA	304.002.913.177	272.063.268.840	233.911.743.507	124.439.894.438	84.793.235.771
7.1.2.	Pinjaman Dalam Negeri			-	73.849.087.640	147.864.697.922
7.1.3.	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	-			
7.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.999.998.300	-			55.163.492.407
7.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	9.999.998.300	-			9.999.998.915
7.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					45.163.493.492

Sumber : Bappelitbangda, diolah

Dari Tabel 3.7 terlihat bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mempunyai SiLPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit.

3.2.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi: (1) aset; (2) kewajiban; dan (3) ekuitas dana, yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening.

3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (2018 - 2022)

3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Belanja Pegawai. Proporsi Belanja Pegawai dapat menunjukkan apakah penggunaan keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi Belanja Pegawai maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya, semakin rendah proporsi Belanja Pegawai maka semakin tinggi penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

**Tabel 3.8 Realisasi Proporsi belanja Pegawai
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2019**

NO	KETERANGAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.137.466.466.446	1.337.528.136.824	1.153.720.854.748
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	808.986.530.411	825.221.480.660	778.326.285.483
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	166.738.210.212	285.818.248.056	252.205.984.014
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.231.500.000	9.691.409.471	9.741.421.380
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	15.332.599.420	14.737.196.746	13.117.118.677
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	361.825.022	505.956.013	441.387.493
5.1.1.07.	Uang Lembur	695.621.500	698.390.000	971.090.000
5.1.1.09.	Honorarium PNS	2.046.728.000	2.657.666.083	2.288.876.150
5.1.1.10.	Honorarium Non PNS	106.506.936.300	176.571.200.000	32.649.120.000
5.1.1.11.	Belanja Pegawai BLUD	1.102.314.000	999.325.000	7.367.110.000
5.1.1.12.	Honorarium Pengelola Dana Bos	26.464.201.581	20.627.264.795	56.612.461.551

Sumber : Bappelitbangda, diolah

**Tabel 3.9 Realisasi Proporsi belanja Pegawai
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2022**

NO	KETERANGAN	TAHUN	
		2021	2022
5.1.01	Belanja Pegawai	1.140.660.223.059	1.126.247.524.223
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	546.005.281.414	549.543.496.880
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	273.597.809.430	293.295.497.248
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	265.494.947.324	208.505.410.475
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	42.804.324.966	51.138.272.489
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.306.265.391	896.865.730
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	946.043.897	1.314.541.380
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	10.505.550.637	21.553.440.021

Sumber : Bappelitbangda, diolah

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari tahun 2018 hingga 2022 hal tersebut disesuaikan dengan efisiensi penggunaan anggaran.

3.3.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kab. Bandung Barat ditinjau berdasarkan surplus ataupun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti Belanja Daerah lebih besar daripada Pendapatan Daerah.

**Tabel 3.10 Defisit/Surplus Anggaran
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022**

SURPLUS/(DEFISIT)			
TAHUN	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
2022	(217.614.994.693)	(112.288.898.104)	51,60
2021	(409.940.294.438)	(113.495.746.307)	27,69
2020	(519.412.143.507)	(109.471.849.069)	21,08
2019	(519.412.143.507)	(109.471.849.069)	21,08
2018	(314.002.913.178)	(41.939.646.037)	13,36

Sumber : Bappelitbangda, diolah

Kondisi keuangan daerah Kab. Bandung Barat dalam periode tahun 2018-2022 berfluktuasi mengalami surplus/defisit sesuai table diatas terjadi kabupaten bandung barat mengalami peningkatan deficit disetiap tahun

3.4 Kerangka Pendanaan (Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2024 – 2026)

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kab. Bandung Barat terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kab. Bandung Barat selama periode 2024-2026 bergantung pada anggaran selama tiga tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah. Perkiraan Pendapatan Daerah disajikan secara indikator dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, yang dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.11 Proyeksi Keuangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026**

No	RINCIAN	Realisasi 2022	Proyeksi		
			2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	2.781.252.577.719,06	2.382.060.621.353	2.408.095.867.300	2.435.504.998.603
1.1	PAD	667.243.725.925,06	676.785.751.719	702.820.997.666	730.230.128.969
1.1.1	Pajak	495.814.400.587,00	500.000.000.000	525.000.000.000	551.250.000.000
1.1.2	Restribusi	15.099.253.355,00	14.331.488.426	15.366.734.373	16.525.865.676
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.253.070.525,00	1.253.070.525	1.253.070.525	1.253.070.525
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	155.077.001.458,06	161.201.192.768	161.201.192.768	161.201.192.768
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.929.331.252.543,00	1.705.274.869.634	1.705.274.869.634	1.705.274.869.634
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	1.637.296.424.922,00	1.412.054.662.000	1.412.054.662.000	1.412.054.662.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Daerah	292.034.827.621,00	293.220.207.634	293.220.207.634	293.220.207.634
2	BELANJA	2.893.541.475.823,00	2.216.893.821.353	2.408.095.867.300	2.435.504.998.603
2.1	BELANJA OPERASI	2.086.070.172.818,00	1.791.302.383.610	1.978.588.404.963	2.001.878.498.135
2.1.1	Belanja Pegawai	1.126.247.524.223,00	1.213.497.539.488	1.266.141.568.858	1.269.758.666.965
2.1.2	Belanja Barang Jasa	880.687.593.731,00	515.304.844.122	672.446.836.105	692.119.831.170
2.1.3	Belanja Bunga	10.303.550.991,00	15.000.000.000		
2.1.4	Belanja Hibah	62.369.036.473,00	40.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.462.467.400,00	7.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3	BELANJA MODAL	341.545.861.605,00			
3.1	Belanja Modal Tanah				
3.2	Belanja Modal Gedung	52.174.354.880,00			
3.3	Belanja Modal Peralatan Mesin	97.105.705.629,00			
3.3	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	177.473.377.906,00			
3.4	Belanja Asset tetap Lainnya	14.098.540.479,00			
3.5	Belanja Asset Tetap	693.882.711,00			
4	BELANJA TAK TERDUGA	2.511.104.082,00	26.250.000.000	27.562.500.000	28.940.625.000
4.1	Belanja Tak Terduga	2.511.104.082,00	26.250.000.000	27.562.500.000	28.940.625.000
5	BELANJA TRANSFER	463.414.337.318,00	399.341.437.743	401.944.962.337	404.685.875.468
5.1	Belanja Bagi Hasil ke Desa	45.321.914.164,00	51.433.148.843	54.036.673.437	56.777.586.568
5.2	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	418.092.423.154,00	347.908.288.900	347.908.288.900	347.908.288.900
	Surplus/defisit	(112.288.898.103,94)	165.166.800.000	-	-
6	PEMBIAYAAN	177.494.441.285,94	165.166.800.000	-	-
6.1	Penerimaan Pembiayaan	232.657.933.692,94	-	-	-
6.1.1	Silpa Tahun yang berkenaan	84.793.235.770,94		-	-
6.1.2	Penerimaan Pinjaman	147.864.697.922,00	-		-



No	RINCIAN	LRA 2022 (realisasi)	Proyeksi		
			2024	2025	2026
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	55.163.492.407,00	165.166.800.000	-	-
6.2.1	Dana Cadangan Pilkada 2024		40.000.000.000	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal	9.999.998.915,00	30.000.000.000		
6.2.3	Pembayaran Cicilan Utang	45.163.493.492,00	95.166.800.000	-	-
	Pembiayaan Netto	177.494.441.285,94	(165.166.800.000)	-	-
	Total APBD		2.382.060.621.353	2.408.095.867.300	2.435.504.998.603

Sumber : Bappelitbangda, diolah

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Hasil telaahan dokumen perencanaan juga mencakup kebijakan-kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat maupun isu global yang juga turut mempengaruhi isu permasalahan nasional dan daerah. Di sisi yang lain, mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di suatu daerah di masa mendatang ini disebut sebagai Isu Strategis Daerah. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sebagaimana uraian pada Bab II, kinerja pembangunan daerah di satu sisi telah memunculkan *outcome* yang bermanfaat kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta *outcome* maupun yang optimal bagi pemangku kepentingan bahkan tidak berdampak/impact bagi masyarakat.

Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa factor dan potensi permasalahan sendiri muncul akibat masih adanya kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi dengan baik, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja yang dilakukan terhadap perencanaan yang selanjutnya diharapkan akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bandung Barat merupakan hasil analisis capaian kinerja pembangunan yang telah dideskripsikan sebelumnya pada bab II, untuk selanjutnya diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

4.1.1 Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pertumbuhan Harapan lama sekolah usia 7 tahun sebesar 0,01 persen per tahun selama tahun 2018-2022. Dan pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang hanya tumbuh sebesar 0,05 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.
- b. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
- c. Masih terdapat anak usia 13- 15 tahun yang melanjutkan ke pondok pesantren, sekolah diluar kota, lebih memilih bekerja atau tidak sekolah;
- d. Adanya penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di luar Kabupaten Bandung Barat, juga terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang sudah sekolah di SMA/MA atau masih sekolah di SD yang masih berusia kurang dari 13 tahun;
- e. Capaian Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs abru sebesar 94,75%
- f. Masih rendahnya Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA sebesar 65,67 persen
- g. Masih rendahnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- h. Masih terdapat ruang kelas sekolah SD/SMP dalam kondisi rusak sedang dan rusak ringan
- i. Sarana dan prasarana untuk pembelajaran secara daring belum memadai;
- j. Masih adanya Lembaga PKBM, Kursus, dan Pelatihan yang belum berizin dengan capaian hanya 48 persen.

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan baru mencapai 76,17 persen
- b. Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi;

- c. Masih ditemukannya balita gizi buruk
- d. Prevelansi stunting masih tinggi sebesar 27,30%
- e. Masih terdapat ibu hamil dan remaja putri yang menderita anemia
- f. Masih tingginya angka kesakitan baik menular maupun tidak menular
- g. Masih kurangnya Tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan capaian 70%
- h. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan baik FKTP maupun rujukan untuk melayani 1,8 juta jiwa penduduk Kab. Bandung Barat.
- i. Masih rendahnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui Desa Siaga Aktif baru 92 desa dari 165 desa yang ada.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik;
- b. Masih rendahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan kondisi 70,91% jalan baik
- c. Jalan poros desa dalam kondisi baik masih belum memadai;
- d. Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal;
- e. Masih kurangnya ketersediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian.
- f. Masih kurangnya ketersediaan akses air minum yang memadai dengan capaian 68,50%
- g. Kurangnya ketersediaan alat berat/peralatan kebinamargaan.
- h. Belum teroptimalisasi pemanfaatan sumber mata air secara maksimal dan pembebasan lahan yang belum merata.
- i. Masih kurangnya kinerja pengelolaa air limbah dengan capaian masih rendah sebesar 61,18%.
- j. Masih kurang tersedianya lahan untuk proses pembangunan fasilitas publik.
- k. Masih rendahnya kesesesuaian dalam rangka pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang berlaku
- l. Masih rendahnya ruang terbuka hijau (RTH) dengan proporsi 20% dari luas wilayah untuk RTH yang bersifat publik

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan urusan Perumahan dan Pemukiman sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan permukiman di wilayah kabupaten Bandung Barat yang tersebar di 165 Desa yang belum tertangani antara lain Pembangunan Jalan Setapak (jalan Gang), Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase, Pembangunan TPT, dan Pembangunan Penerangan Jalan;
- b. Belum terciptanya Rekapitulasi dan administrasi pencatatan lahan pemakaman atau TPU yang baik serta pengelolaan TPU yang belum maksimal.
- c. Belum tepatnya satuan indikator program dalam penataan wilayah kumuh, dari 7 kriteria kumuh hanya terlaksana 1 kriteria saja yaitu Rumah Tidak Laik Huni.
- d. Belum adanya dokumen RP2KPKPK dan RP3KP untuk penataan kawasan permukiman dan perumahan.
- e. Belum optimalnya penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau;

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- b. Masih kurangnya SDM baik secara kuantitas dan kualitas dalam rangka pelaksanaan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat
- c. Belum optimalnya peranan Satlinmas dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan trantibum
- d. Belum optimalnya peran Relawan bencana dalam mitigasi dan penanganan pasca bencana
- e. Adanya aduan yang tidak tertangani menengani IMB, karena adanya PP 16 tahun 2021 yang menyebutkan tidak adanya kewenangan pemerintahan daerah mengenai sanksi dan belum adanya penyesuaian Perda terkait tersebut;
- f. Perlunya kesiapsiagaan Pemerintah Daerah, Aparatur Desa, Masyarakat, dan lingkungan sekolah dalam menghadapi terjadinya bencana dan penanggulangan dampak dan akibat bencana terhadap korban maupun infrastruktur yang terkena bencana;

- g. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah pada aspek-aspek pengurangan resiko bencana dan mematuhi rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
- h. Perlunya keterlibatan akademisi dalam meneliti, mengkaji dan menganalisis potensi Bencana, agar dapat mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.

6) Urusan Sosial

Permasalahan urusan sosial sebagai berikut:

- a. Database PPKS belum tersusun secara sistematis dan terpadu
- b. Penyandang masalah kesejahteraan sosial pada umumnya kurang memiliki kemampuan untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka;
- c. Penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya Fakir Miskin pada umumnya selain kurang memiliki motivasi untuk berusaha mereka juga tidak memiliki aksesibilitas untuk menjangkau sistem sumber daya yang ada;
- d. Masih banyak Penyandang Disabilitas yang menggantungkan hidupnya kepada pihak lain baik secara ekonomi maupun sosial;
- e. Penyandang masalah kesejahteraan sosial eks Penyandang Penyakit Sosial pada umumnya mereka sulit kembali ke masyarakat dan hidup sebagaimana warga masyarakat pada umumnya.
- f. Belum semuanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tertangani

4.1.2 Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan urusan tenaga kerja sebagai berikut :

- a. Meningkatnya PHK yang disebabkan oleh dampak Covid
- b. Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
- c. Tingginya jumlah pengangguran;
- d. Rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja;
- e. Minimnya perlindungan hukum terhadap kasus ketenagakerjaan;
- f. Masih terdapat Pemberian upah belum sesuai dengan UMR;
- g. Kualifikasi/ jurusan lulusan pendidikan SMK belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Bandung Barat
- b. Pandemi Covid-19 telah memperburuk ketimpangan gender sehingga perempuan menjadi lebih rentan. Dari sisi ekonomi banyak perempuan pengusaha yang mengalami penurunan omset secara drastis akibat penerapan pembatasan sosial dan adaptasi kebiasaan baru.
- c. Masih belum optimalnya peran aktif perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan ekonomi

3) Urusan Pangan

Permasalahan urusan pangan sebagai berikut:

- a. Masih adanya desa rawan pangan
- b. Tingkat Konsumsi pangan yang kurang beragam.
- c. Pengawasan distribusi pangan yang belum optimal.
- d. Berkurangnya jumlah produksi bahan pangan akibat belum sepenuhnya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19;
- e. Masih rendahnya cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat

4) Urusan Pertanahan

Permasalahan urusan pertanahan sebagai berikut:

- a. Belum terealisasinya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong
- b. Belum optimalnya penyelesaian kasus konflik pertanahan

5) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan urusan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil uji pemantauan IPAL industri, dari 17 yang dipantau ternyata hanya 10 IPAL industri yang memenuhi baku mutu.
- b. Masih rendahnya kualitas air sungai.
- c. Belum optimalnya pengelolaan limbah LB3 sesuai peraturan
- d. Cakupan luasan taman dan RTH masih belum sesuai aturan

- e. Permasalahan terkait persampahan masih kurangnya armada yang dimiliki dan terbatasnya SDM dalam pengelolaan sampah dibandingkan dengan luas area pelayanan.

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- a. Masih perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Sarana dan prasarana pelayanan di dinas kurang memadai dikarenakan banyak nya peralatan dan perlengkapan pelayanan yang sudah lama dan sering rusak terutama Server dan Alat Perekaman KTP-EL.
- c. Data yang terecord di data base itu banyak data sampah yang terus di gunakan oleh penduduk dan tetap dilayani sehingga perhitungan capaian kinerja atau berbasis data konsolidasi bersih akan tidak sinkron dengan pelayanan sebenarnya.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- a. Pergantian pengurus BUMDes apabila terpilihnya Kepala Desa baru.
- b. Usaha yang dilakukan oleh BUMDes tidak melalui proses perencanaan dan kajian sehingga resiko kegagalan usaha sangat besar.
- c. Masih sedikitnya BUMDes yang menghasilkan PADes.
- d. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam pembangunan sarana prasarana desa.
- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana desa dan dalam mengikuti lomba desa.
- f. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional;
- g. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif dan belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas.

8) Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Permasalahan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- a. Arus penduduk masuk ke Kabupaten Bandung Barat yang besar pada umumnya Pasangan Usia Subur (PUS), perlu intervensi langsung dan pemberian informasi dan pelayanan KB yang memadai;
- b. Sebagai pengaruh dari keberhasilan Program KB di masa lampau, persentase penduduk usia reproduksi saat ini relatif tinggi. Kondisi ini menuntut konsistensi dan pemerataan akses terhadap pelayanan KB.
- c. Belum optimalnya Petugas KB di lini lapangan seperti belum semua desa memiliki rasio satu PKB satu desa sehingga dalam melakukan pembinaan KIE belum maksimal
- d. Penggerakan yang kurang tepat sasaran dalam Penggunaan metode MKJP (masih didominasi oleh peserta PUS tua dan sudah memiliki anak lebih dari 2), sehingga jumlah peserta KB MKJP belum dapat mendorong untuk penurunan TFR.

9) Urusan Perhubungan

Permasalahan urusan perhubungan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa trayek yang sudah tidak beroperasi, sehingga terdapat ketidakcocokan antara data eksisting dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 550/Kep.5-Dishub/2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Adanya kebijakan Pemerintah terkait Over Dimension Over Loading (ODOL) sehingga tidak menjalankan uji berkala.
- c. Adanya peraturan Daerah terkait adanya pembatasan angkutan penumpang sehingga kendaraan yang melewati batas usia kendaraan tidak dapat melaksanakan uji KIR atau uji keliling.
- d. Pendapatan Asli Daerah seperti Retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak mencapai target disebabkan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor direncanakan memiliki Alat Uji Kendaraan bermotor sebanyak 2 line, tetapi hanya terealisasi 1 line

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- a. Belum seluruh Perangkat Daerah memahami dan mematuhi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan regulasi lainnya di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Dalam rangka implementasi layanan aplikasi, terutama layanan perizinan online, aplikasi e-presensi (absensi) dan e-kinerja diperlukan spesifikasi server yang mencukupi, dalam hal ini server yang dimiliki oleh Diskominfo belum mendukung untuk implementasi aplikasi dengan baik.
- c. Ruang server yang belum terstandarisasi internasional dan belum tersedianya back up plan Disaster Recovery Center (DRC).
- d. Tidak adanya anggaran peningkatan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang Teknologi Informasi.
- e. Masih kurangnya perangkat pendukung jaringan internet dikarenakan usia perangkat yang ada saat ini sudah tidak layak, perangkat pendukung jaringan internet ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan kepada pengguna.
- f. Belum terkoreksinya seluruh media yang bekerjasama dengan organisasi KBB dan
- g. Belum terkoordinasinya pemberitaan dengan perangkat daerah

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya Sarana, prasarana dan akses permodalan dalam memfasilitasi para pelaku usaha umkm dan pengawasan koperasi;
- b. Masih rendahnya akses produk-produk UMKM Bandung Barat kepada pasar;
- c. Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
- d. Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
- e. Kualitas SDM koperasi dan UMKM, jaringan pemasaran, teknologi tepat guna yang belum optimal;
- f. Belum adanya database UMKM yang telah diperbaharui

12) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Sinergitas antar lembaga dalam proses pelayanan perizinan belum optimal.

- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi perizinan, masih ada pola pikir bahwa melengkapi/tertib izin itu adalah kebutuhan belum merupakan suatu kewajiban.
- c. Rendahnya pelaporan perusahaan dalam menyampaikan LKPM.
- d. Belum tersedianya Detail Engineering Design (DED) terhadap potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan.
- e. Belum meratanya penyebaran infrastruktur yang mendukung pengembangan investasi.

13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya layanan kepemudaan dengan capaian hanya 7,83 persen di tahun 2022
- b. belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan
- c. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda pada organisasi kepemudaan
- d. Masih tingginya angka pengangguran pada usia pemuda padahal pemuda adalah penduduk yang berusia 16 -30 tahun yang merupakan termasuk usia produkti
- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga masih sangat tergantung kepada ketersediaan melalui APBD
- f. Belum adanya prasarana olahraga berupa gelanggang/gedung/lapang olahraga/Gedung Diklat olahraga sebagai pusat aktifitas masyarakat maupun atlet dalam penyelenggaraan olahraga
- g. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga yang dipengaruhi oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana serta ruang terbuka untuk melakukan kegiatan berolahraga

14) Urusan Statistik

Permasalahan urusan statistik sebagai berikut:

- a. Dengan telah ditetapkannya Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, terdapat beberapa kendala terkait tata kelola data di Kab. Bandung Barat:
 - Bahwa Data statistik yang dikumpulkan harus sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia terkait data harus memenuhi standar data, harus memiliki metadata,

harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dan harus menggunakan Kode Referensi;

- Belum adanya penentuan Data Prioritas yaitu Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data;
 - Bahwa sesuai Perpres 39 tahun 2019 bahwa Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
- b. Dalam rangka integrasi dan publikasi data masih secara manual belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi

15) Urusan Persandian

Permasalahan urusan persandian sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan keamanan audit, pertimbangan kelayakan keamanan dalam pembangunan infrastruktur seperti pusat data nasional, sistem jaringan pemerintah, dan badan penghubung layanan pemerintah.
- b. Masih rendahnya pengetahuan aparatur sipil perangkat daerah di lingkup Pemkab Bandung Barat tentang keamanan informasi.

16) Urusan Kebudayaan

Permasalahan urusan kebudayaan sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi;
- b. Memudarnya semangat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal;
- c. Peninggalan warisan budaya saat ini sudah semakin terancam keberadaannya;
- d. Belum tersedianya gedung kesenian representatif untuk pementasan;
- e. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya;
- f. Pelaksanaan event seni budaya masih terbatas;
- g. Pelestarian situs cagar budaya belum optimal

17) Urusan Perpustakaan

Permasalahan urusan perpustakaan sebagai berikut:

- a. Kurangnya minat baca masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

- b. Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif sebagai gedung perpustakaan umum daerah dengan lokasi yang mudah di akses terutama oleh masyarakat KBB.
- c. Kurangnya koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka/ pengunjung perpustakaan.
- d. Penurunan pengunjung perpustakaan akibat dampak pandemi Covid-19

18) Urusan Kearsipan

Permasalahan urusan kearsipan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pengelolaan kearsipan di Perangkat daerah dengan capaian 31 persen.
- b. Masih kurangnya sumber daya manusia seperti tenaga arsiparis, tenaga teknis dan tenaga ahli, baik itu di lingkungan SKPD, kecamatan, desa dan sekolah.

4.1.3 Permasalahan Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- a. Produksi ikan, baik ikan hias, ikan konsumsi dan benih ikan belum optimal;
- b. Turunnya daya beli masyarakat terhadap bahan pangan asal hewan khususnya ikan;
- c. Tingginya harga pakan yang mempengaruhi biaya produksi baik di sektor perikanan, sehingga pendapatan pembudidaya ikan dan peternak masih rendah
- d. Pemasaran produksi perikanan masih kurang.

2) Urusan Pariwisata

Permasalahan urusan pariwisata sebagai berikut:

- a. Kurang memadainya akses menuju destinasi wisata di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata unggulan yang telah ada, dan kurangnya pengembangan potensi wisata sebagai destinasi wisata baru;
- c. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan;
- d. Masih rendahnya daya saing pelaku usaha ekonomi kreatif
- e. Belum efektifnya kegiatan promosi pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif
- f. Masih kurangnya daya saing pelaku usaha dan pendukung pariwisata

3) Urusan Pertanian

Permasalahan urusan pertanian sebagai berikut:

- a. Kurangnya penerapan teknologi pertanian oleh petani;
- b. Berkurangnya hasil usaha pertanian dan peternakan;
- c. Masih tingginya gangguan hama/penyakit tanaman yang menyebabkan berkurangnya tingkat produksi pertanian;
- d. Makin berkurangnya luas lahan pertanian produktif;
- e. Berkurangnya Minat usaha tani dan ternak;
- f. Penyampaian informasi mengenai pertanian dan peternakan kepada masyarakat Belum Optimal relatif masih rendah dan keterbatasan permodalan;
- g. Relatif rendahnya Produktivitas ternak;
- h. Tempat pemotongan hewan ternak/unggas yang berada di bawah standar ketentuan kesmavet;
- i. Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah belum tersedia;
- j. Ketersedian Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang sulit karena ketersediaan lahan tanam dan kualitas HPT yang belum memenuhi standar gizi yang di butuhkan oleh ternak;
- k. Penyakit pada hewan/ternak dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan yang cukup besar bagi peternak khususnya dan masyarakat Bandung Barat. Karena banyak penyakit hewan/ternak yang tidak hanya menyerang hewan/ternak tetapi juga dapat menular kepada manusia. Kondisi peternakan di Bandung Barat yang sebagian besarnya merupakan peternakan rakyat akan sangat rentan dengan ancaman penyakit hewan menular strategis dan zoonosis strategis.
- l. letak geografis Bandung Barat yang sangat strategis, menyebabkan tingginya lalu lintas hewan/ternak yang dapat menimbulkan rentannya perpindahan penyakit;
- m. Minimnya sarana dan prasarana serta SDM kesehatan hewan walaupun merupakan kendala klasik namun tetap masih menjadi faktor kurangnya pelayanan kesehatan hewan.
- n. Akses ke lokasi kelompok tani kurang baik dan kondisi musim penghujan menyulitkan pengiriman barang ke lokasi.

4) Urusan Perdagangan

Permasalahan urusan perdagangan sebagai berikut:

- a. Perlu dioptimalkan pengamanan, penguatan dan akses pada pasar tradisional agar mendukung produktivitas.
- b. Kurangnya jaringan pemasaran, pemberian fasilitas permodalan, kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen sehingga menjadi lambatnya perkembangan perdagangan.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat penggunaan produk dalam negeri yang dapat menguntungkan masyarakat lokal.

5) Uruan Industri

Permasalahan urusan industri sebagai berikut:

- a. Perlu dilaksanakan kajian secara komprehensif mengenai dampak negatif hasil proses pengelolaan industri agar bisa di selesaikan secara menyeluruh dan menyelesaikan masalah hasil produksi pertanian dan sektor primer lainnya;.
- b. Masih kurangnya Kontribusi keterkaitan industri besar yang ada di Bandung Barat dengan IKM setempat;
- c. Belum optimalnya jasa pelayanan/rekomendasi untuk pemberian lisensi terhadap produk IKM (seperti HAKI, Hak Cipta, Label Halal);
- d. Belum optimalnya pemasaran produk IKM.

6) Urusan Transmigrasi

Permasalahan urusan transmigrasi adalah transmigrasi regional dari Kabupaten Bandung Barat selama kurung waktu 3 tahun (2018-2020) tidak memberangkatan transmigran dari kabupaten Bandung Barat, dikarenakan tidak memperoleh kuota dari pemerintah pusat.

4.1.4 Permasalahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah**1) Urusan Perencanaan**

Permasalahan fungsi penunjang urusan Pemda bidang perencanaan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan terhadap usulan kegiatan pada renja perangkat daerah dan usulan hasil Musrenbang Kecamatan.
- b. Masih belum optimalnya keterlibatan peran masyarakat dalam proses-proses penyusunan perencanaan

- c. Belum optimalnya Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD

2) Urusan Keuangan

Permasalahan fungsi penunjang urusan Pemda bidang keuangan sebagai berikut:

- a. Belum terintegrasinya SIPD dengan sistem pelaporan keuangan.
- b. Menu tampilan dan rumusan perhitungan nilai perhitungan air (NPA) belum sempurna.
- c. Penatausahaan pendapatan dan piutang pajak daerah (non PBB) dan penatausahaan PBB-2 belum memadai.
- d. Penatausahaan dan pengelolaan asset tetap dan aset lainnya belum memadai.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi elektronik pelayanan secara Online;
- f. Belum optimalnya penggunaan Aplikasi Pengelolaan pendapatan daerah; dan

3) Urusan Kepegawaian

Permasalahan fungsi penunjang urusan Pemda bidang kepegawaian sebagai berikut:

- a. Assesment belum dilaksanakan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Peningkatan program dan strategi pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal.
- c. Belum membangun talent pool dan menyusun rencana suksesi.
- d. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai yang sesuai dengan Peta Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan belum optimal.
- e. Sistem aplikasi yang terintegrasi guna mendukung pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal.

4) Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan fungsi penunjang urusan Pemda bidang pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya ASN yang mendapatkan Pembinaan Kepegawaian
- b. Masih kurangnya ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana teknologi informasi pendukung tata laksana pemerintahan dalam menunjang pengembangan kompetensi ASN.

5) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan fungsi penunjang urusan Pemda bidang penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam menunjang pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

4.1.5 Permasalahan Fungsi Lainnya

Permasalahan pembangunan dalam fungsi lain penunjang pemerintahan daerah meliputi:

- a. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Penyusunan produk hukum daerah yang belum sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan;
- d. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa masih terdapat yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- e. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan;
- f. Kelembagaan dan nomenklatur Perangkat Daerah yang belum efektif dan efisien;
- g. Masih sering terjadinya temuan yang berulang-ulang ditemukan di beberapa perangkat daerah termasuk di Kecamatan dan Desa.
- h. Masih banyak audit yang tidak menyelesaikan TLHP sampai tuntas terutama desa-desa.
- i. Rata-rata nilai SAKIP perangkat daerah masih “B”
- j. Masih rendahnya Kapabilitas APIP berada pada level 2

4.1.6 Permasalahan Pokok

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada urusan yang diampu oleh pemerintah daerah, dikelompokkan ke dalam beberapa permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Bandung Barat kurun waktu 2024-2026. Teridentifikasi masalah pokok tersebut antara lain:

1. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan, keberhasilan pembangunan manusia dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Pengukuran keberhasilan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian pembangunan manusia Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir termasuk dalam kategori “kelompok sedang” dengan capaian di tahun 2022 sebesar 69,04 poin, masih berada jauh di posisi ke 21 dari 26 Kab/Kota di Jawa Barat yang rata-rata capaian IPM nya berkisar 70 poin. Masih kurangnya kualitas SDM, bisa dilihat dari dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Berdasarkan data pada tahun 2022, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat walaupun telah mencapai 72,79 tahun. Tetapi capaian kualitas umur panjang ini masih belum dibarengi dengan kualitas hidup sehat yang ditandai dengan Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan ketercapaiannya masih 76,17 persen, ketersediaan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan capaiannya baru 70%. Dalam hal Intervensi Gizi Spesifik dalam rangka menurunkan prevelansi stunting, masih belum optimal hal ini dilihat dari masih tingginya angka stunting di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian s.d tahun 2022 prevelansi stunting sebesar 27,30 persen.

Dari sisi pendidikan, penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata menempuh 8,22 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 11,89 tahun atau setara dengan Kelas XI atau sampai SMA kelas 2. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2018 hingga 2022. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun selama tahun 2018-2022. Sementara itu, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 0,05 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Walau HLS dan RLS menunjukkan peningkatan tetapi peningkatannya lambat, sehingga sector pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Sedangkan bila dilihat dari kualitas pembangunan dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat berdasarkan gender yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Gender, capaian IPG Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2022 sebesar 79,82 dengan indeks pemberdayaan gender sebesar 65,83 poin. Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang belum optimal dan kepekaan perencanaan terkait isu gender masih rendah; strategi pemberdayaan belum sensitif pada isu-isu inklusif gender, perempuan belum mampu memahami dan mengaspirasikan isu-isu sensitif gender.

2. Belum Pulih dan Melambatnya Pertumbuhan Perekonomian Pasca Dampak Pandemi Covid-19

Kondisi perekonomian yang terimbas terjadinya pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan yang baik. Hal ini ditandai dengan terkontraksinya hampir semua lapangan usaha dalam struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi sektor-sektor unggulan yang berkontribusi terhadap PDRB. Nilai PDRB Bandung Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 46.478,9 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 701,2 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 47.180,1 miliar rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 31.398,35 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 30.640,41 miliar rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Bandung Barat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,41 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019.

Perlambatan ekonomi terbesar terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan yaitu sebesar -12,11 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar - 8,15 persen. Hal ini terjadi karena pembatasan pergerakan manusia sangat berdampak pada berkurangnya aktifitas perusahaan-perusahaan pada lapangan usaha tersebut, bahkan di saat awal pandemi dan kasus penyebaran virus meningkat perusahaan-perusahaan tersebut berhenti beroperasi Mengacu pada capaian kinerja beberapa indikator penunjang bidang ekonomi (Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi masing-masing sektor dan lain-lain), maka pertumbuhan dan daya saing ekonomi perlu untuk ditingkatkan.

Hal ini ditunjang dengan: belum optimalnya kinerja investasi; daya saing produksi pertanian dan perikanan yang masih kurang; daya saing UMKM dan koperasi masih kurang; sektor pariwisata belum berkembang optimal; serta kontribusi sektor lapangan usaha selain sektor unggulan yang belum optimal masih di bawah 5%.

Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan/pelaku usaha. Pandemi Covid-19 menyebabkan nilai realisasi investasi di Kabupaten Bandung Barat menurun sangat signifikan, dari target sebesar 500 milyar hanya terealisasi sebesar 192,6 milyar. Penurunan investasi tersebut berkontribusi terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi, penurunan ini dapat berdampak pada berbagai sektor, seperti meningkatnya pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.

3. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, Hal ini ditandai dengan persentase penduduk miskin sampai dengan tahun 2022 sebesar 10,82% dan tingkat pengangguran sebesar 9,63%. Sejak tahun 2018-2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat cenderung meningkat, jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 menjadi 10,49% dan pada tahun 2021 menjadi 11,30%.

Penduduk miskin meningkat 20,43 ribu dari 159,03 ribu pada tahun 2019 menjadi 179,46 ribu pada tahun 2020, meningkat lagi di tahun 2021 sebanyak 11,31 ribu menjadi 190,77 ribu. Angka kemiskinan yang meningkat ini sebagai akibat dampak Covid-19 yang menyebabkan banyaknya penduduk yang tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini yang perlu diberikan perhatian terhadap golongan masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin karena golongan inilah yang rentan menjadi miskin akibat adanya perubahan kondisi sosial dan kebijakan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Selain itu penting diperlukan akses pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada karakter, kapasitas serta potensi penerima manfaat. Permasalahan kemiskinan ada kaitannya dengan permasalahan ketenagakerjaan terutama meningkatnya jumlah pengangguran di Kab. Bandung Barat akibat adanya dampak pandemi covid 19 di awal tahun 2020.

Kondisi ketenagakerjaan selama 4 (empat) tahun di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019-2022 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja, dari 767 ribu pada tahun 2019 menjadi 748 ribu pada tahun 2020, hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian, sehingga banyak usia kerja yang terhenti bekerja. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat dari 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan dari 8,24% menjadi 12,25%, hal ini dampak dari terjadi pandemic Covid-19 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 11,65% seiring dengan mulai pulihnya perekonomian sebagai dampak menurunnya Covid-19 dan semakin menurun menjadi 9,63% pada tahun 2022.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terhentinya kegiatan usaha akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 cukup tinggi, namun sebagian dari mereka mencoba memasuki dunia kerja dengan mencari kerja melalui melamar pekerjaan atau coba memulai mempersiapkan usaha. Indikator persentase kesempatan kerja merupakan komplemen dari persentase pengangguran terbuka. Kegunaan indikator ini adalah untuk mengukur seberapa besar persentase penyerapan tenaga kerja. Jika persentase kesempatan kerja semakin tinggi maka penyerapan terhadap angkatan kerja akan semakin baik, atau pemenuhan dan perluasan kesempatan kerja bagi daerah yang bersangkutan dapat dikategorikan berhasil. Sebaliknya jika persentase kesempatan kerja itu rendah maka pengangguran akan meningkat

4. Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Alasan yang mendasari infrastruktur wilayah perlu ditingkatkan adalah kualitas infrastruktur jalan masih kurang, kualitas dan kuantitas pemenuhan irigasi masih kurang, masih diperlukan peningkatan kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya dukungan konektivitas antar wilayah, serta belum optimalnya penyediaan infrastruktur digital. Hal ini didukung dengan capaian beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan, seperti: Indeks Kesulitan Geografis, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana, Persentase Rumah Layak Huni, serta permasalahan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Dalam melaksanakan pembangunan di desa, tingkat kesulitan geografis desa dalam menjangkau infrastruktur ketersediaan akan pelayanan dasar, pembangunan, serta transportasi masih menjadi kendala. Desa dengan tingkat aksesibilitas tinggi maka desa dengan mudah mendorong kegiatan perekonomian masyarakat.

Sedangkan, desa dengan tingkat aksesibilitas rendah artinya desa tersebut memiliki kesulitan dalam mobilitas dalam menjalankan aktivitasnya. Berdasarkan hasil perhitungan, di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 terdiri dari 165 desa, dengan rentang IKG berkisar antara 7,25 sampai dengan 41,95, ini menandakan masih terdapat beberapa desa dengan kesulitan tinggi dalam hal aksesibilitas terhadap infrastruktur kebutuhan dasar. Sehingga desa yang memiliki Indeks Kesulitan Geografis yang tinggi perlu diperhatikan infrastruktur serta pelayanan dasarnya oleh pemerintah, agar pembangunan infrastruktur disetiap wilayah dapat merata

Pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak, akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah ketersediaan fasilitas tempat buang air besar dan pemenuhan akan kebutuhan air minum. Rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat 88,27% telah memiliki fasilitas sendiri, sementara 11,73% belum memiliki fasilitas sendiri atau menggunakan fasilitas secara bersama, umum atau bahkan tidak memiliki fasilitas. Sedangkan terkait ketersediaan air minum, persentase rumah tangga yang menggunakan air tidak bersih untuk memasak/mandi/cuci/dll adalah 10,68% untuk golongan pengeluaran terendah, 6,02% untuk golongan pengeluaran menengah, dan nyaris tidak ada 0,07% untuk golongan pengeluaran atas. Bila dilihat dari kualitas lingkungan hidup, capaian Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir masih rendah pada kisaran 50-60 persen. Hal ini disebabkan menurunnya kualitas air, udara dan tanah karena adanya pembangunan yang kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan ini pun menyebabkan potensi bencana akibat kerusakan lingkungan dengan indikator capaian indeks ketahanan daerah masih rendah dengan katagor “sedang”

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa/kinerjanya.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nilai IRB Kab. Bandung Barat pada tahun 2018 masuk pada kategori CC (CUKUP) dengan nilai 54,24 sampai dengan tahun 2021 Nilai IRB Kab. Bandung Barat masih pada katagori CC walaupun secara nilai ada peningkatan menjadi 57,81. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kab. Bandung Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, belum optimalnya penerapan inovasi daerah dalam rangka pelayanan publik, Sistem akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga pelaporan pemerintah daerah tidak optimal; masih perlunya peningkatan kompetensi dan pengelolaan penilaian kinerja aparatur daerah; belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah belum optimalnya layanan informasi daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah serta tingkat kepuasan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan

6. Belum Optimalnya Kehidupan Sosial dan Berdemokrasi

Dalam rangka meningkatkan kondusifitas wilayah di Kabupaten Bandung Barat terutama menghadapi tahun politik menjelang, saat, pasca pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2024 sampai 2025, dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam suku bangsa dan agama senantiasa akan memunculkan potensi konflik sosial, untuk itu perlu dilakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi yang menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat dan berpolitik di masyarakat, pemenuhan hak dasar akan ketentraman dan ketentriban serta perlindungan masyarakat terhadap berbagai macam gangguan ketertiban umum, memelihara kerukunan antar umat beragama serta pencegahan dan penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya potensi konflik sosial dan masih rendahnya penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat dengan indikator sebesar 84 persen. Masih rendahnya tingkat pemahaman politik di masyarakat dengan capaian hanya 52,18 persen.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, juga menggambarkan lingkungan strategis supra daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

4.2.1 Isu Strategis Global

Kondisi global yang dinamis memunculkan berbagai isu internasional yang harus direspon pemerintah nasional maupun sub nasional di berbagai negara. Stabilitas politik internasional telah mendorong kemitraan global dalam mewujudkan pencapaian SDG's sebagai agenda global yang dirumuskan dalam 17 tujuan dan 169 target pembangunan. Pelaksanaannya mendapatkan dukungan sebanyak 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan komitmennya dalam menanggulangi kelaparan dan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesetaraan gender, pelestarian lingkungan serta tata kelola perekonomian dunia yang lebih adil.

Pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan agenda dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2017 dengan rencana aksi baik secara nasional maupun daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, kondisi global yang dinamis tercermin dari revolusi industri 4.0 yang membawa peluang sekaligus tantangan bagi komponen masyarakat maupun institusi pemerintah untuk meresponnya dengan mengedepankan digitalisasi yang menekankan efektivitas dan efisiensi. Transformasi teknologi dalam revolusi industri 4.0 dan telah meningkatkan kecepatan perubahan iptek, pemanfaatan kecerdasan buatan, pemanfaatan "bigdata", pemanfaatan internet yang luas serta cetak tiga dimensi semakin meluas dalam berbagai bidang industri, perdagangan dan jasa (terutama riset dan ekonomi digital).

Demikian pula dalam tata kehidupan masyarakat diyakini dengan bantuan Iptek akan meningkatkan produktivitas, meningkatnya pemanfaatan telekomunikasi dan efisien dalam proses produksi serta pemanfaatan internet telah mendukung perkembangan sistem kemasyarakatan, sistem kesehatan dan pelayanan publik secara luas.

Pada akhirnya, hadirnya revolusi industri 4.0 menghadirkan tantangan yang lebih kuat bagi sektor-sektor publik terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Salah satu poin paling krusial dari revolusi industry 4.0 adalah proses digitalisasi. Proses digitalisasi termasuk penggunaan teknologi dalam berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, perizinan, pariwisata dan sector lainnya. Berkaitan dengan itu, pemerintah pusat telah menjadikan digitalisasi sebagai suatu katalisator dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Kondisi global semakin dinamis bahkan berdampak besar dengan adanya Pandemi Covid-19. Seluruh level pemerintahan terdampak, dimana terdapat tuntutan penanganan pandemi agar tidak semakin berdampak kepada kesehatan masyarakat maupun tuntutan pemulihan perekonomian nasional dan daerah. Pada akhir tahun 2019, dunia dihadapkan pada permasalahan kesehatan yaitu Covid-19 yang dapat menyebabkan penurunan aktivitas (kontraksi) sosial dan juga perekonomian. Pada awal Maret tahun 2020, WHO menyatakan Covid-19 sebagai suatu pandemi yang harus direspon dan dicegah secara baik di seluruh dunia. Akibatnya pada semester I tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 yang memerlukan pembatasan fisik (physical distancing) dan pembatasan sosial (social distancing) yang berpengaruh pada aktivitas sosial dan juga perekonomian secara nasional.

Menurunnya pandemi Covid 19 dan pemulihan perekonomian dunia sangat tergantung pada pencapaian *herb immunity* (kekebalan umum) dengan meluasnya cakupan vaksinasi, penerapan protocol kesehatan, pemulihan ekonomi secara umum akan meningkatkan perkembangan usaha jasa, pariwisata, transportasi, perdagangan antar negara dan normalisasi perekonomian negara-negara industri maju. Oleh karena itu pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan bersama dengan pencapaian *herb immunity* melalui perluasan cakupan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, agar era kenormalan baru segera terwujud.

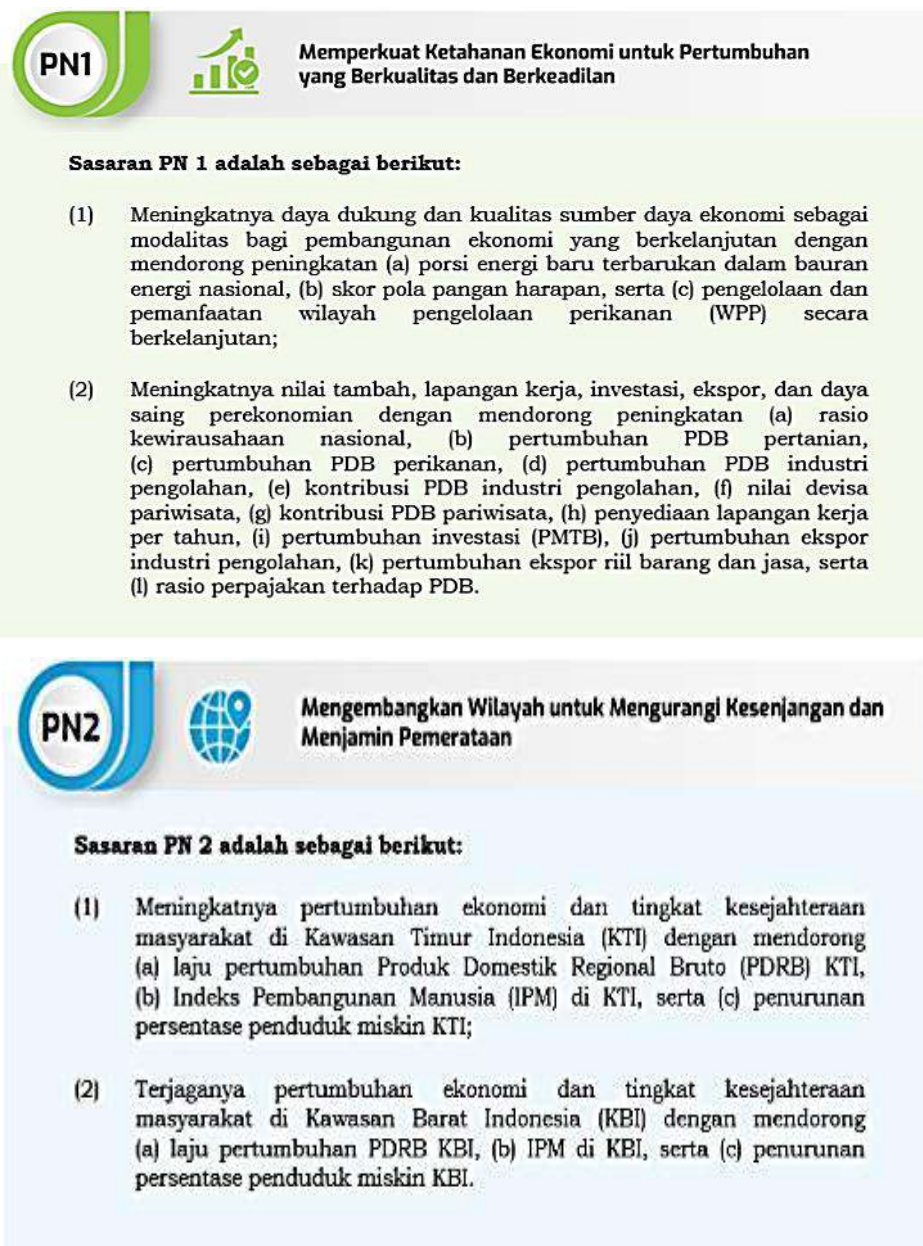
Pandemic Covid 19 telah membuktikan bahwa usaha mikro dan kecil mampu bertahan dan membuka peluang pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan pasar (*marketplace*) dan ekonomi digital semakin meluas. Perubahan global yang bersifat dinamis, revolusi industri 4.0 dan pandemic Covid 19 sejak Maret 2020 telah mengharuskan disrupsi yang luas baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat, terutama pada hal yang terkait dengan:

- a. Disrupsi dalam berbagai bidang kehidupan sebagai dampak pandemi Covid 19. Dua tahun pandemi telah merubah banyak kegiatan masyarakat yang harus dilakukan dari rumah masing-masing, antara lain work from home (WHF) bagi ASN, pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara bertingkat untuk pengendalian penyebaran Covid 19, belajar dari rumah bagi anak sekolah dan mahasiswa, berkembangnya marketplace, munculnya era kenormalan baru dan perilaku hidup sehat dan bersih.
- b. Revolusi industri 4.0 dilakukan dengan meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligent*), penggunaan big data dan penggunaan internet secara massif dalam berbagai kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (pemanfaatan data, pertemuan, rapat koordinasi, kunjungan virtual dan tranfer data) secara cepat, mudah dan efisien
- c. Mobilitas dan fleksibilitas dalam beragam kegiatan baik di lingkungan perangkat daerah, dunia usaha dan masyarakat. Hal ini menuntut perubahan dinamis dalam berbagai regulasi di pemerintahan daerah (seperti penyederhanaan tata peraturan, prosedur pelayanan dan layanan secara virtual), mudak dan cepat).
- d. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memasuki pasar kerja termasuk kelompok millennial, yaitu Generasi Y (kelompok usia 25 – 39 tahun) dan Generasi Z (kelompok usia < 24 tahun) dengan pemanfaatan media sosial dan internet yang luas. Kelompok tersebut memerlukan dukungan kompetensi keahlian dan kemudahan akses pelayanan public memanfaatkan internet secara luas mendukung beragam kegiatan produktif masyarakat.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahana Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

Gambar 4.1 Tujuh Agenda pembangunan Nasional sebagai Isu Strategis yang Menjadi Prioritas pada RPJMN 2020-2024





Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
- (3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi *stunting* pada balita, (d) menurunkan insidensi *tuberculosis*, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;
- (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- (5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
- (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.



Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
- (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:



- (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;
- (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
- (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
- (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- (3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.



Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
- (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
- (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
- (5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepada daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut untuk Kepala Daerah yang masa Jabatannya berakhir di tahun 2023, akan diangkat dan ditetapkan seorang Penjabat Kepala Daerah atau Penjabat Bupati sampai dengan terlaksananya pemilihan umum Kepala daerah pada Pimilu serentak tahun 2024 mendatang. Pada masa transisi tersebut agar tidak ada kekosongan hukum dan tidak ada kegamangan atau keraguan bagi penyelenggara negara dan manajemen tata kelola pemerintahan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah Pusat, melalui Menteri Dalam Negeri telah mengambil langkah strategi dengan dikeluarkannya Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan DOB.

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Perumusan isu strategis Provinsi Jawa Barat dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah periode tahun 2024-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Provinsi Jawa Barat yang telah dikaji dan dianalisis permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan hasil evaluasi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Derajat dan kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan. Hal tersebut penting menjadi perhatian mengingat tersedianya sumber daya manusia yang potensial, memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang diharapkan akan mampu memiliki daya saing dalam persaingan di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, optimalisasi capaian pendidikan dan kesehatan perlu diupayakan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu sehingga akan tercipta generasi yang berkualitas dan tangguh. Adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 mengancam upaya peningkatan sumber daya manusia yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam jangka panjang, diperkirakan terjadi ancaman lost generation pada kelompok usia sekolah saat ini. Generasi yang hilang ditandai dengan kondisi kesehatan yang rentan. Selain itu, pembatasan kegiatan ekonomi menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat dan berimbas pada turunnya asupan gizi. Pembatasan aktivitas di luar rumah mengakibatkan turunnya potensi kecerdasan sosio-emosional yang dialami anak-anak dan generasi muda. Nilai-nilai budaya masyarakat terancam luntur dan tergantikan dengan budaya dari luar yang tidak semuanya selaras dengan norma-norma yang telah berlaku. Bahkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19, ancaman ini telah menjadi perhatian masyarakat.

2. Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan juga sebagai salah satu destinasi tujuan pariwisata domestic maupun mancanegara, sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif penopang ibukota Jakarta serta peran potensi unggulan pada sector industri dan perdagangan dalam mendukung stabilitas perekonomian nasional maupun dalam peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi.

Sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal, serta memberikan dampak ikutan bagi berkembangnya sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal, serta memberikan dampak ikutan bagi berkembangnya sektor-sektor lainnya mendukung upaya penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Kualitas dan jangkauan infrastruktur yang andal terus menjadi perhatian pemerintah pada tahun ini, dan diharapkan mendorong daya saing daerah dan berdampak positif bagi investasi daerah.

3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan Jawa Barat melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pemerataan pembangunan suatu wilayah hendaknya memperhatikan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan dan hal ini menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45 persen, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya.

Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, serta pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program pembangunan wilayah dan sektoral.

Kebijakan pembangunan terkait isu kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan dalam rangka menjaga dan melestarikan kualitas lingkungan hidup serta pengendalian dampak perubahan iklim serta mitigasi dan penanggulangan terhadap bencana.

Permasalahan lingkungan pada dasarnya adalah irisan dari permasalahan yang terjadi pada lingkungan alami (natural environment), lingkungan buatan (man-made environment) terkait aktivitas perekonomian, dan lingkungan sosial (social environment). Oleh sebab itu, penanganan permasalahan lingkungan harus dilaksanakan secara holistic sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kondisi ekonomi dan sosial yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan di Provinsi Jawa Barat ditandai dengan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Degradasi kuantitas air yang terjadi di Provinsi Jawa Barat diantaranya diakibatkan oleh pemanfaatan air tanah secara berlebihan, berkurangnya luas kawasan resapan air (catchment area), dan berkurangnya fungsi sungai sebagai sumber daya air akibat pencemaran dan sedimentasi.

Adapun degradasi kualitas air ditandai dengan banyaknya sungai di Provinsi Jawa Barat yang tercemar berat, salah satunya adalah Sungai Citarum, akibat belum terkendalinya pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan. Berbagai permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Provinsi Jawa Barat juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta kurangnya upaya pengelolaan ekosistem berbasis DAS secara terpadu.

4. Kualitas Demokrasi dan Birokrasi yang didukung oleh Inovasi Daerah

Dalam rangka memberikan pelayanan public yang berkualitas hendaknya didukung oleh inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel serta kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integrative melalui berbagai inovasi.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.2.4 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat

Penetapan isu strategis dilakukan dengan menggunakan prinsip menelaah isu-isu strategi, serta tujuan dan sasaran yang ada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah nasional dan daerah provinsi maupun kabupaten serta isu-isu global yang menjadi tantangan serta peluang bagi pembangunan di masa yang akan datang. Proses ini juga meliputi penelaahan terkait amanat SDGs dan berbagai dokumen perencanaan yang bersifat jangka Panjang. Apakah akan terulang lagi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan pengertian bahwa apakah proses ini, analisis terhadap data-data terkait capaian pembangunan yang dilakukan untuk melihat berbagai permasalahan yang dihadapi pada berbagai bidang urusan.

Disisi lain juga perlu memperbandingkan kondisi kemampuan internal Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat untuk tiga tahun kedepan pada masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah sampai dengan tahun 2026, maka diperoleh 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka menengah atau Rencanan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026, antara lain:

1. Daya Saing Sumberdaya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 sebanyak 1.846.969 jiwa, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Bandung Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung Barat yang ditunjukkan oleh harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Dalam hal ini, penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,22 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 11,89 tahun atau setara dengan Kelas XI atau sampai SMA kelas 2.

Permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan (Angka Harapan Hidup) yang masih perlu ditingkatkan, dimana umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat adalah 72,79 tahun.

Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 72,79 tahun. Selain itu masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.

Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan 1 (satu) dari 4 (empat) anak usia 0 (nol) sampai 59 bulan di Kabupaten Bandung Barat mengalami stunting. Rasio layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat masih rendah yang dikarenakan kurangnya aksesibilitas ke tempat layanan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19.

Pemberdayaan perempuan dan peran pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Bandung Barat saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kabupaten Bandung Barat sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kabupaten Bandung Barat.

Peran aktif pemuda dalam pembangunan diarahkan dalam rangka layanan kepemudaan untuk pencapaian kemandirian pemuda melalui upaya peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan, serta peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif sehingga mampu mensejahterakan dirinya juga berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Sementara peran pemuda dalam mendukung pencapaian indeks pembangunan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Bandung Barat di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Kabupaten Bandung Barat melalui upaya-upaya peningkatan pembinaan olahragawan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan olahraga dalam rangka perwujudan pemuda mandiri.

2. Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada tahun 2020, kontribusi seluruh sector unggulan mengalami kontraksi walaupun mulai membaik di tahun 2021 dan 2022 tetapi secara keseluruhan peranan kontribusi sector unggulan pasca pandemic covid-19 belum kembali normal bahkan cenderung turun terutama sector pertanian, perdagangan, kontruksi serta sector transportasi dan pergudangan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu -2,41 persen. Kontraksi/pertumbuhan negatif ekonomi Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 disebabkan oleh melambatnya seluruh lapangan usaha, hal ini terjadi karena pembatasan pergerakan manusia sangat berdampak pada berkurangnya aktifitas perusahaan-perusahaan pada lapangan usaha tersebut, bahkan di saat awal pandemi dan kasus penyebaran virus meningkat perusahaan-perusahaan tersebut berhenti beroperasi. hal ini pun terlihat dari nilai investasi yang cenderung turun bahkan tidak mencapai target sampai dengan tahun 2022 masih dibawah 500 milyar per tahun. Kondisi perekonomian yang terimbas terjadinya pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan yang baik, diperlukan revitalisasi sektor-sektor unggulan seperti pada sector pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan sektor jasa.

Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat, sebagai potensi unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian walaupun tidak lagi secara langsung dihitung kontribusinya tetapi sub sector pariwisata berkontribusi terhadap perekonomian dilihat dari sector makan dan minum (restoran), sector perdagangan dan insutri pendukung pariwisata, jasa perusahaan pariwisata, transportasi pendukung pariwisata dan wisata agro.

Permasalahan belum optimalnya kontribusi sub sector pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenitas pariwisata, belum terintegrasinya promosi pariwisata, serta kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata. Belum pulihnya sector pariwisata akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya kunjungan ke destinasi wisata, pelaku usaha maupun pelaku seni yang tutup atau tidak melakukan aktivitasnya sehingga belum mampu mendorong hidupnya kembali industri pariwisata.

Pasca terjadinya pandemic covid-19 di awal tahun 2020, perekonomian Kabupaten Bandung Barat yang salahsatunya ditopang oleh sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMLM) serta Koperasi dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya KUKM, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum optimalnya kapasitas *digital literacy* bagi daya saing para pelaku UKM dalam memasarkan produknya.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerataan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dengan demikian tujuan utama dari kesejahteraan yaitu menurunnya tingkat kemiskinan dengan indikator tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dengan indikator gini rasio. Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu Tahun 2018 - 2022 di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren meningkat. Pada keadaan Tahun 2018, persentase penduduk miskin di Bandung Barat mencapai 10,66 persen (169,00 ribu jiwa) dan pada keadaan tahun 2022 meningkat sebesar 0,76 persen menjadi 10,82 persen (183,70 ribu jiwa). Secara absolut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selama periode Tahun 2018 – 2022, penduduk miskin Kabupaten Bandung Barat terjadi peningkatan sekitar 14,70 ribu jiwa yaitu dari 169,00 ribu jiwa menjadi 183,70 ribu jiwa. Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2018 –2022, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp.64.541,- dari Rp.329.415,- per kapita per bulan pada Tahun 2018 menjadi Rp.393.956,- per kapita per bulan pada Tahun 2022.

Gini Rasio digunakan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022 berfluktuatif namun cenderung selalu berada pada level ketimpangan rendah ($<0,4$), tetapi Pemerintah Daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang. Masalah kemiskinan, dipengaruhi juga oleh ketersediaan lapangan kerja dan kondisi keternagakerjaan, Tumbuhnya ekonomi dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT). Angkatan Kerja di Kab. Bandung Barat terus meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022), peningkatan jumlah angkatan kerja, dari 747 ribu pada tahun 2018 menjadi 767 ribu pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 748 ribu. Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19, pada tahun 2021 angkatan kerja kembali meningkat menjadi 766 ribu dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 819 ribu.

Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja tetapi sebaliknya bila tidak terserap pada lapangan kerja akan mengakibatkan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Pada tahun 2020 dan 2021 dampak pandemi COVID-19 masih memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat, hal ini terlihat dari capaian target tingkat pengangguran terbuka selalu lebih rendah dibanding target yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023. Begitupun pula kondisi tingkat pengangguran di Kab. Bandung Barat masih tinggi bila dibandingkan dengan capaian TPT Jawa Barat dan nasional. Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam dengan indikator presentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani oleh pemerintah. PPKS di Kab. Bandung Barat mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan PSKS.

4. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah

Pemerataan pembangunan antar wilayah perkotaan dan perdesaan perlu mendapat dukungan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Kab. Bandung Barat dengan indikatornya adalah Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yaitu angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi.

Kondisi Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2022 dengan kondisi panjang jalan Kabupaten Bandung Barat 525,57 Km terdapat 70,91 persen jalan yang dibangun dalam kondisi baik. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat tidak serta merta menambah kondisi panjang jalan, sehingga rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk semakin menurun. Untuk mendukung aksesibilitas barang dan orang di dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berupa sarana angkutan darat, ASDP, terminal, dermaga. Jumlah penumpang yang menggunakan transportasi darat dan transportasi ASDP terjadi penurunan hal ini disebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas layanan angkutan darat dan angkutan penyebrangan dengan jumlah trayek dan jumlah armada angkutan umum yang semakin berkurang.

Terkait pemenuhan infrastruktur permukiman, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, dengan target layanan SPM penyediaan air bersih harus 100% baru terpenuhi sebesar 63,26 persen rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih untuk mencukupi kebutuhannya. Sama halnya dengan Target SPM Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio rumah layak huni, tercatat sampai dengan Tahun 2022 baru sebesar 71,62 persen rumah yang sudah layak huni. Masih rendahnya areal penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha di Kab. Bandung Barat ditandai dengan capaian yang baru mencapai 33,25 persen. Bila dilihat dari kondisi infrastruktur, terkait ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dengan indikatornya adalah Indeks Ketahanan Daerah, capaian ketahanan daerah masih dalam kondisi sedang dengan nilai 0,47 poin.

5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Kab. Bandung Barat. Hal ini menjadi perhatian, karena, dinamika pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya.

Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan. Daya dukung lingkungan diarahkan dalam rangka rencana wilayah pengembangan dan daya tampung lingkungan diarahkan pada rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri.

Sejalan dengan isu strategis Provinsi Jawa Barat dan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Inti terdiri dari: Kota Bandung dan Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat masuk ke dalam kawasan perkotaan sekitarnya. Dalam hal ini, Kabupaten Bandung Barat merujuk Perpres tersebut ada pada Kawasan Perkotaan sekitarnya, yaitu: Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Cipeundeuy-Cikalong Wetan, dan Kawasan Perkotaan Cililin. Dalam rangka pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dilakukan pengembangan wilayah dengan membagi ke dalam 6 (enam) wilayah pengembangan (WP), dimana Kabupaten Bandung Barat termasuk di dalam wilayah pengembangan (WP) Cekungan Bandung, dengan focus pengembangan Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi.

Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lain. RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%. Masih rendahnya Persentase RTH di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian sebesar 6,86%. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengendalian pencemaran air, udara dan tanah perlu dilakukan pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal/terpusat dan pengelolaan air limbah domestik dan industri harus dioptimalkan.

6. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dimensi-dimensi pembangunan dapat diwujudkan pelaksanaannya, jika didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik pula

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi adalah pemerintahan yang berbasis kinerja selanjutnya diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan demi menghadapi tantangan global yang semakin dinamis seperti pada era sekarang ini, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan mutlak untuk diimplementasikan. Hal ini tentu membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh aktor pembangunan dan inovasi yang tepat, sehingga diperlukan kualitas SDM ASN yang mampu meningkatkan pelayanan, peningkatan transparansi, penerapan merit sistem, penghapusan jabatan struktural, serta reformasi birokrasi.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022, disebutkan bahwa penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten/Kota dan atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun ke empat dan isu strategis aktual.

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD dan atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 pada tahap ke lima (tahun 2023-2025) dengan memperhatikan keselarasan prioritas pembangunan nasional pada RPJMN 2020 – 2024 serta sinergitas dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan jangka menengah di Jawa Barat (RPJMD/RPD Provinsi Jawa Barat) dan isu strategis actual, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat

Visi pembangunan daerah mengarah pada pencapaian tujuan daerah, seperti tertuang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat, yang merupakan momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga membuka ruang dan potensi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bandung Barat dan mempunyai korelasi yang signifikan dalam menunjang akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barat khususnya, Provinsi Jawa Barat dan nasional pada umumnya. Visi pembangunan daerah merupakan penjabaran dari tugas yang dimandatkan oleh rakyat kepada pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang Cerdas, Maju, Makmur dan Agamasi dengan **Visi** pembangunan daerah tahun 2005-2025 adalah:

“ KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN ”

Pada hakikatnya, makna dari visi tersebut adalah:

Agroindustri: Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversifikasi pengolahan hasil-hasil pertanian

Wisata Ramah Lingkungan: Mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan mandat dan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) **Misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Kreatif,
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pengembangan Industri Yang Berdaya Saing Serta Berkeadilan
4. Memelihara Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup, Adalah Terpeliharanya Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
5. Mengintegrasikan Kearifan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Dalam Pembangunan

Tahapan Pertama RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025 terbagi dalam 2 (dua) periode, periode tahun 2005-2007 merupakan periode perintisan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat dan periode 2007-2008 merupakan periode pembangunan pondasi berupa penataan birokrasi, pembentukan regulasi dan inventarisasi asset daerah. Tahap selanjutnya RPJPD dibagi menjadi RPJM Daerah Kedua (2008-2013), RPJM Daerah Ketiga (2013-2018), RPJM Daerah Keempat (2018-2023) dan RPJM Daerah Kelima (2023-2025).

Penentuan tujuan dan sasaran dalam rangka penyusunan RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, didasarkan pada visi misi RPJPD dan atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap ke lima (tahun 2023-2025), dengan prioritas berdasarkan masing-masing Misi pada RPJPD adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Kreatif,

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai oleh meningkatnya semangat kewirausahaan, kreativitas, kompetensi, dan kemandirian yang tinggi di kalangan seluruh komponen sumberdaya manusia Kabupaten Bandung Barat, prioritas pembangunan pada Misi I ini diarahkan pada kondisi-kondisi berikut:

- a. terwujudnya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung wilayah;
- b. terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat;
- c. terwujudnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat di jalur formal, informal, dan nonformal dengan memperhatikan kondisi wilayah;.
- d. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan melalui pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan;
- e. terwujudnya Wajib Belajar 9 tahun menjadi Wajib Belajar Menengah 12 tahun yang berkualitas; dan
- f. terwujudnya pemberdayaan perempuan dan pemuda yang kreatif dan inovatif.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah dalam era demokratisasi dewasa ini. Perubahan sosial yang cepat, yang ditandai dengan peningkatan taraf pendidikan menyebabkan masyarakat makin kritis dalam menilai kinerja pemerintahan. Karena itu, dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat diarahkan pada tujuan dan prioritas sebagai berikut:

- a. meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang dihasilkan oleh postur kelembagaan (organisasi) birokrasi yang efektif dan efisien dengan kualitas sumberdaya manusia aparat birokrasi yang kompeten;
- b. meningkatnya kinerja kecamatan dan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
- c. meningkatnya kapasitas manajemen pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel serta bermuara kepada peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- d. meningkatnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan pemerintahan; dan
- e. terwujudnya jejaring kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang sinergis dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Industri yang Berdaya Saing Serta Berkeadilan

Dalam rangka kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, yang ditandai oleh sistem perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing global, disertai dengan terwujudnya sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya tersistem guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, yang ditandai oleh tercapainya sumberdaya manusia yang berkualitas, sistem perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing global berbasis pada potensi daerah. Guna mewujudkannya, prioritas pembangunan pada misi ini diarahkan untuk pencapaian tujuan dengan prioritas:

- a. berkembangnya industri pertanian berupa tanaman pangan ,hortikultura, perkebunan, kehutanan ,peternakan dan perikanan;
- b. berkembangnya wisata yang ramah lingkungan;
- c. terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi investasi di bidang industri pengolahan;
- d. tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangun yang berkelanjutan;
- e. meningkatnya daya beli masyarakat;
- f. meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- g. terkendalinya harga serta ketersediaan bahan pokok.

4. Memelihara Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup, Adalah Terpeliharanya Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

Pada misi ini ditandai oleh meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terkendalinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya upaya pengendalian resiko bencana, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup. Guna mewujudkan pemeliharaan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka pembangunan daerah pada msisi ini diarahkan untuk mencapai tujuan dengan prioritas sebagai berikut:

- a. meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air baku;
- b. meningkatnya upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana;
- c. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan;

- d. terpeliharanya kawasan lindung; dan
- e. terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

5. Mengintegrasikan Kearifan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Dalam Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan daerah jangka panjang merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama dan budaya, bahkan senantiasa harus dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya sebagai acuan dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan antarmanusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal mengarah pada penciptaan nilai-nilai yang konstruktif terhadap terwujudnya masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, upaya mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan diarahkan pada:

- a. terwujudnya kerukunan inter dan antar umat beragama.
- b. terwujudnya sistem kerja sama antara forum warga dan pemerintah
- c. terwujudnya penguatan identitas dan jati diri masyarakat melalui penumbuhan budaya inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

5.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan antar periode dan keselarasan pembangunan pusat dan daerah, penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026 dalam penetapannya memperhatikan sinergitas pembangunan antar pusat dan daerah.

5.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional tahun 2020-2024, diantaranya sebagai berikut:

1. Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Major Project, yang dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar 5.1 Agenda Pembangunan Nasional
Pada RPJMN Tahun 2020-2024**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

5.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat sama halnya dengan Kabupaten Bandung Barat yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, dengan demikian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat bersamaan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2024-2026.

Berdasarkan rancangan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 - 2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatnya standar hidup layak masyarakat
 - d. Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan pemuda
 - e. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan
 - b. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
 - c. Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif
 - d. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha
 - e. Terkendalinya tingkat kemiskinan
 - f. Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja
 - g. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
 - h. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah, dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien
 - b. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera
 - c. Terwujudnya pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, dan akuntabel
 - d. Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas
 - e. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan

5.2.3 Penetapan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026, merupakan perumusan hasil analisis capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan periode pembangunan jangka menengah sebelumnya (RPJMD 2018-2023) dan sinergitas pembangunan antar pusat dan daerah sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, dengan memperhatikan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

- 5 Misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025;
- 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
- 4 Tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2026, dan
- 6 Isu-isu strategis 2024-2026.

Dalam rangka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merumuskan sebuah konsep RPD 2024-2026 yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1 Perumusan Konsep Dalam Rangka Penentuan Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026**

RPJPD 2005 - 2025	RPJMN 2020-2024	RPD Prov. Jabar 2024 -2026	ISU STRATEGIS	TUJUAN
Misi 1 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kreatif	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Daya Saing Sumberdaya Manusia	Tujuan 1 Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkesetaraan
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah	6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tujuan 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Misi 3 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif, Berkeadilan dan Berdaya Saing	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Tujuan 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	2. Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan	Tujuan 2 Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)		3. Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat	



RPJPD 2005 - 2025	RPJMN 2020-2024	RPD Prov. Jabar 2024 -2026	ISU STRATEGIS	TUJUAN
Misi 4 Memelihara Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)	Tujuan 3 : Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	4. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Tujuan 3 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan (PN 6)		5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
Misi 5 Mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)			Tujuan 5 Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tenang dan Tertib Dalam Kerangka Demokrasi

Sumber: Analisa Bappelitbangda, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, telah ditentukan 5 (lima) tujuan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 – 2026, yaitu:

1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5. Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenang dan Tertib dalam Kerangka Demokrasi

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dari lima (lima) tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, perlu dijabarkan dalam target sasaran yang akan dicapai selama 3 (tiga) pada RPD tahun 2024-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, dengan penjelasan masing-masing tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah sebagai berikut:



1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan, dengan sasaran:

- 1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan
- 1.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
- 1.3 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
- 1.4 Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
- 1.5 Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan

Tabel 5.2 Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkesetaraan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET			KONDISI AKHIR 2026
					2024	2025	2026	
1	TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKESETARAAN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	Poin	69,04	69,44	69,71	69,98	69,98
1.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	a. Angka Harapan Hidup	Poin	72,79	72,80	72,82	72,86	72,86
		b. Prevalensi Stunting	% SSGI	27,30	17	17	17	17
			% EPPGBM	8,15	7,36	6,90	6,45	6,45
1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	a. Harapan Lama Sekolah	Poin	11,89	11,91	11,91	11,92	11,92
		b. Rata - Rata Lama Sekolah	Poin	8,22	8,23	8,27	8,29	8,29
1.3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,80	1,58	1,58	1,57	1,57
1.4	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	79,69	79,73	79,89	80,22	80,22
1.5	Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	a. Presentase Layanan Kepemudaan	%	7,83	10,30	10,35	10,40	10,40
		b. Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,42	0,44	0,46	0,48	0,48

Sumber: Analisa Bappelitbangda, 2022

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan, dengan sasaran:

- 2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
- 2.2 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 2.3 Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha
- 2.4 Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
- 2.5 Meningkatnya Ketahanan Pangan
- 2.6 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

**Tabel 5.3 Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target
Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATU AN	REALI SASI 2022	TARGET			KON DISI AKHIR 2026
					2024	2025	2026	
2	PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	2.1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	%	5,34	5,66	5,88	6,13	6,13
		2.2 GINI RASIO	Poin	0,368	0,341	0,338	0,335	0,335
2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	a. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	12,87	12,88	12,89	13,00	13,00
		b. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,35	12,98	13,01	13,03	13,03
		c. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	41,60	41,61	41,63	41,65	41,65
2.2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	3	3	4	5	5
		b. Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung pariwisata	%	24,75	36,14	42,22	48,29	48,29
2.3	Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha	a. Realisasi Nilai investasi	Trilyun	6,2	6,5	6,8	7,1	7,1
		b. Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	46,80	48,40	50,00	51,60	51,60
		c. Pertumbuhan Usaha Mikro	%	19,20	23,23	26,45	29,58	29,58
2.4	Terkendalnya Tingkat Kemiskinan	Presentase Penduduk Miskin	%	10,82	10,40	10,28	10,16	10,16
2.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase desa tahan pangan	%	72,73	75,76	78,79	81,82	81,82
2.6	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,63	9,20	9,07	8,81	8,81

Sumber: Analisa Bappelitbangda, 2022

3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan, dengan sasaran:

- 3.1 Meningkatkan Infrastruktur Permukiman
- 3.2 Meningkatkan Akseibilitas Wilayah
- 3.3 Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
- 3.4 Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
- 3.5 Meningkatkan Pembangunan Wilayah Pedesaan
- 3.6 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

**Tabel 5.4 Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dengan Memperhatikan Kualitas
Lingkungan**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATU AN	REALI SASI 2022	TARGET			KON DISI AKHIR 2026
					2024	2025	2026	
3	PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DENGAN MEMPERHATIKAN KUALITAS LINGKUNGAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	Poin	26,78	26,37	26,09	25,81	25,81
3.1	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman	%	N/A	66,72	79,69	92,56	92,56
3.2	Meningkatnya Akseibilitas Wilayah	Indeks Akseibilitas / Transportasi	Poin	13,27	13,11	13,06	13,01	13,01
3.3	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	N/A	100	100	100	100
3.4	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin/ Kata gori	0,47 / Se dang	0,49 / Se dang	0,50 / Se dang	0,51 / Se dang	0,51 / Sedang
3.5	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan	Persentase Desa mandiri	%	37,58	42,42	44,85	46,67	46,67
3.6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,03	63,10	63,20	63,30	63,30

Sumber: Analisa Bappelitbangda, 2022

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dengan sasaran:

- 4.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
- 4.2 Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel
- 4.3 Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur
- 4.4 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 4.5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- 4.6 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah

**Tabel 5.5 Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	REALI SASI 2022	TARGET			KON DISI AKHIR 2026
					2024	2025	2026	
4	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai/ Katagori	60,97 (CC)	62 (CC)	66 (B)	70 (B)	70 (B)
4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	Nilai/ Katagori	64,57 (B)	71 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
4.2	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	Skore	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Merit	Skore	0,72	0,76	0,81	0,86	0,86
4.4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Poin	2,65	2,75	2,85	3,00	3,00
4.5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,39	83,67	87,08	87,32	87,32
4.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Indeks Kearsipan	Poin	49,64	57,94	60,59	63,66	63,66

Sumber: Analisa Bappelitbangda, 2022

5. Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tertib Dan Tentram Dalam Kerangka Demokrasi, dengan sasaran:

- 5.1 Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- 5.2 Menurunnya Potensi Konflik Sosial
- 5.3 Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat



Tabel 5.6 Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target
Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tertib Dan Tentram Dalam Kerangka Demokrasi

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATU AN	REALI SASI 2022	TARGET			KON DISI AKHIR 2026
					2024	2025	2026	
5	TERWUJUDNYA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN TERTIB DALAM KERANGKA DEMOKRASI	INDEKS DEMOKRASI	Poin	N/A	70	75	80	80
5.1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Presentase penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	79,56	92,64	96,75	100	100
5.2	Menurunnya Potensi Konflik Sosial	Presentase Konflik Sosial yang Ditangani	%	84,86	100	100	100	100
5.3	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat	Persentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat	%	N/A	75	80	85	85

Sumber: Analisa Bappelitbangda, 2022

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini memberikan penjelasan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan berupa strategi yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2024 - 2025 serta arah kebijakan dari setiap strategi pembangunan terpilih. Upaya yang dilakukan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 2024 - 2026 yang akan datang didukung oleh program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program prioritas daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan daerah dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan sasaran pembangunan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan jangka menengah periode tahun 2024 - 2026 di Kabupaten Bandung Barat, maka ditetapkan serangkaian strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Kabupaten Bandung Barat selama 3 (tiga) tahun periode pembangunan, strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut disajikan berdasarkan masing-masing tujuan pembangunan, seperti pada tabel berikut ini:



**Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkesetaraan	1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Meningkatkan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan Intervensi Gizi Spesipik	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja2. Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular3. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan4. Peningkatan Kualitas Pengawasan Obat Dan Makanan5. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai dengan standar6. Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, bayi dan balita7. Penyediaan akses air minum layak dan aman8. Penyediaan akses pengelolaan air limbah9. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan10. Peningkatan kondisi keluarga sejahtera
	1.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan merata bagi seluruh masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan dasar2. Peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar4. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan5. Meningkatkan minat budaya baca
	1.3 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Pengendalian jumlah dan distribusi penduduk	<ol style="list-style-type: none">1. Penurunan angka Total Fertility Rate2. Peningkatan Layanan KB dan kesehatan reproduksi3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
	1.4 Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan3. Pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak4. Pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak
	1.5 Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatkan kapasitas daya saing pemuda serta meningkatkan pembinaan, pengembangan dan prestasi olahraga	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan pemuda kader3. Meningkatkan peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan4. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana olahraga5. Peningkatan SDM Keolahragaan6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga7. Peningkatan Prestasi Olahraga



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2. Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Kesejahteraan	2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	2.1.1 Peningkatan produksi dan diferensiasi produk pertanian, peternakan dan perikanan	1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, peternakan dan perikanan 2. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peternakan dan perikanan 3. Penanggulangan bencana pertanian dan pengendalian kesehatan ternak 4. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian 5. Terjaminnya pasokan air untuk pertanian
		2.1.2 Peningkatan pelaku usaha perdagangan dan daya saing produk perdagangan	1. Meningkatkan Perdagangan Dalam & Luar Negeri 2. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang 3. Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan
		2.1.3 Peningkatan pelaku industri dan daya saing produk industri	1. Peningkatan Jumlah IKM 2. Peningkatan standar dan daya saing produk IKM
	2.2 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan daya saing pariwisata dan Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam mendukung sektor pariwisata	1. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Peningkatan pengelolaan dan promosi destinasi wisata 3. Peningkatan SDM dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 5. Pelestarian budaya lokal dlm mendukung pariwisata 6. Pementasan kesenian tradisional di objek wisata 7. Pelestarian cagar budaya dalam mendukung pariwisata
	2.3 Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha	Meningkatkan potensi investasi dan kualitas usaha	1. Penyediaan Peta Potensi Investasi 2. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 3. Kepatuhan Perusahaan yang menyusun LKPM 4. Peningkatan koperasi sehat 5. Fasilitasi pertumbuhan volume usaha koperasi 6. Peningkatan Usaha Mikro yang Mandiri 7. Peningkatan kapasitas & kualitas produk UMKM
	2.4 Terkendalinya Tingkat Kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan terpadu dan tepat sasaran	1. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 2. Penguatan fasilitasi pendataan Perlindungan dan Jaminan Sosial keluarga miskin 3. Mengendalikan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dari kelayakan tempat hunian (Rutilahu) 4. Menangani Kantong-Kantong Kemiskinan 5. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 6. Memberdayakan masyarakat miskin dan mencegah terjadinya kemiskinan baru
	2.5 Meningkatnya Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan	1. Peningkatan ketersediaan pangan 2. Penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat Miskin 3. Diversifikasi pangan dan pemanfaatan Pangan Segar Asal Tumbuhan
	2.6 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1. Meningkatkan skill dan keterampilan tenaga kerja 2. Meningkatkan pelatihan kewirausahaan tenaga kerja 3. Penanganan kasus perselisihan hub. industrial



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan	3.1 Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan permukiman dan pengembangan kawas permukiman2. Pengelolaan prasarana dan sarana umum perumahan3. Pembangunan sistem drainase permukiman
	3.2 Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Peningkatan ketersediaan jalan dalam kondisi baik dan ruas jalan yang berkeselamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan, peningkatan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkapanya2. Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	3.3 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian pembangunan infrastruktur berdasarkan rencana tata ruang	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan ruang sebagai arahan penyusunan rencana struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan ruang2. Mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung dan Kawasan Cekungan Bandung dan sekitarnya, dengan sektor unggulan industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan3. Penatagunaan tanah sesuai tata ruang
	3.4 Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Mitigasi bencana serta penanggulangan bencana dan penanganan pasca bencana alam dan non alam	<ol style="list-style-type: none">1. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana2. Peningkatan Upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana3. Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan korban bencana4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana5. Rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana
	3.5 Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa2. Peningkatan pengelolaan adminsitasi dan keuangan desa3. Pengembangan kerjasama Desa4. Peningkatan Keberdayaan lembaga dan masyarakat desa
	3.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian dan pemantauan pencemaran udara2. Pengendalian dan pemantauan pencemaran air sungai serta buangan air limbah domestik dan industri3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan4. Peningkatan layanan pengelolaan sampah5. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan Perundang-undangan2. Penataan dan penguatan organisasi3. Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu4. Penguatan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan bidang ekonomi5. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah6. <i>Center of excelent</i> pengadaan barang jasa7. Peningkatan kualitas dan keselarasan Perencanaan pembangunan8. Peningkatan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah9. Peningkatan kapabilitas APIP10. Pembangunan Zona Integritas dan pencegahan korupsi11. Meningkatkan Kualitas Penelitian, Pengembangan dan penerapan Inovasi daerah12. Peningkatan kualitas penunjang urusan pemerintahan
	4.2 Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan tata kelola keuangan dan barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah2. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah3. Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah4. Tindaklanjut Rekomendasi Temuan BPK RI dan APIP oleh Perangkat Daerah
	4.3 Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur	Pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian2. Peningkatan Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin ASN3. Peningkatan Aspek Pengembangan Karir ASN4. Meningkatkan Kompetensi ASN
	4.4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan <i>Smart Governance</i>2. Peningkatan layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik berbasis teknologi informasi3. Peningkatan SDM TIK4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral5. Penerapan manajemen Keamanan Informasi Pemerintah
	4.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan penerapan inovasi pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan layanan administasi kependudukan dan pencatatan sipil2. Peningkatan layanan dan kemudahan perijinan3. Peningkatan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD4. Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan
	4.6 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis2. Penyelamatan dan perlindungan arsip



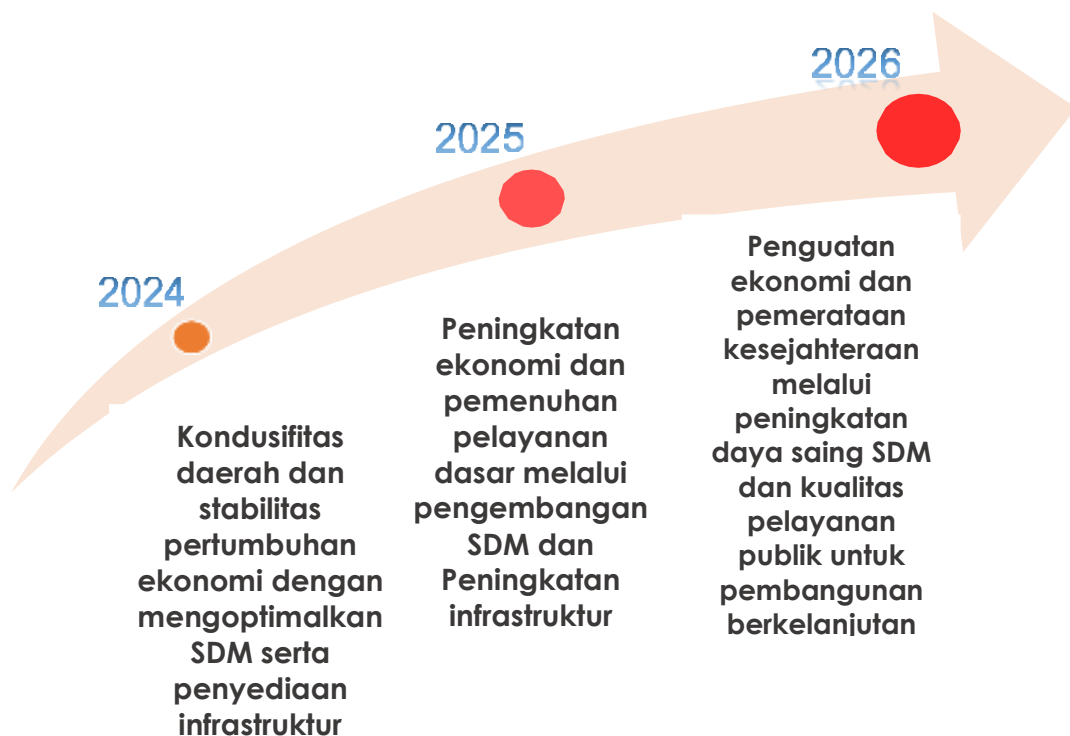
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5. Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tertib Dan Ten tram Dalam Kerangka Demokrasi	5.1 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 2. Peningkatan penegakan Perda dan Perkada 3. Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas 4. Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
	5.2 Menurunnya Potensi Konflik Sosial	Peningkatan Kewaspadaan Nasional serta Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	1. Peningkatan Koordinasi Kondusifitas dan Stabilitas Daerah 2. Fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik sosial 3. Penguatan ideologi pancasila dan karekter kebangsaan
	5.3 Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi di masyarakat	1. Pembinaan Terhadap Kelembagaan, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik 2. Peran Partai Politik dalam Peningkatan pemahaman politik di masyarakat

Sumber : Bappelitbangda, diolah

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi pembangunan terdiri dari tema-tema yang secara simultan dari tahun 2024 - 2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang telah ditetapkan.

Penyusunan tema pembangunan RPD Tahun 2024-2026 dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran RPD, prioritas pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan, isu strategis, dan kebijakan nasional serta kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun fokus atau tema pembangunan Kabupaten Bandung Barat setiap tahun selama 3 (tiga) tahun periode RPD 2024-2026 disajikan sebagai berikut:

Gambar 3.3 Tema Pembangunan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026



Tema pembangunan 2024 sampai 2026 menekankan keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya yang dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dengan penjelasan tema dan arah kebijakan tahunan adalah sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun politik yaitu dalam rangka menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pilkada dan Pilpres, sehingga fokus prioritas pembangunan menjaga stabilitas politik di daerah dan menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi pasca dampak pandemi covid-19 dengan dukungan optimalisasi sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur wilayah. Tema Pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk **“Kondusifitas daerah dan stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan SDM serta penyediaan infrastruktur”** dengan arah kebijakan meliputi:

1. Optimalisasi akses dan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat
2. Optimalisasi layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
3. Stabilitas dan penguatan ekonomi sektor unggulan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta optimalisasi potensi investasi
4. Percepatan pemulihan sector pariwisata
5. Perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan terpadu dan tepat sasaran terutama kemiskinan ekstrem serta perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran
6. Penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang aksesibilitas wilayah dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup serta kesiapsiagaan terhadap resiko bencana
7. Transpormasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
8. Menjaga dan meningkatkan kondusifitas daerah
9. Pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial serta peningkatan kesadaran politik dan demokrasi di masyarakat

b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas dan optimalisasi pelayanan dan pengembangan potensi SDM yang berdaya saing untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, peningkatan sektor ekonomi memiliki nilai strategis tinggi, perluasan kesempatan kerja, pemenuhan pelayanan dasar serta peningkatan penyediaan infrastruktur.

Pengembangan ekonomi diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan; perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal. Berkembangnya perekonomian daerah yang dibarengi dengan meningkatnya produktivitas daerah terutama diarahkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah terus menjadi perhatian pemerintah pada tahun ini, dan diharapkan mendorong daya saing daerah dan berdampak positif bagi investasi daerah. Pembangunan tahun 2025 dengan tema **“Peningkatan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar melalui pengembangan SDM dan Peningkatan infrastruktur”** dengan arah kebijakan meliputi:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
2. Peningkatan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

3. Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan pengembangan UMKM dan Koperasi berbasis inovasi yang berdampak positif bagi investasi daerah
4. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya local
5. Peningkatan produktivitas daerah dan perlindungan social untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah
7. Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana
8. Peningkatan implementasi *smart governance* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik
9. Stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kehidupan social masyarakat serta penanganan potensi konflik sosial

c. Tema Pembangunan tahun 2026

Fokus pembangunan tahun 2026 dengan tema **“Penguatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui peningkatan daya saing SDM dan kualitas pelayanan publik untuk pembangunan berkelanjutan”** diarahkan dalam rangka pencapaian target akhir pembangunan jangka menengah periode 3 tahun. Dengan prioritas pada penguatan perekonomian berbasis sektor-sektor unggulan dan peningkatan sector ekonomi lainnya melalui peningkatan daya saing SDM yang dibarengi dengan kualitas pelayanan publik. Memperkuat perekonomian masyarakat yang dibarengi dengan meningkatnya daya saing UMKM dan meningkatnya investasi diharapkan dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan sebagai upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan pencegahan kemiskinan baru serta pengangguran. Pembangunan pada akhir periode RPD ini diarahkan pada perwujudan penguatan dan pemantapan ekonomi berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan untuk pertumbuhan namun juga pemerataan, perluasan kesempatan serta perluasan akses, dengan arah kebijakan, meliputi:

1. Meningkatkan potensi dan daya saing SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berkesetaraan secara gender dan merata
2. Pemantapan dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
3. Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi berbasis inovasi serta peningkatan investasi

4. Peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif serta penguatan objek pemajuan kebudayaan dalam mendukung sektor pariwisata
5. Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan social untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan pencegahan kemiskinan baru serta pengangguran
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur serta konektivitas wilayah yang berkelanjutan
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana
8. Penguatan reformasi birokrasi dan pengembangan implementasi *smart governance* serta inovasi pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
9. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan kehidupan social masyarakat yang lebih baik.

6.2 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional yang bertujuan mewujudkan Kabupaten Bandung Barat sebagai Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan untuk mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya untuk selanjutnya dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, kebijakan struktur ruang dan pola ruang, serta kebijakan kawasan strategis. Kebijakan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bandung Barat menurut RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029, meliputi:

1. Penetapan sistem pusat pelayanan sesuai fungsi PKN, PKL, PPK, dan PPL;
2. Pengembangan sistem pusat pelayanan yang sesuai dengan dayadukung dan dayatampung serta fungsi kegiatan dominannya;
3. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan;
4. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi dayadukung dan dayatampungnya;
5. Penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah;
6. Mendorong terlaksananya peran Wilayah Pengembangan (WP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk;
7. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan lindung;
8. Pencegahan kerusakan kawasan lindung;
9. Perwujudan keterpaduan kawasan budidaya;

10. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung;
11. Pengembangan pusat-pusat kegiatan agroindustri;
12. Pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan; dan
13. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat diwujudkan melalui pembagian 6 (empat) WP serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan. WP ditentukan berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya. WP mengacu pada skenario pengembangan wilayah sesuai target pencapaian penataan ruang dan arah pengembangan ekonomi.

Kebijakan terkait penetapan Wilayah Pengembangan (WP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk, dapat diwujudkan dengan kebijakan dan strategi berikut:

1. Mendorong pengembangan di WP Padalarang bagian tengah dan selatan, dilakukan melalui strategi:
 - Memenuhi kebutuhan pelayanan umum perkotaan yang berdayasaing dan ramah lingkungan;
 - Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa;
 - Memprioritaskan pengembangan jaringan prasarana wilayah;
 - Menjamin ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang memadai;
 - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kabupaten/kota perbatasan dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di KSN Cekungan Bandung
2. Mengendalikan pengembangan di WP Lembang dan sebagian WP Padalarang bagian Utara, dilakukan melalui strategi:
 - Memenuhi kebutuhan pelayanan umum perkotaan dan perdesaan yang berdayasaing dan ramah lingkungan;
 - Membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan potensial menyebabkan alih fungsi kawasan lindung dan lahan pertanian beririgasi teknis;
 - Menerapkan kebijakan yang ketat untuk kegiatan perkotaan yang menarik arus migrasi masuk tinggi;
 - Mengembangkan sistem transportasi masal;

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kabupaten/kota perbatasan dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di KSN Cekungan Bandung dan KSP Bandung Utara;
 - Mengembangkan mekanisme kerjasama dengan kabupaten/kota yang berbatasan dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya alam.
3. Mendorong pengembangan di WP Cikalongwetan, dilakukan melalui strategi:
- Memprioritaskan investasi agroindustri, asia afrika village, pusat pemerintahan, rekreasi, gedung pertemuan, rumah sakit internasional, pusat perdagangan daging, musium perhubungan, pengembangan kampus hijau ITB untuk mengembangkan kawasan sesuai dengan arahan RTRW KBB;
 - Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa;
 - Memprioritaskan pengembangan jaringan prasarana wilayah;
 - Menjamin ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang memadai; dan
 - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kabupaten/kota perbatasan dalam mewujudkan keterpaduan peran dan fungsi KSP Padalarang - Cikalongwetan-Purwakarta
4. Membatasi pengembangan di WP Cililin bagian Selatan, dilakukan melalui strategi:
- Mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan;
 - Meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budidaya secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi lindung yang telah ditetapkan;
 - Meningkatkan akses menuju dan ke luar antar wilayah pengembangan;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman terutama di wilayah perbatasan;
 - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kabupaten dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi WP; dan
 - Mengembangkan mekanisme kerjasama antar kabupaten yang berbatasan dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan penyediaan jaringan prasarana wilayah

6.2.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem irigasi, sistem air minum, sistem persampahan, sistem drainase, sistem air limbah.

Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah sesuai dengan peran dan fungsi wilayahnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah lainnya. Sistem pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan menciptakan perkembangan ekonomi.

Untuk mendistribusikan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dibutuhkan pusat-pusat yang mendukung perkembangan tiap wilayah. Dengan pertimbangan utama keseimbangan wilayah, maka ditentukan satu (1) pusat pertumbuhan primer dan empat (4) pusat pertumbuhan sekunder, yaitu:

1. Kecamatan Ngamprah, merupakan pusat pengembangan primer dengan orientasi kegiatan berupa pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan, dan pelayanan masyarakat.
2. Kecamatan Padalarang, merupakan pusat pengembangan sekunder di bagian tengah dengan industri, perdagangan, dan permukiman sebagai orientasi pengembangan wilayahnya.
3. Kecamatan Lembang, merupakan pusat pengembangan sekunder di bagian utara sebelah timur dengan fokus pengembangan sektor pariwisata, permukiman, pertanian, kawasan lindung, dan konservasi.
4. Kecamatan Cikalongwetan, merupakan pusat pengembangan sekunder di bagian utara sebelah barat dengan perkebunan dan industri sebagai orientasi pengembangan wilayahnya.
5. Kecamatan Cililin, merupakan pusat pengembangan sekunder di bagian selatan dengan sektor pariwisata, perkebunan, konservasi, dan permukiman sebagai sektor andalannya.

Rencana sistem perkotaan yang akan diterapkan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan berdasarkan rencana hierarki kota yang ditentukan berdasarkan hasil analisis dan arahan kebijakan yang telah ditetapkan. Titik simpul (kota-kota) berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat-pusat pelayanan merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/ atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten. Dalam rencana sistem pusat pelayanan, terdiri dari:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
- Ditandai dengan adanya bandar udara skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A
- Kota Bandung sebagai pusat dari Kawasan Perkotaan Bandung Raya (Metropolitan Bandung Raya) berperan sebagai PKN dan sudah ditetapkan di dalam RTRW Nasional, serta kawasan perkotaan di dalamnya meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang, yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

- Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
- Fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan
- PKL Kawasan Perkotaan Ngamprah - Padalarang dipilih berdasarkan rencana pengembangan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Ngamprah, Stasiun KA Kabupaten Bandung Barat yang berlokasi di Padalarang, serta rencana pengembangan sarana dan prasarana lainnya yang menunjang pengembangan kawasan perkotaan, seperti rencana Rumah Sakit tipe B, perdagangan dan grosir, serta hotel.
- Terdapat rencana pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang salah satu lokasi stasiunnya berada di Padalarang

3. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)

- Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, meliputi Kecamatan Lembang, Cililin dan Cikalongwetan

- Fungsi pengembangan sebagai kawasan budaya, wisata, perekonomian untuk skala lokal, pendidikan, kesehatan, peribadatan
 - Berpotensi juga sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan antara lain dengan adanya stasiun kecil atau Terminal tipe C,
 - Beberapa sarana dan prasarana pendukung akan direncanakan di kecamatan-kecamatan tersebut, seperti Rumah Sakit tipe C, perdagangan grosir dan hotel melati
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi: Perkotaan Cisarua, Batujajar, Cipatat, Cipeundeuy dan Cihampelas
 - Fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal
 - Selain itu juga berfungsi sebagai DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) yang melayani kawasan perdesaan atau perkotaan yang berpotensi meningkatkan kegiatan produksi dan sektor ekonomi lainnya di desa tersebut maupun desa sekitarnya,
 - Didukung kelengkapan sarana minimum seperti: pasar, dan sub terminal

Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi:

1. Desa Pasirpogor, Desa Puncaksari, Desa Cikadu, Desa Cintakarya, Desa Cicangkan Girang, dan Desa Sindangkerta berada di Kecamatan Sindangkerta;
2. Desa Cijenuk, Desa Sarinagen, dan Desa Cijambu berada di Kecamatan Cipongkor;
3. Desa Sinarjaya, Desa Bunijaya, dan Desa Cilangari berada di Kecamatan Gununghalu;
4. Desa Cinengah, Desa Cibitung, dan Desa Cibedug berada di Kecamatan Rongga; dan
5. Desa Cihanjuangrahayu berada di Kecamatan Parongpong; dan
6. Desa Cipangeran berada di Kecamatan Saguling

Berdasarkan hal tersebut, dapat diterapkan rencana hierarki kota dan pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

Tabel 6.2 Sistem Perkotaan Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Hierarki	Pusat Pelayanan
1	Ngamprah - Padalarang	Hierarki 1	PKL
2	Cikalongwetan	Hierarki 2	PKLp
3	Lembang		
4	Cililin		
5	Batujajar	Hierarki 3	PPK
6	Cihampelas		
7	Cipatat		
8	Cipeundeuy		
9	Cisarua		
10	Saguling	Hierarki 4	PPL
11	Sindangkerta		
12	Cipongkor		
13	Gununghalu		
14	Rongga		
15	Parongpong		

Sumber: RTRW KBB tahun 2009-2029

6.2.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan. Secara umum, kebijakan pola ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan fungsi utamanya, meliputi:

a. Kebijakan Pola Ruang untuk Kawasan Lindung, meliputi:

- Pemantapan batas kawasan hutan lindung;
- Rehabilitasi kawasan hutan lindung;
- Penetapan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air;
- Penetapan kawasan sempadan sungai;
- Penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
- Pengamanan daerah aliran sungai di beberapa kecamatan yang dilalui;
- Penegasan sempadan danau/waduk/situ paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi;

- Penetapan Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air dengan mata air prioritas > 10 liter/detik pada mata air;
 - Pelestarian dan pemeliharaan keanekaragaman nabati dan hayati;
 - Pengembangan Taman Buru;
 - Pengembangan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - Penyediaan dan pengelolaan Hutan Kota pada kawasan Industri
 - Penyediaan Taman Kota;
 - Perlindungan terhadap Cagar Alam;
 - Perlindungan terhadap Taman Wisata Alam;
 - Perlindungan terhadap Taman Hutan Raya;
 - Rehabilitasi lahan dan air;
 - Rehabilitasi lahan Hutan dan kritis;
 - Inventarisasi dan penggunaan bangunan tahan gempa;
 - Pembatasan pembangunan (lahan terbangun);
 - Pemanfaatan jaringan jalan utama dan jalan lingkungan sebagai jalur evakuasi;
 - Penyediaan ruang evakuasi dengan memanfaatkan fasilitas umum dan sosial, kantor pemerintahan, RTH, lapangan olahraga;
 - Penyediaan tanda peringatan pada kawasan rawan bencana dan sistem informasi dini kebencanaan;
 - Identifikasi dan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana longsor;
 - Identifikasi dan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;
 - Perlindungan terhadap waduk, situ, dan sungai;
 - Pendayagunaan Kawasan Cagar Alam Geologi; dan
 - Konservasi Kawasan rawan bencana alam geologi
- b. Kebijakan Pola Ruang untuk Kawasan Budidaya, meliputi:
1. Kawasan hutan produksi, yaitu kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, melalui:
 - Pemantapan batas kawasan Hutan Produksi;
 - Pemantapan batas kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - Pengembangan kelompok tani hasil hutan dan perkayuan;
 - Pembangunan dan pengembangan industri yang berbasis hutan tanaman industri;

- Fasilitasi kemitraan masyarakat sekitar hutan dengan pemegang ijin pengelolaan hutan produksi; dan
 - Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hutan produksi untuk menjamin Kelestarian Hutan.
2. Kawasan hutan rakyat, melalui:
- Pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan Hutan Rakyat
 - Penyediaan lembaga Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
 - Pembentukan unit-unit pengelolaan atau FMU (Forest Management Unit) sebagai suatu unit kelestarian dan unit pengusahaan hutan rakyat;
 - Rehabilitasi Hutan rakyat dengan penutupan vegetasi tutupan lahan
3. Kawasan pertanian yaitu kawasan tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya perternakan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), melalui:
- Inventarisasi luas baku sawah maupun jaringan irigasi yang ada;
 - Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - Pengembangan tanaman pangan;
 - Pengembangan perusahaan pengumpul dan distribusi pertanian tanaman pangan;
 - Peningkatan akses distribusi produksi pertanian tanaman pangan; dan
 - Pembangunan dan pengembangan pertanian lahan kering (komoditi palawija)
 - Mempertahankan kawasan potensi hortikulutra;
 - Optimalisasi produksi buah-buahan melalui pengembangan kawasan sentra;
 - Optimalisasi produksi sayuran melalui pengembangan kawasan sentra;
 - Peningkatan akses distribusi produksi hortikultura; dan
 - Pengembangan dan penguatan kelembagaan petani
 - Pengembangan perkebunan kopi;
 - Pengembangan perkebunan teh;
 - Pengembangan perkebunan karet;
 - Pengembangan perkebunan aren;
 - Pengembangan perkebunan tembakau; dan
 - Pengembangan perkebunan cengkeh
 - Pengembangan dan fasilitasi ternak besar;
 - Pengembangan dan fasilitasi ternak kecil;

- Pengembangan dan fasilitasi ternak unggas;
 - Intensifikasi budidaya peternakan;
 - Penyediaan lahan penggembalaan perternakan;
 - Penyediaan rumah potong hewan; dan
 - Penyediaan pasar hewan
4. Kawasan pertambangan dan energi yaitu kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, kawasan panas bumi, kawasan pembangkit tenaga listrik, melalui:
- Pembatasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - Pembatasan pertambangan mineral logam
5. Kawasan perikanan budidaya, melalui:
- Intensifikasi budidaya perikanan;
 - Pengembangan budidaya perikanan melalui pembenihan ikan;
 - Kawasan budidaya perikanan melalui pembesaran (Kolam air deras);
 - Kawasan pengolahan ikan melalui pendedelan ikan; dan
 - Penyediaan sarana Balai Benih Ikan (BBI) dan pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
6. Kawasan peruntukan industri yaitu kawasan industri, sentra industri kecil, dan sentra industri menengah, melalui:
- Penataan kawasan industri;
 - Pengembangan dan penataan kawasan industri tekstil;
 - Relokasi kawasan industri;
 - Pengembangan industri biogas yang berasal dari eceng gondok; dan
 - Pengembangan industri makanan
7. Kawasan pariwisata melalui pengembangan potensi wisata alam tersebar di seluruh kecamatan
8. Kawasan permukiman melalui pengembangan kawasan permukiman di seluruh kecamatan
9. Kawasan peruntukan lainnya, melalui:
- Pengembangan kawasan pemerintahan skala kecamatan
 - Pengembangan kawasan pemerintahan skala kabupaten
 - Pengembangan kawasan perdagangan di pusat WP; dan
 - Pengaturan dan pengendalian jumlah sarana di tiap lingkungan
 - Pengembangan dan penataan kawasan pusat pelatihan militer

6.2.3 Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Perkotaan Padalarang dengan sudut kepentingan sosial ekonomi (meliputi Kecamatan Padalarang, Batujajar, sebagian Kecamatan Cihampelas, dan sebagian Kecamatan Ngamprah)
2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan sudut kepentingan sosial ekonomi (Kecamatan Cikalongwetan dan Kecamatan Cipeundeuy)
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kawasan Industri Cipeundeuy
4. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Pusat Agribisnis dengan sudut kepentingan sosial ekonomi (kawasan agribisnis Bandung Barat bagian utara - Lembang dan kawasan strategis di kawasan agribisnis Bandung Barat bagian selatan - Cililin).
5. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang termasuk Kawasan Bandung Barat bagian Selatan (KBBBS) adalah beberapa kawasan yang termasuk Kecamatan Rongga, Gununghalu, dan Sindangkerta
6. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Saguling yang berkaitan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, sebagian Kecamatan Cipongkor, dan sebagian Kecamatan Batujajar
7. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Cirata yang berkaitan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

6.3 Program Prioritas

Program prioritas daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Program prioritas daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, yaitu:



1. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan melibatkan UMKM dan koperasi
4. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal
5. Perlindungan sosial dan mengurangi kesenjangan dengan kebijakan yang *pro-poor, pro-job, pro-growth*
6. Pemerataan pembangunan perkotaan dan pedesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
7. Pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana
8. Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui *Smart Governance*
9. Kondusifitas wilayah melalui peningkatan trantibumlinmas, pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial serta peningkatan kesadaran politik dan demokrasi di masyarakat

Mengingat strategis dan pentingnya program prioritas daerah, maka dalam pelaksanaannya perlu diprioritaskan dan mendapatkan dukungan penganggaran yang seimbang dengan target yang akan dicapai. Program prioritas Kabupaten Bandung Barat yang disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran RPD untuk periode Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:



**Tabel 6.3 Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkesetaraan	1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Meningkatkan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan Intervensi Gizi Spesipik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja 2. Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan 4. Peningkatan Kualitas Pengawasan Obat Dan Makanan 5. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai dengan standar 6. Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, bayi dan balita 7. Penyediaan akses air minum layak dan aman 8. Penyediaan akses pengelolaan air limbah 9. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan 10. Peningkatan kondisi keluarga sejahtera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 5. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 	Dinkes, DP2KBP3A, DKPP, DPUPR
	1.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan merata bagi seluruh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemerataan akses lay. pendidikan dasar 2. Peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 5. Meningkatkan minat budaya baca 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pembinaan Perpustakaan 	Disdik, Disarpus
	1.3 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Pengendalian jumlah dan distribusi penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan angka Total Fertility Rate 2. Peningkatan Layanan KB dan kesehatan reproduksi 3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Penduduk 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana 	DP2KBP3A
	1.4 Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak 2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 3. Pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 3. Program Perlindungan Perempuan 4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 5. Program Perlindungan Khusus Anak 	DP2KBP3A
	1.5 Meningkatnya	Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan Pemuda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya 	Dispora



	Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	kapasitas daya saing pemuda serta meningkatkan pembinaan, pengembangan dan prestasi olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan pemuda kader 3. Meningkatkan peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan 4. Peningkatan penyediaan Saprass olahraga 5. Peningkatan SDM Keolahragaan 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga 7. Peningkatan Prestasi Olahraga 	<p>Saing Kepemudaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 	
2. Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Kesejahteraan	2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 Peningkatan produksi dan diferensiasi produk pertanian, peternakan dan perikanan 2.1.2 Peningkatan pelaku usaha perdagangan dan daya saing produk perdagangan 2.1.3 Peningkatan pelaku industri dan daya saing produk industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, peternakan dan perikanan 2. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peternakan dan perikanan 3. Penanggulangan bencana pertanian dan pengendalian kesehatan ternak 4. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian 5. Terjaminnya pasokan air untuk pertanian 1. Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 2. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang 3. Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan 1. Peningkatan Jumlah IKM 2. Peningkatan standar dan daya saing produk IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 6. Program Penyuluhan Pertanian 7. Program pengelolaan sumber daya air 1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Program Pengembangan Ekspor 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 5. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 	<p>DKPP, Dispernakan DPUPR</p> <p>Disperindag</p> <p>Disperindag</p>
	2.2 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Penguatan Objek	Peningkatan daya saing pariwisata dan Penguatan Objek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Peningkatan pengelolaan dan promosi destinasi wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 	Disparbud



	Ekonomi Kreatif	Pemajuan Kebudayaan dalam mendukung sektor pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan SDM dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 5. Pelestarian budaya lokal dalam mendukung pariwisata 6. Pementasan kesenian tradisional di objek wisata 7. Pelestarian cagar budaya dalam mendukung pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 	
	2.3 Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha	Meningkatkan potensi investasi dan kualitas usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Peta Potensi Investasi 2. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 3. Peningkatan Kepatuhan Perusahaan yang menyusun LKPM 4. Peningkatan koperasi sehat 5. Fasilitasi pertumbuhan volume usaha koperasi 6. Peningkatan Usaha Mikro yang Mandiri 7. Peningkatan kapasitas dan kualitas produk UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 5. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 6. Program Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan UMKM 8. Program Pengembangan UMKM 	DPMPTSP Diskop UKM
	2.4 Terkendalinya Tingkat Kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan terpadu dan tepat sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 2. Penguatan fasilitasi pendataan Perlindungan dan Jaminan Sosial keluarga miskin 3. Mengendalikan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dari kelayakan tempat hunian(Rutilahu) 4. Menangani Kantong-Kantong Kemiskinan 5. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 6. Memberdayakan masyarakat miskin dan mencegah terjadinya kemiskinan baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Rehabilitasi Sosial 5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 6. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 	Dinkes Diperkim Dinsos
	2.5 Meningkatnya Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan pangan 2. Penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat Miskin 3. Diversifikasi pangan dan pemanfaatan Pangan Segar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengawasan Keamanan Pangan 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan 	DKPP



			Asal Tumbuhan	Kemandirian Pangan 4. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
	2.6 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1. Meningkatkan skill dan keterampilan tenaga kerja 2. Meningkatkan pelatihan kewirausahaan tenaga kerja 3. Penanganan kasus perselisihan hubungan industrial	1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial	Disnaker
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan	3.1 Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman	1. Penataan permukiman dan pengembangan kawas permukiman 2. Pengelolaan prasarana dan sarana umum perumahan 3. Pembangunan sistem drainase permukiman	1. Program pengembangan permukiman 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 3. Program kawasan permukiman 4. Program peningkatan PSU	Dinas PUPR, Disperkim
	3.2 Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Peningkatan ketersediaan jalan dalam kondisi baik dan ruas jalan yang berkeselamatan	1. Pembangunan, peningkatan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkapanya 2. Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Program penyelenggaraan jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas PUPR Dinas Perhubungan
	3.3 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian pembangunan infrastruktur berdasarkan rencana tata ruang	1. Penataan ruang sebagai arahan penyusunan rencana struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan ruang 2. Mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung dan Kawasan Cekungan Bandung dan sekitarnya, dengan sektor unggulan industri, t. pangan, pariwisata, dan perkebunan 3. Penatagunaan tanah sesuai tata ruang	1. Program penyelenggaraan penataan ruang 2. Program pengelolaan izin lokasi 3. Program penatagunaan tanah	Dinas PUPR, Disperkim
	3.4 Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Mitigasi bencana serta penanggulangan bencana dan penanganan pasca bencana alam dan non alam	1. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 2. Peningkatan Upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana 3. Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan korban bencana 4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana 5. Rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 3. Program Penanganan Bencana 4. Program penataan bangunan dan lingkungannya 5. Program pengembangan perumahan	BPBD Disdamkar, Dinas PUTR, Disperkim Dinsos
	3.5 Meningkatnya Pembangunan	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa,	1. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Peningkatan pengelolaan adminisitrasi dan keuangan	1. Program Penataan Desa 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD



	Wil. Pedesaan	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa	desa 3. Pengembangan kerjasama Desa 4. Peningkatan Keberdayaan lembaga dan masyarakat desa	3. Program Peningkatan Kerjasama Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
	3.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Pengendalian dan pemantauan pencemaran udara 2. Pengendalian dan pemantauan pencemaran air sungai dan buangan air limbah domestik dan industri 3. Peningkatan layanan pengelolaan sampah 4. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan 5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program pengendalian bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) 3. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 4. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 5. Program pengelolaan persampahan 6. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penataan Perundang-undangan 2. Penataan dan penguatan organisasi 3. Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu 4. Penguatan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan bidang ekonomi 5. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah 6. <i>Center of excelent</i> pengadaan barang jasa 7. Peningkatan kualitas dan keselarasan Perencanaan pembangunan 8. Peningkatan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 9. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 10. Pembangunan Zona Integritas dan pencegahan korupsi	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan 3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 6. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Itda Setda Bappelitbangda Semua PD



			11. Meningkatkan Kualitas Penelitian, Pengembangan dan penerapan Inovasi daerah 12. Peningkatan kualitas penunjang urusan pemerintahan		
	4.2 Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan tata kelola keuangan dan barang Milik Daerah	1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah 2. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah 4. Tindaklanjut Rekomendasi Temuan BPK RI dan APIP oleh Perangkat Daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Itda BKAD Bapenda
	4.3 Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur	Pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	1. Peningkatan Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Peningkatan Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin ASN 3. Peningkatan Aspek Pengembangan Karir ASN 4. Meningkatkan Kompetensi ASN	1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
	4.4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	1. Pengembangan <i>Smart Governance</i> 2. Peningkatan layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik berbasis teknologi informasi 3. Peningkatan SDM Teknologi, Informasi & Komunikasi 4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral 5. Penerapan manajemen Keamanan Informasi	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Kominfo dan Statistik
	4.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan penerapan inovasi pelayanan publik	1. Peningkatan layanan administasi kependudukan dan pencatatan sipil 2. Peningkatan layanan dan kemudahan perijinan 3. Peningkatan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD 4. Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Data Dan SIPM 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 9. Program Koordinasi Trantibum Umum 10. Program Pembinaan Dan Pengawasan	Disdukcapil DPMPSTP Sekretariat DPRD 16 Kecamatan



				Pemerintahan Desa	
	4.6 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan	1. Meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis 2. Penyelamatan dan perlindungan arsip	1. Program Pengelolaan Arsip 2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Disarpus
5. Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tertib Dan Tenram Dalam Kerangka Demokrasi	5.1 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 2. Peningkatan penegakan Perda dan Perkada 3. Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP 16 Kecamatan
	5.2 Menurunnya Potensi Konflik Sosial	Peningkatan Kewaspadaan Nasional serta Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	1. Peningkatan Koordinasi Kondusifitas dan Stabilitas Daerah 2. Fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik sosial 3. Penguatan ideologi pancasila dan karekter kebangsaan	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbang pol
	5.3 Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat	Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi di masyarakat	1. Pembinaan Terhadap Kelembagaan, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik 2. Peran Partai Politik dalam Peningkatan pemahaman politik di masyarakat	1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbang pol

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bandung Barat berisi skema dan asumsi kapasitas kemampuan pendanaan daerah dan program-program pembangunan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

7.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 - 2026, sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat, tetapi juga oleh sumber pendapatan lainnya (APBN, APBD Propinsi dan Sumber- sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, kerangka pendanaan pembangunan daerah dalam bab ini hanya mencantumkan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat, yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2024**

No	RINCIAN	Proyeksi		
		2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	2.382.060.621.353	2.408.095.867.300	2.435.504.998.603
1.1	PAD	676.785.751.719	702.820.997.666	730.230.128.969
1.1.1	Pajak	500.000.000.000	525.000.000.000	551.250.000.000
1.1.2	Restribusi	14.331.488.426	15.366.734.373	16.525.865.676
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.253.070.525	1.253.070.525	1.253.070.525
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	161.201.192.768	161.201.192.768	161.201.192.768
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.705.274.869.634	1.705.274.869.634	1.705.274.869.634
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	1.412.054.662.000	1.412.054.662.000	1.412.054.662.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Daerah	293.220.207.634	293.220.207.634	293.220.207.634
No	RINCIAN	Proyeksi		



		2024	2025	2026
2	BELANJA	2.216.893.821.353	2.408.095.867.300	2.435.504.998.603
2.1	BELANJA OPERASI	1.791.302.383.610	1.978.588.404.963	2.001.878.498.135
2.1.1	Belanja Pegawai	1.213.497.539.488	1.266.141.568.858	1.269.758.666.965
2.1.2	Belanja Barang Jasa	515.304.844.122	672.446.836.105	692.119.831.170
2.1.3	Belanja Bunga	15.000.000.000		
2.1.4	Belanja Hibah	40.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3	BELANJA MODAL			
3.1	Belanja Modal Tanah			
3.2	Belanja Modal Gedung			
3.3	BelanjaModal Peralatan Mesin			
3.3	Belanja Jalan,Jaringan dan Irigasi			
3.4	Belanja Asset tetap Lainnya			
3.5	Belanja Asset Tetap			
4	BELANJA TAK TERDUGA	26.250.000.000	27.562.500.000	28.940.625.000
4.1	Belanja Tak Terduga	26.250.000.000	27.562.500.000	28.940.625.000
5	BELANJA TRANSFER	399.341.437.743	401.944.962.337	404.685.875.468
5.1	Belanja Bagi Hasil ke Desa	51.433.148.843	54.036.673.437	56.777.586.568
5.2	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	347.908.288.900	347.908.288.900	347.908.288.900
	Surplus/defisit	165.166.800.000	-	-
6	PEMBIAYAAN	165.166.800.000	-	-
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
6.1.1	Silpa Tahun yang berkenaan		-	-
6.1.2	Penerimaan Pinjaman	-		-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	165.166.800.000	-	-
6.2.1	Dana Cadangan Pilkada 2024	40.000.000.000	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal	30.000.000.000		
6.2.3	Pembayaran Cicilan Utang	95.166.800.000	-	-
	Pembiayaan Netto	(165.166.800.000)	-	-
	Total APBD	2.382.060.621.353	2.408.095.867.300	2.435.504.998.603

Sumber : Bappelitbangda, diolah

7.2 Program Perangkat Daerah



Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Program yang mengacu kepada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Program perangkat daerah yang memuat judul program dilengkapi dengan indikator kinerja, target dan pagu indikatif setiap tahun, dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Program tersebut disajikan selengkapnya pada Tabel 7.2 berikut:



**Tabel 7.2 Program Perangkat Daerah serta Kebutuhan Anggaran
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026**

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR													
1	URUSAN PENDIDIKAN												
1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	%	104,84	101,64	33.261.989.000	101,19	58.975.468.000	100,74	58.975.468.000	100,74	151.212.925.000	Disdik
		APM SD	%	97,91	99,07		99,53		99,99				
		APS (7-12)	%	104,08	100,85		100,43		100,01				
		Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	%	35,28	35,32		35,49		35,58				
		Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	52,54	52,7		52,78		52,86				
		Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	39,24	40,02		40,41		40,8				
		Indeks Iklim Keamanan SD	Indeks	2,22	2,22		2,23		2,24				
		Indeks Iklim Kebinekaan SD	Indeks	2,12	2,12		2,13		2,14				
		Indeks Inklusivitas SD	Indeks	1,95	1,95		1,96		1,97				
		APK SMP	%	93,97	96,15		97,74		99,33				
		APM SMP	%	75,87	77,49		77,8		78,11				
		APS (13-15)	%	96,32	96,79		98,02		99,26				
		Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	%	38,91	38,96		39,15		39,24				
		Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	63,21	63,53		63,69		63,85				
		Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	54,07	54,19		54,25		54,31				



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026**

**RPD
2024-2026**

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
		Indeks Iklim Keamanan SMP	Indeks	2,31	2,31		2,32		2,33		2,33		Disdik
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Indeks	2,18	2,18		2,19		2,20		2,20		
		Indeks Inklusivitas SMP	Indeks	1,91	1,91		1,92		1,93		1,93		
		Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik	%	66,69	66,77		67,09		67,26		67,26		
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	48.55	51,61		53,14		54,67		54,67		
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	57.02	57,4		57,59		57,78		57,78		
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	anak	6,47	6,71		6,83		6,95		6,95		
		Jumlah Lembaga PKBM, Kursus, dan Pelatihan yang berizin	Lembaga	48	49		49		49		49		
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kurikulum	%	100	100	1.190.312.000	100	2.083.636.000	100	2.083.636.000	100	5.357.584.000	
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/Murid SD	Rasio	1 : 22,13	1 : 22,67	356.430.000	1 : 22,94	623.929.000	1 : 23,21	623.929.000	1 : 23,21	1.604.288.000	
		Rasio Pengawas SD	Rasio	1 : 12	1 : 12		1 : 12		1 : 12		1 : 12		
		Rasio Guru/Murid SMP	Rasio	1 : 17,24	1 : 18,52		1 : 19,16		1 : 19,80		1 : 19,80		
		Rasio Pengawas SMP	Rasio	1 : 13	1 : 13		1 : 13		1 : 13		1 : 13		
		Rasio Guru/Murid PAUD	Rasio	1 : 33,15	1 : 15,02		1 : 15,73		1 : 16,44		1 : 16,44		
		Rasio Penilik PAUD	Rasio	1 : 60	1 : 60		1 : 61		1 : 61		1 : 61		



No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD, Pendidikan Non Formal yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	16,01	16,03	239.831.000	16,11	419.828.000	16,15	419.828.000	16,15	1.079.487.000	Dsidik
		Peningkatan proporsi Jumlah satuan pendidikan dasar yang mendapatkan minimal akreditasi A	%	26,83	26,86		26,99		27,06		27,06		
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	95,53	100	346.541.000	100	606.615.161	100	606.615.161	100	1.559.771.322	
2	URUSAN KESEHATAN												
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	76	100%	11.826.928.081	100%	18.419.066.237	100%	18.419.066.237	100%	48.665.060.555	DINKES
		Presentase Penduduk Miskin yang menerima bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	99	100%	49.292.883.838	100%	52.344.681.815	100%	52.344.681.815	100%	153.982.247.468	
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	88,33	90%	343.367.317	92%	366.056.890	93%	366.056.890	93%	1.075.481.097	
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif	%	56	57,50%	485.857.673	60%	646.893.632	62,50%	646.893.632	62,50%	1.779.644.937	
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	70	72%	179.708.488	74%	269.407.976	76%	269.407.976	76%	718.524.440	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAAN RUANG												
10	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	persentase sambungan rumah tangga yang terlayani akses air minum	%	82,92%	83,42%	1.000.000.000	83,92%	2.000.000.000	84,42%	2.000.000.000	84,42%	5.000.000.000	DPUPR
11	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	persentase KK yang terlayani sistem air limbah domestik	%	65,56%	66,26%	1.000.000.000	66,76%	2.000.000.000	67,26%	2.000.000.000	67,26%	5.000.000.000	
12	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase capaian pengelolaan sumber daya air secara optimal	%	60,00%	60,51%	1.833.147.000	60,77%	3.576.000.000	61,04%	3.695.200.000	61,04%	9.104.347.000	
13	Program penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	70,91%	58,42%	14.746.416.500	60,04%	29.432.000.000	61,56%	30.436.400.000	61,56%	74.614.816.500	
14	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	%	100	100%	1.762.404.750	100%	3.438.000.000	100%	3.552.600.000	100%	8.753.004.750	
15	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi sesuai standar	%	98,06%	100%	690.000.000	100%	570.000.000	100%	670.000.000	100%	1.930.000.000	
16	Program penataan bangunan gedung	Persentase penataan bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	%	100	100%	5.076.650.000	100%	8.730.000.000	100%	9.070.000.000	100%	22.876.650.000	
17	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase capaian penataan bangunan dan lingkungannya	%	100	0%	-	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	1.800.000.000	
18	Program pengembangan permukiman	Persentase sarana prasarana permukiman yang dibangun kawasan strategis kabupaten (Berkas Kawasan)	%	100%	100%	1.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	7.000.000.000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
19	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase kenaikan panjang drainase yang terbangun	%	65,53%	66,89%	1.000.000.000	68,76%	2.000.000.000	70,26%	2.000.000.000	70,26%	5.000.000.000	DPUPR
20	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	100	100%	5.266.446.500	100%	5.372.000.000	100%	5.584.400.000	100%	16.222.846.500	
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
21	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	%	100%	25%	1.030.000.000	35%	3.550.000.000	50%	3.850.000.000	50%	8.430.000.000	Disperkim
22	Program kawasan permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di kawasan kumuh di bawah 10 Ha	%	N/A	25%	2.500.000.000	35%	3.500.000.000	50%	3.550.000.000	50%	9.550.000.000	
		Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha	%	N/A	33,49%	970.000.000	66,98%	1.950.000.000	100%	2.350.000.000	100%	5.270.000.000	
23	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan formal yang melakukan proses serahterima PSU kepada Pemerintah daerah	%	33,33%	66,67%	451.250.000	83,33%	878.375.000	100%	878.375.000	100%	2.208.000.000	
24	Program pengembangan perumahan	Persentase penanganan rumah korban bencana	%	0%	33,33%	6.710.000.000	66,67%	9.871.625.000	100%	10.096.625.000	100%	26.678.250.000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
25	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	Sedang (0,47)	Sedang (0,49)	3.971.600.000	Sedang (0,50)	6.961.500.000	Sedang (0,51)	7.296.004.935	Sedang (0,51)	18.229.104.935	BPBD
26	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	%	67,53	82%	5.150.000.000	84%	5.465.000.000	87%	5.630.000.000	87%	16.245.000.000	Disdamkar
27	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	13.166.865.100	100	11.382.754.700	100	11.398.033.200	100	35.947.653.000	SATPOL PP
		Presentase peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan Satlinmas	%	38,67	77,92		90,24		100		100		
		Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100		100		100		100		
			%										
6	URUSAN SOSIAL												
28	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	72	100%	1.320.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.400.000.000	100%	6.120.000.000	Dinsos
29	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial	%	40	33%	724.450.000	66%	1.837.800.000	100%	1.837.800.000	100%	4.400.050.000	
30	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tingkat fasilitasi pendataan fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	37	100	2.530.000.000	100	2.486.950.000	100	2.478.825.000	100	7.495.775.000	
31	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	%	100	100%	50.000.000	100%	175.250.000	100%	183.375.000	100%	408.625.000	
32	Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	100	100%	600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	3.800.000.000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	URUSAN TENAGA KERJA												
33	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	%	100	-	-	-	-	100	100,000,000	100	100,000,000	Disnaker
34	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	30.37	30.67	1,830,000,000	31.52	2,600,000,000	32.30	2,900,000,000	32.30	7,330,000,000	
		Produktivitas Tenaga kerja	Juta rupiah	45.09	46.76		47.17		47.57		47.57		
35	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja yang ditempatkan	%	16.03	16.43	230,000,000	16.81	350,000,000	17.16	400,000,000	50.40	980,000,000	
36	Program Hubungan Industrial	Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Disnaker	%	100	100	800,000,000	100	1,200,000,000	100	1,500,000,000	100	3,500,000,000	
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
37	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	40,50	40,51%	87,500,000	40,52	112,500,000	40,54%	112,500,000	40,54%	312,500,000	DP2KBP3A
38	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data dan profil gender dan anak	%	78	79%	43,750,000	79,8%	56,250,000	80,6%	56,250,000	80,6%	156,250,000	
39	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	%	100%	100%	131,250,000	100%	168,750,000	100%	168,750,000	100%	468,750,000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
40	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	%	84	87,5	175,000,000	90	225,000,000	94	225,000,000	94	625,000,000	DP2KBP3A
41	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	%	78	80%	87,500,000	82%	112,500,000	84%	112,500,000	84%	312,500,000	
42	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak	%	100	100%	175,000,000	100%	225,000,000	100%	225,000,000	100%	625,000,000	
3	URUSAN PANGAN												
43	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang tersertifikasi	%	22.22	27.78	220,000,000	33.33	275,000,000	38.89	400,000,000	38.89	895,000,000	DKPP
44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Tahan Pangan	%	72.73	76.36	220,000,000	80.00	275,000,000	84.24	400,000,000	84.24	895,000,000	
45	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase sarana dan prasarana pangan yang terbangun	%	100	100	350,000,000	100	390,000,000	100	450,000,000	100	1,190,000,000	
46	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	ton	10	30	725,000,000	39	725,000,000	49	800,000,000	49	2,250,000,000	
		Pencapaian Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	poin	83.14	85.64		88.14		90.64		90.64		
		Score Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	poin	76.8	77.2	600,000,000	77.6	700,000,000	78	900,000,000	78	2,200,000,000	



No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
4	URUSAN PERTANAHAN												
47	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	25%	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	1,050,000,000	Disperkim
48	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase capaian dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan	%	100%	100%	1,450,000,000	0%	-	100%	100,000,000	100%	1,550,000,000	
49	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, ter-sinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria	%	N/A	100%	200,000,000	100%	525,000,000	100%	600,000,000	100%	1,325,000,000	
50	Program pengelolaan tanah kosong	Persentase Capaian inventarisasi, kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong	%	N/A	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	250,000,000	100%	400,000,000	
51	Program penatagunaan tanah	Persentase capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	%	N/A	100%	3,000,000,000	100%	4,875,000,000	100%	4,475,000,000	100%	12,350,000,000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
5	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP												
52	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	42,86	1,250,000,000	71,43	700,000,000	100.00	550,000,000	100.00	2,500,000,000	DLH
53	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sampel kualitas air sungai dengan status mutu air baik	%	6%	6%	755,000,000	6%	1,525,000,000	6%	1,225,000,000	6%	3,505,000,000	
		Persentase sampel kualitas udara dengan status mutu udara baik	%	70%	70%		70%		70%		70%		
54	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Presentase RTH Taman yang terawat	%	72.22	100	1,475,000,000	100	2,900,000,000	100	2,850,000,000	100	7,225,000,000	
55	Program pengendalian bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan	%	31,78%	37%	110,000,000	42%	350,000,000	47%	300,000,000	47%	760,000,000	
56	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Presentase ketaatan industri dan/atau usaha dalam pelaporan pelaksanaan PPLH	%	58,70	62	200,450,000	65	500,000,000	68	400,000,000	68	1,100,450,000	
57	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Presentase Desa yang telah menerapkan aksi peduli lingkungan	%	100	100	250,000,000	100	650,000,000	100	650,000,000	100	1,550,000,000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
58	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH	Entitas	15	15	120,000,000	15	200,000,000	15	200,000,000	45	520,000,000	DLH
59	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	N/A	100%	90,900,000	100%	250,000,000	100%	200,000,000	100%	540,900,000	
60	Program pengelolaan persampahan	Persentase cakupan pengelolaan sampah domestik	%	12%	12%	24,129,380,000	12%	28,300,000,000	12%	29,175,000,000	12%	81,604,380,000	
6	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
61	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Memiliki KTP-EI	%	93%	95%	625,000,000	96%	700,000,000	97%	720,000,000	97%	2,045,000,000	Disduk capil
		Persentase Indentitas Kependudukan Digital	%	0%	10%		15%		20%		20%		
		Persentase Anak Ber KIA	%	25%	26%		28%		30%		30%		
62	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta kematian	%	32%	50%	625,000,000	55%	700,000,000	60%	720,000,000	60%	2,045,000,000	
		Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun	%	89.43%	90%		92%		94%		94%		
63	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%	25%	50%	1,450,000,000	60%	1,500,000,000	70%	1,600,000,000	70%	4,550,000,000	
64	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan yang terselesaikan	Dokumen	1	1	50,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	3	170,000,000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
7	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
65	Program Penataan Desa	Presentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	%	0	33,33	465,911,600	66,67	444,594,340	100	454,145,354	100	1,364,651,294	DPMD
66	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	%	32.31	33,33	222,209,546	66,67	181,151,806	100	296,600,792	100	699,962,144	
67	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Percentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Tertib	%	0	33,33	4,196,121,146	66,67	4,625,746,146	100	4,250,746,146	100	13,072,613,438	
68	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	91.82	100	688,121,146	100	625,746,146	100	750,746,146	100	2,064,613,438	
8	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA												
69	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	100%	100%	500,000,000	100%	850,000,000	100%	850,000,000	100%	2,200,000,000	DP2KBP3A
70	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2.24	2.23	800,000,000	2.22	1,000,000,000	2.21	1,000,000,000	2.21	2,800,000,000	
71	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	%	70,73	70,80%	1,812,000,000	71.00%	2,162,000,000	71.10%	2,162,000,000	71.10%	6,136,000,000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
9	URUSAN PERHUBUNGAN												
72	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	%	67,44	97,92	6,320,000,000	98,42	13,512,200,000	98,93	13,390,650,000	98,93	33,222,850,000	Dishub
73	Program pengelolaan pelayaran	Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	%	81,48	96,25	370,250,000	98,13	650,000,000	100	1,100,000,000	100	2,120,250,000	
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
74	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE	%	100	100	4,257,500,000	100	4,350,000,000	100	4,350,000,000	100	12,957,500,000	Diskom infotik
75	Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Yang Terkelola	%	100	100	1,200,000,000	100	1,220,000,000	100	1,220,000,000	100	3,640,000,000	
11	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
76	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	%	65,96%	67.02%	250,000,000	68.07%	350,000,000	69.13%	400,000,000	69.13%	1,000,000,000	Diskop UKM
77	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	46,80%	48.40%	150,000,000	50.00%	200,000,000	51.60%	325,000,000	51.60%	675,000,000	
78	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	%	0,43%	0,45%	100,000,000	0,54%	150,000,000	0,63%	200,000,000	1,62%	450,000,000	
79	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan	%	29.00%	40.00%	750,000,000	50.00%	882,000,000	60.00%	1,000,000,000	60.00%	2,632,000,000	
80	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Presentase Usaha mikro yang diberdayakan	%	20%	20%	600,000,000	22,22%	1,050,000,000	22,73%	1,260,000,000	22,73%	2,910,000,000	
81	Program Pengembangan UMKM	Presentase Usaha Mikro yang dikembangkan	%	16.6%	20.0%	650,000,000	21.43%	500,000,000	21.57%	665,000,000	21.57%	1,815,000,000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
12	URUSAN PENANAMAN MODAL												
82	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal	%	0	100%	312,000,000	100%	320,500,000	100%	320,500,000	100%	953,000,000	DPMPTSP
83	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	100	100%	365,000,000	100%	213,500,000	100%	226,500,000	100%	805,000,000	
84	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	KBLI	782	882	435,000,000	982	468,500,000	1082	495,500,000	1,082	1,399,000,000	
85	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan	%	100%	100%	135,000,000	100%	141,500,000	100%	157,500,000	100%	434,000,000	
86	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	%	82.79%	84%	330,000,000	85%	476,500,000	86%	514,500,000	86%	1,321,000,000	
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
87	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Layanan Kepemudaan	%	7.83	10,30	900,000,000	10,35	1,515,000,000	10,40	1,650,000,000	10,40	4,065,000,000	Dispora
88	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Pemuda yang Aktif Pada Organisasi Kepramukaan	%	2,83	5%	15,000,000	5%	45,000,000	5%	75,000,000	5%	135,000,000	
89	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Indeks ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga	poin	0,59	0,61	1,437,500,000	0,63	2,505,000,000	0,65	2,718,600,000	0,65	6,661,100,000	
		Indeks SDM Keolahragaan	poin	0,33	0,34		0,36		0,38				
		Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	poin	0,34	0,36		0,38		0,40				
		Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	Jumlah	569	50		75		250		375		



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
14	URUSAN STATISTIK												
90	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	poin	2	2	500,000,000	3	550,000,000	3	550,000,000	3	1,600,000,000	Diskom infotik
15	URUSAN PERSANDIAN												
91	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat kematangan penerapan manajemen Keamanan Informasi Pemerintah	poin	2	2	400,000,000	3	440,000,000	3	440,000,000	3	1,280,000,000	Diskom infotik
16	URUSAN KEBUDAYAAN												
92	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan	%	30	35	900,000,000	38	1,350,000,000	40	2,100,000,000	40	4,350,000,000	Disparbud
93	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	8,58	100,000,000	12,86	200,000,000	17,15	300,000,000	17,15	600,000,000	
94	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sumber daya manusia/lembaga dan informasi sejarah	%	34	51	120,000,000	68	150,000,000	86	250,000,000	86	520,000,000	
95	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan	%	35	50	550,000,000	50	800,000,000	50	1,150,000,000	50	2,500,000,000	
17	URUSAN PERPUSTAKAAN												
96	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	47.18	52	909,975,000	55	2,484,900,000	59	2,484,900,000	59	5,879,775,000	Disarpus
18	URUSAN KEARSIPAN												
97	Program Pengelolaan Arsip	Nilai pengawasan kearsipan eksternal	Nilai	60.49	63,24%	333,133,300	66,67%	2,436,100,000	70,65%	2,486,100,000	70,65%	5,255,333,300	Disarpus
		Nilai pengawasan kearsipan internal	Nilai	33.39	50,21%		51,49%		53,19%		53,19%		
98	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat pemenuhan penyelamatan dan perlindungan arsip	Level	0	0	-	2	200,000,000	3	300,000,000	3	500,000,000	
99	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Fasilitasi perizinan penggunaan arsip	SOP	0	0	-	1	150,000,000	0		1	150,000,000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
URUSAN PILIHAN													
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN												
100	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Jumlah Nelayan Tangkap yang terdaftar	%	N/A	25	55,000,000	30	50,000,000	35	50,000,000	35	155,000,000	Disper nakan
101	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Jumlah Unit usaha budidaya dan pembenihan perikanan yang menerapkan CBIB/CPIB	Unit	20	30	650,000,000	30	1,070,000,000	40	1,480,000,000	100	3,200,000,000	
102	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Kesadaran Nelayan terhadap Penangkapan Ikan yang Baik	%	N/A	5	160,000,000	5	160,000,000	5	160,000,000	15	480,000,000	
103	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolahan ikan yang menerapkan SSOP	%	38.46	42.31	155,000,000	47.44	215,000,000	51.28	285,000,000	51.28	655,000,000	
2	URUSAN PARIWISATA												
104	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase Desitinasi Wisata yang dikembangkan	%	16,67	33,33	1,000,000,000	50	1,350,000,000	66,67	1,750,000,000	66,67	4,100,000,000	Disparbud
105	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Jumlah kunjungan Wisatawan	%	12,18	12,86	1,830,000,000	13,61	2,050,000,000	14,32	2,400,000,000	14,32	6,280,000,000	
106	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan yang Akan Didaftarkan HAKI	%	5	9,09	400,000,000	18,18	400,000,000	27,27	600,000,000	27,27	1,400,000,000	
107	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya manusia pariwisata yang ditingkatkan kompetensinya	%	17,39	34,78	400,000,000	52,17	500,000,000	69,57	750,000,000	69,57	1,650,000,000	
		Persentase sumber daya manusia ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	%	21,14	29,27		37,40		45,53		45,53		
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi sertifikasi profesi dan kompetensinya	%	8,13	24,39		43,90		68,29		68,29		



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
3	URUSAN PERTANIAN												
108	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun	%	100	100	2,045,000,000	100	2,095,000,000	100	3,000,000,000	100	7,140,000,000	DKPP
		Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik	%	100	100		100		100		Disper nakan		
109	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	ton	365,583	365,883	1,595,000,000	366,183	2,175,000,000	366,483	3,220,000,000	366,483	6,990,000,000	DKPP
		Produksi pertanian tanaman hortikultura (sayuran dan buah"an)	ton	82,394	82,894		83,394		83,494		83,494		
		Produksi pertanian tanaman hortikultura (tanaman hias)	tangkai	35,605,770	88,613,470		88,614,470		88,615,470		88,615,470		
		Produksi pertanian tanaman perkebunan	ton	9,119	9,409		9,659		9,909		9,909		
		Persentase Kelahiran ternak	%	82.68	83		83.5		84		84		Disper nakan
110	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase penanggulangan bencana pertanian	%	N/A	90	250,000,000	90	400,000,000	90	550,000,000	90	1,200,000,000	DKPP
		Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak	%	100	100		100		100		100		Disper nakan
111	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi perizinan usaha	%	N/A	75	175,000,000	75	265,000,000	75	350,000,000	75	790,000,000	DKPP
		Presentase usaha peternakan yang telah dibina dan diawasi	%	80	85		90		95		95		Disper nakan
112	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM penyuluh pertanian	%	64.29	76.79	500,000,000	89.29	585,000,000	100	1,015,000,000	100	2,100,000,000	DKPP
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	15.95	16.73		17.59		18.44		18.44		
		Persentase kelompok peternak yang naik kelas	%	15	16		17,50		19		19		Disper nakan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
113	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan hewan	%	77.3	80	1,200,000,000	85	1,870,000,000	90	2,640,000,000	90	5,710,000,000	Disper nakan
4	URUSAN PERDAGANGAN												
114	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	%	40	50	215,000,000	60	250,000,000	70	325,000,000	70	790,000,000	Disperin dag
115	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang dan jasa	Milyar	2,493	2,500	1,369,380,000	2,700	1,055,000,000	3,000	1,335,000,000	3,000	3,759,380,000	
116	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	%	10	10	105,620,000	10	330,000,000	10	495,000,000	30	930,620,000	
117	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	%	33	33	450,000,000	33	625,000,000	33	850,000,000	33	1,925,000,000	
118	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Presentase pelaku usaha terfasilitas dalam pemasaran produk dalam negeri	%	100	100	400,000,000	100	500,000,000	100	650,000,000	100	1,550,000,000	
119	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	N/A	10	235,000,000	10	290,000,000	10	420,000,000	10	945,000,000	
5	URUSAN INDUSTRI												
120	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pengembangan IKM	%	40	45	1,550,000,000	50	1,950,000,000	55	2,770,000,000	55	6,270,000,000	Disperin dag
121	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri yang berizin	%	58.26	63.36	100,000,000	68.46	135,000,000	73.56	175,000,000	73.56	410,000,000	
122	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS	%	15.38	30.38	300,000,000	45.38	400,000,000	60.38	500,000,000	60.38	1,200,000,000	
6	URUSAN TRANSMIGRASI												
123	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang di berangkatkan	%	0	16	200,000,000	32	350,000,000	48	400,000,000	48	950,000,000	Disnaker



No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
124	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	%	85	85%	2,250,000,000	87%	4,500,000,000	90%	4,500,000,000	90%	11,250,000,000	Bab. Tapem Setda
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	%	85	87%		90%		95%		95%		Bag. Kesra Setda
		Persentase Perda yang ditetapkan	%	80	85%		88%		90%		90%		Bag. Hukum Seta
		Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	80	85%		87%		90%		90%		Bag. Tapem Setda
125	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	80	85%	2,150,000,000	90%	4,500,000,000	95%	4,500,000,000	95%	11,150,000,000	Bag. Ekonomi Setda
		Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	%	85	87%		90%		95%		95%		Bag. Adbang Setda
		Center of excelent pengadaan barang jasa	%	80	85%		90%		95%		95%		Bag. Barjas Setda
126	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	indeks	83.2	84.75	6,506,500,000	85.25	12,123,400,000	86.5	12,123,400,000	86.5	30,753,300,000	Setwan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perang kat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
1	UNSUR PERENCANAAN												
127	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPd	%	97.28	100%	900,000,000	100%	1,750,000,000	100%	1,750,000,000	100%	4,400,000,000	Bappelit bangsa
128	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPd Ke Dalam APBD	%	99.20	100%	2,257,500,000	100%	4,500,000,000	100%	4,500,000,000	100%	11,257,500,000	
2	UNSUR KEUANGAN												
129	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai standar dan peraturan yang berlaku	%	100%	100%	485,711,091,401	100%	464,659,115,995	100%	468,778,154,126	100%	1,419,148,361,522	BKAD
130	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan aset daerah	%	85.17%	87%	2,000,052,100	88%	2,021,052,100	89%	2,021,052,100	89%	6,042,156,300	
131	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	29,64	3%	4,080,130,850	5%	6,120,196,050	5%	6,120,196,050	5%	16,320,522,950	Bapenda
3	UNSUR KEPEGAWAIAN												
132	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	103	106.5	2,007,500,000	110	4,125,000,000	113.5	4,125,000,000	113.5	10,257,500,000	BKPSDM
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	25	27.5		30		32.5		32.5		
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	Nilai	97.5	102.5		110		115		115		



No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
4	UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
133	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Nilai	62.5	67.5	800,000,000	70	1,500,000,000	75	1,500,000,000	75	3,800,000,000	BKPSDM
5	UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
134	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	N/A	53,6	700,000,000	53,8	1,500,000,000	54	1,500,000,000	54	3,700,000,000	Bappelit bangda
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
135	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP Pemda	Level	2.4	3	1,219,081,000	3	2,102,412,000	3	2,102,412,000	3	5,423,905,000	ITDA
136	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai/ Katagori	B (67,32)	71 (BB)	15,000,000	72 (BB)	20,000,000	75 (BB)	20,000,000	75 (BB)	55,000,000	
		Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	%	68	70%	2,408,847,700	72%	4,839,880,400	75%	4,839,880,400	75%	12,088,608,500	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Kinerja	Anggaran	
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
UNSUR KEWILAYAHAN													
137	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	139,840,000	100	155,222,400	100	170,798,364	100	465,860,764	Kec. Lembang
138	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	257,840,000	100	286,202,400	100	314,876,364	100	858,918,764	
139	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	61,000,000	100	67,710,000	100	74,481,000	100	203,191,000	
140	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	51,000,000	100	56,610,000	100	62,271,000	100	169,881,000	
141	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	45,000,000	100	54,000,000	100	64,800,000	100	163,800,000	Kec. Parongpong
142	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	55,000,000	100	96,000,000	100	115,200,000	100	266,200,000	
143	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	25,000,000	100	30,000,000	100	36,000,000	100	91,000,000	
144	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	25,000,000	100	30,000,000	100	36,000,000	100	91,000,000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
145	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	117,051,000	100	135,000,000	100	191,820,000	100	443,871,000	Kec. Cisarua
146	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	93,635,000	100	127,756,852	100	103,635,000	100	325,026,852	
147	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	43,000,000	100	65,500,000	100	82,100,000	100	190,600,000	
148	Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	33,200,000	100	73,200,000	
149	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	68,300,000	100	99,000,000	100	130,000,000	100	297,300,000	Kec. Cikalong wetan
150	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	130,000,000	100	125,000,000	100	135,000,000	100	390,000,000	
151	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	50,000,000	100	100,000,000	100	50,000,000	100	200,000,000	
152	Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	60,000,000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
153	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	56,838,500	100	84,838,500	100	106,838,500	100	248,515,500	Kec. Cipeundeuy
154	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	111,000,000	100	123,000,000	100	174,000,000	100	408,000,000	
155	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	95,000,000	100	111,000,000	100	99,000,000	100	305,000,000	
156	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	53,000,000	100	54,000,000	100	57,000,000	100	164,000,000	
157	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	202,601,100	100	222,861,210	100	245,147,331	100	670,609,641	Kec. Ngamprah
158	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	44,100,000	100	48,510,000	100	53,361,000	100	145,971,000	
159	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	22,000,000	100	74,200,000	100	26,620,000	100	122,820,000	
160	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	25,350,000	100	27,885,000	100	30,673,500	100	83,908,500	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
161	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	167,073,400	100	189,643,400	100	214,030,600	100	570,747,400	Kec. Cipatat
162	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	66,048,200	100	78,143,800	100	103,143,800	100	247,335,800	
163	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	57,455,000	100	74,735,000	100	91,735,000	100	223,925,000	
164	Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	82,908,300	100	89,751,400	100	112,908,300	100	285,568,000	
165	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	48,125,000	100	69,157,500	100	76,073,250	100	193,355,750	Kec. Padalarang
166	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	50,930,000	100	56,023,000	100	63,415,300	100	170,368,300	
167	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	32,500,000	100	35,750,000	100	56,825,000	100	125,075,000	
168	Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	7,500,000	100	8,250,000	100	9,075,000	100	24,825,000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
169	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	115,454,500	100	144,318,100	100	170,295,300	100	430,067,900	Kec. Batujajar
170	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	85,400,000	100	106,750,000	100	125,965,000	100	318,115,000	
171	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	66,945,500	100	83,681,800	100	98,744,250	100	249,371,550	
172	Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	47,480,000	100	59,350,000	100	70,033,000	100	176,863,000	
173	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	242,000,000	100	296,800,000	100	396,800,000	100	935,600,000	Kec. Cihampelas
174	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	35,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	115,000,000	
175	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	45,000,000	
176	Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	56,500,000	100	56,500,000	100	56,500,000	100	169,500,000	



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026**

**RPD
2024-2026**

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
177	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	42,000,000	100	42,000,000	100	103,000,000	100	187,000,000	Kec. Cililin
178	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	149,000,000	100	149,000,000	100	203,000,000	100	501,000,000	
179	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	32,000,000	100	103,000,000	100	62,000,000	100	197,000,000	
180	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	15,000,000	100	15,000,000	100	25,000,000	100	55,000,000	
181	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	81,390,000	100	89,500,000	100	98,450,000	100	269,340,000	Kec. Cipongkor
182	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	94,500,000	100	107,750,000	100	118,525,000	100	320,775,000	
183	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	105,532,500	100	158,000,000	100	167,338,000	100	430,870,500	
184	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	43,208,000	100	44,000,000	100	48,400,000	100	135,608,000	



No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
185	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	86,125,875	100	100,767,274	100	115,882,365	100	302,775,514	Kec. Rongga
186	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	161,886,377	100	193,504,111	100	222,909,478	100	578,299,966	
187	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	84,661,500	100	99,053,953	100	113,912,045	100	297,627,498	
188	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	23,116,500	100	27,046,305	100	31,103,251	100	81,266,056	
189	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	109,937,000	100	125,730,700	100	126,863,770	100	362,531,470	Kec. Gununghalu
190	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	200,123,380	100	211,035,718	100	234,000,000	100	645,159,098	
191	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	102,398,520	100	154,538,372	100	120,119,467	100	377,056,359	
192	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	27,000,000	100	32,200,000	100	38,000,000	100	97,200,000	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
193	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	88,000,000	100	90,000,000	100	102,700,000	100	280,700,000	Kec. Sindangkerta
194	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	263,000,000	100	295,000,000	100	327,000,000	100	885,000,000	
195	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	60,000,000	100	74,900,000	100	56,000,000	100	190,900,000	
196	Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	35,000,000	100	45,000,000	100	52,000,000	100	132,000,000	
197	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	25,000,000	100	37,000,000	100	55,000,000	100	117,000,000	Kec. Saguling
198	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	90,000,000	100	140,000,000	100	175,000,000	100	405,000,000	
199	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	10,000,000	100	16,000,000	100	24,000,000	100	50,000,000	
200	Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	15,000,000	100	20,000,000	100	35,000,000	100	70,000,000	



No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
201	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	%	N/A	75%	1,737,314,400	80%	1,844,564,400	85%	2,079,020,840	85%	5,660,899,640	Kesbangpol
202	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase fasilitasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	83.18	80%	773,797,900	85%	851,177,690	90%	936,295,459	90%	2,561,271,049	
203	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase fasilitasi Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	N/A	65%	195,650,000	75%	215,215,000	85%	236,736,500	85%	647,601,500	
204	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Cakupan Sosialisasi dan Pembinaan Terhadap Organisasi Masyarakat	%	N/A	86%	359,317,725	90%	395,249,498	95%	464,774,447	95%	1,219,341,670	
205	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase tingkat pemahaman politik di masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	%	52.18	60%	296,779,800	70%	326,457,780	80%	389,103,558	80%	1,012,341,138	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH													
206	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BAPPELITBANGDA	Nilai/ Predikat	67,96 (B)	72 (BB)	11,936,418,141	72,50 (BB)	12,786,418,141	73 (BB)	12,786,418,141	73 (BB)	37,509,254,423	Bappelit bangda
207	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP ITDA	Nilai/ Predikat	70,06 (BB)	72 (BB)	17,897,981,413	75 (BB)	18,821,117,713	80 (A)	18,821,117,713	80 (A)	55,540,216,839	ITDA
208	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISKOMINFO	Nilai/ Predikat	BB (70.20)	70,50 (BB)	5,136,007,554	71 (BB)	5,176,007,554	71,20 (BB)	5,176,007,554	71,20 (BB)	15,488,022,662	Diskominfo tik
209	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BKAD	Nilai/ Predikat	64,81 (B)	70,10 (BB)	108,697,712,224	70,20 (BB)	108,887,212,224	70,30 (BB)	108,887,212,224	70,30 (BB)	326,472,136,672	BKAD
210	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BAPENDA	Nilai/ Predikat	68,51 (B)	68,55 (B)	25,622,478,877	68,61 (B)	26,082,413,677	68,71 (B)	26,082,413,677	68,71 (B)	77,787,306,231	Bapenda
211	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai/ Predikat	74,85 (BB)	75,00 (BB)	24,658,422,263	76,00 (BB)	25,583,422,263	77 (BB)	25,583,422,263	77 (BB)	75,825,266,789	BKPSDM
212	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SETDA	Nilai/ Predikat	70,16 (BB)	70,50 (BB)	38,415,705,805	70,60 (BB)	44,058,205,805	70,70 (BB)	44,058,205,805	70,70 (BB)	126,532,117,415	Setda
213	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SETWAN	Nilai/ Predikat	70,50 (BB)	71,15 (BB)	62,879,548,648	71,55 (BB)	67,505,148,648	71,95 (BB)	67,505,148,648	71,95 (BB)	197,889,845,944	Setwan
		Persentase Layanan Keuangan, Kesejahteraan dan Administrasi DPRD	%	0	100		100		100				



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
214	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISARPUS	Nilai/ Predikat	61,21 (B)	67 (B)	6,476,512,065	68,87 (B)	7,221,120,365	70,25 (BB)	7,221,120,365	70,25 (BB)	20,918,752,795	Disarpus
215	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISDUK	Nilai/ Predikat	74,26 (BB)	76 (BB)	10,643,671,305	78 (BB)	12,676,171,305	80 (BB)	13,036,171,305	80 (BB)	36,356,013,915	Disdukcapil
216	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SATPOL PP	Nilai/ Predikat	64,61 (B)	65,10 (B)	11,498,301,006	66,00 (B)	10,966,546,306	67,10 (B)	10,951,267,806	67,10 (B)	33,416,115,118	Satpol PP
217	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISDAMKAR	Nilai/ Predikat	63,21 (B)	65 (B)	7,321,135,518	67 (B)	7,248,635,518	70 (B)	7,456,630,583	70 (B)	22,026,401,619	Disdamkar
218	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Nilai/ Predikat	63,26 (B)	68 (B)	4,405,430,912	70 (BB)	4,478,126,369	72 (BB)	4,604,859,933	72 (BB)	13,488,417,214	Kesbangpol
219	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISDIK	Nilai/ Predikat	69,16 (B)	69,40 (B)	551,626,202,321	69,60 (B)	606,793,695,691	70,10 (BB)	610,410,793,798	70,10 (BB)	1,768,830,691,810	Disdik
220	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DINKES	Nilai/ Predikat	62, 11 (B)	62,20 (B)	325.936.401.572	62,30 (B)	326.134.693.028	62,40 (B)	326.134.693.028	62,40 (B)	978.205.787.628	Dinkes
221	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BPBD	Nilai/ Predikat	68,85 (B)	68,85 (B)	6,728,173,015	69,85 (B)	6,480,773,015	70,85 (BB)	6,646,268,080	70,85 (BB)	19,855,214,110	BPBD
222	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DINSOS	Nilai/ Predikat	62,11 (B)	62,30 (B)	7,139,628,782	62,35 (B)	8,102,746,095	62,40 (B)	8,102,746,095	62,40 (B)	23,345,120,972	Dinsos



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
223	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISPORA	Nilai/ Predikat	72,76 (BB)	78,01 (BB)	5,767,374,092	78,05 (BB)	5,797,374,092	78,10 (BB)	5,918,774,092	78,10 (BB)	17,483,522,276	Dispora
224	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISNAKER	Nilai/ Predikat	70,65 (BB)	72 (BB)	6,665,203,233	73 (BB)	7,225,203,233	74 (BB)	7,425,203,233	74 (BB)	21,315,609,699	Disnaker trans
225	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DP2KBP3A	Nilai/ Predikat	71,86 (BB)	74 (BB)	13,533,476,972	76 (BB)	14,275,976,972	78 (BB)	14,275,976,972	78 (BB)	42,085,430,916	DP2KBP3A
226	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai/ Predikat	70,41 (BB)	70,45 (BB)	8,218,547,734	70,50 (BB)	8,175,047,734	71 (BB)	8,581,047,734	71 (BB)	24,974,643,202	DPMPTSP
227	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISPARBUD	Nilai/ Predikat	60,16 (B)	61 (B)	7,205,674,438	62 (B)	7,205,674,438	63 (B)	7,205,674,438	63 (B)	21,617,023,314	Disparbud
228	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DPUPR	Nilai/ Predikat	70,5 (BB)	70,8 (B)	20,320,230,663	71 (B)	21,919,795,413	71.50 (B)	22,029,195,413	71.50 (B)	64,269,221,489	DPUPR
229	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISPERKIM	Nilai/ Predikat	66,6 (B)	68,61 (B)	9,120,412,174	70 (B)	9,620,412,174	70,5 (BB)	9,770,412,174	70,5 (BB)	28,511,236,522	Disperkim
230	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISHUB	Nilai/ Predikat	61,21 (B)	71 (BB)	13,421,323,624	75 (BB)	15,516,323,624	81 (A)	15,187,873,624	81 (A)	44,125,520,872	Dishub
231	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DLH	Nilai/ Predikat	66,81 (B)	70 (B)	10,818,443,918	71 (BB)	11,874,173,918	72 (BB)	11,699,173,918	72 (BB)	34,391,791,754	DLH



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
232	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. LEMBANG	Nilai/ Predikat	61,21 (B)	67,26 (B)	4,386,987,054	69,28 (B)	4,430,922,254	71,26 (BB)	4,474,240,326	71,26 (BB)	13,292,149,634	KEC. LEMBANG
233	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. PARONGPONG	Nilai/ Predikat	57,21(CC)	62 (B)	4,052,390,097	65 (B)	4,092,390,097	68 (BB)	4,150,390,097	68 (BB)	12,295,170,291	KEC. PARONGPONG
234	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. CISARUA	Nilai/ Predikat	59,41 (CC)	65 (B)	3,817,678,806	67,25 (B)	3,843,107,954	69 (B)	3,880,609,806	69 (B)	11,541,396,566	KEC. CISARUA
235	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. CIKALONGWETAN	Nilai/ Predikat	60,91 (B)	62 (B)	4,311,193,042	63,5 (B)	4,335,493,042	65 (B)	4,444,493,042	65 (B)	13,091,179,126	KEC. CIKALONG WETAN
236	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC CIPEUNDEUY	Nilai/ Predikat	69,16 (B)	70,00 (B)	2,960,610,831	72,00 (BB)	3,003,610,831	73,25 (BB)	3,039,610,831	73,25 (BB)	9,003,832,493	KEC CIPEUNDEUY
327	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC NGAMPRAH	Nilai/ Predikat	65,26 (B)	67,26 (B)	3,596,082,319	69,26 (B)	3,616,677,209	71,26 (BB)	3,734,331,588	71,26 (BB)	10,947,091,116	KEC NGAMPRAH
238	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. CIPATAT	Nilai/ Predikat	59,85 (CC)	61 (B)	3,213,953,505	62,22 (B)	3,255,164,805	63,5 (B)	3,265,620,705	63,5 (B)	9,734,739,015	KEC. CIPATAT



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
239	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. PADALARANG	Nilai/ Predikat	67,80 (B)	68 (B)	3,670,738,948	68,5 (B)	3,740,613,448	69 (BB)	3,804,405,398	69 (BB)	11,215,757,794	KEC. PADALARANG
240	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC BATUJAJAR	Nilai/ Predikat	58,51 (CC)	62,76 (B)	3,728,834,964	67,01 (B)	3,750,015,064	70,25 (BB)	3,779,077,414	70,25 (BB)	11,257,927,442	KEC. BATUJAJAR
241	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. CIHAMPELAS	Nilai/ Predikat	58,66 (CC)	60,00 (CC)	3,879,807,579	61,00 (B)	3,920,007,579	62,00 (B)	3,920,007,579	62,00 (B)	11,719,822,737	KEC. CIHAMPELAS
242	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. CILILIN	Nilai/ Predikat	59,40 (CC)	59,60 (CC)	3,124,966,514	59,80 (CC)	3,153,966,514	60,00 (B)	3,169,966,514	60,00 (B)	9,448,899,542	KEC. CILILIN
243	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. CIPONGKOR	Nilai/ Predikat	52,50 (CC)	63,50 (B)	2,895,602,885	65,70 (B)	2,920,983,385	70,00 (B)	2,987,520,385	70,00 (B)	8,804,106,655	KEC. CIPONGKOR
244	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. RONGGA	Nilai/ Predikat	60,31 (B)	60,32 (B)	3,206,167,718	60,33 (B)	3,241,586,327	60,35 (B)	3,278,150,831	60,35 (B)	9,725,904,876	KEC. RONGGA
245	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC GUNUNGHALU	Nilai/ Predikat	58,71 (CC)	62,45 (B)	2,949,057,533	64,50 (B)	2,965,011,643	66,75 (B)	3,069,533,196	66,75 (B)	8,983,602,372	KEC GUNUNGHALU



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2026

RPD
2024-2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
246	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC SINDANGKERTA	Nilai/ Predikat	54,41 (CC)	62 (B)	3,065,531,515	63 (B)	3,106,631,515	64 (B)	3,173,831,515	64 (B)	9,345,994,545	KEC SINDANGKERTA
247	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC SAGULING	Nilai/ Predikat	54,31 (CC)	60,5 (B)	3,072,356,066	61 (B)	3,099,356,066	61,5 (B)	3,123,356,066	61,5 (B)	9,295,068,198	KEC SAGULING
248	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DPMD	Nilai/ Predikat	67,01 (B)	68,02 (B)	6,391,526,672	69,04 (B)	6,329,151,672	70,00 (B)	6,454,151,672	70,00 (B)	19,174,830,016	DPMD
249	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISKOPUKM	Nilai/ Predikat	60,01 (B)	64,50 (B)	6,099,293,941	66,50 (B)	6,967,293,941	70,01 (BB)	7,249,293,941	70,01 (BB)	20,315,881,823	Diskop UKM
250	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISPERINDAG	Nilai/ Predikat	60,46 (B)	63 (B)	16,518,330,259	66 (B)	17,208,330,259	69 (B)	17,723,330,259	69 (B)	51,449,990,777	Disperindag
251	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DKPP	Nilai/ Predikat	73,51/ BB	76,01/ BB	18,392,641,814	78,51/ BB	18,792,641,814	81,01/ A	18,792,641,814	81,01/ A	55,977,925,442	DKPP
252	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISPERNAKAN	Nilai/ Predikat	69,16 (B)	70 (B)	11,875,803,010	72 (BB)	12,125,803,010	75 (BB)	12,675,803,010	75 (BB)	36,677,409,030	Dispernakan

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi indikator kinerja utama (IKU) daerah yang menggambarkan kinerja daerah, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disertai target selama 3 (tiga) periode tahun 2024 - 2026, meliputi:

1. Indikator makro pembangunan, dirumuskan untuk menyelesaikan isu strategis, disajikan pada Tabel 8.1
2. Indikator Kinerja Kunci tingkat kinerja dampak (*impact*), yang memuat
 - a. IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, disajikan pada Tabel 8.2
 - b. IKU Perangkat Daerah, merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya, disajikan pada Tabel 8.3
3. Indikator Kinerja Kunci tingkat hasil (*outcome*) disajikan pada tabel 8.4



Tabel 8.1 Proyeksi Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,04	69,44	69,71	69,98	69,98
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,80	1,58	1,58	1,57	1,57
3	Presentase Penduduk Miskin	Persen	10,82	10,40	10,28	10,16	10,16
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,63	9,20	9,07	8,81	8,81
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,34	5,66	5,88	6,13	6,13
6	Gini Rasio	Point	0,368	0,341	0,338	0,335	0,335
7	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	28,65	30,11	31,73	33,51	33,51

Sumber: Hasil Proyeksi 2022, Bappelitbangda diolah.

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,04	69,44	69,71	69,98	69,98
2	Prevalensi Stunting	% SSGI	27,30	17	17	17	17
		% EPPGBM	8,15	7,36	6,90	6,45	6,45
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,34	5,66	5,88	6,13	6,13
4	Realisasi Nilai Investasi	Trilyun	6,2	6,5	6,8	7,1	7,1
5	Gini Rasio	Point	0,368	0,341	0,338	0,335	0,335
6	Presentase Penduduk Miskin	Persen	10,82	10,40	10,28	10,16	10,16
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,63	9,20	9,07	8,81	8,81
8	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Poin	26,78	26,37	26,09	25,81	25,81



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,03	63,10	63,20	63,30	63,30
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai / Katagori	60,97 / CC	62 / CC	66 / B	70 / B	70 / B
11	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,39	83,67	87,08	87,32	87,32
13	Indeks Demokrasi	Poin	N/A	70	75	80	80

Sumber: Hasil Proyeksi 2022, Bappelitbangda, diolah

**Tabel 8.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
1	Angka Harapan Hidup	Poin	72,79	72,80	72,82	72,86	72,86	Dinkes
2	Prevalensi Stunting	% SSGI	27,30	17	17	17	17	Dinkes, DP2KBP3A, DKPP, DPUPR
		% EPPGBM	8,15	7,36	6,90	6,45	6,45	
3	Harapan Lama Sekolah	Poin	11,89	11,91	11,91	11,92	11,92	Disdik, Disarpus
4	Rata - Rata Lama Sekolah	Poin	8,22	8,23	8,27	8,29	8,29	
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,80	1,58	1,58	1,57	1,57	DP2KBP3A
6	Indeks Pembangunan Gender	Poin	79,69	79,73	79,89	80,22	80,22	
7	Presentase Layanan Kepemudaan	%	7,83	10,30	10,35	10,40	10,40	Dispora
8	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,42	0,44	0,46	0,48	0,48	
9	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	12,87	12,88	12,89	13,00	13,00	DKPP, Dispernakan
10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,35	12,98	13,01	13,03	13,03	Disperindag



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
11	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	41,60	41,61	41,63	41,65	41,65	Disperindag
12	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	3	3	4	5	5	Disparbud
13	Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung pariwisata	%	24,75	36,14	42,22	48,29	48,29	Disparbud
14	Realisasi Nilai investasi	Trilyun	6,2	6,5	6,8	7,1	7,1	DPMPTSP
15	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	46,80	48,40	50,00	51,60	51,60	Diskop UMKM
16	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	19,20	23,23	26,45	29,58	29,58	Diskop UMKM
17	Presentase Penduduk Miskin	%	10,82	10,40	10,28	10,16	10,16	Dinkes, Disperkim, Dinsos
18	Persentase Desa Tahan Pangan	%	72,73	75,76	78,79	81,82	81,82	DKPP
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,63	9,20	9,07	8,81	8,81	Disnaker
20	Persentase cakupan infrastruktur permukiman	%	N/A	66,72	79,69	92,56	92,56	PUPR, Disperkim
21	Indeks Akseibilitas / Transportasi	Poin	13,27	13,11	13,06	13,01	13,01	Dishub, PUPR
22	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	N/A	100	100	100	100	PUPR, Disperkim, DLH
23	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,47 / Katagori	0,49 Sedang	0,50 Sedang	0,51 Sedang	0,51 Sedang	BPBD, Disdamkar, PUTR, Kimrum, Dinsos
24	Persentase Desa Mandiri	%	37,58	42,42	44,85	46,67	46,67	DPMD
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,03	63,10	63,20	63,30	63,30	DLH, PUPR
26	Nilai Sakip	Nilai / Katagori	64,57 (B)	71 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	Itda, Bappelitbangda, Setda, Semua PD



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
27	Opini BPK terhadap LKPD	Skore	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD, Bapenda, Itda
28	Indeks Merit	Skore	0,72	0,76	0,81	0,86	0,86	BKPSDM
29	Indeks SPBE	Poin	2,65	2,75	2,85	3,00	3,00	Diskominfo
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,39	83,67	87,08	87,32	87,32	Disduk, DPMPTSP, Setwan, Kecamatan
31	Indeks Kearsipan	Poin	49,64	57,94	60,59	63,66	63,66	Disarpus
32	Presentase penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	%	79,56	92,64	96,75	100	100	Satpol PP
33	Presentase Konflik Sosial yang Ditangani	%	84,86	100	100	100	100	Bakesbangpol
34	Persentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	%	N/A	75	80	85	85	Bakesbangpol

Sumber: Hasil Proyeksi 2022, Bappelitbangda, diolah



**Tabel 8.4 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/*Impact*
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026**

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	5,34	5,66	5,88	6,13	6,13	
2	Tingkat Inflasi	Persen	7,45	1,66	1,14	1,08	1,08	
3	Gini Rasio	Point	0,368	0,341	0,338	0,335	0,335	
4	Presentase Penduduk Miskin	Persen	10,82	10,40	10,28	10,16	10,16	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,63	9,20	9,07	8,81	8,81	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,37	64,81	65,14	65,42	65,42	
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,04	69,44	69,71	69,98	69,98	
A	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Realisasi Nilai Investasi	Trilyun	6,2	6,5	6,8	7,1	7,1	DPMPSTP
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	ribu	9.044	10.200	10.990	12.020	12.020	
3	Persentase Desa Mandiri	%	37,58	42,42	44,85	46,67	46,67	DPMPD
4	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,47	0,49	0,50	0,51	0,51	BPBD
5	Rasio Ketergantungan	%	51,36	51,33	51,31	51,30	51,30	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR							
1	URUSAN PENDIDIKAN							
1	APK SD	%	104.84	101.64	101.19	100.74	100.74	Disdik
2	APM SD	%	97.91	99.07	99.53	99.99	99.99	
3	APS (7-12)	%	104.08	100.85	100.43	100.01	100.01	
4	Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	%	35,28	35,32	35,49	35,58	35,58	
5	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	52.54	52.7	52.78	52.86	52.86	
6	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	39.24	40.02	40.41	40.8	40.8	
7	Indeks Iklim Keamanan SD	Indeks	2,22	2,22	2,23	2,24	2,24	
8	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Indeks	2,12	2,12	2,13	2,14	2,14	
9	Indeks Inklusivitas SD	Indeks	1,95	1,95	1,96	1,97	1,97	
10	APK SMP	%	93.97	96.15	97.74	99.33	99.33	
11	APM SMP	%	75.87	77.49	77.8	78.11	78.11	
12	APS (13-15)	%	96.32	96.79	98.02	99.26	99.26	
13	Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	%	38,91	38,96	39,15	39,24	39,24	
14	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	63.21	63.53	63.69	63.85	63.85	
15	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	54.07	54.19	54.25	54.31	54.31	
16	Indeks Iklim Keamanan SMP	Indeks	2.31	2.31	2.32	2.33	2.33	
17	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Indeks	2.18	2.18	2.19	2.20	2.20	
18	Indeks Inklusivitas SMP	Indeks	1.91	1.91	1.92	1.93	1.93	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencanan Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
19	Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik	%	66.69	66.77	67.09	67.26	67.26	Dsidik
20	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	48.55	51.61	53.14	54.67	54.67	
21	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	57.02	57.4	57.59	57.78	57.78	
22	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	anak	6.47	6.71	6.83	6.95	6.95	
23	Jumlah Lembaga PKBM, Kursus, dan Pelatihan yang berizin	Lembaga	48	49	49	49	49	
24	Persentase pemenuhan kurikulum	%	100	100	100	100	100	
25	Rasio Guru/Murid SD	Rasio	1 : 22,13	1 : 22,67	1 : 22,94	1 : 23,21	1 : 23,21	
26	Rasio Pengawas SD	Rasio	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	
27	Rasio Guru/Murid SMP	Rasio	1 : 17,24	1 : 18,52	1 : 19,16	1 : 19,80	1 : 19,80	
28	Rasio Pengawas SMP	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	
29	Rasio Guru/Murid PAUD	Rasio	1 : 33,15	1 : 15,02	1 : 15,73	1 : 16,44	1 : 16,44	
30	Rasio Penilik PAUD	Rasio	1 : 60	1 : 60	1 : 61	1 : 61	1 : 61	
31	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD, Pendidikan Non Formal yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	16.01	16.03	16.11	16.15	16.15	
32	Peningkatan proporsi Jumlah satuan pendidikan dasar yang mendapatkan minimal akreditasi A	%	26.83	26.86	26.99	27.06	27.06	
33	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	95.53	100	100	100	100	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2	URUSAN KESEHATAN							
1	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	76	100%	100%	100%	100%	DINKES
2	Presentase Penduduk Miskin yang menerima bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	99	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	88.33	90%	92%	93%	93%	
4	Persentase Desa Siaga Aktif	%	56	57.50%	60%	62.50%	62.50%	
5	Persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	70	72%	74%	76%	76%	
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAAN RUANG							
1	persentase sambungan rumah tangga yang terlayani akses air minum	%	82,92%	83,42%	83,92%	84,42%	84,42%	DPUPR
2	persentase KK yang terlayani sistem air limbah domestik	%	65,56%	66,26%	66,76%	67,26%	67,26%	
3	Persentase capaian pengelolaan sumber daya air secara optimal	%	60.00%	60,51%	60,77%	61,04%	61,04%	
4	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	70,91%	58,42%	60,04%	61,56%	61,56%	
5	Persentase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	%	100	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase pengembangan jasa konstruksi sesuai standar	%	98.06%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase penataan bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	%	100	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase capaian penataan bangunan dan lingkungannya	%	100	0%	100%	100%	100%	
9	Persentase sarana prasarana permukiman yang dibangun kawasan strategis kabupaten (Berbasis Kawasan)	%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase kenaikan panjang drainase yang terbangun	%	65,53%	66,89%	68,76%	70,26%	70,26%	
11	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	100	100%	100%	100%	100%	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	%	100%	25%	35%	50%	50%	Disperkim
2	Persentase RTLH yang tertangani di kawasan kumuh di bawah 10 Ha	%	N/A	25%	35%	50%	50%	
3	Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha	%	N/A	33.49%	66.98%	100%	100%	
4	Persentase perumahan formal yang melakukan proses serahterima PSU kepada Pemerintah daerah	%	33.33%	66.67%	83.33%	100%	100%	
5	Persentase penanganan rumah korban bencana	%	0%	33,33%	66,67%	100%	100%	
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	Sedang (0,47)	Sedang (0,49)	Sedang (0,50)	Sedang (0,51)	Sedang (0,51)	BPBD
2	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	%	67.53	82%	84%	87%	87%	Disdamkar
3	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP
4	Presentase peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan Satlinmas	%	38,67	77,92	90,24	100	100	
5	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	
6	URUSAN SOSIAL							
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	72	100%	100%	100%	100%	Dinsos
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial	%	40	33%	66%	100%	100%	
3	Tingkat fasilitasi pendataan fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	37	100	100	100	100	
4	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	%	100	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	100	100%	100%	100%	100%	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	URUSAN TENAGA KERJA							
1	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	%	100	-	-	100	100	Disnaker
2	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	30.37	30.67	31.52	32.30	32.30	
3	Produktivitas Tenaga kerja	Juta rupiah	45.09	46.76	47.17	47.57	47.57	
4	Presentase pencari kerja yang ditempatkan	%	16.03	16.43	16.81	17.16	50.40	
5	Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Disnaker	%	100	100	100	100	100	
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	40,50	40,51%	40,52	40,54%	40,54%	DP2KBP3A
2	Persentase data dan profil gender dan anak	%	78	79%	79,8%	80,6%	80,6%	
3	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	%	84	87,5	90	94	94	
5	Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	%	78	80%	82%	84%	84%	
6	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak	%	100	100%	100%	100%	100%	
3	URUSAN PANGAN							
1	Persentase Pangan yang tersertifikasi	%	22.22	27.78	33.33	38.89	38.89	DKPP
2	Persentase Desa Tahan Pangan	%	72.73	76.36	80.00	84.24	84.24	
3	Persentase sarana dan prasarana pangan yang terbangun	%	100	100	100	100	100	
4	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	ton	10	30	39	49	49	
5	Pencapaian Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	poin	83.14	85.64	88.14	90.64	90.64	
6	Score Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	poin	76.8	77.2	77.6	78	78	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
4	URUSAN PERTANAHAN							
1	Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	25%	100%	100%	100%	100%	Disperkim
2	Persentase capaian dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan	%	100%	100%	0%	100%	100%	
3	Persentase capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, ter-sinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria	%	N/A	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Capaian inventarisasi, kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong	%	N/A	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	%	N/A	100%	100%	100%	100%	
5	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	42,86	71,43	100.00	100.00	DLH
2	Persentase sampel kualitas air sungai dengan status mutu air baik	%	6%	6%	6%	6%	6%	
3	Persentase sampel kualitas udara dengan status mutu udara baik	%	70%	70%	70%	70%	70%	
4	Presentase RTH Taman yang terawat	%	72.22	100	100	100	100	
5	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan	%	31,78%	37%	42%	47%	47%	
6	Presentase ketaatan industri dan/atau usaha dalam pelaporan pelaksanaan PPLH	%	58,70	62	65	68	68	
7	Presentase Desa yang telah menerapkan aksi peduli lingkungan	%	100	100	100	100	100	DLH
8	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH	Entitas	15	15	15	15	45	
9	Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	N/A	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase cakupan pengelolaan sampah domestik	%	12%	12%	12%	12%	12%	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
6	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Persentase Penduduk Memiliki KTP-EI	%	93%	95%	96%	97%	97%	Disduk capil
2	Persentase Indentitas Kependudukan Digital	%	0%	10%	15%	20%	20%	
3	Persentase Anak Ber KIA	%	25%	26%	28%	30%	30%	
4	Persentase penerbitan Akta kematian	%	32%	50%	55%	60%	60%	
5	Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun	%	89.43%	90%	92%	94%	94%	
6	Persentase Lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%	25%	50%	60%	70%	70%	
7	Profil Kependudukan yang terselesaikan	Dokumen	1	1	1	1	3	
7	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Presentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	%	0	33,33	66,67	100	100	DPMD
2	Persentase Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	%	32.31	33,33	66,67	100	100	
3	Percentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Tertib	%	0	33,33	66,67	100	100	
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	91.82	100	100	100	100	
8	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	100%	100%	100%	100%	100%	DP2KBP3A
2	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2.24	2.23	2.22	2.21	2.21	
3	Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	%	70,73	70,80%	71.00%	71.10%	71.10%	
9	URUSAN PERHUBUNGAN							
1	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	%	67,44	97,92	98,42	98,93	98,93	Dishub
2	Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	%	81,48	96,25	98,13	100	100	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE	%	100	100	100	100	100	Diskom infotik
2	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Yang Terkelola	%	100	100	100	100	100	
11	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Persentase Koperasi aktif	%	65,96%	67.02%	68.07%	69.13%	69.13%	Diskop UKM
2	Persentase Koperasi Sehat	%	46,80%	48.40%	50.00%	51.60%	51.60%	
3	Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	%	0,43%	0,45%	0,54%	0,63%	1,62%	
4	Persentase Koperasi yang mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan	%	29.00%	40.00%	50.00%	60.00%	60.00%	
5	Presentase Usaha mikro yang diberdayakan	%	20%	20%	22,22%	22,73%	22,73%	
6	Presentase Usaha Mikro yang dikembangkan	%	16.6%	20.0%	21.43%	21.57%	21.57%	
12	URUSAN PENANAMAN MODAL							
1	Persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal	%	0	100%	100%	100%	100%	DPMP TSP
2	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	100	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	KBLI	782	882	982	1082	1,082	
4	Presentase data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	%	82.79%	84%	85%	86%	86%	
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Presentase Layanan Kepemudaan	%	7.83	10,30	10,35	10,40	10,40	Dispora
2	Presentase Pemuda yang Aktif Pada Organisasi Kepramukaan	%	2,83	5%	5%	5%	5%	
3	Indeks ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga	poin	0,59	0,61	0,63	0,65	0,65	
4	Indeks SDM Keolahragaan	poin	0,33	0,34	0,36	0,38	0,38	
5	Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	poin	0,34	0,36	0,38	0,40	0,40	
6	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	Jumlah	569	50	75	250	375	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
14	URUSAN STATISTIK							
1	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	poin	2	2	3	3	3	Diskom infotik
15	URUSAN PERSANDIAN							
1	Tingkat kematangan penerapan manajemen Keamanan Informasi Pemerintah	poin	2	2	3	3	3	Diskom infotik
16	URUSAN KEBUDAYAAN							
1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan	%	30	35	38	40	40	Disparbud
2	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	8,58	12,86	17,15	17,15	
3	Persentase pembinaan sumber daya manusia/lembaga dan informasi sejarah	%	34	51	68	86	86	
4	Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan	%	35	50	50	50	50	
17	URUSAN PERPUSTAKAAN							
1	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	47.18	52	55	59	59	Disarpus
18	URUSAN KEARSIPAN							
1	Nilai pengawasan kearsipan eksternal	Nilai	60.49	63,24%	66,67%	70,65%	70,65%	Disarpus
2	Nilai pengawasan kearsipan internal	Nilai	33.39	50,21%	51,49%	53,19%	53,19%	
3	Tingkat pemenuhan penyelamatan dan perlindungan arsip	Level	0	0	2	3	3	
4	Fasilitasi perizinan penggunaan arsip	SOP	0	0	1	0	1	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	URUSAN PILIHAN							
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Peningkatan Jumlah Nelayan Tangkap yang terdaftar	%	N/A	25	30	35	35	Disper nakan
2	Peningkatan Jumlah Unit usaha budidaya dan pembenihan perikanan yang menerapkan CBIB/CPIB	Unit	20	30	30	40	100	
3	Persentase Peningkatan Kesadaran Nelayan terhadap Penangkapan Ikan yang Baik	%	N/A	5	5	5	15	
4	Persentase pengolahan ikan yang menerapkan SSOP	%	38.46	42.31	47.44	51.28	51.28	
2	URUSAN PARIWISATA							
1	Persentase Desitinasi Wisata yang dikembangkan	%	16,67	33,33	50	66,67	66,67	Disparbud
2	Persentase Jumlah kunjungan Wisatawan	%	12,18	12,86	13,61	14,32	14,32	
3	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan yang Akan Didaftarkan HAKI	%	5	9,09	18,18	27,27	27,27	
4	Persentase sumber daya manusia pariwisata yang ditingkatkan kompetensinya	%	17,39	34,78	52,17	69,57	69,57	
5	Persentase sumber daya manusia ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	%	21,14	29,27	37,40	45,53	45,53	
6	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi sertifikasi profesi dan kompetensinya	%	8,13	24,39	43,90	68,29	68,29	
3	URUSAN PERTANIAN							
1	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun	%	100	100	100	100	100	DKPP
2	Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	Disper nakan



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
3	Produksi pertanian tanaman pangan	ton	365,583	365,883	366,183	366,483	366,483	DKPP
4	Produksi pertanian tanaman hortikultura (sayuran dan buah"an)	ton	82,394	82,894	83,394	83,494	83,494	
5	Produksi pertanian tanaman hortikultura (tanaman hias)	tangkai	35,605,770	88,613,470	88,614,470	88,615,470	88,615,470	
6	Produksi pertanian tanaman perkebunan	ton	9,119	9,409	9,659	9,909	9,909	
7	Persentase Kelahiran ternak	%	82.68	83	83.5	84	84	Disper nakan
8	Presentase penanggulangan bencana pertanian	%	N/A	90	90	90	90	DKPP
9	Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak	%	100	100	100	100	100	Disper nakan
10	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi perizinan usaha	%	N/A	75	75	75	75	DKPP
11	Presentase usaha peternakan yang telah dibina dan diawasi	%	80	85	90	95	95	Disper nakan
12	Persentase peningkatan SDM penyuluh pertanian	%	64.29	76.79	89.29	100	100	DKPP
13	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	15.95	16.73	17.59	18.44	18.44	
14	Persentase kelompok peternak yang naik kelas	%	15	16	17,50	19	19	Disper nakan
15	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan hewan	%	77.3	80	85	90	90	Disper nakan



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
4	URUSAN PERDAGANGAN							
1	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	%	40	50	60	70	70	Disperin dag
2	Nilai ekspor barang dan jasa	Milyar	2,493	2,500	2,700	3,000	3,000	
3	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	%	10	10	10	10	30	
4	Persentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	%	33	33	33	33	33	
5	Presentase pelaku usaha terfasilitas dalam pemasaran produk dalam negeri	%	100	100	100	100	100	
6	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	N/A	10	10	10	10	
5	URUSAN INDUSTRI							
1	Persentase Pengembangan IKM	%	40	45	50	55	55	Disperin dag
2	Persentase industri yang berizin	%	58.26	63.36	68.46	73.56	73.56	
3	Persentase industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS	%	15.38	30.38	45.38	60.38	60.38	
6	URUSAN TRANSMIGRASI							
1	Persentase calon transmigran yang di berangkatkan	%	0	16	32	48	48	Disnaker
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
1	Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	%	85	85%	87%	90%	90%	Bag. Tapem Setda
2	Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	%	85	87%	90%	95%	95%	Bag. Kesra Setda
3	Persentase Perda yang ditetapkan	%	80	85%	88%	90%	90%	Bag. Hukum Seta
4	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	80	85%	87%	90%	90%	Bag. Tapem Setda



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
5	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	80	85%	90%	95%	95%	Bag. Ekonomi
6	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	%	85	87%	90%	95%	95%	Bag. Adbang
7	Center of excelent pengadaan barang jasa	%	80	85%	90%	95%	95%	Bag. Barjas
8	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	indeks	83.2	84.75	85.25	86.5	86.5	Setwan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	UNSUR PERENCANAAN							
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	%	97.28	100%	100%	100%	100%	Bappelit bangsa
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD	%	99.20	100%	100%	100%	100%	
2	UNSUR KEUANGAN							
1	Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai standar dan peraturan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	BKAD
2	Persentase pengelolaan aset daerah	%	85.17%	87%	88%	89%	89%	
3	Persentase peningkatan pajak daerah	%	29,64	3%	5%	5%	5%	Bapenda
3	UNSUR KEPEGAWAIAN							
1	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	103	106.5	110	113.5	113.5	BKPSDM
2	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	25	27.5	30	32.5	32.5	
3	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	Nilai	97.5	102.5	110	115	115	
4	UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Nilai	62.5	67.5	70	75	75	BKPSDM
5	UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	N/A	53,6	53,8	54	54	Bappelit bangsa



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencanan Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
1	Nilai Maturitas SPIP Pemda	Level	2.4	3	3	3	3	ITDA
2	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai/ Katagori	B (67,32)	71 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	
3	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	%	68	70%	72%	75%	75%	
	UNSUR KEWILAYAHAN							
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Lembang
2	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
4	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Parongpong
6	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
8	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
9	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Cisarua
10	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
12	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
13	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Cikalong wetan
14	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
15	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
16	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
17	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Cipeundeuy
18	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
19	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
20	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
21	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Ngamprah
22	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
23	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
24	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
25	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Cipatat
26	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
27	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
28	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
29	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Padalarang
30	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
31	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
32	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
33	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Batujajar
34	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
35	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
36	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
37	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Cihampelas
38	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
39	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
40	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
41	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Cililin
42	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
43	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
44	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
45	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Cipongkor
46	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
47	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
48	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
49	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Rongga
50	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
51	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
52	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
53	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Gunung halu
54	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
55	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
56	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
57	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Sindang kerta
58	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
59	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
60	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
61	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kec. Saguling
62	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
63	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
64	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
1	Persentase fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	N/A	75%	80%	85%	85%	Kesbangpol
2	Persentase fasilitasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	83.18	80%	85%	90%	90%	
3	Persentase fasilitasi Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	N/A	65%	75%	85%	85%	
4	Persentase Cakupan Sosialisasi dan Pembinaan Terhadap Organisasi Masyarakat	%	N/A	86%	90%	95%	95%	
5	Persentase tingkat pemahaman politik di masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	%	52.18	60%	70%	80%	80%	



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH							
1	Nilai SAKIP BAPPELITBANGDA	Nilai/ Predikat	67,96 (B)	72 (BB)	72,50 (BB)	73 (BB)	73 (BB)	Bappelitbangda
2	Nilai SAKIP ITDA	Nilai/ Predikat	70,06 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	80 (A)	80 (A)	ITDA
3	Nilai SAKIP DISKOMINFO	Nilai/ Predikat	BB (70.20)	70,50 (BB)	71 (BB)	71,20 (BB)	71,20 (BB)	Diskominfotik
4	Nilai SAKIP BKAD	Nilai/ Predikat	64,81 (B)	70,10 (BB)	70,20 (BB)	70,30 (BB)	70,30 (BB)	BKAD
5	Nilai SAKIP BAPENDA	Nilai/ Predikat	68,51 (B)	68,55 (B)	68,61 (B)	68,71 (B)	68,71 (B)	Bapenda
6	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai/ Predikat	74,85 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)	77 (BB)	77 (BB)	BKPSDM
7	Nilai SAKIP SETDA	Nilai/ Predikat	70,16 (BB)	70,50 (BB)	70,60 (BB)	70,70 (BB)	70,70 (BB)	Setda
8	Nilai SAKIP SETWAN	Nilai/ Predikat	70,50 (BB)	71,15 (BB)	71,55 (BB)	71,95 (BB)	71,95 (BB)	Setwan
9	Persentase Layanan Keuangan, Kesejahteraan dan Administrasi DPRD	%	0	100	100	100	100	
10	Nilai SAKIP DISARPUS	Nilai/ Predikat	61,21 (B)	67 (B)	68,87 (B)	70,25 (BB)	70,25 (BB)	Disarpus
11	Nilai SAKIP DISDUK	Nilai/ Predikat	74,26 (BB)	76 (BB)	78 (BB)	80 (BB)	80 (BB)	Disdukcapil
12	Nilai SAKIP SATPOL PP	Nilai/ Predikat	64,61 (B)	65,10 (B)	66,00 (B)	67,10 (B)	67,10 (B)	Satpol PP
13	Nilai SAKIP DISDAMKAR	Nilai/ Predikat	63,21 (B)	65 (B)	67 (B)	70 (B)	70 (B)	Disdamkar
14	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Nilai/ Predikat	63,26 (B)	68 (B)	70 (BB)	72 (BB)	72 (BB)	Kesbangpol
15	Nilai SAKIP DISDIK	Nilai/ Predikat	69,16 (B)	69,40 (B)	69,60 (B)	70,10 (BB)	70,10 (BB)	Disdik
16	Nilai SAKIP DINKES	Nilai/ Predikat	62, 11 (B)	62,20 (B)	62,30 (B)	62,40 (B)	62,40 (B)	Dinkes
17	Nilai SAKIP BPBD	Nilai/ Predikat	68,85 (B)	68,85 (B)	69,85 (B)	70,85 (BB)	70,85 (BB)	BPBD
18	Nilai SAKIP DINSOS	Nilai/ Predikat	62,11 (B)	62,30 (B)	62,35 (B)	62,40 (B)	62,40 (B)	Dinsos
19	Nilai SAKIP DISPORA	Nilai/ Predikat	72,76 (BB)	78,01 (BB)	78,05 (BB)	78,10 (BB)	78,10 (BB)	Dispora
20	Nilai SAKIP DISNAKER	Nilai/ Predikat	70,65 (BB)	72 (BB)	73 (BB)	74 (BB)	74 (BB)	Disnaker



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
21	Nilai SAKIP DP2KBP3A	Nilai/ Predikat	71,86 (BB)	74 (BB)	76 (BB)	78 (BB)	78 (BB)	DP2KBP3A
22	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai/ Predikat	70,41 (BB)	70,45 (BB)	70,50 (BB)	71 (BB)	71 (BB)	DPMPTSP
23	Nilai SAKIP DISPARBUD	Nilai/ Predikat	60,16 (B)	61 (B)	62 (B)	63 (B)	63 (B)	Disparbud
24	Nilai SAKIP DPUPR	Nilai/ Predikat	70,5 (BB)	70,8 (B)	71 (B)	71.50 (B)	71.50 (B)	DPUPR
25	Nilai SAKIP DISPERKIM	Nilai/ Predikat	66,6 (B)	68,61 (B)	70 (B)	70,5 (BB)	70,5 (BB)	Disperkim
26	Nilai SAKIP DISHUB	Nilai/ Predikat	61,21 (B)	71 (BB)	75 (BB)	81 (A)	81 (A)	Dishub
27	Nilai SAKIP DLH	Nilai/ Predikat	66,81 (B)	70 (B)	71 (BB)	72 (BB)	72 (BB)	DLH
28	Nilai SAKIP KEC. LEMBANG	Nilai/ Predikat	61,21 (B)	67,26 (B)	69,28 (B)	71,26 (BB)	71,26 (BB)	KEC. LEMBANG
29	Nilai SAKIP KEC. PARONGPONG	Nilai/ Predikat	57,21(CC)	62 (B)	65 (B)	68 (BB)	68 (BB)	KEC. PARONGPONG
30	Nilai SAKIP KEC. CISARUA	Nilai/ Predikat	59,41 (CC)	65 (B)	67,25 (B)	69 (B)	69 (B)	KEC. CISARUA
31	Nilai SAKIP KEC. CIKALONGWETAN	Nilai/ Predikat	60,91 (B)	62 (B)	63,5 (B)	65 (B)	65 (B)	KEC. CIKALONG WETAN
32	Nilai SAKIP KEC CIPEUNDEUY	Nilai/ Predikat	69,16 (B)	70,00 (B)	72,00 (BB)	73,25 (BB)	73,25 (BB)	KEC CIPEUNDEUY
33	Nilai SAKIP KEC NGAMPRAH	Nilai/ Predikat	65,26 (B)	67,26 (B)	69,26 (B)	71,26 (BB)	71,26 (BB)	KEC NGAMPRAH
34	Nilai SAKIP KEC. CIPATAT	Nilai/ Predikat	59,85 (CC)	61 (B)	62,22 (B)	63,5 (B)	63,5 (B)	KEC. CIPATAT
35	Nilai SAKIP KEC. PADALARANG	Nilai/ Predikat	67,80 (B)	68 (B)	68,5 (B)	69 (BB)	69 (BB)	KEC. PADALARANG
36	Nilai SAKIP KEC BATUJAJAR	Nilai/ Predikat	58,51 (CC)	62,76 (B)	67,01 (B)	70,25 (BB)	70,25 (BB)	KEC BATUJAJAR
37	Nilai SAKIP KEC. CIHAMPELAS	Nilai/ Predikat	58,66 (CC)	60,00 (CC)	61,00 (B)	62,00 (B)	62,00 (B)	KEC. CIHAMPELAS
38	Nilai SAKIP KEC. CILILIN	Nilai/ Predikat	59,40 (CC)	59,60 (CC)	59,80 (CC)	60,00 (B)	60,00 (B)	KEC. CILILIN
39	Nilai SAKIP KEC. CIPONGKOR	Nilai/ Predikat	52,50 (CC)	63,50 (B)	65,70 (B)	70,00 (B)	70,00 (B)	KEC. CIPONGKOR
40	Nilai SAKIP KEC. RONGGA	Nilai/ Predikat	60,31 (B)	60,32 (B)	60,33 (B)	60,35 (B)	60,35 (B)	KEC. RONGGA



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
41	Nilai SAKIP KEC GUNUNGHALU	Nilai/ Predikat	58,71 (CC)	62,45 (B)	64,50 (B)	66,75 (B)	66,75 (B)	KEC. GUNUNGHALU
42	Nilai SAKIP KEC SINDANGKERTA	Nilai/ Predikat	54,41 (CC)	62 (B)	63 (B)	64 (B)	64 (B)	KEC. SINDANGKERTA
43	Nilai SAKIP KEC SAGULING	Nilai/ Predikat	54,31 (CC)	60,5 (B)	61 (B)	61,5 (B)	61,5 (B)	KEC. SAGULING
44	Nilai SAKIP DPMD	Nilai/ Predikat	67,01 (B)	68,02 (B)	69,04 (B)	70,00 (B)	70,00 (B)	DPMD
45	Nilai SAKIP DISKOPUKM	Nilai/ Predikat	60,01 (B)	64,50 (B)	66,50 (B)	70,01 (BB)	70,01 (BB)	Diskop UKM
46	Nilai SAKIP DISPERINDAG	Nilai/ Predikat	60,46 (B)	63 (B)	66 (B)	69 (B)	69 (B)	Disperindag
47	Nilai SAKIP DKPP	Nilai/ Predikat	73,51/ BB	76,01/ BB	78,51/ BB	81,01/ A	81,01/ A	DKPP
48	Nilai SAKIP DISPERNAKAN	Nilai/ Predikat	69,16 (B)	70 (B)	72 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	Dispernakan

Sumber: Hasil Proyeksi 2022, Bappelitbangda diolah.

BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 disusun sebagaimana amanat Inmendagri 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan DOB.

RPD disusun untuk memberikan arah atau haluan pembangunan masa transisi, sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, pada Pemilu serentak Tahun 2024 sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2024-2026. Dokumen RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan. Agar dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta program, kegiatan dan pelaksanaan RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 diperlukan komitmen, kesepahaman, kerjasama, konsistensi, inovasi, transparansi, serta rasa tanggung jawab oleh seluruh aparatur pemerintah, unsur masyarakat dan *stakeholder* terkait.

Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program-program RPD. Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasinya, infrastruktur yang berkelanjutan serta kondusifitas daerah dalam menunjang iklim usaha dan investasi untuk pementapan ekonomi.